PEMERINTAH
KOTA PALU

RPJMD
KOTA PALU
2021-2026

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
4. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
5. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat,

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
9. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Daerah adalah Kota Palu.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. visi dan misi Kepala Daerah terpilih; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evalusi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
    d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(2) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan, maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota Palu yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Palu, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 Tahun.

Penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD, RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Palu adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palu selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. RPJMD tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah. Harapan kami RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Palu.

Semoga dengan tersusunnya RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan dukungan semua pihak akan mampu mewujudkan Palu Mantap Bergerak.

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar xviii

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Landasan Hukum ..... I - 6
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 11
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJPN Tahun 2005-2025 ..... I - 11
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... I - 12
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah ..... I - 13
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Palu ..... I - 13
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu ..... I - 14
1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan RPKD Kota Palu ..... I - 14
1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kota Palu ..... I - 15
1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Palu ..... I - 15
1.3.9 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya ..... I - 17
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 17

1.4.1 Maksud ..... I - 17
1.4.2 Tujuan ..... I - 17
1.5 Sistematika ..... I - 19

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II - 1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II - 29
2.1.3 Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana Alam ..... II - 30
2.2 Aspek Demografi ..... II - 52
2.2.1 Perubahan Penduduk ..... II - 52
2.2.2 Komposisi dan Populasi Penduduk ..... II - 53
2.3 Potensi Sumber Daya ..... II - 55
2.3.1 Kawasan Hutan ..... II - 55
2.3.2 Kawasan Pariwisata ..... II - 55
2.3.3 Kawasan Industri ..... II - 57
2.3.4 Kawasan Ekonomi Khusus Palu ..... II - 58
2.3.5 Potensi Pertambangan ..... II - 61
2.3.6 Potensi Sungai ..... II - 62
2.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu ..... II - 63
2.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 64
2.4.2 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 88
2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 93
2.4.4 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 94
2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu ..... II - 178
2.6 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu ..... II - 179

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020..... III - 2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020 ... III - 7
3.1.2 Necara Daerah ..... III - 18
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020... III - 27
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III - 28
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... III - 30
3.3 Kerangka Pendanaan ..... III - 32
3.3.1 Proyeksi Pendanaan dan Belanja ..... III - 33
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... III - 35
3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya ..... III – 44

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... IV - 1
4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu ..... IV - 2
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu IV - 5
4.1.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu ..... IV - 9
4.1.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu ..... IV - 11
4.2 Isu Strategis ..... IV - 14
4.2.1 Isu Strategis Global..... IV - 14
4.2.2 Isu Strategis RPJMN 2020-2024 ..... IV - 14
4.2.3 Isu Strategis Regional Sulawesi..... IV - 36

4.2.4 Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.... IV - 37
4.2.5 Isu, Masalah, dan Harapan Warga Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025 ..... IV - 37
4.2.6 Telaahan RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041 .. IV - 39
4.2.7 Rekomendasi Isu Strategis KLHS ..... IV - 44
4.2.8 Isu Strategis Kota Palu..... IV - 45

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....V - 1
5.1 Visi..... V - 1
5.2 Misi ..... V - 3
5.3 Tujuan dan Sasaran..... V - 9

BAB IV STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....VI - 1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... VI - 1
6.1.1 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi ..... VI - 2
6.1.2 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan dan Infrastruktur .... VI - 4
6.1.3 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya manusia ..... VI - 8
6.1.4 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintah ..... VI - 12
6.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026..... VI – 26

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII - 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII - 1

BAB IX PENUTUP ..... IX - 1

9.1 Pedoman Transisi..... IX - 2

9.2 Kaidah Pelaksanaan..... IX - 3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..... II - 1
Tabel 2.2 Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu ..... II - 3
Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah menurut Kecamatan Se-Kota Palu ..... II - 4
Tabel 2.4 Jenis Geologi di Kota Palu..... II - 10
Tabel 2.5 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2020..... II - 12
Tabel 2.6 Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020 ..... II - 13
Tabel 2.7 Rata-Rata Hari Hujan, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2020 ..... II - 14
Tabel 2.8 Rata-Rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 14
Tabel 2.9 Sungai yang Mengalir di Kota Palu..... II - 16
Tabel 2.10 Penggunaan Lahan Kota Palu ..... II - 18
Tabel 2.11 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Palu ..... II - 20
Tabel 2.12 Struktur Ruang Wilayah Kota Palu 2021-2041 . II - 21
Tabel 2.13 Pola Ruang Wilayah Kota Palu 2021-2041 ..... II - 26
Tabel 2.14 Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah (September-Oktober 2018) ..... II - 32
Tabel 2.15 Nilai Indeks Risiko Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ..... II - 48
Tabel 2.16 Bencana di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 ..... II - 51

Tabel 2.17 Distribusi Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... II - 52
Tabel 2.18 Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Struktur Usia Tahun 2020 ..... II - 53
Tabel 2.19 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020 ..... II - 54
Tabel 2.20 Kawasan Hutan Perkecamatan di Kota Palu..... II - 55
Tabel 2.21 Kawasan Pariwisata di Kota Palu ..... II - 56
Tabel 2.22 Banyaknya Industri Menurut Klasifikasi Industri..... II - 57
Tabel 2.23 Jumlah Industri Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan Kota Palu ..... II - 58
Tabel 2.24 Daftar Tenant yang Telah Menempati Lokasi KEK Palu ..... II - 58
Tabel 2.25 Potensi Kawasan Pertambangan di Kota Palu.... II - 62
Tabel 2.26 Rencana Kawasan Pertambangan Batuan di Kota Palu ..... II - 62
Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)..... II - 66
Tabel 2.28 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)..... II - 68
Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2020 (persen) ..... II - 70
Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)

Tahun 2016-2020 ..... II - 71
Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020 ..... II - 72
Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020 ..... II - 73
Tabel 2.33 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 ..... II - 74
Tabel 2.34 Rata-rata Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2016-2020 ..... II - 75
Tabel 2.35 Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2016-2019 ..... II - 75
Tabel 2.36 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 ..... II - 77
Tabel 2.37 Kinerja Penangulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2020 ..... II - 80
Tabel 2.38 Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017-2020 ..... II - 86
Tabel 2.39 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu Tahun 2016 – 2020..... II - 87
Tabel 2.40 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2020 ..... II - 90
Tabel 2.41 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan

Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2019-2020 ..... II - 90
Tabel 2.42 Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2016 -2020..... II - 95
Tabel 2.43 APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020 ..... II - 95
Tabel 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020 ..... II - 97
Tabel 2.45 Perbandingan APM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 ..... II - 99
Tabel 2.46 Angka Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020 ..... II - 102
Tabel 2.47 Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2016-2018 ..... II - 103
Tabel 2.48 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2016-2020 ..... II - 105
Tabel 2.49 Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid) Tahun 2016-2020 ..... II - 106
Tabel 2.50 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 108
Tabel 2.51 Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 109
Tabel 2.52 Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 109
Tabel 2.53 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 110
Tabel 2.54 AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran

Hidup) Tahun 2016-2020..... II - 111
Tabel 2.55 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..... II - 112
Tabel 2.56 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2020 ..... II - 113
Tabel 2.57 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 114
Tabel 2.58 Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 115
Tabel 2.59 Jumlah dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 .... II - 116
Tabel 2.60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2016-2019 ..... II - 117
Tabel 2.61 Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (km) Tahun 2016-2018..... II - 119
Tabel 2.62 Jaringan Irigasi di Kota Palu (meter) Tahun 2016-2019 ..... II - 120
Tabel 2.63 Perkembangan Rasio Tempat Ibadah per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2020 ..... II - 121
Tabel 2.64 Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman per Penduduk di Kota Palu Tahun 2018 – 2020 .... II - 123
Tabel 2.65 Jumlah Volume Sampah (m3) dan Produksi Sampah di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 123
Tabel 2.66 Luas RTH terhadap Luas Wilayah Kota Palu ... II - 124
Tabel 2.67 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 125
Tabel 2.68 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019 ..... II - 125
Tabel 2.69 Cakupan Rumah Layak Huni di Kota Palu

Tahun 2019 ..... II - 126
Tabel 2.70 Jumlah Aparat Keamanan, Sengketa, Sarana Keamanan, Kendaraan Operasional, dan Kejadian Kebakaran di Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 127
Tabel 2.71 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020 ..... II - 130
Tabel 2.72 Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 131
Tabel 2.73 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017-2020 ..... II - 131
Tabel 2.74 Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2020 ..... II - 132
Tabel 2.75 Konsumsi Energi di Kota Palu Tahun 2020 ..... II - 133
Tabel 2.76 Luas Lahan Bersertifikat (hektar) di Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 134
Tabel 2.77 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2020 ..... II - 135
Tabel 2.78 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 143
Tabel 2.79 Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 143
Tabel 2.80 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 144
Tabel 2.81 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2020 ..... II - 145
Tabel 2.82 Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2016-2020 ..... II - 146
Tabel 2.83 Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan)

Tahun 2016-2020 ..... II - 147
Tabel 2.84 Jumlah Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2017-2020 ..... II - 148
Tabel 2.85 Jaringan Komunikasi Provinsi/Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 149
Tabel 2.86 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 150
Tabel 2.87 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2016-2020 ..... II - 151
Tabel 2.88 Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2016-2020 ..... II - 152
Tabel 2.89 Penduduk yang Menggunakan Telepon Tahun 2016-2020 ..... II - 152
Tabel 2.90 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020... II - 153
Tabel 2.91 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 154
Tabel 2.92 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 154
Tabel 2.93 Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 156
Tabel 2.94 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 156
Tabel 2.95 Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 157
Tabel 2.96 Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 158
Tabel 2.97 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016–2019 ..... II - 158
Tabel 2.98 Destinasi Wisata di Kota Palu ..... II - 161
Tabel 2.99 Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas

Tanaman Pangan di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 165
Tabel 2.100 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2019 .. II - 171
Tabel 2.101 Capaian IKU Tahun 2020..... II - 172
Tabel 2.102 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 ..... II - 173
Tabel 2.103 Pengukuran IKU ..... II - 175
Tabel 2.104 Jumlah Kelurahan pada Kecamatan se-Kota Palu ..... II - 176
Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu Tahun 2017-2020 ..... II - 178
Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 179

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... III - 4
Tabel 3.2 Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2012-2016 ..... III - 8
Tabel 3.3 Persentase Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020 ..... III - 15
Tabel 3.4 Kontribusi Pendapatan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 ..... III - 16
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ..... III - 17
Tabel 3.6 Realiasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 ..... III - 19
Tabel 3.7 Neraca Daerah Kota Palu Tahun 2015-2019 (Dalam Rupiah) ..... III - 20

Tabel 3.8 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Palu..... III - 24
Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palu ..... III - 29
Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Kota Palu ..... III - 30
Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palu ..... III - 31
Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Palu Tahun 2018-2020 ..... III - 32
Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022-2026 Kota Palu ..... III - 36
Tabel 3.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Palu ..... III - 40
Tabel 3.15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palu Tahun 2022-2026 ..... III - 43

Tabel 4.1 Permasalahan Kota Palu Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... IV - 2
Tabel 4.2 Permasalahan Kota Palu Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar..... IV - 5
Tabel 4.3 Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan..... IV - 9
Tabel 4.4 Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang..... IV - 11

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota PaluTahun 2021-2026 ..... V - 11

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu 2021-2026 ..... VI - 15
Tabel 6.2 Tema Pembangunan Kota Palu 2021-2026..... VI - 25
Tabel 6.3 Agenda Prioritas Pembangunan Kota Palu 2021-2026 ..... VI - 29
Tabel 6.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 ..... VI - 42
Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2021-2026 ..... VI - 46

Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ..... VII - 4

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Palu ..... VIII - 2
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Kunci Daerah Kota Palu ..... VIII - 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Palu ..... II - 3
Gambar 2.2 Peta Kondisi Topografi Kota Palu ..... II - 6
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Palu ..... II - 7
Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Palu ..... II - 10
Gambar 2.5 Peta Klimatologi Kota Palu ..... II - 15
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kota Palu ..... II - 17
Gambar 2.7 Peta Patahan Aktif di Sekitar Kota Palu ..... II - 34
Gambar 2.8 Indeks Kerentanan Seismik Kota Palu ..... II - 35
Gambar 2.9 Peta Potensi Tsunami di Kota Palu ..... II - 36
Gambar 2.10 Kerusakan Pantai Akibat Terjangan Tsunami pada Muara Sungai Palu ..... II - 37
Gambar 2.11 Kerusakan Kawasan Pesisir Akibat Tsunami ... II - 38
Gambar 2.12 Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi di Balaroa, Palu Teridentifikasi melalui Citra Satelit ..... II - 39
Gambar 2.13 Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi di Petobo, Palu, Teridentifikasi melalui Citra Satelit ..... II - 40
Gambar 2.14 Peta Analisa Rawan Longsor di Kota Palu ..... II - 41
Gambar 2.15 Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Palu ..... II - 43
Gambar 2.16 Peta Proyeksi Perubahan Rata-Rata Suhu Maksimum Periode 2032-2040 di Sulawesi ..... II - 45
Gambar 2.17 Peta Proyeksi Curah Hujan Musiman Periode 2032-2040 di Sulawesi ..... II - 46
Gambar 2.18 Peta Proyeksi Perubahan Hari Tanpa Hujan Musiman Periode 2032-2040 di Sulawesi ..... II - 46
Gambar 2.19 Peta Proyeksi Perubahan Hari Kering Beruntun Periode 2032-2040 di Sulawesi ..... II - 47

Gambar 2.20 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Palu ..... II - 61
Gambar 2.21 Sungai-Sungai yang Mengalir ke Sungai Palu . II - 63
Gambar 2.22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Juta Rp) ..... II - 66
Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 ..... II - 67
Gambar 2.24 Struktur Perekonomian Kota Palu Menurut Tiga Sektor Tahun 2019 dan 2020 (persen) ..... II - 69
Gambar 2.25 PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019 ..... II - 76
Gambar 2.26 Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2016-2020 II - 78
Gambar 2.27 Angka Melek Huruf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II - 81
Gambar 2.28 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 82
Gambar 2.29 Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 ..... II - 84
Gambar 2.30 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 85
Gambar 2.31 Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp/Tahun) Tahun 2016-2020 ..... II - 89
Gambar 2.32 Rasio Ekspor Impor Kota Palu terhadap PDB Tahun 2016-2020 ..... II - 93
Gambar 2.33 Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-

2020 ..... II - 98
Gambar 2.34 Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs/SMA/ MA/SMK di Kota Palu (persen) Tahun 2016-2020 ..... II - 101
Gambar 2.35 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2017-2019 ..... II - 102
Gambar 2.36 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 121
Gambar 2.37 Rasio Aparat Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2019..... II - 128
Gambar 2.38 Rasio Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 129
Gambar 2.39 Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 ..... II - 130
Gambar 2.40 Penduduk yang Memiliki KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, Akta Cerai, dan Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2016-2019.. II - 136
Gambar 2.41 Rasio Penduduk yang Memiliki KTP di Kota Palu Tahun 2016-2019 ..... II - 137
Gambar 2.42 Rasio Pasangan yang Memiliki Akta Nikah di Kota Palu Tahun 2016-2018 ..... II - 137
Gambar 2.43 Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2016-2018 ..... II - 138
Gambar 2.44 Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Palu Tahun 2016 – 2018 ..... II - 139
Gambar 2.45 Rata-Rata Anak per Keluarga di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 141
Gambar 2.46 Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 141
Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2016-

2020 ..... II - 142
Gambar 2.48 Persentase Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 144
Gambar 2.49 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum ..... II - 146
Gambar 2.50 Jumlah Orang Yang Melalui Terminal ..... II - 148
Gambar 2.51 Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 149
Gambar 2.52 Total Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu Tahun 2015-2019 ..... II - 151
Gambar 2.53 Produksi Perikanan di Kota Palu (Ton) Tahun 2017-2020 ..... II - 159
Gambar 2.54 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 160
Gambar 2.55 Kontribusi Sektor PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 162
Gambar 2.56 Kontribusi Sektor Pertanian, dan Perkebunan (ADHB) terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 162
Gambar 2.57 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2018-2020 ..... II - 163
Gambar 2.58 Persentase Pelanggan Pengguna Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 166
Gambar 2.59 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2016-2020 ..... II - 167
Gambar 2.60 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap

PDRB Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 168
Gambar 2.61 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2016-2020 ..... II - 168

Gambar 3.1 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palu Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) ..... III - 9
Gambar 3.2 Perkembangan Rencana dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palu Tahun 2026-2020 (Milyar Rupiah) ..... III - 11
Gambar 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) ..... III - 13
Gambar 3.4 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pendapatan Lain yang Sah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) ..... III – 14

Gambar 5.1 Konsep Pembangunan Kota Palu 2021-2026..... V - 8

Gambar 6.1 Fokus Pengembangan Kota Palu 2021-2026 .. VI - 24
Gambar 6.2 Tema/Fokus Pembangunan Kota Palu 2021-2026 ..... VI - 25
Gambar 6.3 Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026 ..... VI - 26
Gambar 6.4 Kerangka Pikir 6 Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026 ..... VI - 27
Gambar 6.5 Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026.. VI - 28

BAB I

Pendahuluan

Lampiran
Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Tahun
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota diselenggarakan. Salah satu syarat administratif yang harus disertakan dalam pendaftaran pasangan calon adalah naskah visi dan misi calon Kepala Daerah. Visi-Misi dan Program Kerja Calon Kepala Daerah tersebut akan dipromosikan selama masa kampanye, dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Dokumen visi-misi dan program kerja dimaksud merupakan dokumen yang sangat strategis dan penting karena dokumen tersebut berisi janji pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada rakyat, yang harus diwujudkan pada akhir periode jabatan apabila pasangan tersebut terpilih. Visi-misi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RPJMD. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sedang dalam Pasal 150 ayat 3 huruf e berbunyi bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 70, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Nomor 3 menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat, sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun2017, yaitu Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, spasial, maka tindak lanjut penyusunan dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021- 2026 disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratis**, pendekatan ini berdasarkan metode ilmiah. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulandata dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dandapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan

analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Arah Kebijakan;

2. **Pendekatan partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemeritah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;
3. **Pendekatan politis**, sebagai upaya dalam menterjemahkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam RPJMD atau dengan kata lain menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan lima tahun;
4. **Pendekatan *top-down* dan *bottom-up***, hasil pendekatan *Bottom-Up* melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan *Top-Down* berupa penyelarasan dokumen perencanaan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas sasaran, seperti terkandung dalam makna filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional;
5. **Pendekatan holistik-tematik**, dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus

yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan

7. **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan, dan kesepakatan dengan DPRD serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Ranperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kota Palu tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode keempat dari RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yaitu RPJMD dan RPJPN, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025, Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024, Dokumen RPJMD Kota Palu dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041, dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Dokumen RPJMD dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Renstra OPD Kota Palu Tahun 2021-2026, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJPN Tahun 2005-2025

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2005-2025 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan RPJMD ini ingin mewujudkan Visi Pembangunan Sumberdaya Manusia Indonesia yakni “Terwujudnya Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Berakhlak Mulia”. Selain itu, RPJMD Kota Palu selaras dengan usaha pencapaian Visi Ekonomi RPJPN Tahun 2005-2025 yakni “terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”. Melalui pembangunan daerah di Kota Palu, pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah Kota Palu, berkurangnya kesenjangan antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021- 2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, target dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kota Palu juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kota Palu juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 antara lain terkait dengan arah pengembangan

kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kota Palu.

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Palu

RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah Kota Palu, Kota Untuk Semua Atau *"**City For All**"*. Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode keempat untuk perencanaan Tahun 2021-2026 terutama memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, terutama:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokrasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, bermartabat, mandiri dan agamis bertumpuh pada sektor perdagangan, pariwisata dan industri.
3. Mewujudkan Kota Palu sebagai kota Ekologis.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kota Palu digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Palu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah denganpola pemanfaatan ruang. Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah

ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Palu. Selain itu, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 memuat juga arah pembangunan pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan RPKD Kota Palu

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 selaras dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang mempedomani Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Program-Program dalam Bab VII RPJMD selaraskan dan menjadi acuan dokumen RPKD dan dokumen RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD Kota Palu sesuai Ayat 3 Pasal 20 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menyatakan dokumen RPKD Provinsi dan dokumen RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kota Palu

Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan OPD yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Palu

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 memperhatikan juga prioritas pembangunan Kota Paluyang terjabarkan dalam Renstra OPD Kota Palu Tahun 2021-2026 lalu menjadi acuan dalam penyusunan RKPD selama periode tersebut. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD dan Renstra Kota Palu diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Kota Palu.

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Palu yang dilaksanakan secara berjenjang. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

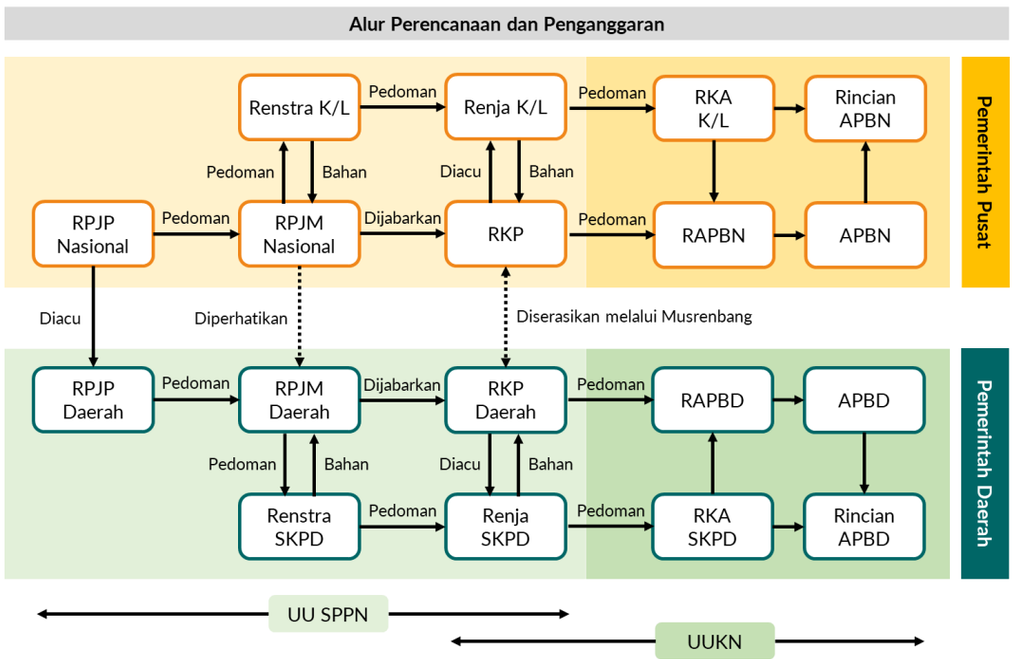

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.9 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021–2026 adalah memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan pembangunansesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Palu.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menjadi pijakan strategis dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kota Palu, untuk menetapkan prioritas program-program pembangunan yang perlu dilakukan guna melaksanakan otonomi daerah dan mekanisme monitoring, serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Merupakan rujukan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Palu;
3. Menjadi landasan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tolok ukur kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
4. Menjadi panduan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai pelaksanaan strategi dan arah

kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

5. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dicapai secara bertahap (gradual) melalui program-program pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan terukur;
6. Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun periode 2021-2026;
7. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2024;
8. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja keberhasilan OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
9. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Palu;
10. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasandalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan.

1.5 Sistematika

Dokumen RPJMD Kota Palu sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek

daya saing daerah.

Bab III **Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. visi, misi, tujuan dan sasaran;

Bab V **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Bab ini Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan;

Bab VI **Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih;

Bab VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan;

Bab VIII **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2026;

Bab IX **Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD serta

pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa karakteristik lokasi dan wilayah meliputi: luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi dan klimatologi, serta penggunaan lahan.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 46 (empat puluh enam) wilayah kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore dengan luas 206,80 km² (52,35%) dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur dengan luas 7,71 km² (1,95%).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
1	Palu Barat	8,28	2,10
2	Tatanga	14,95	3,78
3	Ulujadi	40,25	10,19
4	Palu Selatan	27,38	6,93

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase
5	Palu Timur	7,71	1,95
6	Mantikulore	206,8	52,35
7	Palu Utara	29,94	7,58
8	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		**395,06**	**100,00**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Wilayah Kota Palu terletak pada posisi bagian tengah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelilingi atau berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kecamatan/kabupaten. Tercatat sebanyak 8 (delapan) kecamatan atau 3 (tiga) kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu dengan beberapa kecamatan/kabupaten yang mengelilinginya disebutkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara 0°,36”-0°,56” Lintang Selatan dan 119°,45”-121°,1” Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi

terjadinya hujan *Zenithal* atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi.

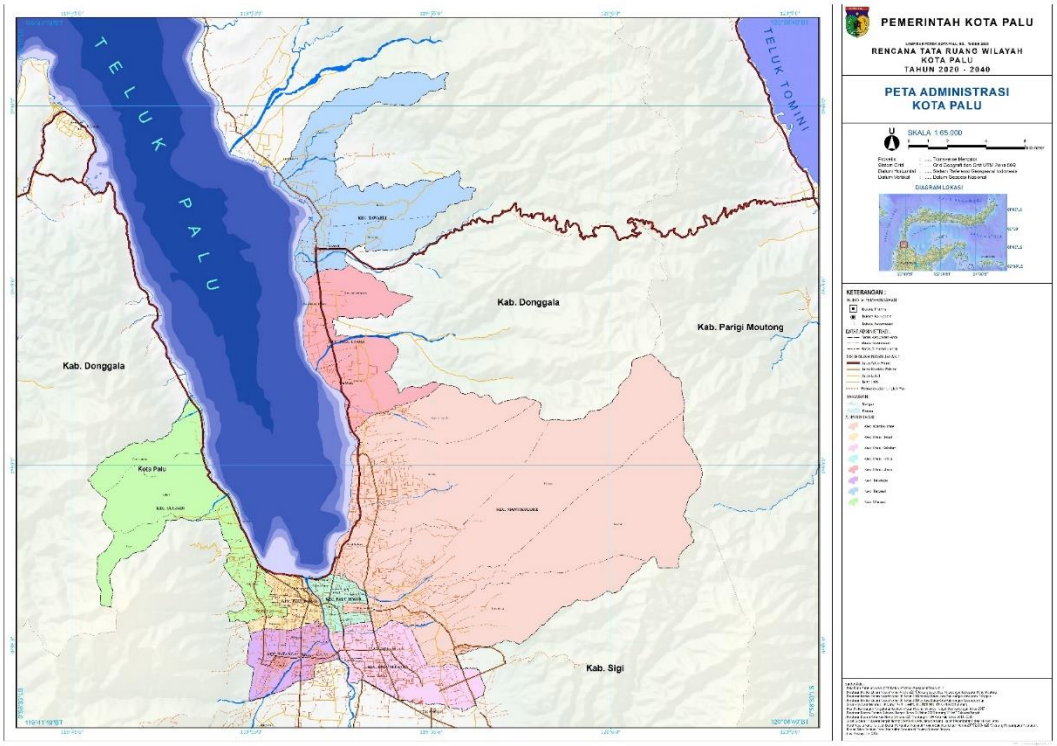

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Sebagian besar letak kelurahan di Kota Palu berada pada dataran Lembah Palu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sedangkan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu.

Tabel 2.2 Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		**46**	**17**	**29**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan berada pada wilayah lembah yang tidak memiliki pantai. Di sisi lain, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli memiliki masing-masing lima kelurahan yang hampir semuanya berada pada pesisir pantai, 4 (empat) kelurahan berada pada pesisir pantai dan 1 (satu) kelurahan berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) di antaranya berada di sepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Kota Palu dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi, berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu yang secara astronomis terletak antara 0º,36”-0 º,56” Lintang Selatan dan 119º,45”-121º,1” Bujur Timur, tepat berada di bawah garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut (mdpl). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah menurut Kecamatan Se-Kota Palu

No	Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Palu Barat	5
2	Tatanga	22
3	Ulujadi	27

No	Kecamatan	Tinggi (meter)
4	Palu Selatan	61
5	Palu Timur	9
6	Mantikulore	25
7	Palu Utara	25
8	Tawaeli	33
Kota Palu		**-**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Secara fisiografi daerah Palu terdiri dari pematang timur dan pematang barat, keduanya berarah utara-selatan dan terpisahkan oleh Lembah Palu (Fossa Sarasina). Pematang Barat di dekat Palu hingga lebih dari 2000 meter tingginya, tapi di Donggala menurun hingga muka laut. Pematang timur dengan tinggi puncak dari 400 hingga 1900 meter dan menghubungkan pegunungan di Sulawesi Tengah dengan lengan Utara.

Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga zona ketinggian permukaan bumi dari permukaan laut, yaitu:

1. Topografi dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0–100 m di atas permukaan laut yang memanjang dari arah Utara ke Selatan dan bagian Timur ke arah Utara.
2. Topografi perbukitan dengan ketinggian antara 100–500 m di atas permukaan laut yang terletak dibagian Barat sisi Barat dan Selatan, kawasan bagian Timur ke arah Selatan dan bagian Utara kearah Timur.
3. Pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m sampai dengan 700 m di atas permukaan laut.

Wilayah dengan tingkat kemiringan tanah, yaitu 0-5% hingga 5–40% merupakan yang paling luas yaitu 376,68 Ha (95,34%), sedangkan ketinggian diatas 500 meter dari permukaan laut yang paling luas, yaitu 18,38 Ha (4,66%). Kondisi topografi

Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota Palu menunjukan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase 4 hampir 75% dari total luas wilayah.

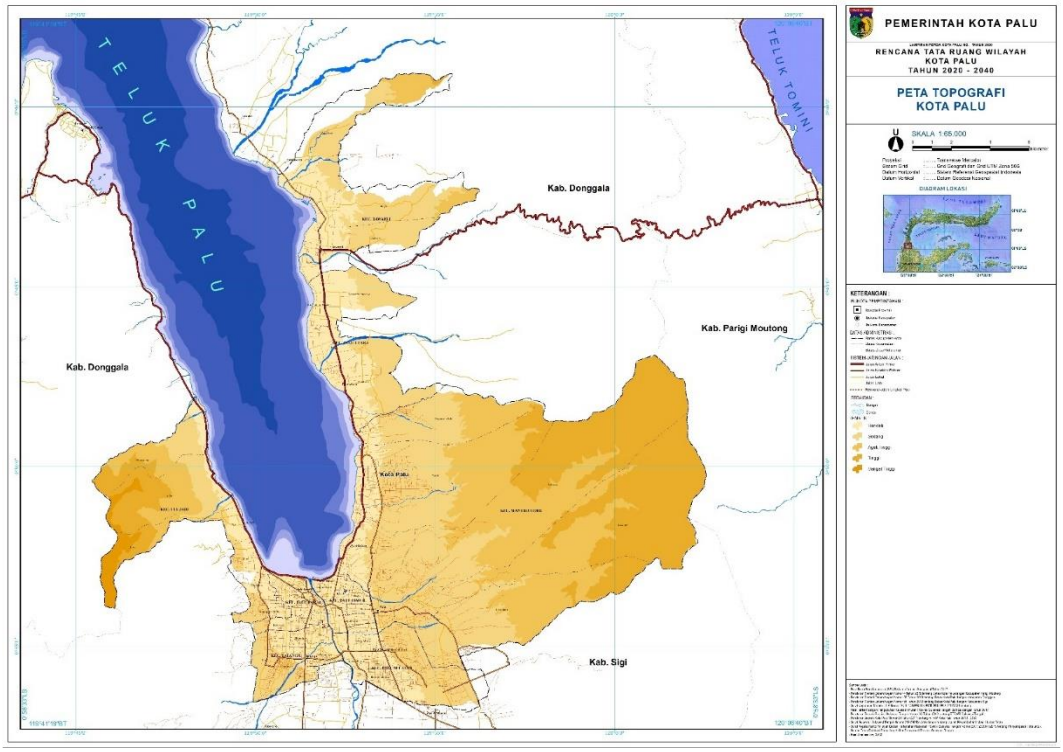

Gambar 2.2 Peta Kondisi Topografi Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%. Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 20%. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan >40 derajat. Wilayah dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.

2.1.1.4 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng permukaan tanah di Kota Palu bervariasi dari 0-8% hingga >40%. Kemiringan lereng 0-8% (datar) merupakan yang terluas di Kota Palu seluas 13.768,91 ha yang tersebar disetiap Kecamatan, sedangkan kemiringan lereng >40% seluas 11.306,42 ha yang hanya tersebar di Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Keadaan ini sesuai dengan kondisi topografi Lembah dan Teluk Kota Palu dimana semakin tinggi keadaan permukaan tanah semakin curam tingkat kemiringan lerengnya.

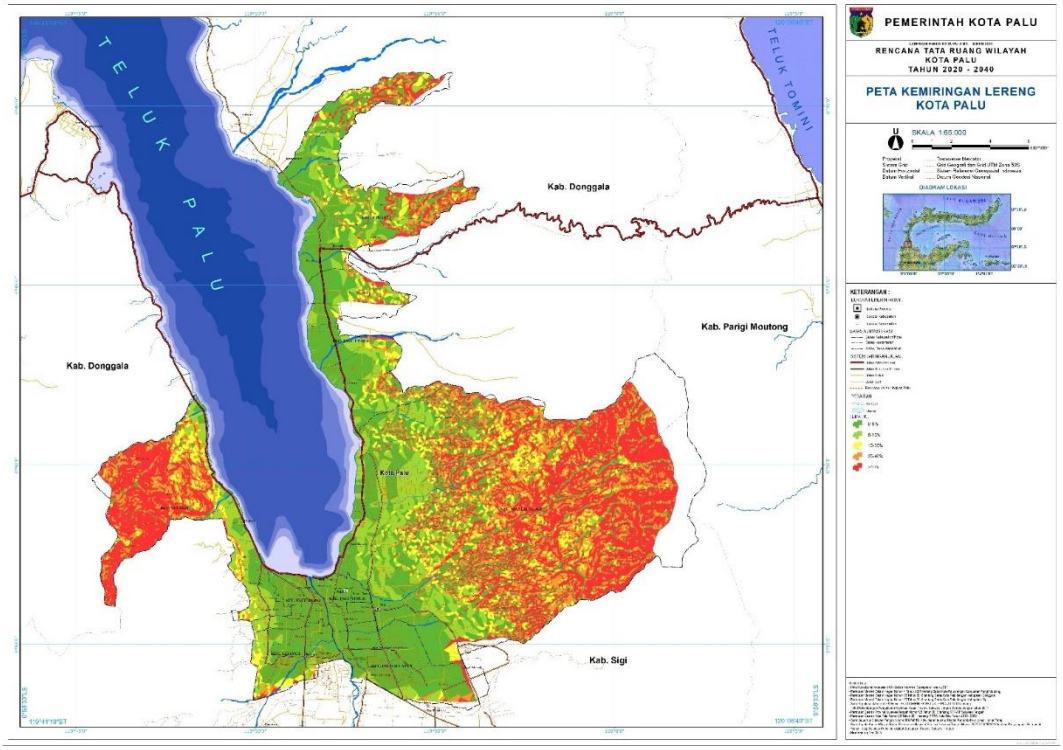

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.1.1.5 Kondisi Geologi

Secara geografis dan proses geologis daratan di Sulawesi Tengah terbentuk karena adanya kegiatan tektonik sehingga

terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Adanya pengangkatan dan penurunan menyebabkan adanya beberapa permukaan tanah terangkat cukup tinggi. Secara fisiografis, daerah ini dibangun oleh rangkaian pegunungan dengan celah yang sempit dan dalam. Di bagian barat terdapat pelurusan lembah yang mempunyai arah barat laut-selatan selatan tenggara (Lembah Palu, Lembah Mui, Lembah Halua, Lembah Koro, Lembah Leboni terus masuk ke Teluk Bone) dan merupakan ekspresi morfologi dari adanya patahan transcurrent besar yang dinamai fossa sarasina (Sarasin, 1901 dalam Katili, 1980 dalam Studi Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006). Morfologi dataran umumnya menempati daerah cekungan antar pegunungan yang bersambung dengan dataran pantai. Cerminan morfologi ini bervariasi mulai dari dataran bergelombang, miring dan rata.

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

Salah satu yang menarik dari endapan mineralisasi tersebut adalah mineralisasi emas pada daerah Poboya, Kota Palu, dan kawasan Dongi-Dongi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Ketidakhadiran dari batuan vulkanik dan subvulkanik yang biasanya berasosiasi dengan sistem epitermal seperti Endapan Emas Hishikari, Jepang dan Endapan Emas Champagne Pool, New Zeland (Corbett dan Leach, 1997), menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian di daerah ini. Secara regional, mineralisasi tersebut berasosiasi dengan sesar Palu yang berarah sinistral (Wajdi *et al.*, 2011). Peta geologi regional Palu, Sigi, Parigi dan sekitarnya diperlihatkan Gambar 2.3. Fisiografi dataran Palu menurut Van Bemmelen (Van Bemmelen, 1989 dalam Studi Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006) terbagi dalam 5 formasi dasar, yaitu sebagai berikut:

- Alluvium dan Endapan Pasir, memanjang di sepanjang pantai.
- Molasa Celebes dan Sarasin, terdiri atas konglomerat, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, koral dan napal tersebar memanjang dari utara ke selatan.
- Tinombo Ahlburg, berupa batuan vulkanik hasil gunung api terdiri dari batu pasir, konglomerat, batu gamping termasuk fisit dan kwarsit.
- Kompleks terdiri dari skismika skismibibolit, genes dan pualam.
- Granit dan Granidiorit Secara fisiografi daerah Palu terdiri dari pematang timur dan pematang barat, kedua-duanya berarah utara-selatan dan terpisahkan oleh Lembah Palu.

Keadaan geologi Kota Palu secara umum sama untuk semua kecamatan yaitu jenis tanah alluvial yang terdapat di lembah Palu. Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri

dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (*Inncous Intrusiverocks*). Disamping pula batuan-batuan metamorfosis dan sedimen. Dataran lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan alluvial dan colluvial yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Topografi daerah ini adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah.

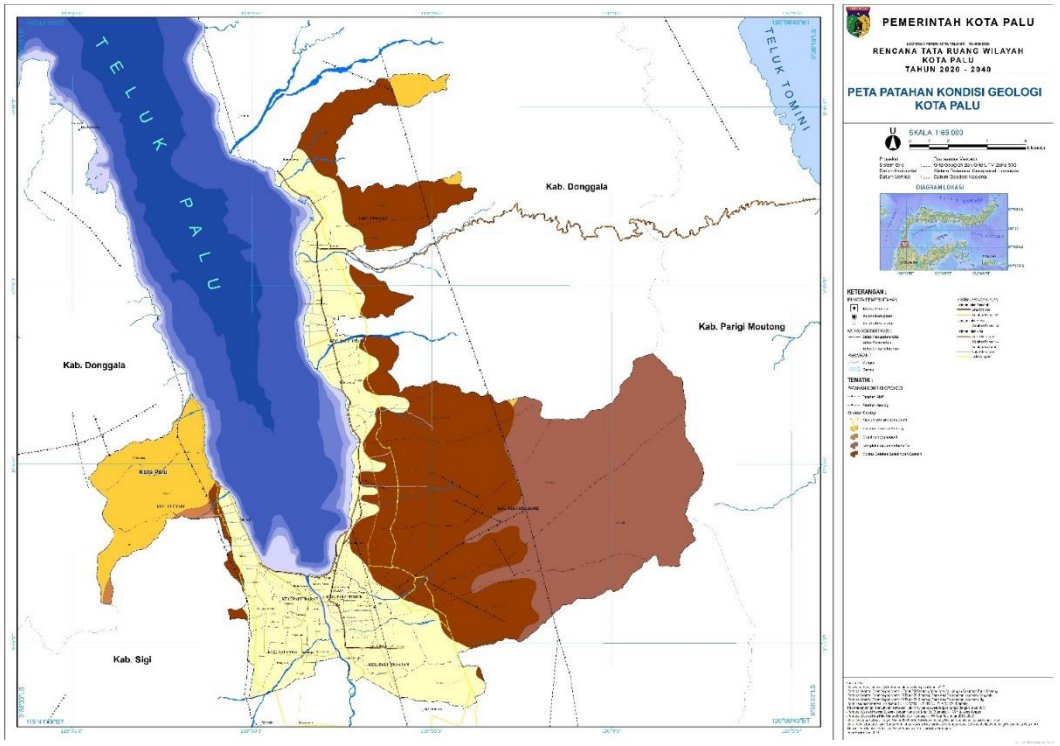

Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu 2021-2041

Tabel 2.4 Jenis Geologi di Kota Palu

No	Kecamatan	Jenis Geologi (Ha)					Luas (Ha)
		A	B	C	D	E	
1	Palu Barat	24,79		703,41			728,2
2	Tatanga	36,43					36,43
3	Ulujadi	312,17	1.954,49	900,48		3.167,24	6.334,38

No	Kecamatan	Jenis Geologi (Ha)					Luas (Ha)
		A	B	C	D	E	
4	Palu Selatan			2.368,72			2.368,72
5	Palu Timur			614,33			614,33
6	Mantikulore	8.456,38		3.048,41	8.881,27		20.386,06
7	Palu Utara	1.142,88		1.834,82			2.977,70
8	Tawaeli	3.594,39		1.421,07	346,99	697,73	6.060,18
Jumlah		13.567,04	1.954,49	10.891,24	9.228,26	3.864,97	39.506,00

Keterangan
A = Batugamping, Konglomerat, Batupasir
B = Granit Dan Granodiorit
C = Kerikil, Pasir, Lempur, Setempat Terumbu
D = Sekis Mika, Sekis Amfibolit, Genes Dan Puala (Terutama Genes)
E = Serpih, Batupasir, Konglomerat, Batuan Volkanik, Batuan Gamping Dan Rijang, Termasuk Filit, Sabak Dan Kuarsit

Sumber: Balitan, 2018

2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Sebagai daerah tropis maka Kota Palu memiliki dua musim yang berpengaruh secara tetap yaitu musim kemarau (musim Timur) pada bulan April sampai dengan bulan September dan musim hujan (musim Barat) pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, curah hujan berkisar antara 400-1250 mm per tahun. Kedudukan Kota Palu yang diapit oleh bukit-bukit dan pantai sehingga Kota Palu dapat dikategorikan sebagai Kota Lembah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka suhu udara dipengaruhi oleh udara pegunungan dan udara pantai yang berakibat pada terdapatnya perbedaan suhu antar wilayah yang dipengaruhi oleh suhu pegunungan berkisar antara 25^0C-31^0C, sedangkan wilayah yang dipengaruhi oleh suhu pantai berkisar antara 31^0C–37^0C dengan kelembaban berkisar antara 70–86%. Berbeda dengan daerah- daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim, Kota Palu memiliki karakteristik yang spesifik, dikarenakan Kota Palu tidak dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai Non Zona Musim.

Pada Tahun 2012, rata-rata suhu udara di Kota Palu yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu adalah 27,7°C Suhu terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 26,4°C, sedangkan bulan-bulan lainnya suhu udara berkisar antara 27,1°C - 28,8°C. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 82 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 72 persen.

Pada Tahun 2013, rata-rata suhu udara di Kota Palu yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu adalah 27,28°C Suhu terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 24,41°C, dan suhu terpanas terjadi pada bulan Mei yaitu dengan temperature 28,52°C sedangkan bulan-bulan lainnya suhu udara berkisar antara 26,08°C - 28,15°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 83,99 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 74,08 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara			Kelembapan (%)
	Minimumm	Maximum	Rata-Rata	
Januari	23,3	34,1	28,8	72,0
Februari	22,9	33,4	29,4	71,1
Maret	24,4	34,1	28,2	75,8
April	24,0	34,1	28,5	74,9
Mei	23,9	34,0	28,7	77,3
Juni	22,4	32,5	27,3	80,8
Juli	22,8	31,6	26,7	83,8
Agustus	22,9	32,9	27,4	78,4
September	23,1	31,9	27,1	82,6
Oktober	23,5	32,9	27,8	78,7
November	23,5	33,2	28,0	77,4
Desember	23,3	33,5	28,4	72,6

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Kondisi tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020. Tekanan udara tertinggi yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2020 terjadi pada bulan Februari, Maret, April, dan November sebesar 1.012,0 mb, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan September sebesar 1.0010 mb. Untuk kecepatan angin, terlihat nyaris konstan antara 3-5 knots. Angka 5 knots terjadi pada bulan Februari, dan Maret, 4 knots terjadi pada bulan Januari, April, dan Mei, sementara 3 knots terjadi pada bulan Juni hingga Desember Tahun 2020. Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak dari empat arah mata angin yaitu utara, timur, timur laut dan tenggara dengan arah angin terbanyak dalam satu tahun bergerak dari arah utara wilayah Kota Palu.

Tabel 2.6 Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Arah Angin
Januari	1.011	4	Utara
Februari	1.012	5	Utara
Maret	1.012	5	Utara
April	1.012	4	Utara
Mei	1.011	4	Utara
Juni	1.011	3	Timur Laut
Juli	1.011	3	Timur Laut
Agustus	1.011	3	Timur
September	1.001	3	Utara
Oktober	1.010	3	Tenggara
November	1.012	3	Timur
Desember	1.010	3	Utara

Sumber: BPS Kota Palu, 2021

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2020 terjadi pada bulan September, yaitu 304 mm. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak

terjadi pada bulan September pula yaitu sebanyak 28 hari. Jumlah hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Januari sebanyak 11 hari. Penyinaran matahari pada Tahun 2020 tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 128%, sedangkan penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Juni sebanyak 53%.

Tabel 2.7 Rata-Rata Hari Hujan, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2020

Bulan	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	11	15	63
Februari	15	25	66
Maret	16	38	61
April	16	64	73
Mei	26	50	128
Juni	26	89	53
Juli	25	181	63
Agustus	25	59	73
September	28	304	54
Oktober	25	48	66
November	22	42	63
Desember	15	20	66

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.8 Rata-Rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2016-2020

Kondisi Iklim	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu (°C)	28,30	27,50	28,00	28,20	27,6
Kelembaban Udara (%)	75,30	79,30	76,50	75,60	80,00
Tekanan Udara (mb)	1.011,04	1.008,02	1.011,01	1.011,07	1001,00
Arah Angin Terbanyak	Barat Laut	Barat Laut	Utara	Utara	-
Kecepatan Angin (Knots)	5,00	4,50	4,50	4,40	1,85

Kondisi Iklim	2016	2017	2018	2019	2020
Curah Hujan (mm)	54,80	71,70	48,70	76,80	953,90
Penyinaran Matahari (%)	67,50	59,00	64,10	69,10	65,00

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Untuk peta klimatologi Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini.

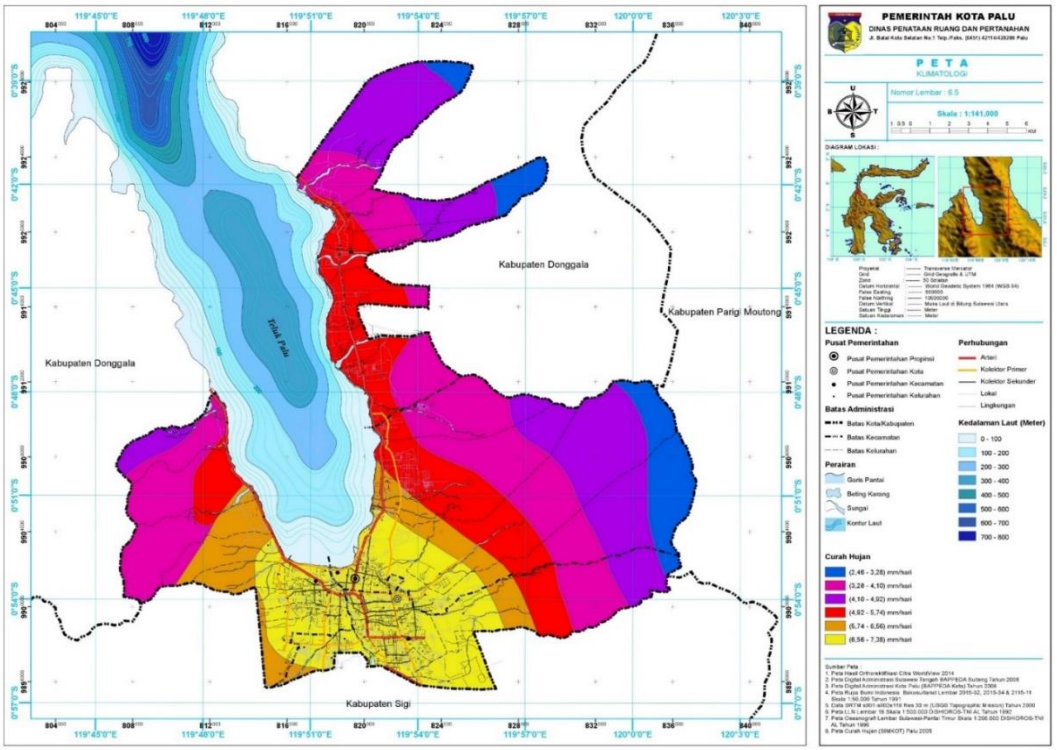

Gambar 2.5 Peta Klimatologi Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.1.1.7 Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai yang melintas pada semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Mantikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1

(satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Lima kecamatan lainnya masing-masing dilalui oleh 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli.

Tabel 2.9 Sungai yang Mengalir di Kota Palu

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1	Palu Barat	Sungai Palu
2	Tatanga	Sungai Lewara
3	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungan Tawaeli

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan lahan, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan pada suatu wilayah dapat dilihat dalam Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perdagangan, dan Kawasan Perumahan termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Secara garis besar, penggunaan lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari permukiman, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran.

Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (makam, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam).

Guna lahan pada kawasan budi daya Kota Palu didominasi oleh kawasan permukiman seluas 3.975,01 ha atau sebesar 10,06%. Namun secara garis besar penggunaan lahan di Kota Palu didominasi berupa lahan kosong/semak belukar/hutan seluas 30.839,85 ha atau sebesar 78,06%.

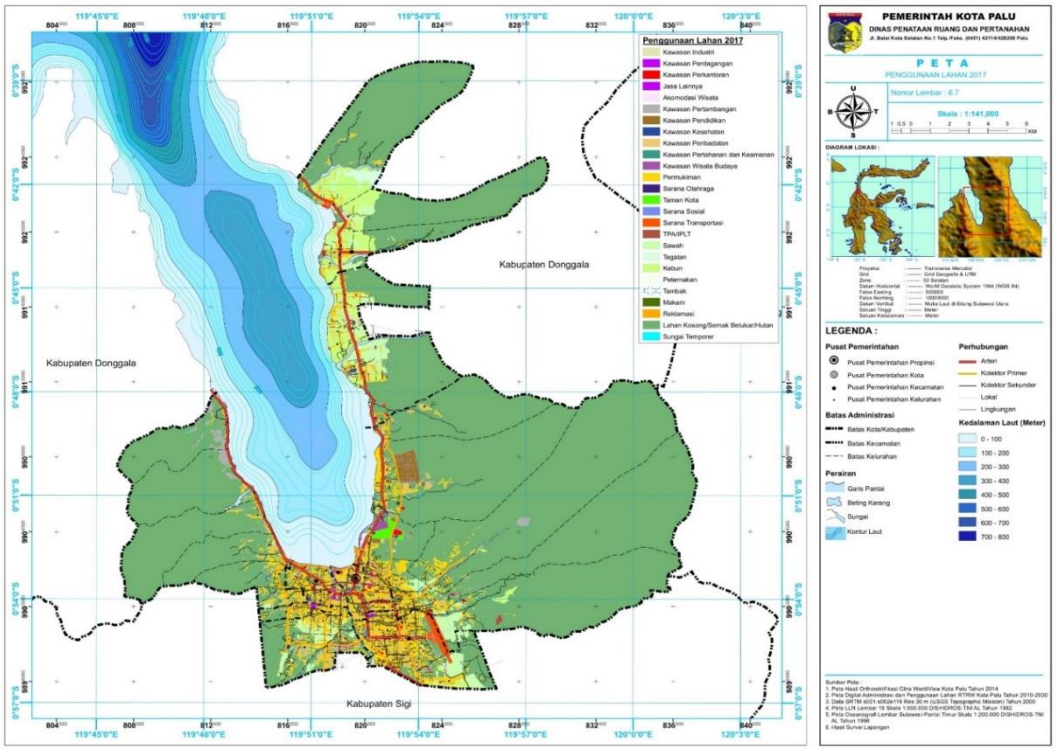

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Tabel 2.10 Penggunaan Lahan Kota Palu

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Ha)								Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Mantikulore	Palu Barat	Palu Selatan	Palu Timur	Palu Utara	Tatanga	Ulujadi	Tawaeli		
1	Akomodasi Wisata	2,31	2,56	2,26	7,53	1,72	0,99	4,67		22,04	0,06
2	Permukiman	969,80	397,38	883,85	354,94	274,13	491,67	368,55	234,69	3.975,01	10,06
3	Kawasan Bersejarah		1,82		0,81					2,63	0,01
4	Kawasan Industri	18,93	1,04	4,39	1,31	67,05	1,64	12,69	66,77	173,82	0,44
5	Kawasan Kesehatan	6,93	4,80	1,58	3,11	6,19	0,59	1,63	0,76	25,59	0,06
6	Kawasan Pantai Berhutan Bakau				0,94					0,94	0,00
7	Kawasan Pariwisata					9,60				9,60	0,02
8	Kawasan Pendidikan	226,25	28,47	15,38	29,01	11,41	10,46	5,91	4,12	331,01	0,84
9	Kawasan Perdagangan	78,49	93,27	90,81	102,60	12,15	34,58	5,00	22,00	438,90	1,11
10	Kawasan Peribadatan	7,40	8,75	7,06	4,57	0,76	3,44	1,76	1,34	35,08	0,09
11	Kawasan Perkantoran	50,56	11,65	24,37	55,59	3,78	0,34	1,38	6,08	153,75	0,39
12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	4,89	0,21	15,23	21,13	4,82	1,11		0,28	47,67	0,12
13	Kawasan Pertambangan	25,82		0,85		24,91	13,51	183,39		248,48	0,63
14	Kebun	43,22		59,16		458,57			784,46	1.345,41	3,40
15	Lahan Kosong/ Semak Belukar/ Hutan	17264	146,18	522,50	6,18	1788,75	766,75	5728,21	4617,28	30.839,85	78,06
16	Lapangan Golf	32,82								32,82	0,08
17	Makam	11,81	3,33	2,38	1,35	1,43	0,62	0,88	0,89	22,69	0,06
18	Pasir Pantai	2,34			2,19	3,52			1,80	9,85	0,02
19	Pelabuhan Kecil								0,11	0,11	0,00

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Ha)								Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Mantikulore	Palu Barat	Palu Selatan	Palu Timur	Palu Utara	Tatanga	Ulujadi	Tawaeli		
20	Penggaraman Talise	18,63				1,29			0,68	20,60	0,05
21	Pergudangan	16,51				4,64				21,15	0,05
22	Hutan Mangrove					0,32			2,40	2,72	0,01
23	Peternakan			8,22			1,87	0,31		10,40	0,03
24	Reklamasi	6,21	1,82					3,62		11,65	0,03
25	Ruang Kegiatan Sektor Informal	10,76	5,84	0,31	0,33			1,21		18,45	0,05
26	Ruang Terbuka Hijau	82,16	1,25	0,01	8,41		0,15		0,89	92,87	0,24
27	Sarana Olahraga	11,44	2,03	1,92	1,84	5,13	4,26	1,18	5,45	33,25	0,08
28	Sarana Sosial	0,64	3,97	5,81	0,59	0,19			0,17	11,37	0,03
29	Sarana Transportasi	39,77	0,60	101,21		4,48		0,27	35,96	182,29	0,46
30	Sawah	232,58	2,86	183,91		274,45	172,24	9,66	102,53	978,23	2,48
31	Sungai Temporer	67,17	9,71	24,34	11,94	52,14	13,02	15,73	90,87	284,92	0,72
32	Tegalan	1,13							106,37	107,50	0,27
33	TPA/IPLT	14,63								14,63	0,04
34	Jasa Lainnya		0,55		0,13		0,04			0,72	0,00
Jumlah		**19.247,20**	**728,09**	**1.955,55**	**614,50**	**3.011,43**	**1.517,28**	**6.346,05**	**6.085,90**	**39.506,00**	**100,00**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.1.1.9 Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu pada tahun 2021-2041, sesuai yang diamanatkan dalam Perda Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW, adalah untuk mewujudkan ruang Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN berbasis industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berkearifan lokal, dan tangguh bencana. Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Palu.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu, meliputi:

Tabel 2.11 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Palu

No.	Kebijakan	Strategi
1	pengembangan dan pemantapan PPK untuk mendukung Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN	a. memantapkan dan mengembangkan PPK sebagai pusat aktivitas perkotaan utama yang melayani seluruh wilayah Daerah dan/atau regional b. mengembangkan pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang c. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki
2	pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana	a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu b. mengembangkan jalan lingkar luar dan jalan lingkar dalam kota c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi d. menjaga kelestarian sumber air dan meningkatkan ketersediaan air e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air baku f. meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan limbah, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah g. meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir h. mengembangkan infrastruktur mitigasi bencana i. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana

No.	Kebijakan	Strategi
3	penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan lindung	a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung b. mewujudkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh) persen c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
4	perwujudan pengembangan kawasan budidaya yang tangguh bencana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. mengembangkan kegiatan industri di kawasan peruntukan industri b. mengembangkan kegiatan pariwisata dan pendidikan c. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi infrastruktur pendukung d. mengembangkan kawasan perumahan yang tangguh bencana
5	peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan c. mengembangkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya

Sumber: RTRW Kota Palu 2021-2041

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu diturunkan ke dalam rencana struktur ruang dan pola ruang yang akan diwujudkan hingga masa RTRW Kota Palu 2021-2041 berakhir.

Tabel 2.12 Struktur Ruang Wilayah Kota Palu 2021-2041

No.	Struktur Ruang	Keterangan
1	Sistem Pusat Pelayanan	a. Pusat Pelayanan Kota 1) PPK Lolu-Besusu di Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan Daerah, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya 2) PPK Tondo-Talise di Kecamatan Mantikulore yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala

No.	Struktur Ruang	Keterangan
		regional, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan olahraga skala nasional, dan pusat pelayanan transportasi
		b. Sub Pusat Pelayanan Kota 1) SPPK I di Kecamatan Tawaeli 2) SPPK II di Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Timur 3) SPPK III di Kecamatan Palu Barat
		c. Pusat Lingkungan 1) PL Taipa di Kecamatan Palu Utara 2) PL Mamboro di Kecamatan Palu Utara 3) PL Lasoani di Kecamatan Mantikulore 4) PL Petobo di Kecamatan Palu Selatan 5) PL Tavanjuka di Kecamatan Tatanga 6) PL Tipo di Kecamatan Ulujadi
2	Sistem Jaringan Prasarana	a. Sistem jaringan transportasi 1) Sistem jaringan transportasi darat a) Sistem jaringan jalan (1) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kota Palu (a) Jalan arteri primer • Pantoloan (Bts. Kab. Donggala) – Tawaeli • Kebonsari (Talise) – Tawaeli • Kebonsari (Palu) - jalan Tanah Runtuh • jalan Yos Sudarso • jalan Sam Ratulangi • jalan Sudirman • jalan Wolter Monginsidi • jalan Emmy Saelan • jalan Basuki Rahmat • jalan Abdul Rahman Saleh • jalan Hasanuddin II (b) Jalan kolektor primer 1 • Watusampu (Bts. Kota Palu/Kab. Dongala) – Ampera • jalan Hasanuddin I • jalan Gajah Mada • jalan Imam Bonjol • jalan Diponegoro • jalan Malonda • jalan Towua • jalan lingkar luar melewati Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi • jalan lingkar dalam melewati Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, dan

No.	Struktur Ruang	Keterangan
		Kecamatan Ulujadi (c) Jalan tol • Toboli – Pantoloan • Pantoloan – Palu (2) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kota Palu (a) Jalan kolektor primer 2 • jalan Moh. Hatta • jalan Juanda • jalan M. Yamin • jalan Dewi Sartika • jalan Sisingamangaraja • jalan Soekarno – Hatta • jalan L. Gadi • jalan Sis Aljufri I • jalan Sis Aljufri II • jalan Pue Bongo • jalan I Gusti Ngurah Rai • jalan Padanjakaya • jalan Gunung Gawalise • jalan Munif Rahman II • jalan Towua • jalan Karanja Lemba I (b) jalan strategis provinsi berupa ruas jalan bundaran Palupi-Batas Kabupaten Sigi (3) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kota Palu (a) Jalan arteri sekunder • jalan Wahid Hasyim • jalan Garuda • jalan Maleo • jalan Veteran • jalan H. Hayyun • jalan Kimaja • jalan Danau Poso • jalan S. Dolago • jalan Cumi-cumi Taman Ria • jalan Komodo • jalan Raja Moili • jalan S. Gumbasa (b) Jalan kolektor sekunder sejumlah 87 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palu (4) Terminal penumpang (a) Terminal Tipe A Mamboro di Kecamatan Palu Utara (b) Terminal Tipe B Tipo di Kecamatan Ulujadi (c) Terminal Tipe C • Terminal Petobo di Kecamatan Palu Selatan • Terminal Manonda di Kecamatan Palu Barat • Terminal Pasar Tawaeli di Kecamatan Tawaeli

No.	Struktur Ruang	Keterangan
		• Terminal Pasar Lasoani di Kecamatan Mantikulore • Terminal Kota di Kecamatan Palu Timur (5) Terminal barang berada di Kecamatan Palu Utara (6) Jembatan timbang (a) jembatan timbang Kayumalue Ngapa di Kecamatan Palu Utara (b) jembatan timbang di Kecamatan Ulujadi b) Sistem jaringan kereta api (1) jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum antarkota melewati Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi (2) stasiun kereta api di Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Ulujadi c) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan (1) Lintas penyeberangan (a) lintas penyeberangan antar Provinsi, yaitu Palu-Balikpapan (b) lintas penyeberangan antar kabupaten/kota • Palu-Donggala • Palu-Tolitoli (2) pelabuhan penyeberangan kelas I berupa pelabuhan penyeberangan Taipa di Kecamatan Palu Utara 2) Sistem jaringan transportasi laut a) Pelabuhan laut (1) pelabuhan utama berupa Pelabuhan Pantoloan di Kecamatan Tawaeli (2) terminal khusus (c) di Kecamatan Tawaeli (d) di Kecamatan Palu Utara (e) di Kecamatan Ulujadi b) Alur pelayaran (1) Pantoloan Palu – Parepare – Makassar – Surabaya – Balikpapan – Nunukan (2) Pantoloan Palu – Balikpapan - Nunukan (3) Dampal Utara – Palu – Tolitoli 3) Sistem jaringan transportasi udara a) Bandara umum berupa bandar udara pengumpul sekunder Mutiara Sis-Aljufri di Kecamatan Palu Selatan b) Ruang udara untuk penerbangan berupa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara
		b. Sistem jaringan energi berupa sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya a) pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Ulujadi

No.	Struktur Ruang	Keterangan
		b) pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Mantikulore c) pembangkit tenaga listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Mantikulore 2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya a) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang melewati Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi b) jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh Kecamatan c) gardu induk di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Ulujadi
		c. Sistem jaringan telekomunikasi 1) Jaringan tetap berupa jaringan serat optik 2) Jaringan bergerak a) jaringan terestrial berupa pemancar gelombang TV dan radio b) jaringan seluler berupa menara BTS c) jaringan satelit
		d. Sistem jaringan sumber daya air 1) sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kota berupa WS Palu-Lariang meliputi 15 DAS 2) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kota berupa jaringan irigasi meliputi 3 Daerah Irigasi (Gumbasa, Kekeloe, dan Paneki) dan irigasi pada Kecamatan Palu Selatan, Tatanga, dan Mantikulore 3) sistem jaringan sumber daya air Kota a) sumber air (1) air permukaan meliputi 5 sungai, 2 situ, 5 embung, dan mata air (2) cekungan air tanah (CAT) berpa CAT Palu dan CAT Tawaeli b) prasarana sumber daya air (1) sarana jaringan irigasi meliputi 11 Daerah Irigasi (2) sistem pengendalian banjir (3) jaringan air baku untuk air bersih
		e. Infrastruktur perkotaan 1) SPAM a) Jaringan perpipaan meliputi SPAM Zona I, SPAM Zona II, dan SPAM Zona III b) Jaringan non perpipaan berupa sumur pompa 2) SPALD a) SPAL setempat meliputi SPAL individu dan IPLT di Kecamatan Mantikulore

No.	Struktur Ruang	Keterangan
		b) SPAL terpusat meliputi IPAL permukiman di setiap kecamatan dan IPAL industri di Kecamatan Tawaeli 3) Sistem pengolahan limbah B3 4) Sistem jaringan persampahan a) TPST di setiap kecamatan b) TPA di Kecamatan Mantikulore 5) Sistem jaringan evakuasi bencana a) Jalur evakuasi bencana melalui 121 ruas jalan dan seluruh jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal yang dilengkapi dengan tanda petunjuk jalur evakuasi b) Ruang evakuasi bencana meliputi sarana prasarana umum, lapangan olahraga, gedung serbaguna, gedung pemerintahan, dan rumah ibadah yang berada di seluruh kecamatan 6) Sistem jaringan drainase a) Jaringan primer meliputi 8 sungai b) Jaringan sekunder mengikuti pola jaringan jalan di setiap kecamatan c) Jaringan tersier pada kawasan permukiman di setiap kecamatan 7) Sistem jaringan pejalan kaki d) ruas jalan Soekarno Hatta e) ruas jalan Muhammad Yamin f) ruas jalan Juanda g) ruas jalan Moh. Hatta h) ruas jalan Basuki Rahmat i) ruas jalan Rajamoili j) ruas jalan Cumi-Cumi k) ruas jalan Diponegoro

Sumber: RTRW Kota Palu 2021-2041

Tabel 2.13 Pola Ruang Wilayah Kota Palu 2021-2041

No.	Pola Ruang	Keterangan
1	Kawasan Lindung	a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa hutan lindung seluas lebih kurang 6.380 hektar di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Ulujadi
		b. kawasan perlindungan setempat 1) sempadan pantai seluas lebih kurang 270 hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi 2) sempadan sungai seluas lebih kurang 218 hektar di seluruh kecamatan 3) kawasan sekitar danau atau waduk seluas lebih kurang 4 hektar di Kecamatan Tawaeli
		c. kawasan konservasi berupa kawasan pelestarian alam taman hutan raya seluas lebih kurang 2.559 hektar di Kecamatan Mantikulore

No.	Pola Ruang	Keterangan
		d. Kawasan rawan bencana 1) kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi seluas kurang lebih 1 hektar di Kecamatan Ulujadi 1) sempadan patahan aktif (*active fault*) di kawasan rawan bencana gempa bumi berupa berupa sempadan patahan aktif (*active fault*) Palu-Koro seluas kurang lebih 12 hektar terdapat di Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi
		e. kawasan cagar budaya seluas lebih kurang 2 hektar di Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur
		f. kawasan ekosistem mangrove seluas lebih kurang 10 hektar meliputi Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Timur
		g. RTH 1) Proporsi RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau lebih kurang 2.265 hektar dari luas kawasan terbangun Kota 2) Proporsi RTH privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen
2	Kawasan Budidaya	h. kawasan hutan produksi seluas lebih kurang 5.137 hektar di Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Kecamatan Palu Utara
		i. kawasan pertanian 1) kawasan tanaman pangan seluas lebih kurang 427 hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi 2) kawasan perkebunan seluas lebih kurang 4.894 hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Ulujadi
		j. kawasan pertambangan dan energi berupa wilayah pertambangan, yaitu kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas lebih kurang 18 hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Mantikulore
		k. kawasan perikanan 1) perikanan tangkap terdapat di seluruh perairan Kota Palu 2) perikanan budidaya seluas lebih kurang 35 hektar meliputi Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Mantikulore
		l. kawasan peruntukan industri 1) kawasan industri seluas lebih kurang 1.395 hektar terdapat di Kecamatan Tawaeli 2) sentra industri kecil dan menengah seluas lebih kurang 62 hektar di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Tawaeli.
		m. kawasan pariwisata seluas lebih kurang 76 hektar meliputi Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Utara
		n. kawasan permukiman seluas lebih kurang 11.376 hektar 1) kawasan perumahan seluas lebih kurang 9.044 hektar di seluruh kecamatan 2) kawasan perdagangan dan jasa seluas lebih kurang 1.382 hektar di seluruh kecamatan

No.	Pola Ruang	Keterangan
		3) kawasan perkantoran seluas lebih kurang 236 hektar di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi 4) kawasan peribadatan seluas lebih kurang 12 hektar di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat 5) kawasan pendidikan seluas lebih kurang 403 hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Tatanga 6) kawasan kesehatan seluas lebih kurang 37 hektar di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Ulujadi 7) kawasan olahraga seluas lebih kurang 7 hektar di Kecamatan Mantikulore 8) kawasan transportasi seluas lebih kurang 255 hektar meliputi Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat
		o. kawasan pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 265 hektar 1) Komando Resor Militer (KOREM) di Kecamatan Mantikulore 2) Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Mantikulore 3) Batalyon Infanteri (Yonif) di Kecamatan Palu Selatan 4) Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Barat 5) Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Ulujadi 6) Pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mantikulore 7) Kepolisian Daerah (POLDA) di Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore 8) Kepolisian Resort (POLRES) terdapat di Kecamatan Palu Timur

Sumber: RTRW Kota Palu 2021-2041

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, ditetapkan Kawasan Strategis Nasional yang salah satu lokasinya berada di Kota Palu, yaitu Kawasan Palapas, meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.

Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di Kota Palu terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya di Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, yaitu Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2021-2041, ditetapkan Kawasan Strategis Kota Palu yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Tondo-Talise; dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Tua di Kecamatan Palu Barat.

Kawasan Tondo-Talise rencananya diarahkan sebagai Kawasan *New Town* Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Rencana Lokasi Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo dan Talise dengan jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di Kota Palu;

2. Sebagaimana rencana pada poin a, telah didukung dengan rencana struktur ruang, yaitu pada Kelurahan Tondo dan Talise yang direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan fungsi utama sebagai *Central Business District* skala kota hingga regional dan *Civic Center* skala kota; dan
3. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu, Kecamatan Mantikulore, khususnya Kelurahan Tondo merupakan lokasi tertinggi kedua setelah Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus) yang perkembangan wilayahnya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana strategis kota yang memicu wilayah itu untuk berkembang, seperti ketersediaan beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Tadulako (Negeri), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan lahan kosong yang luas untuk permukiman, akses Jalan Lingkar Luar, Jalan Lingkar Dalam, Jalan Arteri Primer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor Primer K2.

2.1.3 Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana Alam

Wilayah Kota Palu memiliki berbagai potensi kerawanan bencana yang mencakup kerawanan bencana gempa, kerawanan bencana tsunami, kerawanan bencana sedimen (longsor), kerawanan bencana banjir, kerawanan bencana likuifaksi (Kementerian ATR/BPN, 2018). Kondisi ini tidak terlepas dari karakter fisik alam yang dilewati oleh sesar aktif dan juga karakter batuan yang berupa batuan endapan yang mengandung pasir dengan ikatan yang lemah serta muka air tanah dangkal. Selain itu karakter morfologi kawasan yang berupa perbukitan dengan lereng curam dan pendek memiliki potensi besar menyebabkan bencana banjir dan longsor (sedimen).

2.1.3.1 Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi yang potensial terjadi di Kota Palu adalah jenis gempa bumi tektonik, yaitu diakibatkan oleh pergeseran didalam bumi. Magnitude gempa bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah hingga dalam. Apabila gempa bumi memiliki magnitude besar dan memiliki kedalaman dangkal dapat menimbulkan bencana alam yang sangat merugikan. Aktivitas gempa bumi di Kota Palu dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro dan Patahan Pasternoster.

Jalur gempa sangat berkaitan dengan jalur patahan. Kota Palu dilalui/dipengaruhi oleh tiga jalur patahan yang saling sejajar berarah barat laut-tenggara, yaitu:

1. Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur perbukitan;
2. Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu, melewati Tondo, Talise, Biromaru, Bora dan memanjang ke arah Palolo; dan
3. Patahan vertikal di sebelah barat dengan jalur patahan relatif memanjang dari tepi pantai Kabonga melewati Loli, Buluri, Watusampu, Balane dan selanjutnya ke selatan yang kemudian akan bersambung dengan patahan Matano.

Ketiga patahan tersebut secara regional merupakan akibat gravitasi dari proses patahan geser Palu-Koro. Berdasarkan letak dan orientasi garis patahan tersebut maka wilayah yang sangat dekat dengan jalur patahan dan rawan kerusakan akibat gempa adalah Watusampu, Buluri, Silae, Kabonena, Donggala Kodi dan Duyu.

Berdasarkan data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah yang terasa di Kota Palu, yakni:

1. Tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. Tanggal 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. Tanggal 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu;
5. Tanggal 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;
6. Tanggal 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong; dan
7. Tanggal 28 September 2018, gempa berkekuatan 7,4 SR terjadi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Data kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut:

Tabel 2.14 Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah (September-Oktober 2018)

o	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
1	22-Oct-18 23:07:49 WIB	-1.63	120.18	5.2	10 Km	42 km Tenggara Sigi
2	09-Oct-18 04:15:47 WIB	-0.89	119.93	5.2	10 Km	5 km Timur Laut Palu
3	02-Oct-18 11:59:26 WIB	-1.59	120.2	5.3	10 Km	41 km Tenggara Sigi
4	02-Oct-18 06:46:4	-0.57	119.87	5.3	10 Km	16 km Tenggara Donggala

o	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
	1 WIB					
	02-Oct-18					
5	00:39:0	-0.55	119.87	5.0	11 Km	14 km Tenggara Donggala
	2 WIB					
	01-Oct-18					
6	12:43:3	0.06	119.55	5.5	10 Km	62 km Barat Laut Donggala
	5 WIB					
	30-Sep-18					
7	21:38:4	-1.18	120.1	5.1	10 Km	33 km Timur Laut Sigi
	4 WIB					
	29-Sep-18					
8	17:30:2	-1.43	120.21	5.1	10 Km	36 km Tenggara Sigi
	0 WIB					
	29-Sep-18					
9	14:40:1	-1.85	120.57	5.1	102 Km	54 km Barat Daya Poso
	5 WIB					
	29-Sep-18					
10	09:32:5	-1.49	120.04	5.4	10 Km	21 km Tenggara Sigi
	2 WIB					
	29-Sep-18					
11	04:24:0	-1.52	120.16	5.5	10 Km	34 km Tenggara Sigi
	2 WIB					
	28-Sep-18					
12	21:26:0	0.03	119.54	5.4	10 Km	60 km Barat Laut Donggala
	1 WIB					
	28-Sep-18					
13	20:35:3	0.15	119.62	5.8	10 Km	68 km Barat Laut Donggala
	0 WIB					
	28-Sep-18					50 km Tenggara
14	19:27:3	-0.49	120.28	5.0	10 Km	Donggala
	9 WIB					
	28-Sep-18					
15	18:06:5	-1.56	119.95	5.4	10 Km	18 km Tenggara Sigi
	2 WIB					

o	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
16	28-Sep-18 17:50:28 WIB	-0.76	120.04	5.9	10 Km	23 km Timur Laut Palu
17	28-Sep-18 17:47:45 WIB	-0.46	119.91	5.0	10 Km	9 km Tenggara Donggala
18	28-Sep-18 17:39:05 WIB	-0.54	119.86	5.5	11 Km	13 km Tenggara Donggala
19	28-Sep-18 17:02:45 WIB	-0.2	119.89	7.4	11 Km	25 km Timur Laut Donggala
20	28-Sep-18 17:25:07 WIB	-0.93	119.99	5.9	10 Km	12 km Tenggara Palu
21	28-Sep-18 17:14:25 WIB	0.09	119.94	6.1	10 Km	58 km Timur Laut Donggala

Sumber: Pusdatin Humas BNPB, 2018

Informasi sebaran peruntukan ruang daerah rawan gempa berdasarkan peta patahan di sekitar Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.

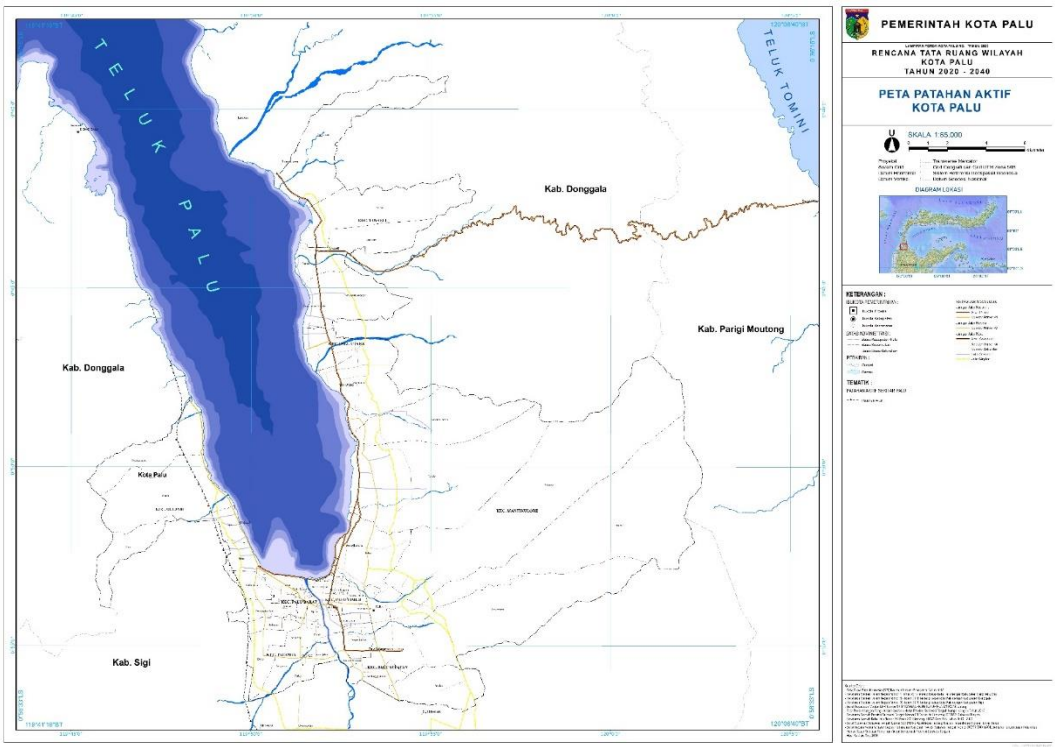

Gambar 2.7 Peta Patahan Aktif di Sekitar Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Dalam rangka memetakan kerentanan bencana seismik, Pemerintah Kota Palu dan BMKG melakukan kegiatan mikrozonasi pasca gempa dan tsunami di Palu. Berdasakan pada hasil kajian mikrozonasi tersebut ternyata terdapat banyak wilayah Kota Palu yang memiliki kerentanan seismik yang tinggi, yang apabila terjadi akan menyebabkan deformasi tanah dan kerusakan struktur pada bangunan diatasnya. Tingginya kerentanan seismik pada wilayah Kota Palu tidak terlepas dari kondisi batuan yang merupakan endapan alluvium muda yang bersifat lunak. Gambaran lebih rinci dari hasil kajian mikrozonasi untuk mengukur kerentanan seismik di Kota Palu dapat dilihat pada gambar berikut.

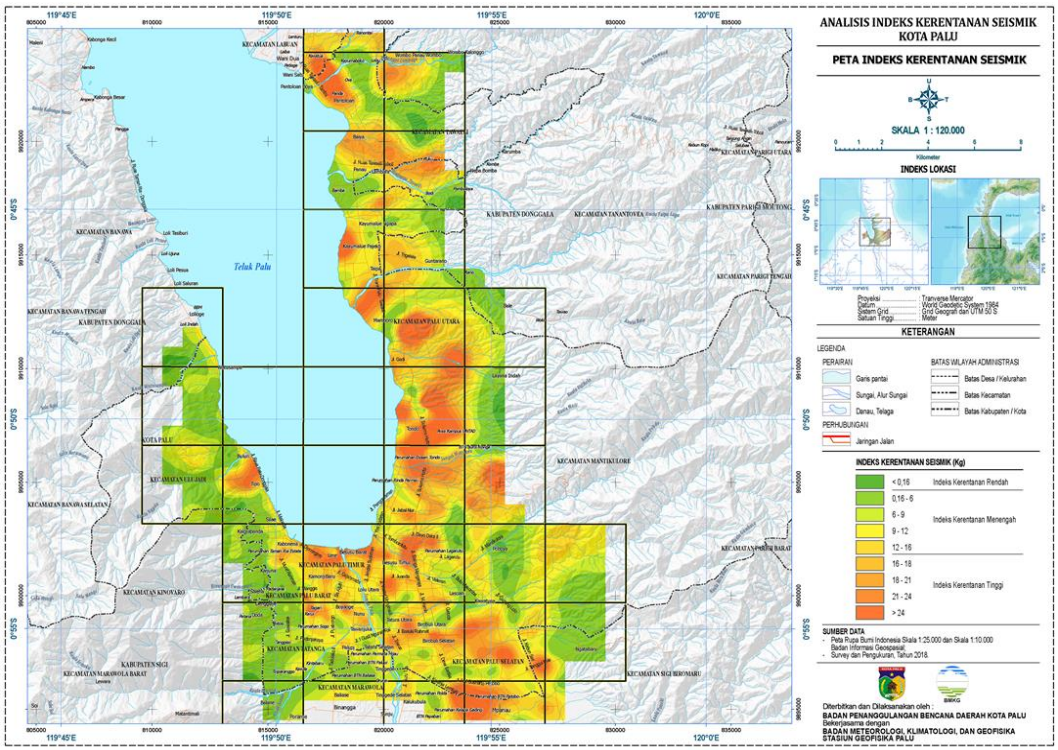

Gambar 2.8 Indeks Kerentanan Seismik Kota Palu
Sumber: BPBD Kota Palu dan BMKG, 2018

Berdasarkan pada hasil kajian mikrozonasi terlihat bahwa Wilayah Palu bagian utara yaitu Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, serta wilayah selatan Palu memiliki tingkat kerentanan seismik yang paling dominan. Kondisi kerentanan seismik ini juga bersinggunan dengan kerawanan bencana likuifaksi di bagian selatan Kota Palu.

Menyikapi kondisi ini maka kehati-hatian dalam alokasi ruang dan pengaturan struktur bangunan perlu menjadi perhatian serius dalam penataan ruang di Kota Palu. Apabila kondisi tersebut tidak diperhatikan bukan tidak mungkin potensi kerusakan bangunan akan terjadi apabila ada faktor pemicu, yaitu gempa bumi.

2.1.3.2 Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami

Zone patahan Palu-Koro memicu gempa dangkal yang menghasilkan tsunami dengan kekuatan konsisten dengan kekuatan gempa. Sedangkan zone patahan Pasternoster menghasilkan gempa dengan kekuatan tsunami yang lebih besar daripada kekuatan gempa. Hal ini disebabkan oleh adalah longsoran bawah laut akibat gempa.

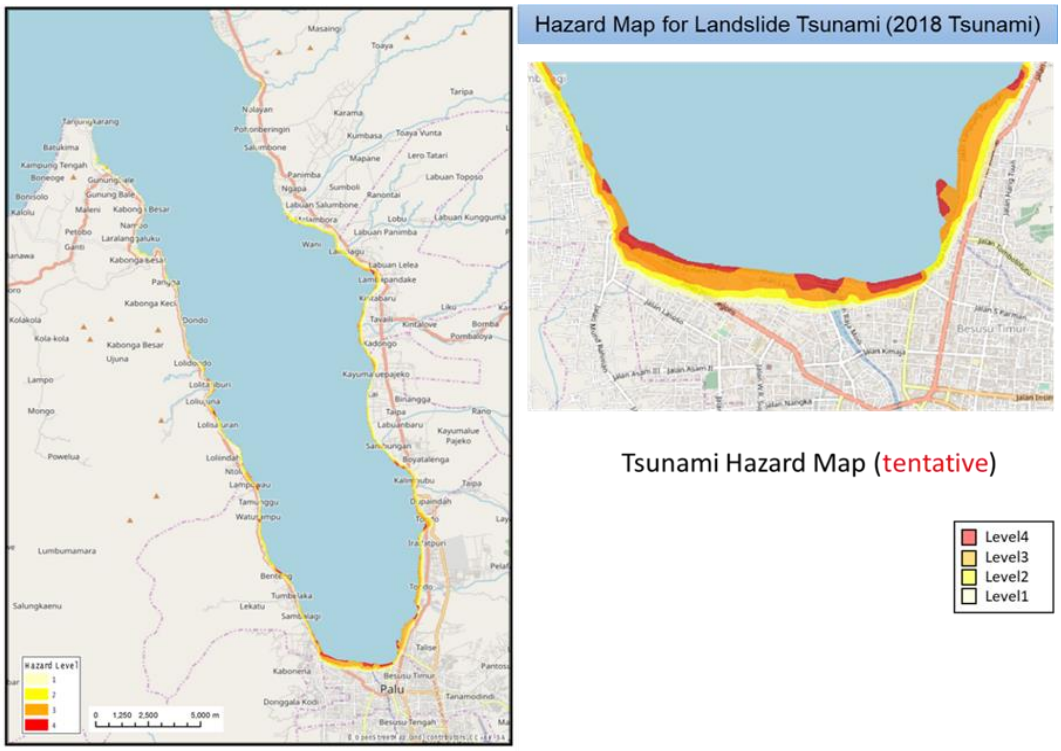

Gambar 2.9 Peta Potensi Tsunami di Kota Palu
Sumber: JICA-Status April 2019

Berdasarkan pada hasil kajian tersebut terlihat jelas bahwa ruang-ruang ekonomi pada pesisir Kota Palu memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Sebagian besar wilayah Lere dan Besusu Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tsunami paling tinggi di pesisir Kota Palu, disatu sisi wilayah ini

merupakan salah satu ruang dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi di Kota Palu sehingga pendekatan untuk mitigasi bencana tsunami mutlak diperlukan dan tidak mungkin melakukan relokasi atas sistem aktivitas ekonomi yang terdapat di dua kelurahan tersebut.

Salah satu dampak dari bencana tsunami pada wilayah pesisir adalah hancurnya Jembatan Palu IV dan juga hilangnya daratan akibat tergerus gelombang tsunami (lihat gambar).

Gambar 2.10 Kerusakan Pantai Akibat Terjangan Tsunami pada Muara Sungai Palu
Sumber: Google Earth, diakses April 2019

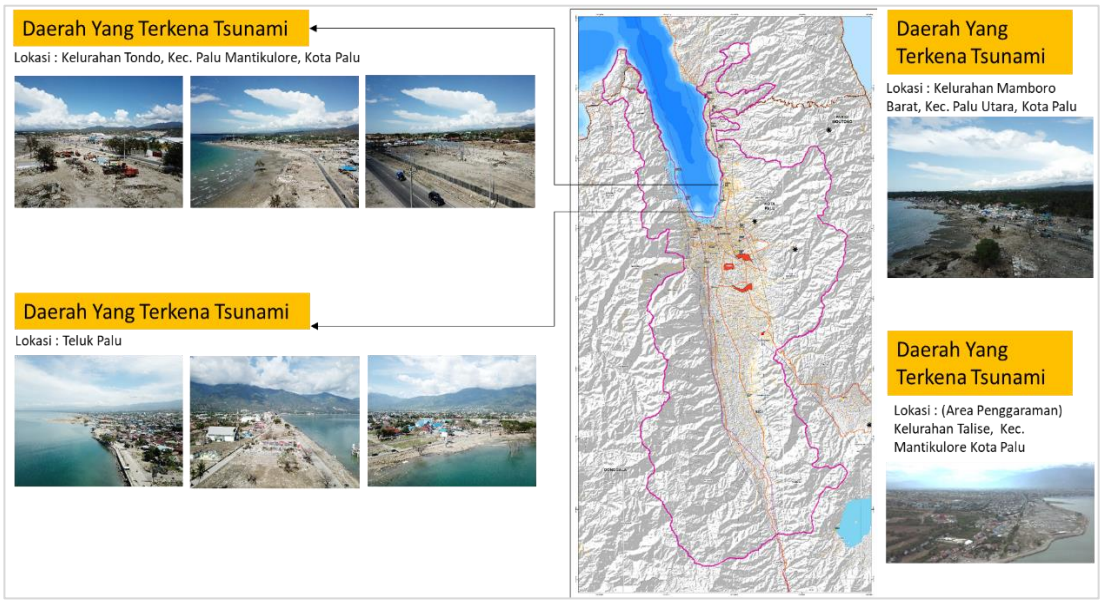

Gambar 2.11 Kerusakan Kawasan Pesisir Akibat Tsunami
Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu 2021-2041

2.1.3.3 Kawasan Rawan Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Kota Palu dan sekitarnya pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi. Wilayah Kelurahan Balaroa dan Petobo di Kota Palu mengalami fenomena likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesan di dua wilayah tersebut. Likuifaksi disebabkan oleh hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

Jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit menunjukkan data indikatif yang perlu dilakukan verikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak.

Likuifaksi di Wilayah Kelurahan Balaroa, Palu

Kelurahan Balaroa merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Meski tidak terdampak Tsunami, namun hampir seluruh wilayah di Kelurahan Balaroa termasuk Perumnas Balaroa terkubur oleh tanah yang mengalami likuifaksi atau *ambles* yang diakibatkan oleh gempa besar yang terjadi. Identifikasi wilayah terdampak yang dilakukan oleh LAPAN dan mitra terkait seperti OSM yang menggunakan citra satelit sebelum dan setelah bencana diperoleh informasi bahwa luas wilayah terdampak di Kelurahan Balaroa adalah 51,34 Ha. Sedangkan bangunan yang berada di wilayah terdampak Likuifaksi sebelum bencana yang teridentifikasi melalui citra satelit sejumlah 1.364 bangunan rusak, dan 263 bangunan diperkirakan rusak, sehingga total bangunan di wilayah terpapar sejumlah 1.627 bangunan.

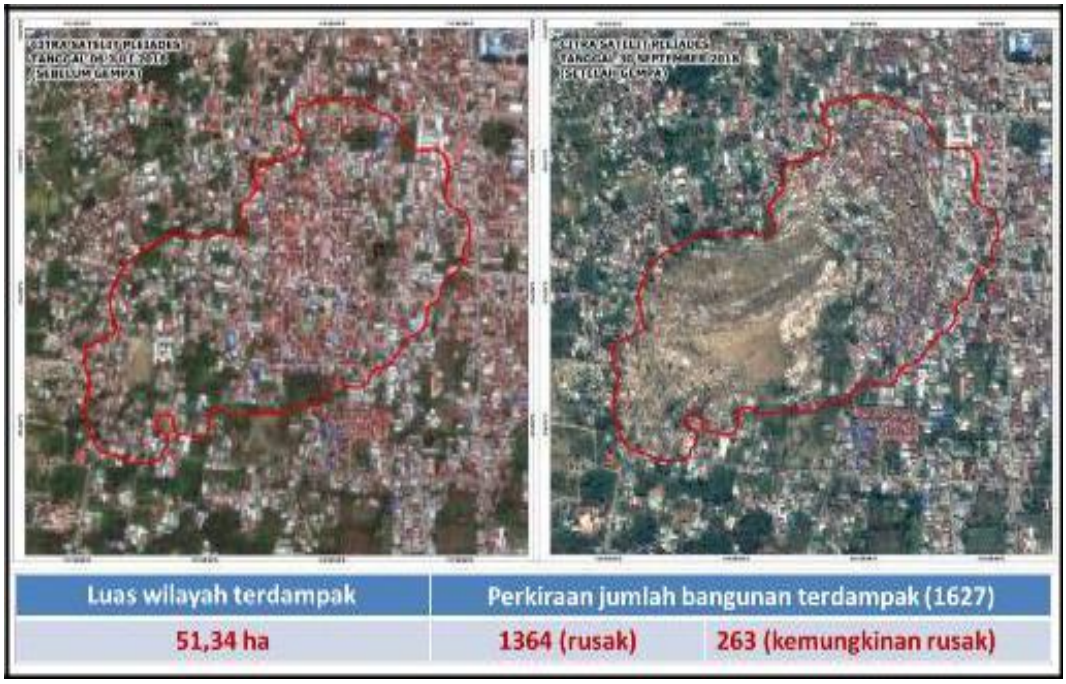

Luas wilayah terdampak	Perkiraan jumlah bangunan terdampak (1627)	
51,34 ha	1364 (rusak)	263 (kemungkinan rusak)

Gambar 2.12 Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi di Balaroa, Palu Teridentifikasi melalui Citra Satelit

Sumber: LAPAN Tahun 2018

Likuifaksi di Wilayah Kelurahan Petobo, Palu

Kelurahan Petobo merupakan salah satu dari dua wilayah di Kota Palu yang terdampak bencana likuifaksi cukup parah selain Kelurahan Balaroa. Berdasarkan pengamatan dan hasil interpretasi yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa total wilayah terdampak Likuifaksi di Kelurahan Petobo adalah 175,64 Ha, sedangkan total bangunan terpapar adalah 2.283 bangunan, dimana 2.059 bangunan rusak, sedangkan 224 bangunan lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang "kemungkinan rusak".

Sebaran wilayah terdampak Likuifasi beserta perkiraan jumlah bangunan yang terpapar secara spasial di Kelurahan Petobo tertera pada Gambar 2.13 berikut.

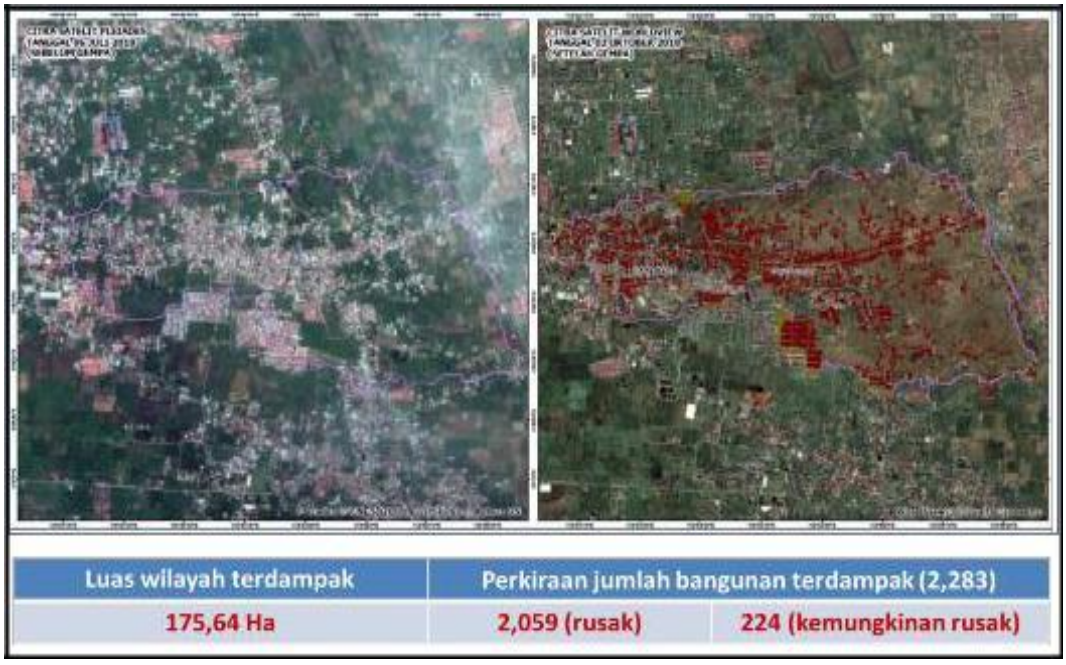

Luas wilayah terdampak	Perkiraan jumlah bangunan terdampak (2,283)	
175,64 Ha	2,059 (rusak)	224 (kemungkinan rusak)

Gambar 2.13 Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi Di Petobo, Palu, Teridentifikasi melalui Citra Satelit

Sumber: LAPAN, 2018

Kondisi kebencanaan ini tentu harus disikapi secara serius dalam penataan ruang di Kota Palu. Daerah dengan potensi likuifaksi tinggi tentu harus dihindari sebagai kawasan budidaya permukiman. Daerah dengan potensi likuifaksi rendah masih dimungkinkan untuk pengembangan permukiman dengan pengaturan terhadap muka air tanah dangkal.

2.1.3.4 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan gempa. Agen utamanya adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.

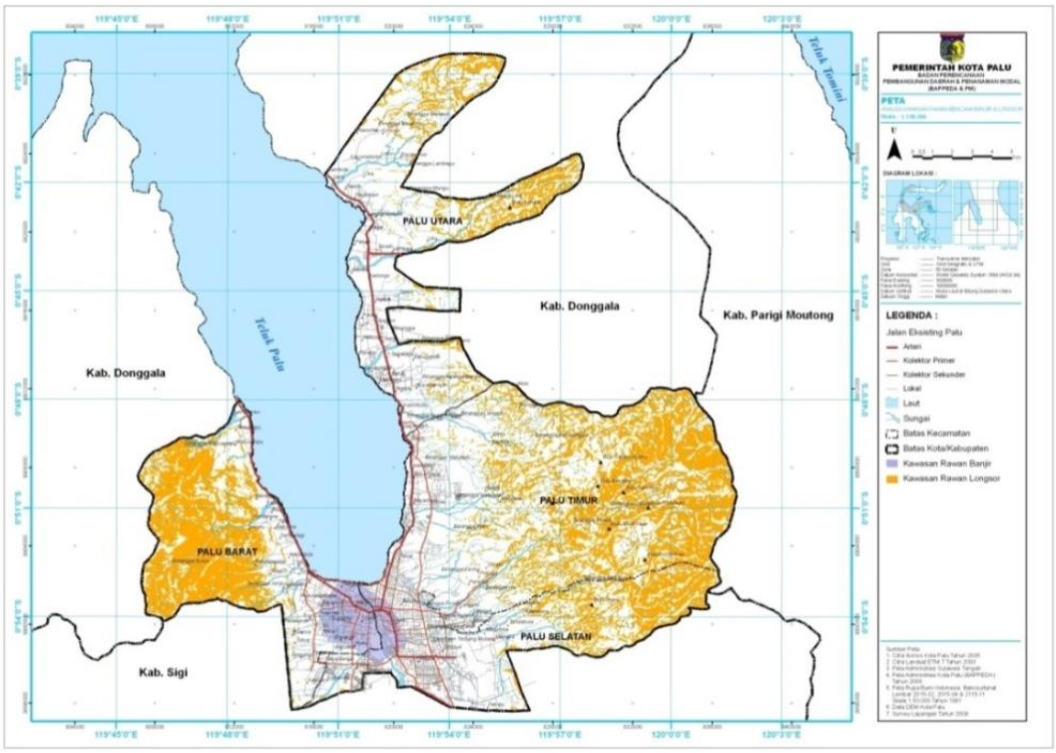

Gambar 2.14 Peta Analisa Rawan Longsor di Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu, Tahun 2010

Wilayah di Kota Palu yang teridentifikasi rawan longsor adalah wilayah sebelah barat Silae, Kabonena dan Donggala Kodi, hulu sungai Watutela, dan tebing bukit di Poboya. Pengamatan di wilayah bantaran sungai menunjukkan kondisi rawan gerusan tebing sungai di Sungai Palayua, Sungai Watutela, dan Sungai Poboya. Gerusan pada tebing Sungai Poboya ke arah Talise bahkan mengancam struktur jalan dan jembatan dan kawasan perumahan pada bantaran sungai.

2.1.3.5 Kawasan Rawan Banjir

Kota Palu mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana banjir. Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat berpengaruh, termasuk di antaranya perbedaan tinggi dasar sungai dan tanah setempat yang relatif kecil. Karakteristik banjir di Kota Palu berupa banjir bandang dengan

periode genangan singkat. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi permukaan lahan tandus serta topografi wilayah yang memiliki kelerengan. Tiga arah aliran utama sungai serta karakteristik banjir di Kota Palu adalah:

1. Sungai yang berhulu di timur berarah timur-barat bermuara di Teluk Palu, secara topografi berpotensi banjir dengan genangan yang relatif kecil. Adanya perbedaan tinggi dasar sungai dan tanah yang cukup besar maka dapat menimbulkan banjir debris yang membawa sedimentasi material yang cukup besar. Adapun sungai yang berhulu di timur dengan arah timur-barat adalah Sungai Tawaeli (Kelurahan Lambara dan Kelurahan Panau), Sungai Taipa (Kelurahan Taipa), Sungai Layana (Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Layana Indah), Sungai Watutela (Kelurahan Tondo) dan Sungai Pondo (Kelurahan Poboya, Lasoani, Tanamodindi, dan Talise).

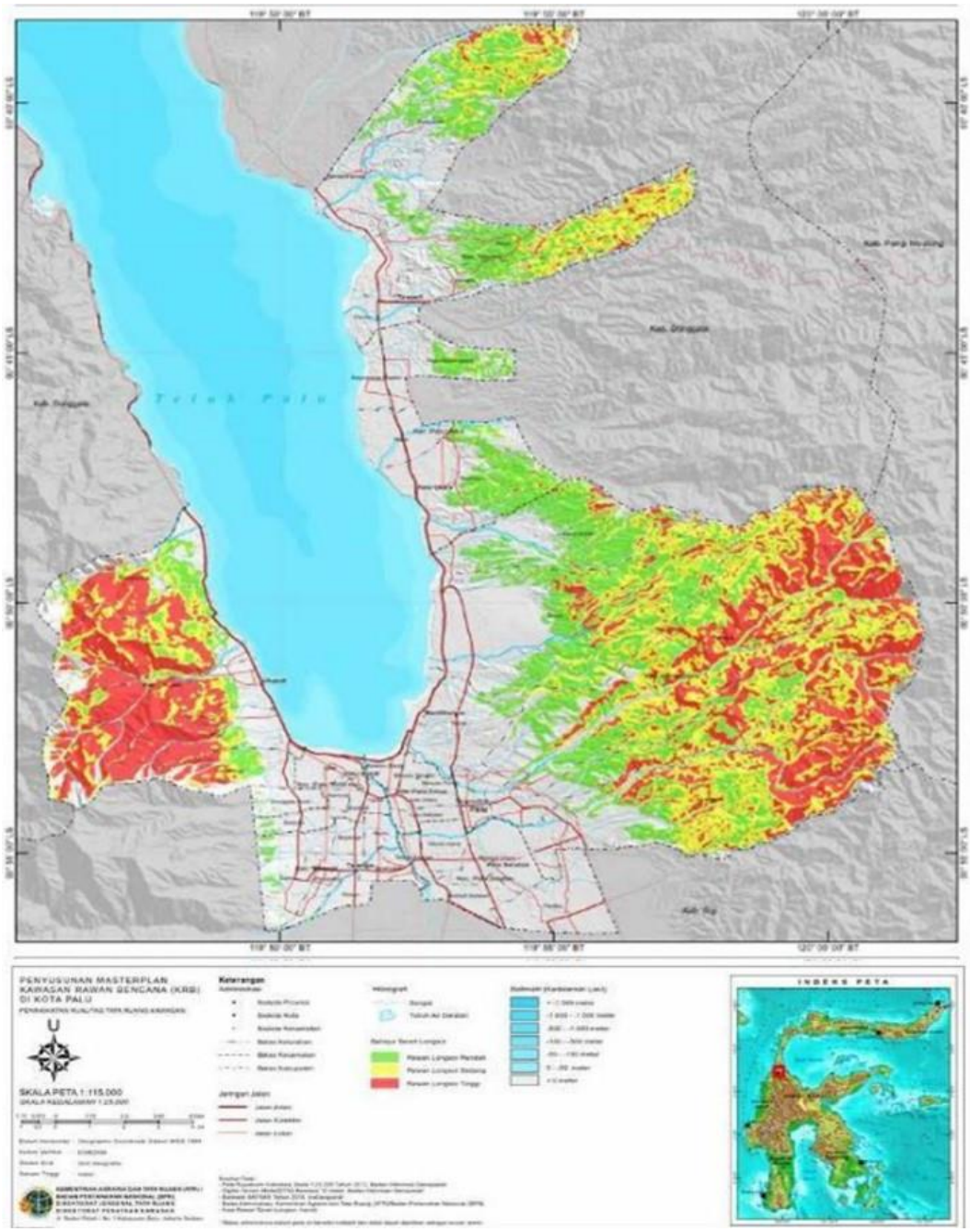

Gambar 2.15 Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Palu
Sumber: Masterplan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Kota Palu, 2018

2. Sungai yang berhulu di barat berarah barat-timur bermuara di Teluk Palu, secara topografi berpotensi banjir dengan genangan yang relatif kecil tetapi mengingat adanya perbedaan tinggi dasar sungai dan tanah yang cukup besar maka dapat

menimbulkan banjir debris yang membawa sedimentasi material yang cukup besar pula. Adapun sungai yang berhulu di barat dengan arah barat-timur adalah Sungai Uwenumpu, Sungai Kalora (Kelurahan Donggala Kodi, Kabonena, Silae, dan Tipo), Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Buluri).

3. Sungai yang berhulu di barat, timur, dan selatan menyatu di Sungai Palu. Sungai ini sangat berpotensi menimbulkan banjir genangan karena gradien kelerengan yang rendah serta adanya kawasan hunian yang terletak pada lokasi yang memiliki ketinggian mendekati elevasi bantaran sungai. Kawasan tersebut terdapat di Kecamatan Palu Barat (Kelurahan Nunu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere), Kecamatan Palu Selatan (Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan), Kecamatan Palu Timur (Kelurahan Besusu Barat).

2.1.3.6 Proyeksi Perubahan Iklim Tingkat Resiko Bencana dan Indeks Ketangguhan Kota Palu terhadap Bencana

Fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu. Sehubungan dengan fenomena tersebut, pusat Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggunakan pemodelan iklim regional dan pemodelan iklim CORDEX-SEA untuk menghasilkan peta proyeksi iklim 2032-2040 di Sulawesi, termasuk Kota Palu.

Data disajikan dalam bentuk peta perubahan dari dua periode yang dibandingkan, yakni hasil simulasi historis model (2006-2014) dengan periode proyeksi dengan skenario kenaikan gas rumah kaca dalam jangka waktu *near future* (2032-2040).

Peta proyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum periode 2032-2040 menunjukkan bahwa untuk daerah Kota Palu pada Periode 2032-2040 dapat terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum dapat mencapai 2.25-2.5^{o}C. Peta proyeksi curah hujan musiman di Sulawesi menunjukkan bahwa pada periode 2032-2040 dapat terjadi pengurangan curah hujan hingga 21 - 30% di Kota Palu. Sementara itu, peta proyeksi perubahan hari tanpa hujan musiman di Sulawesi menunjukkan bahwa pada periode yang sama, jumlah Hari Tanpa Hujan dan *Consecutive Dry Days* (Jumlah Hari Kering Beruntun) di area Kota Palu diproyeksikan akan bertambah hingga lebih dari 4 hari.

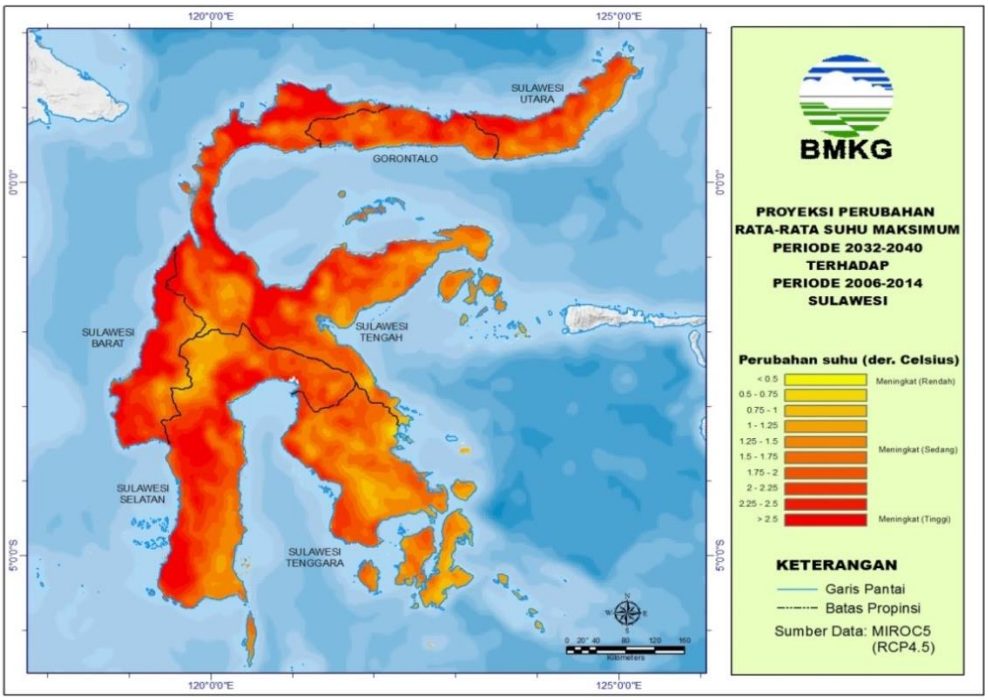

Gambar 2.16 Peta Proyeksi Perubahan Rata-Rata Suhu Maksimum Periode 2032-2040 di Sulawesi

Sumber: BMKG

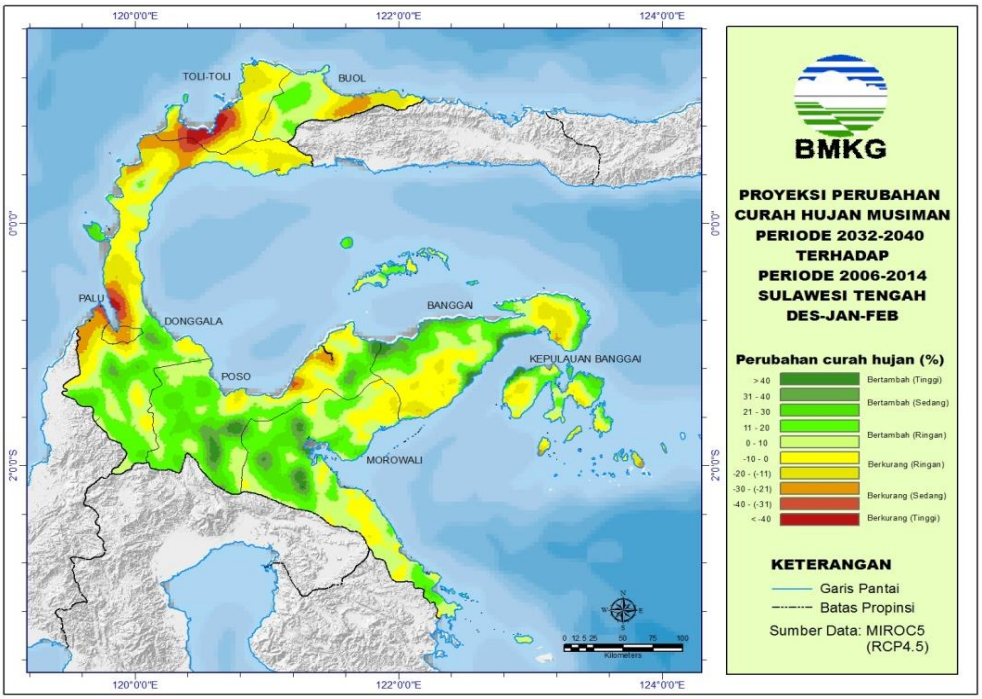

Gambar 2.17 Peta Proyeksi Curah Hujan Musiman Periode 2032-2040 di Sulawesi

Sumber: BMKG

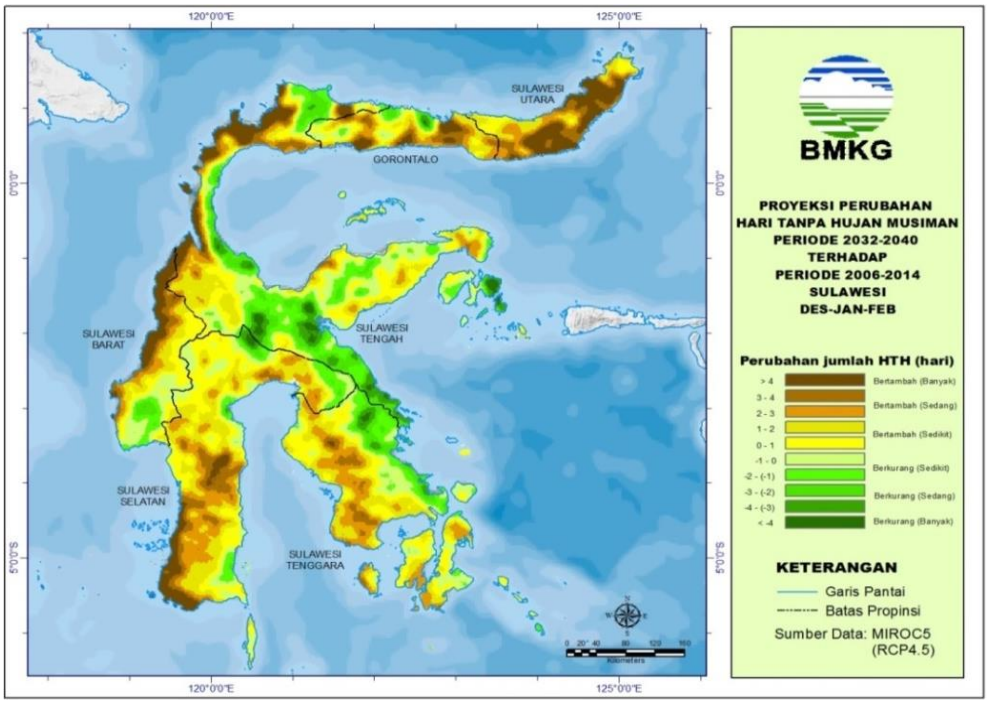

Gambar 2.18 Peta Proyeksi Perubahan Hari Tanpa Hujan Musiman Periode 2032-2040 di Sulawesi

Sumber: BMKG

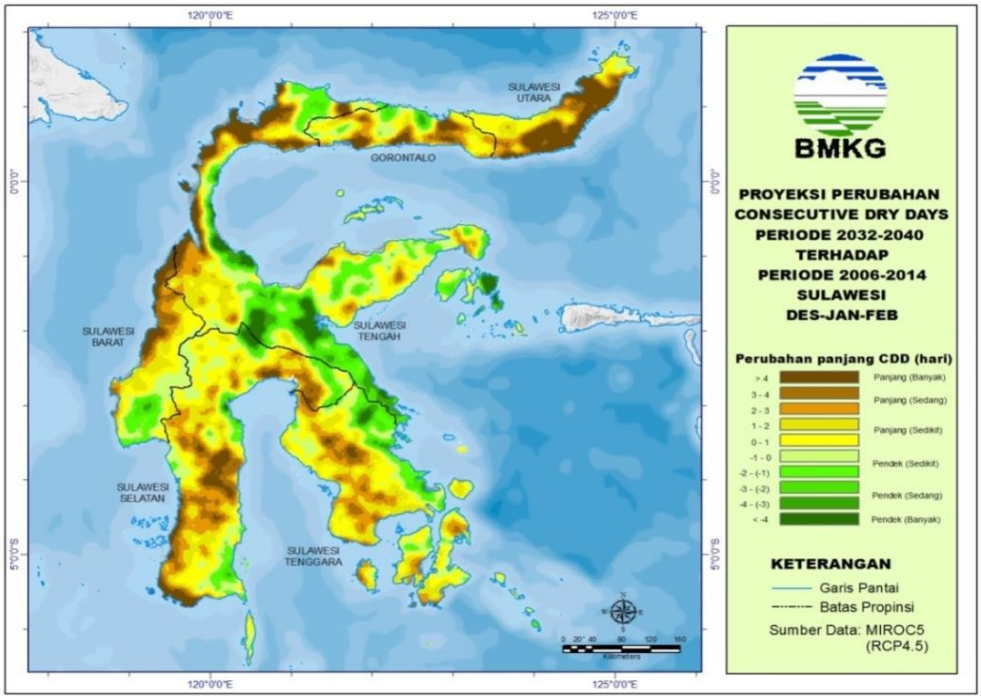

Gambar 2.19 Peta Proyeksi Perubahan Hari Kering Beruntun Periode 2032-2040 di Sulawesi

Sumber: BMKG

Fenomena pemanasan global berdampak pada naiknya permukaan air laut yang dapat mengancam area pesisir termasuk Kota Palu yang memiliki 17 kelurahan di sepanjang Pantai Teluk Palu. Proyeksi mengenai berkurangnya curah hujan di Kota Palu, disertai dengan Hari Tanpa Hujan dan Hari Kering Beruntun yang diprediksi akan menjadi lebih panjang dapat memicu fenomena lain seperti kekeringan panjang dan cuaca ekstrim di area Kota Palu. Fenomena-fenomena tersebut, jika tidak terlebih dahulu diintervensi melalui upaya perencanaan pembangunan, dapat berpotensi menjadi penyebab mundurnya capaian pembangunan di Kota Palu.

Sehubungan dengan risiko bencana alam di Kota Palu, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Palu menempati posisi ke 150 per 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan skor 162.70 yang terkategori dalam kelas risiko tinggi. Sementara jika berdasarkan Indeks Risiko Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2015 - 2019, pada Tahun 2019 Kota Palu masuk dalam Kelas Risiko Tinggi, dengan skor 181.20 pada Tahun 2015 dan 2016, dan skor 162.70 dari Tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 2.15 Nilai Indeks Risiko Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Kelas Risiko 2019
1	Morowali Utara	177,20	173,15	177,20	177,20	177,20	Tinggi
2	Morowali	177,20	177,20	177,20	177,20	173,80	Tinggi
3	Banggai Kepulauan	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	Tinggi
4	Banggai	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	Tinggi

5	Banggai Laut	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	Tinggi
6	**Kota Palu**	**181,20**	**181,20**	**162,70**	**162,70**	**162,70**	**Tinggi**
7	Toli-Toli	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20	Tinggi
8	Donggala	189,20	189,20	172,27	157,13	157,13	Tinggi
9	Buol	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	Tinggi
10	Tojo Una-Una	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	Sedang
11	Poso	172,40	127,52	125,00	132,24	121,14	Sedang
12	Parigi Moutong	173,60	118,70	116,48	108,39	108,39	Sedang
13	Sigi	72,00	50,22	49,79	52,16	48,13	Sedang
Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalama perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan							

Tingginya skor indeks risiko bencana di Kota Palu perlu mendapatkan perhatian. Skor indeks risiko yang relatif konstan menunjukkan kurangnya keterlibatan pembangunan dalam konteks pengurangan risiko bencana. Sebagai wilayah yang rawan dengan beberapa jenis bencana (*multi-hazard*), pembangunan di Kota Palu sepatutnya bisa selaras dengan upaya Kota Palu untuk pulih dari bencana yang telah terjadi sebelumnya, sekaligus untuk meningkatkan ketangguhan Kota Palu dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi di masa mendatang.

Skor Ketangguhan Kota Palu terhadap bencana tersebut salah satunya dapat diukur melalui Langkah Mendasar untuk Membangun Kota Tangguh Bencana yang dirilis oleh UNDDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*) serta adendum untuk kesehatan masyarakat. Berdasarkan penilaian tersebut, Kota Palu memperoleh skor 263 dari skor tertinggi 590. Sedangkan hasil penilaian Kesehatan Masyarakat diperoleh skor 70 dari skor tertinggi 120. Berdasarkan penilaian, Kota Palu telah cukup baik dalam memenuhi pengorganisasian untuk ketangguhan bencana (Langkah Mendasar 1), identifikasi, memahami dan menggunakan skenario risiko saat ini dan

mendatang (Langkah Mendasar 2), serta mempercepat pemulihan dan membangun kembali lebih baik (Langkah Mendasar 10).

Sementara itu, terdapat beberapa langkah mendasar lain yang masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ketangguhan Kota Palu dalam menghadapi bencana, antara lain:

a. pemeliharaan kawasan penyangga dan jasa-jasa ekosistem, terutama pada bagian kesehatan ekosistem dan identifikasi permasalahan lingkungan lintas batas (Langkah Mendasar 5);
b. penguatan kapasitas institusi untuk ketangguhan bencana, terutama dalam identifikasi risiko, mitigasi, perencanaan, respon, hubungan dengan sektor swasta, ketersediaan data kondisi ketangguhan bencana, serta pelatihan untuk pegawai atau praktisi (Langkah Mendasar 6);
c. pemahaman dan peningkatan kapasitas sosial untuk ketangguhan bencana, terutama dalam hubungan sosial dan kohesi lingkungan masyarakat, keterlibatan kelompok rentan masyarakat, pelibatan masyarakat, dan kurangnya data mengenai pemahaman skenario risiko, langkah kunci, dan persiapan menghadapi bencana di masyarakat (Langkah Mendasar 7);
d. peningkatan ketangguhan infrastruktur, khususnya mengenai risiko hilangnya hari dan biaya pelayanan dari aset penting di Kota Palu, keamanan dan keandalan energi gas, riwayat dan data kesehatan, ketersediaan pelayanan kesehatan darurat, keamanan fasilitas pendidikan, serta jaminan kesinambungan sistem data yang penting di pemerintahan (Langkah Mendasar 8), dan
e. usaha untuk memastikan respon bencana yang efektif, terutama pada bagian keberadaan, efektivitas dan jangkauan

sistem peringatan dini, belum diperbaharuinya rencana berdasarkan skenario bencana 'paling mungkin' dan 'paling buruk', penjabaran tugas penanggap bencana, kebutuhan personil beserta proyeksi dan ketersediaannya, keterpaduan dengan kota/provinsi tetangga pada prosedur penting, koordinasi pemulihan pasca bencana, serta latihan atau simulasi yang melibatkan masyarakat maupun praktisi (Langkah Mendasar 9).

Secara umum, jumlah kejadian bencana menurut kecamatan yang terjadi di Kota Palu Tahun 2016–2019 secara rinci diuraikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Bencana di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	2016				2017				2018				2019				2020			
		Banjir	Kebakaran	Angin Topan	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Banjir	Banjir Bandang	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi
1	Palu Barat	-	17	-	1	2	-	-	-	2	2	1	9	9	-	-	9	4	-	-	7
2	Tatanga	-	2	-	1	1	-	-	-	-	6	-	7	-	-	-	9	1	-	-	7
3	Ulujadi	3	3	4	1	-	-	-	-	-	12	-	9	-	-	-	9	1	2	3	7
4	Palu Selatan	-	32	1	1	2	-	-	-	1	7	-	9	2	-	-	9	3	1	1	7
5	Palu Timur	-	25	-	1	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	1	-	-	7
6	Mantikulore	8	18	-	1	-	-	-	-	-	2	-	9	-	-	-	9	3	3	-	7
7	Palu Utara	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	1	-	-	7
8	Tawaeli	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	9	-	-	-	9	2	1	-	7

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2016-2021

2.2 Aspek Demografi

Gambaran aspek demografi untuk Kota Palu antara lain dijelaskan melalui beberapa penjelasan, yaitu; perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.2.1 Perubahan Penduduk

Kota Palu dengan luas 395,06 km², didiami penduduk sebanyak 373.218 jiwa pada Tahun 2020 . Penduduk ini tersebar di 8 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mantikulore sebanyak 76.745 jiwa (20,56%) sedangkan Kecamatan Tawaeli memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 22.568 jiwa (6,05%).

Tabel 2.17 Distribusi Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

ecamatan	ki-laki	empuan	umlah	Jenis Kelamin
Palu Barat	23.425	23.010	46.435	101,8
Tatanga	26.471	26.109	52.580	101,4
Ulujadi	17.710	17.345	35.055	102,1
Palu Selatan	36.169	35.890	72.059	100,8
Palu Timur	21.411	21.907	43.318	97,7
Mantikulore	38.331	38.414	76.745	99,8
Palu Utara	12.316	12.142	24.458	101,4
Tawaeli	11.556	11.012	22.568	104,9
Kota Palu	**187.389**	**185.829**	**373.218**	**100,9**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 sebesar 373.218 jiwa, terdiri dari 187.389 jiwa

penduduk laki-laki dan 185.829 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Palu Tahun 2020 sebesar 100,9 %.

2.2.2 Komposisi dan Populasi Penduduk

2.2.2.1 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia di Kota Palu tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.18 Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Struktur Usia Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	19.132	18.330	37.462
2	5 - 9	16.980	16.258	33.238
3	10 - 14	15.654	14.410	30.064
4	15 - 19	15.389	15.015	30.404
5	20 - 24	17.402	17.802	35.204
6	25 - 29	17.579	17.703	35.282
7	30 - 34	16.661	16.064	32.725
8	35 - 39	14.181	13.825	28.006
9	40 - 44	12.853	12.719	25.572
10	45 - 49	11.072	11.566	22.638
11	50 - 54	9.821	10.265	20.086
12	55 - 59	7.970	8.178	16.148
13	60 - 64	5.715	5.810	11.525
14	65-69	3.744	3.779	7.523
15	70-74	1.920	2.241	4.161
16	75+	1.316	1.864	3.180
Total		**187.389**	**185.829**	**373.218**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu pada Tahun 2020 untuk kelompok umur di bawah 15 tahun sebesar 100.764 jiwa atau 26,99 %, kelompok umur 15-64 tahun (usia penduduk produktif) sebesar 257.590 jiwa atau 69,03 %, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 14.864 jiwa atau 3,98 %. Hal ini menunjukkan

bahwa penduduk Kota Palu didominasi oleh kelompok usia penduduk produktif.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif sebanyak 115.628 jiwa atau 30,97 % dengan penduduk usia produktif sebanyak 257.590 jiwa atau 69,03 %, dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Kota Palu pada Tahun 2020 yaitu sebesar 44,89 %, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 45 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

2.2.2.2 Populasi Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 944,71 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 5.618,42 jiwa/km^2, sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 371,11 jiwa/km^2.

Tabel 2.19 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020

Kecamatan	Luas Area (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase penduduk
Palu Barat	8,28	46.435	5.608,09	12,44
Tatanga	14,95	52.580	3.517,06	14,09
Ujujadi	40,25	35.055	870,93	9,39
Palu selatan	27,38	72.059	2.631,81	19,31
Palu Timur	7,71	43.318	5.618,42	11,61
Mantikulor	206,8	76.745	371,11	20,56

Kecamatan	Luas Area (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase penduduk
Palu Utara	29,94	24.458	816,90	6,55
Tawaeli	59,75	22.568	377,71	6,05
Kota Palu	**395,06**	**373.218**	**944,71**	**100**

Sumber: SIPD Tahun 2020 dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

2.3 Potensi Sumber Daya

Diatas telah dijelaskan mengenai penggunaan lahan di Kota Palu sehingga berdasarkan karakteristik tersebut dapat didentifikasi beberapa potensi sumber daya berdasarkan penggunaan lahan di Kota Palu antara lain sebagai berikut.

2.3.1 Kawasan Hutan

Kawasan hutan merupakan kawasan yang dipertahankan keberadaannya. Kawasan budidaya kehutanan di Kota Palu terdiri atas HL, HPT, APL dan KSA/KPA. Kawasan hutan terluas berada di Kecamatan Mantikulore dengan luas 18.807,33 Ha dan yang kecil berada di Kecamatan Palu Timur seluas 614,52 ha.

Tabel 2.20 Kawasan Hutan Perkecamatan di Kota Palu

No	Kecamatan	Jenis Hutan (Ha)				Luas (Ha)
		HL	HPT	APL	KSA/ KPA	
1	Palu Barat	-	-	728,19	-	728,19
2	Tatanga	-	-	1.955,71	-	1.955,71
3	Ulujadi	3.403,22	-	2.942,93	-	6.346,15
4	Palu Selatan	-	-	1.955,71	-	1.955,71
5	Palu Timur	-	-	614,52	-	614,52
6	Mantikulore	3.269,16	2.714,78	7.801,90	5.021,49	18.807,33
7	Palu Utara	-	1,15	3.010,23	-	3.011,38
8	Tawaeli	-	1727,79	4.359,22	-	6.087,01
Kota Palu		**6.672,38**	**4.443,72**	**23.368,41**	**5.021,49**	**39.506**

Sumber: Revisi RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.3.2 Kawasan Pariwisata

Di Kota Palu terdapat situs bersejarah yang dikelola pemerintah yang menjadi suatu tempat wisata. Adapun tempat wisata lainnya di bangun untuk kepentingan umum seperti taman rekreasi, wisata air, dan sebagainya.

Tabel 2.21 Kawasan Pariwisata di Kota Palu

Jenis	No	Kelurahan	Nama Situs	Pengelolaan
Gedung Bersejarah/ *Historic Buildings*	1	Lere	Sou Raja	Pemerintah
	2	Lolu Utara	Gedung Juang	Pemerintah
Tempat Spiritual/ *Spiritual Places*	1	Lere	Makam Datu Karama	Pemerintah
	2	Siranindi	Makam Guru Besar SIS Aljufri	Pemerintah
	3	Kabonena	Makam Puenjidi	Pemerintah
	4	Lasoani	Makam Dayo Mpoluku	Pemerintah
	5	Watusampu	Makam Mpu Pasu	Pemerintah
	6	Donggala Kodi	Sumur Kulu	Pemerintah
	7	Baru	Masjid Jami	Pemerintah
	8	Baru	Masjid Agung	Pemerintah
	9	Lere	Masjid Terapung	Pemerintah
	10	Siranindi	Masjid Al-Khairat	Pemerintah
Taman Rekreasi/ *Recreation Park*	1	Silae	Pantai Taman Ria	Pemerintah
	2	Talise	Pantai Talise	Pemerintah
	3	Pantoloan	Danau Sibili	Pemerintah
	4	Besusu Barat	Anjungan Teluk Palu	Pemerintah
	5	Donggala Kodi	Sate Mobil	Non Pemerintah
	6	Tondo	Citraland	Non Pemerintah
Wisata Tirta/ *Water Tourism*	1	Taipa	Taipa Beach	Non Pemerintah
	2	Tipo	Pantai Tumbelaka	Non Pemerintah
	3	Tipo	Amazing Beach	Non Pemerintah
	4	Birobuli	Graha Tirta	Non Pemerintah
	5	Birobuli	Millenium Water Park	Non Pemerintah
	6	Silae	Winners	Non Pemerintah
	7	Kabonena	Kolam Pemancingan	Non Pemerintah

Jenis	No	Kelurahan	Nama Situs	Pengelolaan
Lainnya (Bisa ditambahkan)	1	Siranindi	Museum Negeri Palu	Non Pemerintah
	2	Tipo	Cagar Alam	Non Pemerintah
	3	Lere	Palu Grand Mall	Non Pemerintah
	4	Lolu Selatan	Mall Tatura	Non Pemerintah

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu, 2021

2.3.3 Kawasan Industri

Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

2.3.3.1 Klasifikasi Industri

Jumlah perusahaan industri sesuai data yang diperoleh Tahun 2017 tercatat sebanyak 3.410 perusahaan yang terdiri dari: Industri Aneka 763 perusahaan, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia sebanyak 1.117 perusahaan, dan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sebanyak 1.530 perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan yang ada mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 18.203 orang.

Tabel 2.22 Banyaknya Industri Menurut Klasifikasi Industri

Klasifikasi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Aneka (IA)	702	717	734	748	763
Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Kimia	1.063	1.094	1.101	1.112	1.117
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK)	1.454	1.461	1.508	1.515	1.530
Jumlah	**3.219**	**3.272**	**3.343**	**3.375**	**3.410**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.3.3.2 Industri Rumah Tangga Menurut Kecamatan

Industri rumah tangga dan tenaga kerja Tahun 2017 tersebar di 8 Kecamatan Kota Palu. Industri rumah tangga terbanyak berada di kecamatan Tatanga dengan jumlah 51, sedangkan Industri rumah tangga terkecil berada di Kecamatan Palu Selatan dengan jumlah 22. Dan jumlah tenaga kerja industri rumah tangga terbanyak berada di kecamatan Tatanga dengan jumlah 255 tenaga kerja, sedangkan Industri rumah tangga terkecil berada di kecamatan Palu selatan dengan jumlah 90 tenaga kerja.

Tabel 2.23 Jumlah Industri Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan Kota Palu

No	Kecamatan	Industri Rumah Tangga	Tenaga Kerja
1	Palu Barat	23	129
2	Tatanga	51	255
3	Ulujadi	47	199
4	Palu Selatan	22	90
5	Palu Timur	36	161
6	Mantikulore	39	111
7	Palu Utara	29	147
8	Tawaeli	30	130
Jumlah		**277**	**1222**

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

2.3.4 Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014, Kota Palu ditetapkan menjadi salah satu kawasan strategis nasional, yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Hingga Tahun 2021, telah terdapat 32 tenant yang sudah memesan lokasi di KEK Palu.

Tabel 2.24 Daftar *Tenant* yang Telah Menempati Lokasi KEK Palu

No	Nama *Tenant*/Pelaku Usaha	Status	Jenis Produk
1	PT. ASBUTON JAYA ABADI	PMDN	Aspal Dingin dan RMA (Ready Mix Aspalt)
2	PT. HONG THAI INTERNATIONAL	PMA	Gum Rosin Dan Turpentine
3	PT. KAILI ROTAN INDUSTRI	PMDN	Industri Pengawetan Rotan,Bambu Dan Sejenisnya
4	PT. TATA KOKOH ABADI	PMDN	Keramik, Genteng Dan Bata Ringan
5	PT.SULAWESI GLOBAL KOMODITI	PMDN	Pergudangan Dan Penyimpanan
6	PT. WANGHONG NONFERROUS RECYCLING UTILIZATION	PMA	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
7	PT. GANDA PARADE ARTANA	PMDN	Jasa Bisnis Atau Jasa Konsultasi Konstruksi
8	PT. TRINITAN METALS AND MINERALS	PMDN	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
9	PT. SENTOSA UTAMA LESTASRI	PMDN	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung
10	PT. ALFA INDUSTRI MANDIRI	PMDN	Industri Daur Ulang Barang - Barang Bukan Logam
11	PT. AMRETA SEMBAGI ARUTALA	PMDN	Persewaan Mesin Lainnya Dan Peralatan
12	PT. KAYU ENERGI BARU INDONESIA	PMA	Industri Kayu Balsa
13	PT. INDOMANGAN INDUSTRI	PMA	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
14	PT.SARANA DWIMA JAYA	PMDN	Produksi Baja Ringan
15	PT.KEMITRAAN YASKUM BANGUN SEJAHTERA	PMDN	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
16	PT. GANDA PARADE SAMUDERA	PMDN	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa(Fee/Kontrak)
17	PT. PUTRA BARUS RAYA	PMDN	Penyewaan Alat Konstruksi Dan Operator
18	PT. SULAWESI CENTRAL COMODITY	PMDN	Perdagangan Distributor Yang Tidak Terafiliasi Dengan Produksi
19	PT. FREWIN TEKNOLOGI ASIA	PMDN	Industri Wood Pelet
20	PT. BHUMI MITRA NUSANTARA	PMDN	Pergudangan
21	PT. SINAR METALLURGY INDONESIA	PMA	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi

No	Nama *Tenant*/Pelaku Usaha	Status	Jenis Produk
22	PT. IWAVE TECHNOLOGY INOVATION	PMA	Industri Pembuatan Batu Baterai
23	PT. JAYA MINERALS METAL	PMA	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
24	PT. SYNERGI METAL MINERAL	PMA	Industri Pengolahan Lainnya
25	PT. NASANA MITRA SEJAHTERA	PMDN	Pembuatan Barang-Barang Dari Kayu, Pembuatan Lembaran Tipis Veneer(Lapisan), Plywood (Triplek), Barang-Barang Kayu Untuk Digunakan Konstruksi
26	PT. SINERGI MEGATAMA MANDIRI	PMA	Usaha Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata dan Ubin Yang Terbuat Dari Tanah Liat, Kapur ,Semen atau Kaca Untuk Bahan Konstruksi Seperti Genteng Press
27	PT. KEMITRAAN BANGUN PALU SEJAHTERA	PMDN	Penampungan dan Penyaluran Air Baku
28	PT. PANCA SENTOSA INVESTAMA	PMDN	Pengolahan rumput laut berkapasitas 80 ton
29	PT. WIRA SUKSES CEMERLANG	PMDN	Industri pengolahan dan pengawetan biota air dan lainnya
30	PT. MAKMUR JAYA	PMDN	Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruks
31	PT. TRIWIHASO PILAR SUKSES	PMDN	Perdagangan Genteng, Batu Bata,Ubin dan Sejenisnya
32	PT. SOFI AGRO INDUSTRIES	PMDN	Perdagangan Arang, Kopra, Minyak Kelapa, Kelapa Parut Kering dan Sari Kelapa Parut Kering

Sumber: Administrator KEK Palu, 2021

Adapun KEK Palu menempati lahan seluas 1.500 ha di Kecamatan Tawaeli. Sebagai kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri, KEK Palu terdiri dari tiga zona, yaitu zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor.

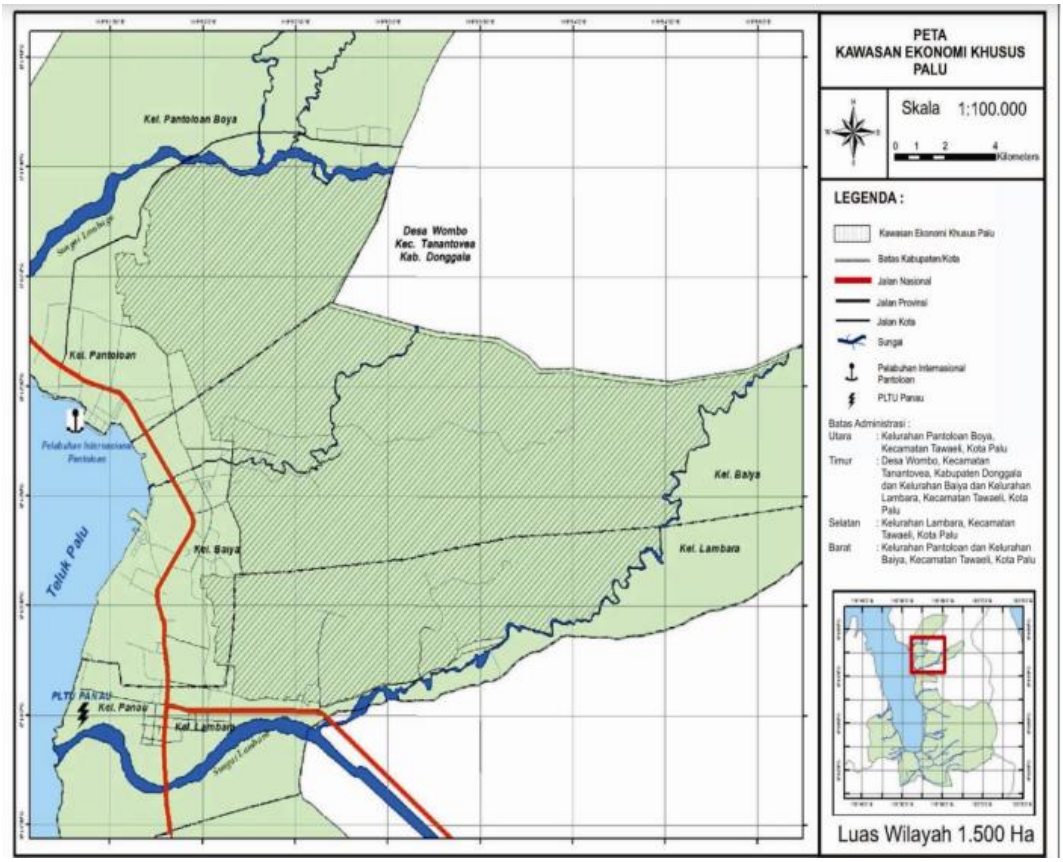

Gambar 2.20 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Palu

2.3.5 Potensi Pertambangan

2.3.5.1 Wilayah Pertambangan

Potensi pertambangan di Kota Palu telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No 3673 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi. Dalam Kepmen tersebut Kota Palu terdapat beberapa potensi wilayah pertambangan antara lain Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan, dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Tabel 2.25 Potensi Kawasan Pertambangan di Kota Palu

No	Kecamatan	Kawasan Pertambangan (Ha)	Luas (Ha)

		WPN	WUP Mineral Logam	WUP Mineral Bukan Logam/ Batuan	WPR	
1	Palu Barat	-	0,75	81,31	-	82,06
2	Tatanga	-	0,03	375,93	3,87	379,83
3	Ulujadi	-	3.182,69	1.505,84	-	4.688,53
4	Palu Selatan	-	-	10,84	-	10,84
5	Palu Timur	-	-	19,40	-	19,40
6	Mantikulore	5627,92	7.819,52	1103,16	-	14550,60
7	Palu Utara	-	57,77	679,15	-	736,92
8	Tawaeli	-	3.187,59	977,93	-	4.165,52
Kota Palu		**5.627,9**	**14.248,35**	**4.753,56**	**3,87**	**24.633,70**

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.3.5.2 Kawasan Pertambangan

Rencana kawasan Pertambangan Batuan di Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Utara.

Tabel 2.26 Rencana Kawasan Pertambangan Batuan di Kota Palu

No.	Kecamatan	Pertambangan Batuan
1	Palu Barat	-
2	Tatanga	15,33
3	Ulujadi	386,42
4	Palu Selatan	0,14
5	Palu Timur	0,83
6	Mantikulore	28,25
7	Palu Utara	22,29
8	Tawaeli	-
Kota Palu		**453,65**

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.3.6 Potensi Sungai

Aliran sungai di Kota Palu umumnya bersumber dari arah yang variatif yaitu dari selatan mengalir ke utara, dari barat ke timur, dari timur ke barat yang kesemuanya bermuara pada Teluk Palu. Sungai-sungai tersebut membentuk pola *subtrelis* dan

dendritik ditunjukkan oleh cabang anak-anak sungai, sedangkan pola *radier* ditemukan di daerah pegunungan.

Gambar 2.21 Sungai-Sungai yang Mengalir ke Sungai Palu

2.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Palu dijelaskan berdasarkan 3 (tiga) aspek pembentuk indikator kinerja, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

2.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil

jika pertumbuhan ekonomi yang dicapaai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepeminpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi,

angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2016 sampai dengan 2020 secara berturut-turut yaitu 5,50 %; 5,53 %; 5,00 %; 5,79 %; dan -4,54 %. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2019 tumbuh 19,63 %, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 59,43 %.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2015-2019, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran ditunjukkan melalui tabel 2.24 dan gambar 2.22 berikut.

Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah Tangga	10 023721	11 058747	12 304 194	13 756 768	14 747 206
Kons. Lembaga	331897	362 899	407 273	640 010	855 187

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Swasta Nirlaba					
Konsumsi Pemerintah	2 902303	3 037 643	3 234 131	3 307 127	3 589 814
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6 852272	7 415 752	7 843 743	8 767 765	9 752 713
Perubahan Inventori	248200	276 884	216 584	(232 053)	(80 491)
Ekspor Impor	(3 192 196)	(3 581 897)	(3 589 907)	(3 620 732)	(4 048 894)
PDRB	**17 166196**	**18 570 030**	**20 416 019**	**22 618 886**	**24 815 534**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun, 2021

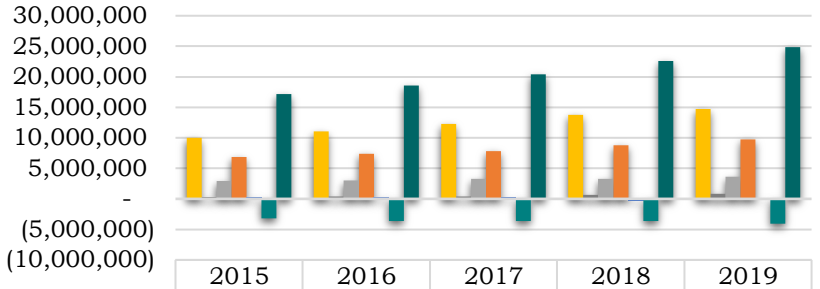

	2015	2016	2017	2018	2019
Komsumsi Rumah Tangga	10,023,721	11,058,747	12,304,194	13,756,768	14,747,206
Kons. Lembaga Swasta Nirlaba	331,897	362,899	407,273	640,010	855,187
Komsumsi Pemerintah	2,902,303	3,037,643	3,234,131	3,307,127	3,589,814
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,852,272	7,415,752	7,843,743	8,767,765	9,752,713
Perubahan Inventor	248,200	276,884	216,584	(232,053)	(80,491)
Ekspor Impor	(3,192,196	(3,581,897	(3,589,907	(3,620,732	(4,048,894
PDRB	17,166,196	18,570,030	20,416,019	22,618,886	24,815,534

Gambar 2.22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.27 dan gambar 2.22 menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan pertumbuhan tertinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu ADHB menurut jenis pengeluaran pada Tahun 2015-2019 secara berurutan terjadi pada konsumsi lembaga swasta nirlaba dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 28,08%, disusul oleh konsusmsi rumah tangga sebesar 10,15%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 9,25%,

ekspor impor sebesar 6,28%, konsumsi pemerintah sebesar 5,48%, dan perubahan inventori sebesar -70,67% . Kondisi ini mengakibatkan PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran lima tahun terakhir sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 9,66% tiap tahunnya.

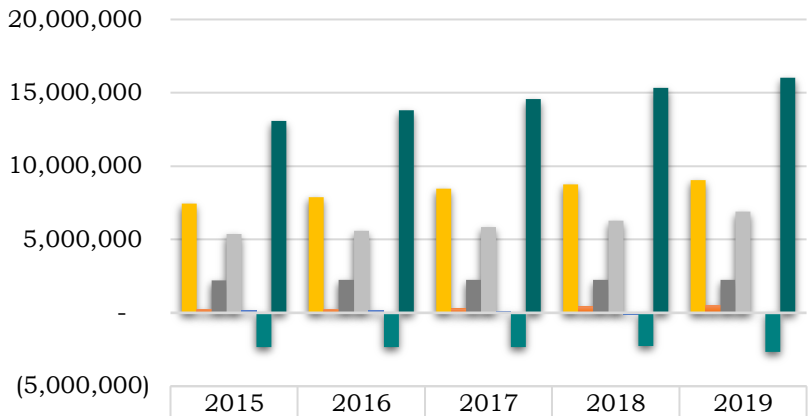

	2015	2016	2017	2018	2019
Komsumsi Rumah Tangga	7,442,649	7,895,780	8,455,156	8,772,051	9,049,535
Kons. Lembaga Swasta Nirlaba	248,343	258,792	267,155	410,020	510,818
Komsumsi Pemerintah	2,205,484	2,230,721	2,237,795	2,232,986	2,250,666
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,388,690	5,582,805	5,850,630	6,274,861	6,883,839
Perubahan Inventor	163,347	177,475	102,420	(110,893)	(15,149)
Ekspor Impor	(2,348,262	(2,324,305	(2,327,351	(2,255,296	(2,653,545
PDRB	13,100,251	13,821,268	14,585,805	15,323,729	16,026,164

Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran

ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 2.28 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah Tangga	7 442 649	7 895 780	8 455 156	8 772 051	9 049 535
Kons. Lembaga Swasta Nirlaba	248 343	258 792	267 155	410 020	510 818
Konsumsi Pemerintah	2 205 484	2 230 721	2 237 795	2 232 986	2 250 666
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 388 690	5 582 805	5 850630	6 274 861	6 883 839
Perubahan Inventori	163 347	177 475	102 420	(110 893)	(15 149)
Ekspor Impor	(2 348 262)	(2 324 305)	(2 327 351)	(2 255 296)	(2 653 545)
PDRB	**13 100 251**	**13 821 268**	**14 585 805**	**15 323 730**	**16 026 164**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.23 dan Tabel 2.28 menunjukkan bahwa PDRB ADHK selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 5,17% tiap tahunnya, hal ini sekaligus menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu setiap tahunnya meningkat sebesar 5,17%. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba merupakan penyumbang pertumbuhan tertinggi tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,37% dan terendah adalah perubahan inventori sebesar -82,06%.

Berdasarkan metode perhitungan terbaru struktur perekonomian terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) sektor pembentuk PDRB. Empat sektor yang paling besar peranannya dalam PDRB Kota Palu Tahun 2020 berasal dari sektor Konstruksi (19,41%), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial

Wajib (14,74%), sektor Informasi dan Komunikasi (10,2%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,7%), dan Jasa Pendidikan (7,9 %). Sedangakan 13 sektor lainnya peranannya di bawah 7%. Sementara itu salah satu sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,13%).

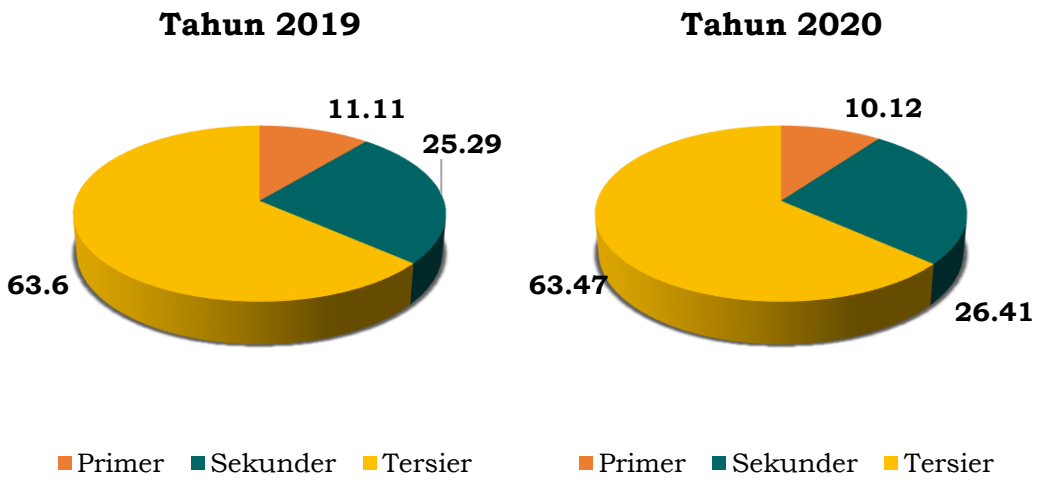

Gambar 2.24 Struktur Perekonomian Kota Palu Menurut Tiga Sektor Tahun 2019 dan 2020 (persen)
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.24 memperlihatkan bahwa Tahun 2019 dan Tahun 2020 perekonomian Kota Palu didominasi oleh sektor Tersier (Kategori G hingga Kategori U). Sedangkan sektor Sekunder yang terdiri dari Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Konstruksi (Kategori C hingga Kategori F) menempati urutan kedua. Sedangkan sektor Primer yang disokong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian (Kategori A dan B) memiliki kontribusi terkecil dalam perekonomian Kota Palu. Tahun 2020, sektor tersier memiliki kontribusi sebesar 63,47 % menurun 0,13 % dibanding

Tahun 2019 sebesar 63,60 %. Sektor sekunder memiliki kontribusi 26,41 % meningkat 1,12 % dibanding Tahun 2019 sebesar 25,29 %. Demikian halnya dengan sektor primer, juga mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,99 % dari 11,11 % pada Tahun 2019 menjadi 10,12 % pada Tahun 2020.

Selain gambaran struktur ekonomi, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga menjadi hal menarik untuk dikaji. Berdasarkan penghitungan PDRB ADHK 2010, perekonomian Kota Palu Tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu -4,54 % pada Tahun 2020 dan 5,79 % pada Tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan sebesar 10,33 % pada Tahun 2020 (data BPS Kota Palu bulan April Tahun 2021), namun pertumbuhan tertinggi berada pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,10 %. Pertumbuhan terendah terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan, yaitu -35,63%.

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2020 (persen)

	Lapangan Usaha / Industrial Origin	LP-PDRB**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (A)	(1,54)
2.	Pertambangan dan Penggalian (B)	(20,83)
3.	Industri Pengolahan (C)	(1,62)
4.	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	1,04
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	(0,90)
6.	Konstruksi (F)	(2,93)
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	(7,37)
8.	Transportasi dan Pergudangan (H)	(35,63)
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	(13,83)
10.	Informasi dan Komunikasi (J)	9,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	7,24
12.	Real Estate (L)	0,35
13.	Jasa Perusahaan (M,N)	(3,07)
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)	1,49
15.	Jasa Pendidikan (P)	(2,25)
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)	7,41
17.	Jasa lainnya (R,S,T,U)	(1,29)
	Kota Palu	**(4,54)**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	4,11	5,21	4,87	(0,86)	(1,54)
B	Pertambangan dan Penggalian	9,87	10,49	0,66	14,98	(20,83)
C	Industri Pengolahan	1,36	0,61	(1,96)	(0,57)	(1,62)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,22	5,67	7,34	2,10	1,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,38	4,01	1,00	(0,22)	(0,90)
F	Konstruksi	(0,11)	2,49	8,42	23,42	(2,93)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,01	4,01	6,04	(0,27)	(7,37)
H	Transportasi dan Pergudangan	6,89	8,54	6,54	(1,81)	(35,63)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	7,47	3,19	(10,56)	(13,83)
J	Informasi dan Komunikasi	8,11	7,76	8,60	9,87	9,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,20	7,00	0,80	(4,82)	7,24
L	Real Estate	3,19	4,31	3,87	(3,20)	0,35
M, N	Jasa Perusahaan	6,60	5,54	4,30	5,05	(3,07)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,74	5,12	7,91	4,03	1,49
P	Jasa Pendidikan	3,95	5,72	0,27	3,18	(2,25)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,01	11,82	9,55	9,42	7,41
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,67	5,13	2,53	2,26	(1,29)
PDRB		**5,50**	**5,53**	**5,00**	**5,79**	**(4,54)**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2020 secara berturut-turut: Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pengadaan Listrik dan Gas; Real Estate; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Lainnya; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa

Pendidikan; Konstruksi; Jasa Perusahaan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertambangan dan Penggalian; dan Transportasi dan Pergudangan.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2020 menurut lapangan usaha ADHB sebesar 24.175.890 milyar rupiah. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,48 %. Demikian pula pada PDRB ADHK berdasarkan tahun dasar 2010 menujukan penurunan sebesar 4,54 % dengan total PDRB Tahun 2020 sebesar 15.467.476 miliar rupiah.

Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	782.256	858.145	964.735	973.763	974.147
B	Pertambangan dan Penggalian	1.243.256	1.421.138	1.452.612	1.808.868	1.472.081
C	Industri Pengolahan	1.461.945	1.540.743	1.561.717	1.571.543	1.588.988
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.766	25.716	30.519	31.275	31.851
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54.527	58.774	68.693	68.152	71.859
F	Konstruksi	3.000.341	3.267.246	3.724.379	4.665.252	4.692.048
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.852.888	2.034.441	2.288.522	2.485.641	2.344.665
H	Transportasi dan Pergudangan	1.705.975	1.950.204	2.247.334	2.407.803	1.556.080
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	210.921	234.647	248.512	237.577	208.652
J	Informasi dan Komunikasi	1.572.447	1.752.796	1.994.364	2.288.772	2.465.360
K	Jasa Keuangan dan	1.117.952	1.225.842	1.323.771	1.290.037	1.390.908

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
	Asuransi					
L	Real Estate	471.327	515.581	565.958	568.689	576.887
M, N	Jasa Perusahaan	220.142	239.388	263.959	279.258	275.317
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.553.227	2.761.359	3.240.726	3.447.843	3.563.720
P	Jasa Pendidikan	1.560.241	1.715.515	1.829.136	1.929.051	1.909.814
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	536.945	613.732	702.124	751.761	822.901
R, S, T, U	Jasa lainnya	183.867	200.745	219.105	232.077	230.605
PDRB		**18.570.030**	**20.416.019**	**22.726.172**	**25.046.370**	**24.175.890**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	612.566	644.505	675.918	670.096	659.800
B	Pertambangan dan Penggalian	912.549	1.008.257	1.014.917	1.169.935	923.843
C	Industri Pengolahan	1.172.290	1.179.480	1.156.388	1.149.778	1.131.203
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.133	28.671	30.776	31.423	31.749
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.753	48.628	49.114	49.004	48.565
F	Konstruksi	1.994.550	2.044.265	2.216.300	2.735.278	2.655.142
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.446.399	1.504.427	1.595.235	1.590.898	1.473.641
H	Transportasi dan Pergudangan	1.250.906	1.357.740	1.446.599	1.420.453	914.366
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149.515	160.688	165.820	148.314	127.796
J	Informasi dan Komunikasi	1.365.414	1.471.405	1.597.988	1.755.683	1.915.373
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	874.117	935.347	942.835	897.407	962.381

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
L	Real Estate	369.929	385.885	400.804	387.980	389.356
M, N	Jasa Perusahaan	163.142	172.174	179.578	188.654	182.865
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.811.828	1.904.644	2.055.219	2.138.073	2.169.956
P	Jasa Pendidikan	1.098.442	1.161.306	1.164.404	1.201.431	1.174.432
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	383.393	429.233	470.219	514.516	552.662
R, S, T, U	Jasa lainnya	141.864	149.140	152.909	156.357	154.338
PDRB		**13.821.267**	**14.585.804**	**15.315.031**	**16.202.287**	**15.467.476**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,46 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 3,35 % per tahun, Kabupaten Donggala 2,94 % per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,65 % per tahun. Sementara rata-rata LPE Provinsi Sulawesi umumnya lebih tinggi, yaitu 7,40 % per tahun.

Tabel 2.33 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Kota Palu	Kab. Donggala	Kab. Parimo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah
2016	5,50	4,89	5,57	5,60	9,94
2017	5,53	5,10	5,64	5,62	7,10
2018	5,00	5,20	4,66	3,92	6,28
2019	5,79	4,37	2,32	3,57	8,83
2020	(4,54)	(4,87)	(4,92)	(1,97)	4,86

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021

2. Laju Inflasi

Selama lima tahun terakhir Kota Palu mengalami kenaikan dan penurunan Inflasi. Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami kenaikan Inflasi dengan rata-rata sebesar 4,09 %. Tahun 2018 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan Inflasi dengan rata-rata sebesar 3,52 %. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49%. Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir sebesar 3,28% per tahun, dan Indonesia sebesar 2,97% per tahun.

Tabel 2.34 Rata-rata Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Inflasi	Tahun					Rata-rata Inflasi
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kota Palu	1,49	4,33	6,46	2,30	1,81	3,28
Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,04	3,03	2,97

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2020

Perkembangan inflasi menurut kelompok pengeluaran Tahun 2016-2019 secara umum menunjukkan sektor-sektor penyumbang inflasi dalam empat tahun terakhir di Kota Palu. Sektor makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau adalah penyumbang inflasi tertinggi dengan rata-rata inflasi sebesar 4,51% per tahun, dan sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah penyumbang inflasi terendah dengan rata-rata inflasi sebesar 3,13 % per tahun.

Tabel 2.35 Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2016 – 2019

No	Sumber Inflasi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Umum	1,49	4,33	6,46	2,30
2.	Bahan Makan	(0,46)	3,79	6,37	3,60
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,53	2,96	8,12	3,42

No	Sumber Inflasi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,42	9,51	4,68	(0,35)
5.	Sandang	3,41	2,09	2,12	5,06
6.	Kesehatan	3,38	3,63	6,21	3,78
7.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4,62	(1,56)	8,01	4,18
8.	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,62	3,08	7,69	1,13

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

3. PDRB per Kapita

Rata-rata PDRB per kapita ADHK Kota Palu sebesar 38,79 (juta rupiah) per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 32,61 (juta rupiah) per tahun. Rata-rata PDRB perkapita ADHB Kota Palu sebesar 55,14 (juta rupiah) per tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 45,44 (juta rupiah) per tahun. Berdasarkan data tersebut pendapatan penduduk Kota Palu per tahun lebih tinggi dari pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

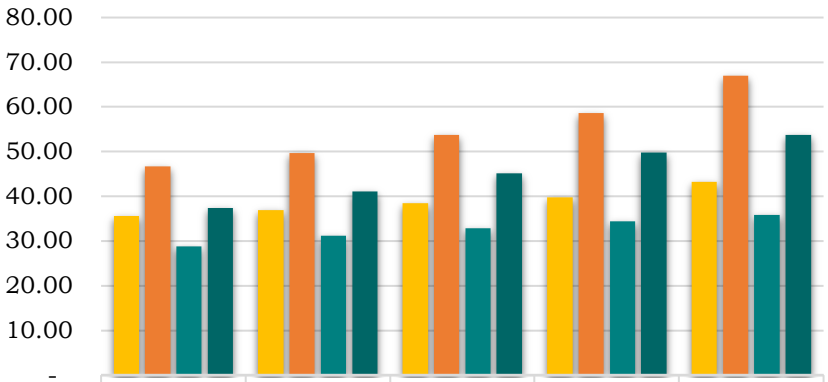

	2015	2016	2017	2018	2019
ADHK KOTA PALU	35.59	36.95	38.41	39.73	43.27
ADHB KOTA PALU	46.64	49.65	53.76	58.65	67.00
ADHK Prov Sulteng	28.78	31.15	32.86	34.41	35.84
ADHB Prov Sulteng	37.39	41.08	45.16	49.84	53.73

Gambar 2.25 PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2015-2019

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.36 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	4,21	4,20	4,07	3,63
B	Pertambangan dan Penggalian	6,69	6,96	6,42	6,26
C	Industri Pengolahan	7,98	7,55	7,11	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,29	0,28	0,27
F	Konstruksi	16,16	16,00	16,47	19,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,98	9,96	9,81	9,47
H	Transportasi dan Pergudangan	9,19	9,55	9,72	9,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,15	1,10	0,97
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	8,59	8,82	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,02	6,00	5,61	5,01
L	Real Estate	2,54	2,53	2,50	2,33
M, N	Jasa Perusahaan	1,19	1,17	1,17	1,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,75	13,53	14,33	13,86
P	Jasa Pendidikan	8,40	8,40	8,39	8,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,89	3,01	3,10	3,03
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,99	0,98	0,97	0,94
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: PDRB Kota Palu Tahun 2016-2019, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.33 memperlihatkan distribusi PDRB Kota Palu ADHB menurut lapangan usaha Tahun 2016-2019 di mana dari sektor konstruksi menunjukkan distribusi yang tertinggi dari tahun ke tahun dengan rata-rata distribusi sebesar 17,07% disusul oleh administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata distribusi sebesar 13,87%. Sedangkan distribusi terendah terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas; dan sektor pengadaan air, pengolahan sampah,

limbah, dan daur ulang, dengan rata-rata distribusi tiap sektor sebesar 0,13% dan 0,28%.

4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $< 0{,}3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0{,}3 \leq G \leq 0{,}5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $> 0{,}5$

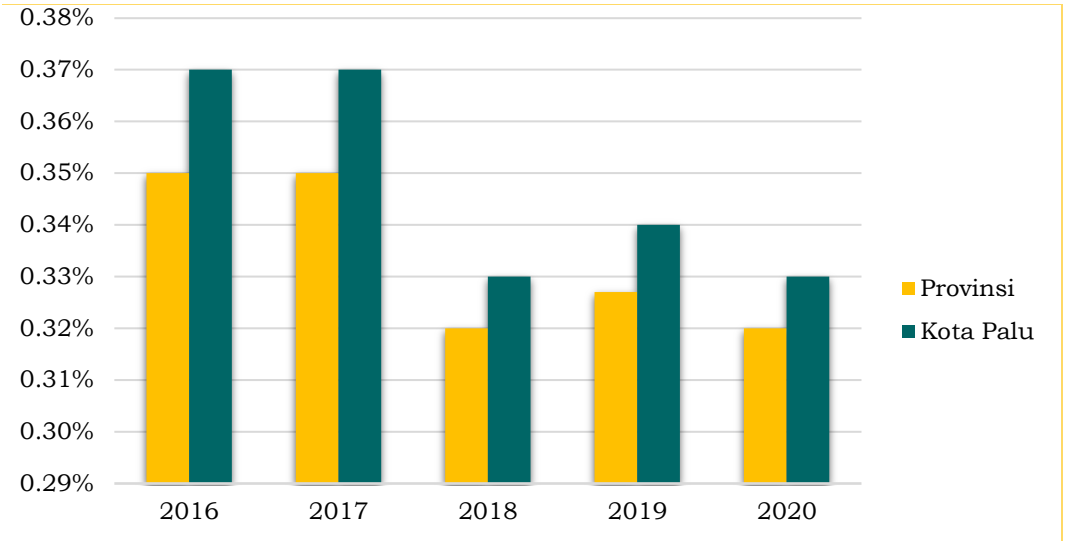

Gambar 2.26 Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.26 memperlihatkan angka gini rasio Kota Palu lima tahun terakhir berada pada jenis ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,35 % per tahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata 0,33 % per tahun. Berdasarkan rata-rata tersebut, indeks gini Kota Palu masih lebih tinggi tiap tahunnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu lima tahun terakhir masih kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin tertinggi di Kota Palu terjadi pada Tahun 2019 sebesar 7,22 % dan persentase terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,55 %. Berdasarkan persentase tersebut sehingga diketahui persentase penduduk di atas garis kemiskinan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 93,45 % dan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 92,78 %.

Hal ini menyebabkan berbagai indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas. Startegi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan agar menghasilkan kondisi yang lebih baik lagi.

Tabel 2.37 Kinerja Penangulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk miskin (org)	25.500	25.263	26.731	26.890
2	Persentase orang miskin	6,71	6,55	7,22	7,20
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)	1,02	0,91	0,99	0,97
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2) (%)	0,24	0,19	0,22	0,22
5	Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Kemiskian				
6.1	Garis kemiskinan	473.555	492.08	492.08	559.246
6.2	Penduduk dibawah garis kemiskinan	25.500	25.263	25.731	26.890
6.3	Beras untuk penduduk miskin	12.478	12.478	12.478	12.478
7	Keluarga menurut tingkat kesejahteraan				

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
7.1	Keluarga pra sejahtera	N/A	13.047	13.026	13.026
7.2	Keluarga sejahtera tahap 1	N/A	5.867	5.861	5.861
7.3	Keluarga sejahtera tahap 2	N/A	3.314	3.303	3.303
7.4	Keluarga sejahtera tahap 3	N/A	2.043	2.040	2.040
7.5	Keluarga sejahtera tahap 3 plus	N/A	1.784	1.782	1.782

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021, Dinsos Kota Palu Tahun 2020

2.4.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Aspek Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menunjukan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Angka tersebut meningkat hingga mendekati angka 100%. Angka Melek Huruf Kota Palu lebih tinggi jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, dimana selalu menjadi harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.

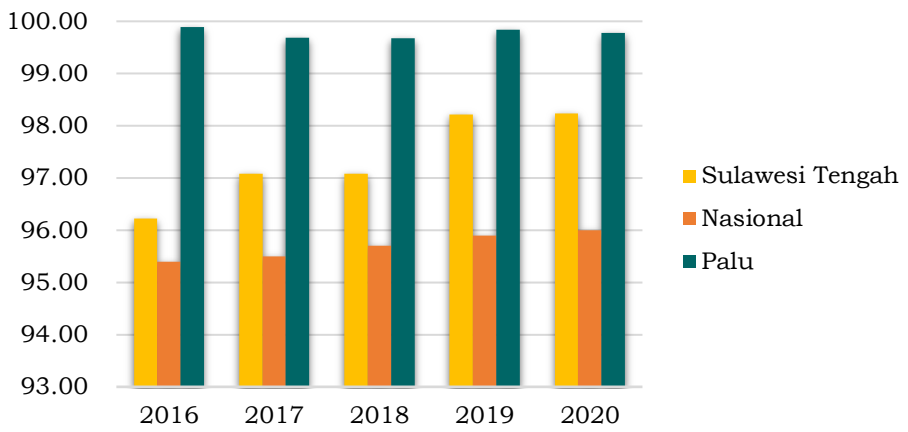

Gambar 2.27 Angka Melek Huruf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.27 memperlihatkan AMH tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2016 sebesar 99,89 % dan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 99,68 %. AMH tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 98,24 % dan terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 96,22 %. AMH tertinggi Nasional terjadi pada Tahun 2020 sebesar 96,00 % dan terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 95,40 %. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata lama sekolah menunjukan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

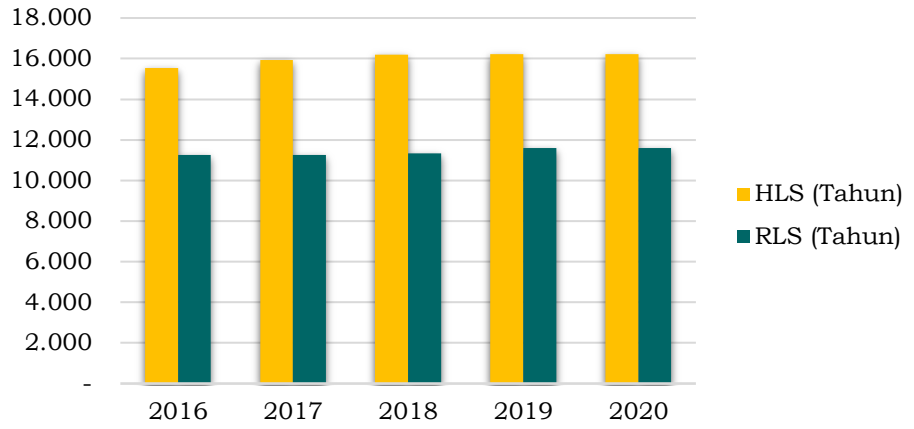

Gambar 2.28 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tahun 2016, RLS mencapai 11,25 tahun, Tahun 2018 RLS naik menjadi 11,33 tahun. RLS tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2020 11,61 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu telah memberi perhatian yang lebih baik pada dunia pendidikan sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di sekolah semakin bertambah. Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Palu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Palu mampu menyelesiakan pendidikannya sampai kelas 2 (dua) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun pula membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu juga terus memiliki harapan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih baik lagi. Tahun 2020, HLS Kota Palu mencapai angka 16,23 tahun atau memiliki harapan bersekolah sampai lulus perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu atau Sarjana S1.

2. Aspek Kesehatan

a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka harapan hidup di Kota Palu yang terus meningkat dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu memiliki kualitas kesehatan atau lama hidup yang tinggi sampai pada usia 71 tahun.

Gambar 2.29 memperlihatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya angka usia harapan hidup di Kota Palu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat yang lebih baik dari kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

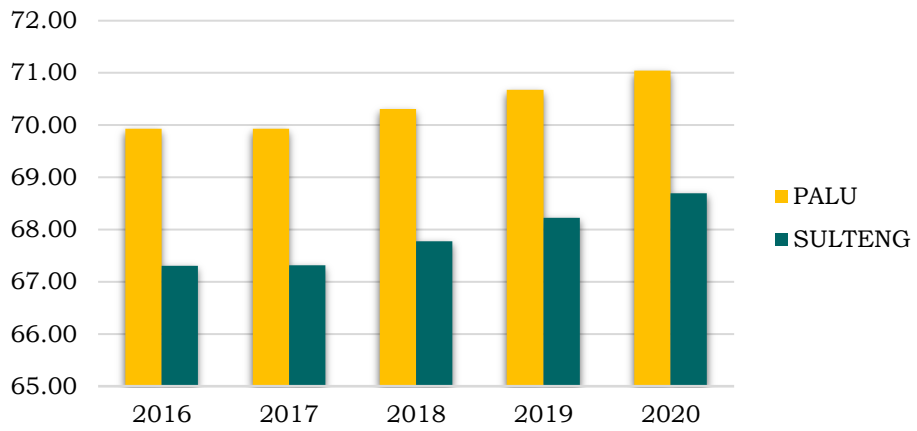

Gambar 2.29 Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020
Sumber: Berita Resmi Statistik Tahun 2021

b. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. WHO (1999) mengelompokkan wilayah, yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

1) rendah = di bawah 10 %
2) sedang = 10-19 %
3) tinggi = 20-29 %
4) sangat tinggi = 30 %

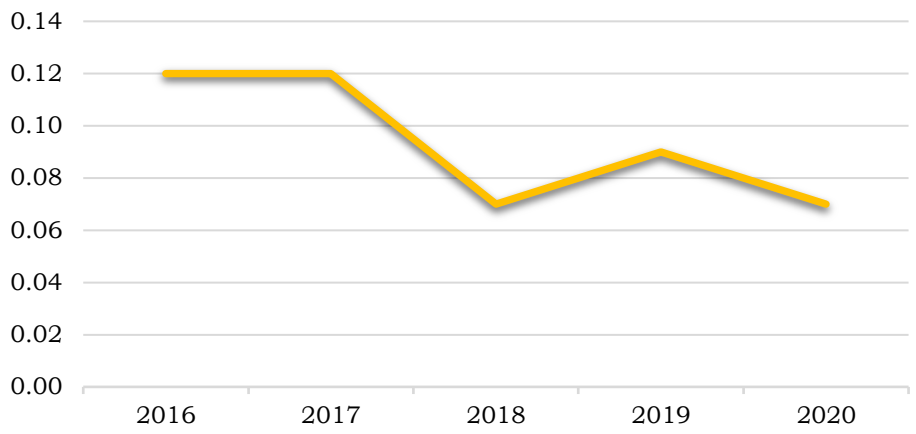

Gambar 2.30 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2020, diolah

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 dan 2017 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,12%. Tahun 2018 menurun mencapai 0,07%. Tahun 2019 dan 2020 pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan liquifaksi di Kota Palu persentase terus menurun dengan capaian masing-masing mencapai 0,09% dan 0,07%. Berdasarkan data capaian yang diperoleh dapat disimpulkan kasus gizi buruk Kota Palu Tahun 2016-2020 dalam kategori rendah.

c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran). Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2017 terus mengalami peningkatan sampai mencapai angka 202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 91,62 % pada Tahun 2020. Rendahnya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh naiknya angka atau jumlah pengangguran mencapai 16.960 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,38 % pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 6,36 %.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palu selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 65,81 % menjadi 66,46 % pada Tahun 2020. Naiknya persentase tingkat partisipasi

angkatan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja mencapai 202.467 jiwa yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 185.507 jiwa pada Tahun 2020.

Tabel 2.38 Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
I. Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467
1. Bekerja/ *Working*	177.959	181.079	181.523	185.507
2. Pengangguran/ *Unemployment*	12.496	11.164	12.337	16.960
II. Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	100.103	102.166
Total	**287.331**	**292.080**	**293.963**	**304.633**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,28	65,81	65,95	66,46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,56	5,81	6,36	8,38
Rasio penduduk yang bekerja	93,44	94,19	93,64	91,62

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

2.4.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana seni budaya dan olahraga. Pada Tahun 2016, organisasi kepemudaan di Kota Palu sebanyak 384 organisasi meningkat menjadi 385 organisasi pada Tahun 2020. Organisasi kepemudaan ini tersebar di semua kecamatan di Kota Palu. Kecamatan yang paling banyak terdapat organisasi kepemudaan adalah Kecamatan Palu Selatan sebanyak 91 organisasi dan paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga sebanyak 30 organisasi.

Jumlah organisasi olahraga di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami sedikit perkembangan. Tercatat pada

Tahun 2016 sebanyak 204 organisasi hingga Tahun 2020 bertambah menjadi 205 organisasi. Organisasi olahraga tersebut tersebar di semua kecamatan di Kota Palu. Organisasi olahraga terbanyak di Kecamatan Palu Timur dengan 54 organisasi dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ulujadi dengan 14 organisasi.

Tabel 2.39 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH ORGANISASI PEMUDA						
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	91
2	Kecamatan Palu Barat	65	65	62	62	62
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
4	Kecamatan Palu Utara	25	25	29	29	29
5	Kecamatan Tawaeli	65	65	65	65	65
6	Kecamatan Mantikulore	29	29	32	32	32
7	Kecamatan Tatanga	29	29	30	30	30
8	Kecamatan Ulujadi	34	34	36	36	36
	Kota Palu	384	384	385	385	385
JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA						
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	14	14	14	14	14
	Kota Palu	204	204	205	205	205

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

2.4.2 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing *(competitiveness)* merupakan satu di antara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Gambaran umum kondisi daerah

yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek, antara lain kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia yang dijelaskan lebih detail.

2.4.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, di mana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda *(multiflier effect)* dan efek menjalar *(contagious effect)* bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan, dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan

digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

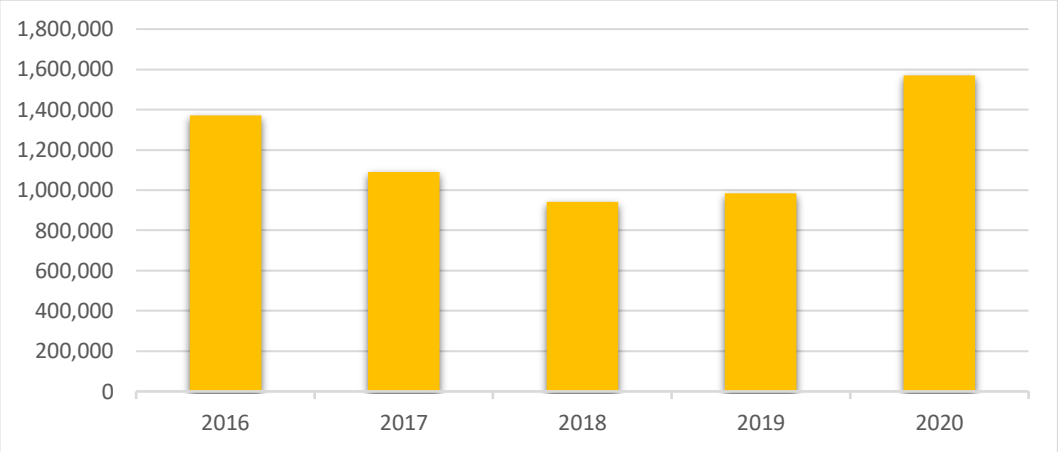

Gambar 2.31 Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp/Tahun) Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.31 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran per kapita setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Kota Palu Tahun 2017-2020 masing-masing sebesar -20,46 %, -13,76%, 4,57 %, dan 59,46 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2018-2020.

Tabel 2.40 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2020

Golongan Pengeluaran	Kota Palu	Sulawesi Tengah
< 150000	0.00	0.00
150.000-199.999	0.00	0.19

Golongan Pengeluaran	Kota Palu	Sulawesi Tengah
200.000-299.999	0.00	1,62
300.000-499.999	3,81	12,36
500.000-749.999	14,37	28,82
750.000-999.999	13,74	20,07
1.000.000-1.499.999	20,67	20,13
1.500.000+	47,41	16,81

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Kota Palu didominasi oleh 5 (lima) golongan pengeluaran, yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,41%), Rp.1.000.000-Rp.1.499.999 (20,67%), Rp.750.000-Rp.999.999 (13,74%), Rp.500.000-Rp.749.999 (14,37%), dan Rp.300.000-Rp.499.999 (3,81%). Khusus pada golongan pengeluaran tertinggi, yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,41%), angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka provinsi yang hanya mencapai 16,81%.

Tabel 2.41 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2019-2020

Kelompok Bukan Makanan	Kota Palu		Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
	2019	2020	
Perumahan dan Fasilitas Rumah	247.717	470.376	222.659
Aneka Barang dan Jasa	100.292	217.933	117.641
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	32.692	49.307	16.615
Barang Yang Tahan Lama	46.688	112.333	65.645
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	30.826	54.029	23.203
Keperluan Pesta dan Upacara	17.817	33.131	15.317
Jumlah	**478.032**	**937.108**	**459.076**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terjadi pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi pada kelompok bukan makanan "perumahan dan fasilitas rumah" sebesar 222.659 rupiah sebulan, dan terendah pada "keperluan pesta dan upacara" sebesar 15.317

rupiah sebulan. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu menurut kelompok bukan makanan Tahun 2020 meningkat sebesar 459.076 rupiah sebulan.

Merujuk dari teori atau hasil penelitian bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1 rupiah maka akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi, maka dengan melihat peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu Tahun 2020 sebesar 459.076 rupiah sebulan maka terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 459.076 rupiah sebulan.

Selanjutnya, produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.

Tujuh belas lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2020 adalah lapangan usaha konstruksi (19,63%); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,86%); perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,8%); dan transportasi dan pergudangan (9,58%).

2. Rasio Ekspor Impor Kota Palu terhadap PDB

Rasio ekspor impor Kota Palu dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran kondisi ekspor dan impor yang masuk dan keluar Kota Palu pada Tahun 2016-2020. Tahun 2016 rasio ekspor impor Kota Palu sebesar -19,29% dan terus meningkat hingga Tahun 2017 menjadi -11,90%. Tahun 2018 turun menjadi -15,22% dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi -17,83%.

Rendahnya rasio ekspor impor Kota Palu mengindikasikan tingkat keterbukaan ekonomi yang masih sangat rendah. Ini juga menjadi salah satu indikator bahwa produk barang nasional masih berorientasi domestik karena belum mampu bersaing di pasar internasional. Rendahnya ekspor membuat penerimaan devisa juga rendah.

Untuk itu, diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Palu untuk memacu ekspor dengan mempercepat perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perbaikan infrastruktur, serta pemberian insentif bagi industri yang berorientasi ekspor. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan vokasi.

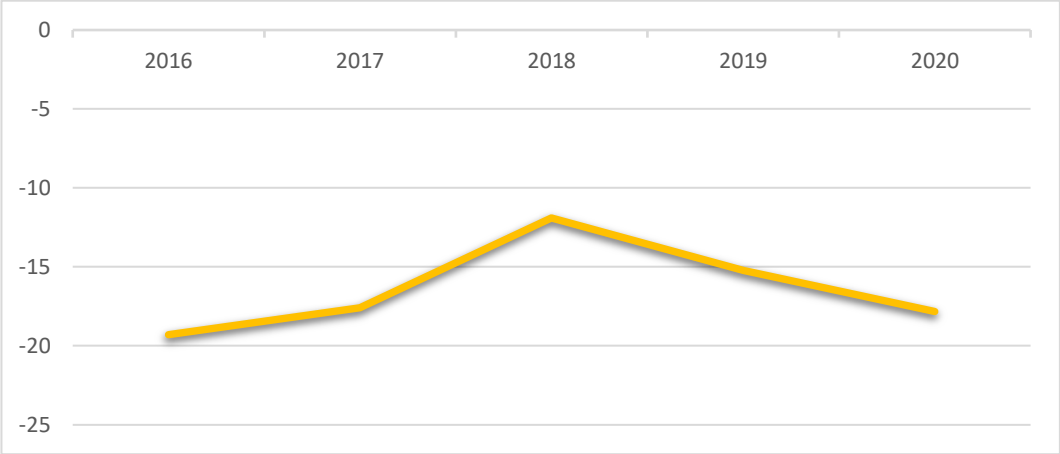

Gambar 2.32 Rasio Ekspor Impor Kota Palu terhadap PDB Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021, diolah

2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan *(availability)* fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan *(competitiveness)*.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pengertian penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan

pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah Kota Palu terkait dengan ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, serta komunikasi dan informatika yang akan dijelaskan selanjutnya di aspek pelayanan umum.

2.4.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik anak usia 4-6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Perkembangan PAUD di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi di seriap tahunnya. Tahun 2016–2017 persentase PAUD cukup tinggi dan mengalai peningkatan namun pada Tahun 2018–2020 terjadi penurunan yang cukup besar dengan

persentase yang rendah. Pada Tahun 2018 persentase murid terhadap penduduk usia 4–6 tahun di Kota Palu sebesar 36,36 % dan menurun lagi menjadi 37,45 % pada Tahun 2019. Meskipun Tahun 2020 persentase PAUD naik sebesar 1,09 %, namun perentase ini masih tergolong sangat rendah karena masih ada sekitar 62,55 % Anak Usia Dini 4-6 tahun yang belum terjangkau oleh layanan PAUD.

Tabel 2.42 Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2016 -2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Murid TK/ RA/Penitipan Anak	6.683	8.188	6.675	6.661	7.258
2	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	10.975	11.975	18.222	19.572	19.381
3	Persentase PAUD	60,89	68,38	36,36	34,03	37,45

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing.

Tabel 2.43 APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK
2016	115	102	103,37	105,78	89,48	83,45
2017	126	107	108,39	105,43	99,19	94,29
2018	110	109	114,46	105,28	92,88	90,63
2019	111	105	74,42	105,13	83,53	87,35
2020	104,8	91,85	111,55	105,95	91,98	88,42

Sumber: BPS dan SIPD Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.41 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Untuk jenjang pendidikan SD, APK SD/MI di Kota Palu rata-rata 113,36 % lebih tinggi 7,85 % dari rata-rata APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah. APK SMP/MTs Kota Palu dengan rata-rata 102,97 % lebih tinggi 11,56 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, dan APK SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata 102,44 % lebih tinggi 13,61 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi rata-rata APK yang lebih tinggi di Kota Palu ini menunjukkan bahwa masih banyak murid/siswa di atas usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI usia 7-12 Tahun, SMP/MTs usia 13-15 Tahun, dan SMA/MA/SMK usia 16-18 Tahun yang sedang bersekolah di Kota Palu.

Jumlah murid/siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di Kota Palu yang lebih banyak jumlahnya dari jumlah usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan ini terjadi bukan karena banyaknya murid/siswa yang tinggal kelas atau tidak lulus tetapi diduga karena banyaknya murid/siswa yang berasal dari luar Kota Palu yang berusia di atas usia sekolah yang bersekolah di Kota Palu.

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan oleh penduduk Kota Palu, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 di Kota Palu cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu naik sebesar 11,43 persen.

Tabel 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020

Tahun	Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio (%)
2016	35.873	374.020	9.59
2017	38.858	379.782	10,23
2018	40.586	385.691	10,52
2019	40.968	370.376	11,06
2020	42.662	373.218	11,43

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021, diolah

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

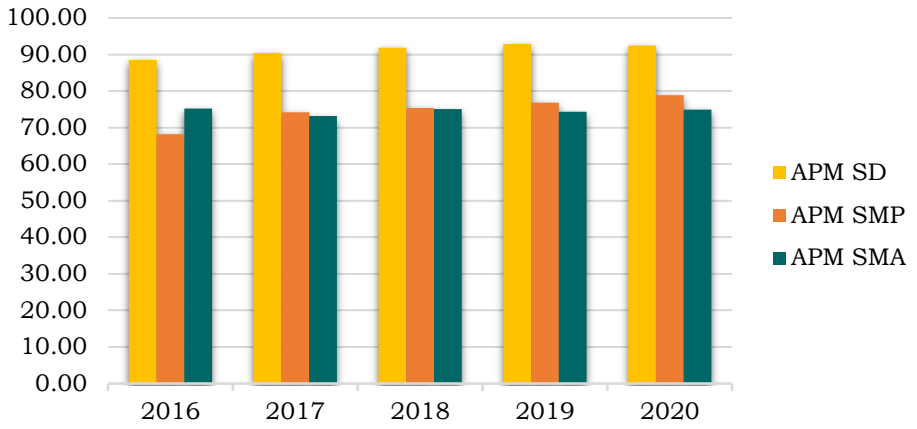

Gambar 2.33 Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.33 menunjukan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung fluktuatif dari Tahun 2016 ke Tahun 2020, namun masih menunjukkan tren naik. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2019 sebesar 92,86 % mengalami penurunan menjadi 92,50 % pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SD/MI adalah 1,3 persen. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2019 sebesar 76,88 % mengalami kenaikan menjadi 78,81 % pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMP/MTs adalah 1,7 persen. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2019 sebesar 74,42 % mengalami kenaikan menjadi 74,94 % pada Tahun 2020. Meskipun terdapat fluktuasi pada Angka Partisipasi Murni SMA, secara keseluruhan perkembangan APM Kota Palu cenderung naik.

Tabel 2.45 Perbandingan APM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Banggai Kepulauan	90,34	80,54	60,69
2	Banggai	90,64	74,23	71,58
3	Morowali	99,21	71,66	76,96
4	Poso	95,38	80,48	61,71
5	Donggala	97,72	63,92	53,50
6	ToliToli	89,31	63,55	68,05
7	Buol	90,03	72,43	65,62
8	Parigi Moutong	87,77	63,86	53,38
9	Tojo Una-Una	96,23	67,96	55,88
10	Sigi	93,96	64,26	57,02
11	Banggai Laut	93,50	83,27	37,38
12	Morowali Utara	92,71	78,38	71,01
13	**Kota Palu**	**92,50**	**78,81**	**74,94**
Sulawesi Tengah		**93,24**	**74,42**	**65,02**

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi masih relatif rendah. Terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki APM lebih tinggi dibanding APM Kota Palu Tahun 2020, yaitu Kab. Morowali (99,71%), Kab. Donggala (97,72%), Kab. Tojo Una-Una (96,23%), Kab. Poso (95,38%), Kab. Sigi (93,96%), Kab. Banggai Laut (93,50%), dan Kab. Morowali Utara (92,71%), Kabupaten lainnya masih lebih rendah dibanding Kota Palu. Sementara APM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga masih lebih tinggi di banding Kota Palu.

APM SMP/MTs Kota Palu masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya

di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 74,94 % pada Tahun 2020. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidikan SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya. Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

e. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan formal dengan penduduk yang berusia sekolah, yang dinyatakan dalam persentase. Pergerakan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020 secara keseluruhan cenderung fluktuatif, namun tetap mengalami peningkatan pada Tahun 2020. Pada Tahun 2018 APS SD/MI di Kota Palu sebesar 98,22 naik menjadi 98,56 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2018 APS SMP/MTs di Kota Palu sebesar 94,86 naik menjadi 95,54 pada Tahun 2020. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8,22% begitupun dengan SMP/MTs sebesar 9,79% akibat terjadinya bencana alam pada bulan September 2018.

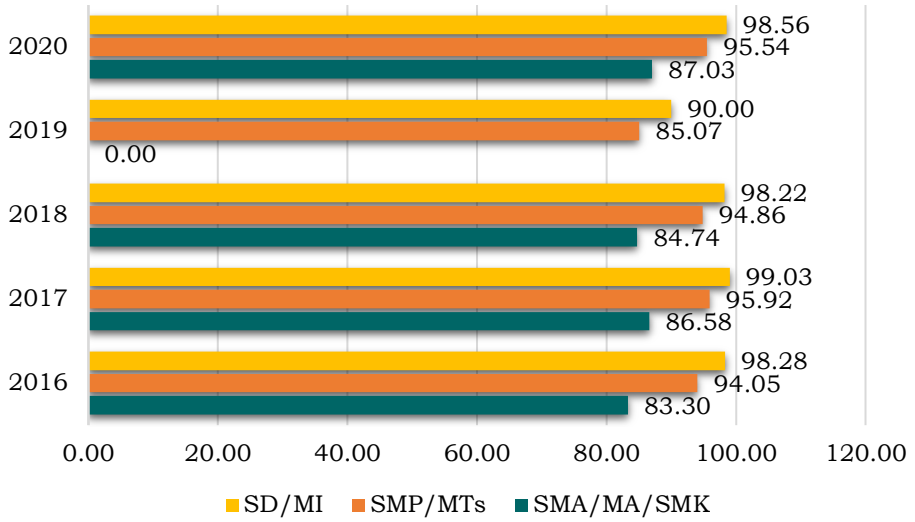

Gambar 2.34 Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK di Kota Palu (persen) Tahun 2016-2020

Sumber: BPS 2021

APS jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2020 sudah cukup tinggi walaupun belum mencapai 100%. Ini bermakna masih terdapat sebagian kecil penduduk usia 7 tahun hingga 12 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs. Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun, kondisi ini belum ideal karena masih ada anak-anak yang tidak masuk sekolah pada pada jenjang sekolah dasar hingga SMP.

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan penduduk usia sekolah yang pernah menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tidak dapat melanjutkan sekolah karena suatu alasan, tidak termasuk penduduk yang tidak pernah sekolah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,04 % naik 0,01 % menjadi

0,05 % pada Tahun 2018. Tahun 2019 APS SD/MI turun sebesar 0,02 % menjadi 0,03 %. Sementara angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,01 % naik sebesar 0,25 % menjadi 0,26 % pada Tahun 2018. Tahun 2019 turun sebesar 0,17 % menjadi 0,09 %.

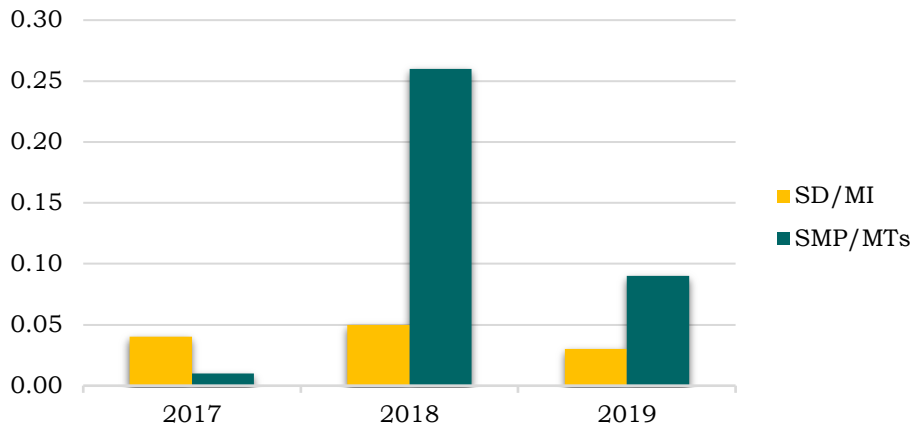

Gambar 2.35 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu, yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Tabel 2.46 Angka Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan pada jenjang SD	6.051	6.498	6.399	6.176	6.169
Jumlah siswa tingkat	6.051	6.498	6.399	6.176	6.169

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya					
Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah lulusan pada jenjang SMP	4.820	5.400	5.661	5.675	5.410
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	4.820	5.400	5.661	5.675	5.410
Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

h. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah pada tahun tersebut. Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada dua tahun terakhir Tahun 2019 dan 2020. Angka Melanutkan Peididkan dari SD ke SMP adalah 85,8% di Tahun 2016, meningkat dan mencapai angka tertinggi 87,8% di Tahun 2018, dan kembali menjadi 85,25% di Tahun 2020.

Tabel 2.47 Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2016-2018

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD	6.051	6.498	6.399	6.176	6.169
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP	5.194	5.634	5.621	5.303	5.259
Angka Melanjut SD ke SMP	**85,8%**	**86,7%**	**87,8%**	**85,86%**	**85,25%**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP	4.820	5.400	5.661	5.675	5.410
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK	7.319	7.580	7.710	8.037	N/A
Angka Melanjut SMP ke SMA/SMK	**151,8%**	**140,4%**	**136,2%**	**141,62%**	**N/A**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan angka melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 151,8% menurun menjadi 140,4% dan 136,2% di Tahun 2017 dan 2018, meningkat menjadi 141,62% di Tahun 2019. Besarnya Angka Melanjutkan Pendidikan dari SMPs ke SMA/SMK di Kota Palu yang melebihi angka 100% disebabkan tingginya jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Palu yang berasal dari daerah luar Kota Palu yang mungkin berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah bahkan mungkin juga dari provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

i. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Rasio ketersedian sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada periode 2016-2018 rasionya

menurun hingga 48,77 per 10.000 penduduk, dan meningkat kembali mencapai 54,69 per 10.000 penduduk pada Tahun 2019, dan relatif konstan hingga 2020 dengan angka 54.36 per 10.000 penduduk. Sementara itu, setelah meningkat dan mencapai angka tertinggi pada Tahun 2017 sebesar 54,29 per 10.000 penduduk, rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dan berada di angka 46.73 per 10.000 penduduk di Tahun 2020. Rasio ketersediaan sekolah jenjang SMA/SMK/MA selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu relatif stabil meski cenderung menurun.

Tabel 2.48 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2016-2020

No.	Jenjang pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Sekolah	184	185	185	189	190
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	33.218	34.526	33.830	34.215	34.954
	Rasio Palu	55.39	53.58	48,77	54.69	54.36
2.	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Sekolah	71	71	70	72	73
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.832	13.078	13.645	16.218	15.623
	Rasio Palu	37.70	54.29	51.30	44.39	46.73
3.	**SMA/SMK/MA**					
3.1	Jumlah Sekolah	63	64	64	64	64
3.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	32.669	33.120	34.722	34.676	N/A
	Rasio Palu	**19.28**	**19.32**	**18.43**	**18.45**	**N/A**

Sumber: Disdikbud Kota Palu dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

j. Rasio Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada

jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu di jenjang pendidikan yang disebutkan. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.49 Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid) Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. SD/MI:					
1.1 Jumlah Guru	2.430	2.232	2.306	2.287	2.641
1.2 Jumlah Murid	41.425	40.818	39.166	36.003	38.916
1.3 Jumlah Kelas	1.334	1.365	1.396	1388	NA
Rasio Guru/Murid	58,66	54,68	58,87	63,52	67,86
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	43,97	40,05	42,17	45,76	NA
2. SMP/MTs:					
2.1 Jumlah Guru	1.605	1.601	1.579	1.599	1.675
2.2 Jumlah Murid	23.802	22.257	17.816	21.116	20.778
2.3 Jumlah Kelas	672	660	648	628	NA
Rasio Guru/Murid	64,73	71,93	88,62	75,72	80,61
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	96,32	108,98	136,75	120,57	NA
3. SMA/SMK/MA:					
3.1 Jumlah Guru	1.742	1.843	1.714	2.078	2.006
3.2 Jumlah Murid	22.607	24.449	24.337	24.857	25.439
3.3 Jumlah Kelas	616	766	916	N/A	NA
Rasio Guru/Murid	77,05	75,38	70,42	83,59	78,85
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	125,08	98,40	76,87	NA	NA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, BPS 2021

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu pada Tahun 2016 adalah sebesar 60,52, atau sebanyak 60 guru per 1.000 murid SD/MI. Periode 2016-2018 menunjukkan tren penurunan hingga rasio berada di titik terendah 50,59 pada Tahun 2018, atau 50 guru per

1.000 murid SD/MI. Rasio guru/murid per kelas rata-rata juga menunjukkan trend yang sama, dan berada di titik 36,24 atau 36 guru per 1000 murid per kelas rata-rata. Namun angka rasio guru terhadap murid SD/MI di Kota Palu kembali meningkat hingga berada di angka 67,86, atau 68 guru per 1.000 murid SD/MI pada Tahun 2020.

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 73,81 atau 74 orang guru per 1.000 murid. Pada periode 2016 - 2018 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu turun menjadi 66,66 atau 67 orang guru per 1.000 murid. Namun dalam 2 (dua) tahun terakhir, rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota palu kembali meningkat dan menjadi 81,58 di Tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi akibat bertumbuhnya jumlah murid SMP/MTs yang tidak dibarengi oleh meningkatnya jumlah guru. Namun setelah terjadi peningkatan jumlah guru pada Tahun 2019-2020, maka terjadi peningkatan rasio guru/murid, termasuk pula rasio guru/murid per kelas rata-rata.

k. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka Melek Huruf juga dapat menjadi ukuran

kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak, dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf di Kota Palu bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah.

Penduduk Kota Palu yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil di atas angka 99%, namun sedikit mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 angka melek huruf di Kota Palu sebesar 99,89% dan mengalami sedikit penurunan selama periode 2016 – 2018 hingga menyentuh angka 99,68%. Pada Tahun 2019 Angka Melek Huruf kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 99,84%, dan berakhir menjadi 99,78% di Tahun 2020.

Angka Melek Huruf yang selalu berada di atas 99% berarti hanya ada segelintir penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Palu yang masih tidak bisa membaca. Angka melek huruf di Kota Palu diperkirakan menjadi 100% pada Tahun 2021 yang berarti pada Tahun 2021 tidak ada lagi penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Palu yang tidak bisa baca tulis.

Tabel 2.50 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf (Persen)	99,89	99,69	99,68	99,84	99,78

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kota Palu 2021

1. Kondisi Bangunan Sekolah

Hingga Tahun 2017, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020 hampir seluruhnya atau sebesar 87,57 % dalam kondisi baik. Namun bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada Tahun 2018 menyebabkan kerusakan di beberapa sekolah di Kota Palu, sehingga dari 2018 hingga 2020 terdapat 76,31% atau 145 sekolah yang berada dalam kondisi baik.

Tabel 2.51 Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	162	162	142	143	145
Jumlah Sekolah	184	185	185	189	190
Kondisi bangunan baik	88,04%	87,57%	76,75%	75,66%	76,31%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2016-2020 dalam kondisi baik. Rata-rata 64,43% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya.

Tabel 2.52 Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	46	46	46	46	46
Jumlah Sekolah	71	71	70	72	73
Kondisi bangunan baik	64,78%	64,78%	65,71%	63,88%	63,01%

Sumber: Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

m. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Pekembangan guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu selama periode 2016-2020 mengalami sedikit penurunan akibat bertambahnya jumlah guru secara keseluruhan.

Tabel 2.53 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI, SMP/MTs, yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA, MA, SMK)	3.926*	4.228	4.099	4.335	4.184
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	5.777	5.676	5.599	5.664	6.322
Rasio	**67,95**	**74,48**	**73,20**	**76,88**	**66,18**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Pada Tahun 2016 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 67,95% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 74,48% pada Tahun 2017. Namun pada periode 2019-2020, rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu mengalami penurunan hingga menjadi 66,18%. Selain disebabkan oleh jumlah guru berkualifikasi S1/D-1V yang mengalami penurunan, rasio juga terpengaruh oleh bertambahnya jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang meningkat sebesar 9,43 % dari 5.777 di Tahun 2016 menjadi 6.322 di Tahun 2020. Peningkatan jumlah guru

secara total ini tidak diikuti dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Perkembangan AKHB Kota Palu dalam periode 2016 - 2019 cenderung menurun hingga Tahun 2019. Namun sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2019 AKHB di Kota Palu tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.54 AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,17	1,42	2,67	1,48	2,35
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	995,83	998,58	997,33	997,28	997,99

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

b. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 1 unit posyandu bagi 75–100 balita.

Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.52

Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 5,25 per 1.000 balita. Ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan Posyandu di Kota Palu adalah 1 : 190 balita yang berarti Kota Palu belum memenuhi rasio ketersediaan posyandu. Kebutuhan posyandu masih kurang dari kondisi yang ideal.

Tabel 2.55 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Posyandu	Balita	Rasio
Palu Barat	28	4.514	**6,20**
Tatanga	24	5.476	**4,38**
Ulujadi	29	4.021	**7,21**
Palu selatan	27	7.096	**3,80**
Palu Timur	32	3.782	**8.46**
Mantikulore	38	7.654	**4,96**
Palu Utara	21	7.587	**2,76**
Tawaeli	24	2.332	**10,29**
Kota Palu	**223**	**42.462**	**5,25**

Sumber: Dinkes Kota Palu dan BPS Kota Palu, Tahun 2021

c. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah masing-masing unit Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Palu dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk.

Pasca peristiwa bencana pada Tahun 2018, jumlah penduduk di Kota Palu mengalami penurunan di Tahun 2019, sehingga angka rasio puskesmas yang tadinya mengalami penurunan pada periode 2016-2018, naik menjadi 3,8 per 100.000 penduduk di Tahun 2019. Namun rasio puskesmas kembali mengalami sedikit penurunan di Tahun 2020 menjadi 3,75 per 100.000 penduduk.

Jumlah Poliklinik di Kota Palu yang sempat mencapai 50 Unit di Tahun 2018 namun turun menjadi 29 Unit di Tahun 2019 berpengaruh besar pada menurunnya rasio Poliklinik pada tahun tersebut. Sementara itu ketersedian Puskesmas Pembantu di Kota Palu juga menurun pada Tahun 2018-2019 menciptakan tren fluktuatif pada rasio Pustu, yang sempat turun menjadi 7,29 pada Tahun 2019, namun kembali naik pada Tahun 2020 menjadi 8,04 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.56 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk) Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	13	13	14	14	14
Jumlah Poliklinik	40	52	50	29	28
Jumlah Pustu	30	30	34	27	30
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Puskesmas	3,48	3,42	3,63	3,77	3,75
Rasio Poliklinik	10,69	13,69	12,97	7,82	7,5
Rasio Pustu	8,02	7,89	8,81	7,29	8,04

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

d. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Palu 5 (lima) Tahun terakhir mengalami sedikit sekali perubahan dari segi

jumlah. Namun rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu dari Tahun 2016-2020 berfluktuasi dan cenderung naik mengikuti total penduduk di Kota Palu di periode tersebut.

Tabel 2.57 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Umum Daerah	3	3	3	3	3
Provinsi	2	2	2	2	2
Kota Palu	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	4	4	4
RS Umum	3	3	3	3	3
Rs Bersalin/RS Ibu Anak	4	4	4	4	4
RS Khusus (Mata)	1	1	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	19	19	19	19	19
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	**5,07**	**5,00**	**4,92**	**5,12**	**5,09**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020 dan BPS Kota Palu Tahun 2021

Pada Tahun 2016-2020 rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu tidak mengalami perubahan signifikan, dimana pada Tahun 2016 rasionya sebesar 5,07 per 100.000 penduduk dan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 5,09 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Palu tidak mengalami penambahan jumlah yaitu 19 unit, sementara jumlah penduduk semakin meningkat. Secara umum, 5 unit rumah sakit per 100.000 penduduk belum dapat

dikategorikan sebagai kondisi ideal. Untuk menyikapi rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu, kebijakan yang dapat diambil adalah menambah kapasitas rumah sakit.

e. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Perkembangan jumlah dokter di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren naik.

Tabel 2.58 Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter	218	319	385	374	374
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Dokter per-1.000 penduduk	**0,583**	**0,840**	**0,998**	**1,010**	**1,002**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Pada Tahun 2016 rasio dokter persatuan penduduk di Kota Palu sebesar 0,583 per 1.000 penduduk, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1,002 per 1.000 penduduk pada Tahun 2020. Meskipun rasio ini naik namun kondisi ini masih sangat kurang untuk kebutuhan dokter yang melayani penduduk. Rasio 1,002 per 1.000 penduduk bermakna 1 orang dokter melayani 998 penduduk pada Tahun 2020.

Peningkatan jumlah penduduk yang kurang diikuti oleh kenaikan jumlah dokter mempengaruhi rasio ketersediaan dokter di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir. Sementara

dalam rangka meningkatkan kualifikasi tipe rumah sakit diperlukan peningkatan rasio dokter khususnya dokter spesialis. Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat terus meningkatkan ketersediaan dokter, khususnya dokter spesialis.

f. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun demikian peningkatan itu tidak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang juga terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan penduduk masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga medis. Rata-rata jumlah penduduk naik sebesar 18,29 % per tahun sedangkan rata-rata tenaga medis hanya sebesar 12, 87 % per tahun. Kondisi ini mengakibatkan rasio tenaga medis turun sebesar 0,76 % dari capaian 7,546 menjadi 7,489 tenaga medis per 1.000 penduduk pada Tahun 2020, atau bermakna bahwa dalam 1000 penduduk terdapat 7 tenaga medis pada Tahun 2020.

Tabel 2.59 Jumlah dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Medis	1.764	2.361	2.538	2.795	2.795
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Tenaga Medis per- 1.000 penduduk	**4,716**	**6,217**	**6,582**	**7,546**	**7,489**

Sumber: Dinkes Kota Palu Tahun 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Dengan perekonomian masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu.

1) Proporsi Jaringan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2016-2019

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Jalan Kondisi Baik (km)	332,7	367,963	126,352	393,989
Jalan Kondisi Baik Sedang (km)	257,65	233,729	157,830	218,304
Jalan Kondisi Rusak (km)	157,04	137,622	349,596	127,021
Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	104,17	112,244	217,785	112,244
Panjang jalan (km)	851,56	851,558	851,563	851,558

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Proporsi	**0,39**	**0,43**	**0,14**	**0,46**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Pada Tahun 2016 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sebesar 0,39%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 0,43% pada Tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sepanjang 126,352 km, meningkat signifikan mencapai 393,989 km pada Tahun 2019. Sementara panjang jaringan jalan yang mengalami rusak ringan pada Tahun 2016 sepanjang 157,04 km, menurun hingga mencapai 137,622 km pada Tahun 2017. Tahun 2018 kondisi jalan dengan katagori jalan kondisi rusak berat meningkat menjadi 217,785 km dari Tahun 2017 sebesar 112,244 km. Hal ini disebabkan karena pada akhir Tahun 2018 Kota Palu diguncang gempa bumi dahsyat dengan 7,4 SR yang menghancurkan beberapa bagian infrastruktur kota termasuk jaringan jalan.

2) Panjang Jalan yang Mempunyai Trotoar dan Drainase

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Sedangkan drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan

jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Tabel 2.61 Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (km) Tahun 2016-2018

No	Ruas jalan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Panjang Drainase (Km)	1.114,54	1.217,99	1.321,45
2	Panjang Trotoar (Km)	1.030	872	995
3	Panjang Jalan (Km)	851,56	851,56	851,56
4	Persentase Jalan yang Berdarainase (Km)	65,44%	71,51%	77,58%
5	Persentase Jalan yang Bertrotoar (Km)	57,26%	57,71%	58,41%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

Tabel 2.58 menunjukkan persentase jalan yang berdrainase Tahun 2018 naik 6,07 %, dan presentase jalan bertrotoar Tahun 2018 naik 0,7 %.

3) Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Tahun 2019 saluran irigasi di Kota Palu dengan kondisi baik mengalami penurunan sepanjang 21.018,87 meter

atau turun sebesar 39,39 % dari Tahun 2018 yang mencapai panjang 53.354,87 meter. Seiring dengan turunnya kondisi saluran irigasi kondisi baik, kondisi rusak berat meningkat sepanjang 20.581,62 meter atau naik 245,42 % dari Tahun 2018 yang mencapai 8.386,38 meter. Untuk Panjang saluran irigasi di Kota Palu pada Tahun 2019 seluruhnya berkurang sebesar 291,92 meter dari tahun sebelumnya sepanjang 79.915 meter. Semua kondisi ini disebabkan oleh bencana alam yang menimpa Kota Palu pada akhir Tahun 2018.

Tabel 2.62 Jaringan Irigasi di Kota Palu (meter) Tahun 2016-2019

Saluran Irigasi	Panjang Saluran			
	2016	2017	2018	2019
Kondisi Baik	47.016,29	61.127,17	53.354,87	32.336,00
Kondisi Sedang	7.734,18	7.610,33	6.487,45	9.245,00
Kondisi Rusak Ringan	7.608,24	6.834,04	11.686,61	9.434,02
Kondisi Rusak Berat	2.867,99	3.502,59	8.386,38	28.968,00
Panjang Saluran Irigasi	65.226,70	79.074,13	79.915,31	79.623,39

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Berkurangnya panjang saluran irigasi dan meningkatnya kondisi rusak berat saluran irigasi pada Tahun 2019 mempengaruhi kontribusi sektor pertanian di Kota Palu yang mengalami penurunan.

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak (Air Bersih)

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2016-2019 terus mengalami

penurunan yang signifikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2016 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 99,77% menjadi 97,77% di Tahun 2017. Tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna air bersih kembali turun sebesar 0,47 % dari tahun sebelumnya mencapai 97,77 % hingga mencapai 96,95 % pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 persentase rumah tangga pengguna air bersih naik signifikan sebesar 2,26 % hingga mencapai 99,21 %. dari total.

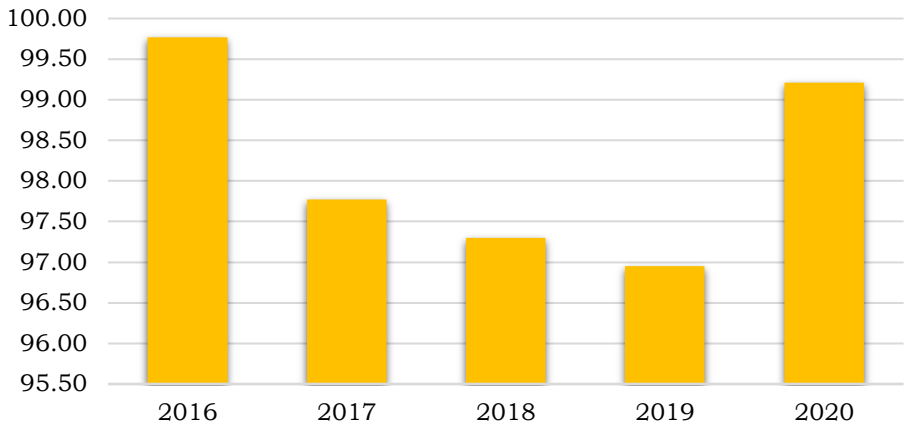

Gambar 2.36 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

5) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Perkembangan jumlah bangunan tempat ibadah di Kota Palu Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Perkembangan bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

Tabel 2.63 Perkembangan Rasio Tempat Ibadah per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2020

Bangunan Tempat Ibadah	2018			2019			2020		
	Jumlah	Jumla Pemeluk	Rasio	Jumlah	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah	Jumlah Pemeluk	Rasio
Mesjid	431	303.700	1,4	431	308.138	1,4	504	310.441	1,6
Gereja	71	53.715	1,3	71	54.504	1,3	110	40.492	2,7
Pura	2	17.378	0,1	2	21.206	0,1	4	16.107	0,3
Wihara	3	8.810	0,3	3	8.990	0,3	4	6.178	0,7
Jumlah	**507**	**383.603**	**1,32**	**507**	**392.838**	**1,29**	**622**	**373.218**	**1,67**

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu pada Tahun 2018 sebesar 1,32 per 1.000 penduduk, mengalami penurunan hingga menjadi 1,29 per 1.000 penduduk pada Tahun 2019. Tahun 2020 rasio tempat ibadah di Kota Palu naik menjadi 1,67 per 1.000 penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu yang meningkat ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya bantuan dari berbagai daerah atau negara pasca bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2018.

6) Rasio Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2020 diuraikan dalam tabel 2.61. Tabel 2.61 memperlihatkan perkembangan rasio tempat pemakaman per satuan penduduk dari Tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 daya rasio tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 1,99 m^2 per penduduk, terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 m^2 per penduduk pada Tahun 2020. Menurunnya rasio

pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat.

Tabel 2.64 Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman per Penduduk di Kota Palu Tahun 2018 – 2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Luas (m^2)	Daya Tampung	Luas (m^2)	Daya Tampung	Luas (m^2)	Daya Tampung
Tempat pemakaman umum (TPU)	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526
Tempat pemakaman khusus (TPK)	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350
Jumlah	**707.500**	**24.132**	**707.500**	**24.132**	**707.500**	**24.132**
Jumlah penduduk (jiwa)	379.782	379.782	385.619	385.619	373.218	373.218
Rasio	**1,99**	**0,07**	**1,95**	**0,07**	**1,93**	**0,07**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

7) Persentase Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis (pemanfaatan sampah), dan mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Tabel 2.65 Jumlah Volume Sampah (m^3) dan Produksi Sampah di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang ditangani	288.000	260.425	1.689.467	201.460	199.100
2	Jumlah volume produksi	330.509	380.049	1.689.467	213.258	219.087

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	sampah					
3	Persentase	87,14%	68,52%	100%	94,47%	90,88%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2021

Persentase penanganan sampah di Kota Palu Tahun 2016-2020 yang mengalami fluktuasi. Tahun 2018 persentase sampah yang ditangani sebesar 100 % turun menjadi 94,47 % di Tahun 2019, dan mengalami peningkatan kembali mencapai 90,88 % pada Tahun 2020.

b. Penataan Ruang

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Kota Palu yang luasnya 395,06 km² seharusnya menyediakan ruang untuk RTH seluas 79,012 km².

Tabel 2.66 Luas RTH terhadap Luas Wilayah Kota Palu

Uraian	Luas (ha)
Luas wilayah perkotaan	39,506
Luasan RTH di Kota Palu	1,833
Persentase RTH	**4,64%**

Sumber: BPS, dan SIPD Kota Palu Tahun 2021

Persentase luas RTH Kota Palu sebesar 4,64 % dari luas wilayah Kota Palu sehingga dengan adanya target luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah administrasi, maka masih tersisa 15,36% luas RTH

yang harus disediakan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

2) Rasio Bangunan ber-IMB

Rasio IMB di Kota Palu Tahun 2016-2019 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun sesungguhnya apabila ditinjau dari trend persentase pertumbuhannya/produksinya terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 44,35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan komitmen pengendalian serta pengawasan dalam pengurusan IMB masih rendah sampai dengan Tahun 2019. Untuk mencapai penataan ruang yang baik dan berkelanjutan kondisi ini belum optimal sehingga perlu untuk ditindaklanjuti.

Tabel 2.67 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kota Palu Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bangunan yang ber-IMB	1.006	1.818	2.432	2.881
Jumlah Bangunan	74.804	75.956	77.138	74.075
Rasio IMB	**1,34%**	**2,39%**	**3,15%**	**3,89%**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020, diolah

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 sebanyak 64.642 unit rumah, dan jumlah penduduk pada tahun yang sama sebesar 370.376 jiwa.

Tabel 2.68 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Uraian	Jumlah dan Rasio
Jumlah rumah layak huni	64.642 unit
Jumlah penduduk	370.376 jiwa
Rasio Rumah Layak Huni	0,17 unit/jiwa

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk Kota Palu pada Tahun 2019, maka didapatkan rasio sebesar 17,45 unit per jiwa penduduk Kota Palu.

b. Cakupan Rumah Layak Huni

Cakupan rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 sebesar 88,60 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 11,40 % atau sebanyak 8.317 unit rumah yang tidak layak huni di Kota Palu.

Tabel 2.69 Cakupan Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Rumah	RTLH	RLH
Palu Barat	9.689	12,73	87,27
Tatanga	11.392	8,12	91,88
Ulujadi	6.352	3,05	96,95
Palu Selatan	15.949	11,16	88,84
Palu Timur	6.330	1,22	98,78
Mantikulore	14.465	11,64	88,36
Palu Utara	4.814	25,07	74,93
Tawaeli	3.968	30,65	69,35
Kota Palu	**72.959**	**11,40**	**88,60**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Persentase rumah layak huni terbesar berada pada wilayah Kecamatan Palu Timur sebesar 98,78 % atau sebanyak

6.253 unit rumah, dan Persentase rumah tidak layak huni terbesar berada pada wilayah Kecamatan Tawaeli sebesar 30,65 % atau sebanyak 1.190 unit rumah.

Jika ditinjau dari jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni, maka Kecamatan Palu Selatan adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah layak huni yang terbanyak sebesar 14.169 unit, dan Kecamatan Palu Barat adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak sebesar 1.233 unit.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditinjau dari jumlah aparat keamanan, sarana keamanan, kendaraan operasional, jumlah sengketa, dan kejadian kebakaran pada Tahun 2016-2019.

Tabel 2.70 Jumlah Aparat Keamanan, Sengketa, Sarana Keamanan, Kendaraan Operasional, dan Kejadian Kebakaran di Kota Palu Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah aparat:	613	548	722	842
- Aparat Pamong Praja/ Satpol PP	505	440	614	734
- Petugas Linmas	108	108	108	108
2. Sarana Keamanan:				
- Pos Kamling	506	506	506	206
3. Sengketa Pengusaha dan Pekerja:				
- Sengketa terselesaikan	43	56	62	52
- Sengketa belum terselesaikan	43	56	62	52
4. Kendaraan Operasional:	13	13	23	7
- Roda 2	4	4	14	3
- Roda 4	9	9	9	4
5. Kejadian Kebakaran	103	89	104	138
Jumlah Penduduk	374.620	379.782	385.619	370.376
Rasio Aparat Pamong Praja	**13,48**	**11,59**	**15,92**	**19,82**

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Rasio Aparat Linmas	**2,88**	**2,84**	**2,80**	**2,92**
Rasio Pos kamling	**11**	**11**	**11**	**4,48**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Tahun 2019, jumlah aparat keamanan dan ketertiban umum sebanyak 842 orang terdiri dari 734 orang aparat pamong praja, dan 108 orang aparat linmas. Jumlah sarana keamanan berupa pos kamling sebanyak 206 unit, dan jumlah kendaraan operasional aparat ketertiban umum dan perlindungan masyarakat roda empat sebanyak 4 unit dan roda dua sebanyak 3 unit. Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja yaitu terdiri dari sengketa yang terselesaikan sebanyak 52 kasus dan belum terselesaikan sebanyak 46 kasus. Tingkat penyelesaian pelanggaran sebesar 53,06% yang terselesaikan dari total kasus sengketa antar pengusaha dan pekerja yaitu sebanyak 98 kasus. Jumlah kejadian kebakaran Pada Tahun 2019 sejumlah 138 kasus meningkat 34 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 104 kasus.

Gambar 2.37 Rasio Aparat Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2019

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020, diolah

Rasio aparat pamong praja per 10.000 penduduk Tahun 2016 sebesar 13,48 menjadi 15,92 di Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 meningkat lagi mencapai 19,82.

Rasio aparat perlindungan masyarakat (linmas) per 10.000 penduduk terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 rasio aparat linmas sebesar 2,88 turun menjadi 2,84 di Tahun 2017, dan kembali turun pada Tahun 2018 hingga menjadi 2,80. Pada Tahun 2019 rasio aparat linmas mengalami peningkatan sebesar 0,12 hingga menjadi 2,81 orang per 10.000 penduduk.

Gambar 2.38 Rasio Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2019

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020, diolah

Berdasarkan data tersebut sehingga pemenuhan cakupan petugas linmas sebanyak 100 orang petugas per wilayah kerja kota dapat terpenuhi karena jumlah aparat yang tersedia sangat memadai sejumlah 108 orang untuk wilayah Kota Palu. Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kota Palu mengalami penurunan pada Tahun 2019 dengan rasio sebesar 4,49 dari tahun sebelumnya sebesar 11,00 per kelurahan.

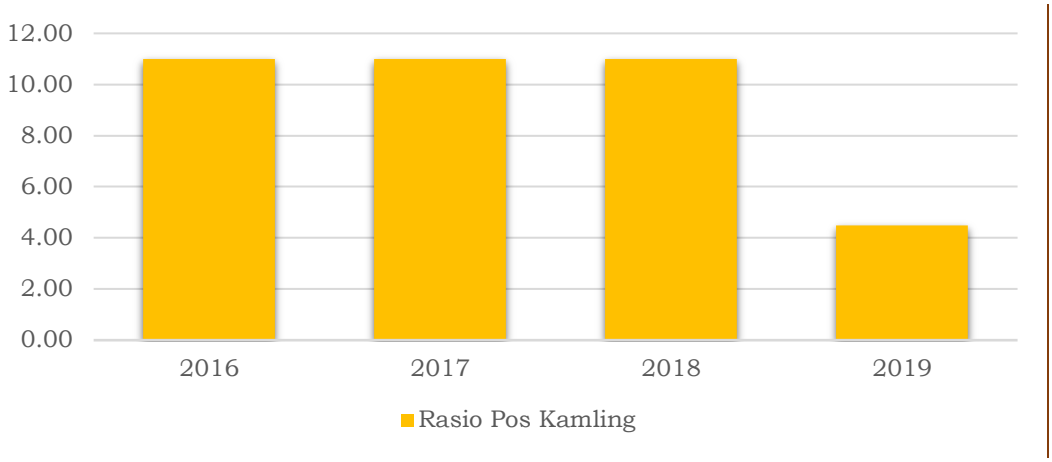

Gambar 2.39 Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020, diolah

6. Sosial

Persentase PPKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial di Tahun 2018 sebesar 41,27% turun menjadi 10,60% pada Tahun 2017. Tahun 2019 dari tahun sebelumnya menjadi 45,52% dari total PPKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.71 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa)	24.892	131.600	261.545	27.659
PPKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	N/A	54.314	27.721	3.200
%PPKS yang memperoleh bantuan sosial		**41,27%**	**10,60%**	**11,57%**

Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di

Kota Palu sejak Tahun 2016-2020. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selam kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 36 unit pada Tahun 2016 hingga naik menjadi 59 unit pada Tahun 2018 dan berkurang menjadi 41 unit pada Tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.72 Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Panti Asuhan	36	53	59	41
Rumah singgah	1	1	1	1
Jumlah	**37**	**54**	**60**	**42**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Tahun 2020 mencapai 202.467 orang, di mana jumlah yang bekerja sebesar 185.507 orang dan pengangguran sebasar 16.960 orang.

Tabel 2.73 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467
	a. Bekerja	177.959	181.079	181.523	185.507
	b. Pengangguran	12.496	11.164	12.337	16.960
2	Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	103.103	102.166
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	287.331	292.080	293.963	304.633
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,28	65,81	65,95	66,46
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	67,51	66,82	N/A	N/A
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	6,56	5,81	6,36	8,38
6	TPT (tingkat pengangguran	3,81	3,37	3,11	3,77

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
	terbuka) Sul-Teng				

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 55,14% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 44,86%, menunjukan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak bekerja di lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

Tabel 2.74 Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	4.908*
Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah	3.993
Jumlah pekerja perempuan	8.901
Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	55,14%
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	44,86%

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan danengan IPM Laki-laki. IPG Kota Palu Tahun 2020 yaitu 97,96 sedangkan untuk Indek Pemberdayaan Gender (IPG) yang merupakan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik berada diTahun 2020 dengan nilai 68,84.

3. Pangan

Untuk bidang pangan, produksi komoditas pangan terdiri dari produksi komoditas pangan nabati beras dan jagung. Jumlah produksi pangan beras pada Tahun 2020 sebesar 1,039 Ton dan jagung sebesar 1.980 Ton. Konsumsi pangan penduduk terhadap bahan pangan padi-padian sebesar 127,0 kg, umbi-umbian 8,7 kg, pangan hewan 46,5 kg, dan kacang-kacangan 9,5 kg.

Berdasarkan data SUSENAS diperoleh data konsumsi energi di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 2.090 kkal/kap/hari, konsumsi protein sebesar 66,30 gram/kap/hari, dan nilai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,30.

Tabel 2.75 Konsumsi Energi di Kota Palu Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.090	1.908	1.960	2.068
2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari	71,20	59,90	59,68	66,30
3	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,40	78,10	82,90	90,30

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021, diolah

4. Pertanahan

Luas lahan bersertifikat dalam lima tahun terakhir sejak Tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 820,10 hektar tiap tahunnya. Tahun 2016 luas lahan bersertifikat sebesar 1.183,89 ha. Tahun 2017 luas lahan bersertifikat naik sebesar 812,16 ha menjadi 1.996,05 Ha. Tahun 2018 naik signifikan sebesar 1.094,36 ha sehingga mencapai 3.090,41 ha. Tahun 2019 dan 2020 masing-masing naik sebesar 840,20 ha dan 533,69 ha sehingga menjadi 3.930,61 ha di Tahun 2019 dan 4.464,30 ha di Tahun 2020.

Tabel 2.76 Luas Lahan Bersertifikat (hektar) di Kota Palu Tahun 2016-2019

Luas Tanah Bersertifikat	2016	2017	2018	2019	2020
1) Hak Milik	508,75	137,02	419,22	165,06	51,85
2) Hak Guna Bangunan	675,14	675,14	675,14	675,14	481,84
3) Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
4) Hak Pakai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5) Girik	-	-	-	-	-
Jumlah	1.183,89	812,16	1.094,36	840,20	533,69
Luas Wilayah	39.506	39.506	39.506	39.506	39.506
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	2,99	5,05	7,82	9,95	11,30

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.73 menunjukkan kenaikan persentase luas lahan bersertifikat di Kota Palu dari Tahun 2016-2020. Kenaikan persentase tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 2,77%, dan kenaikan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 1,35% dari tahun sebelumnya.

5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang baik pada suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator di antaranya ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan pembangunan; terselenggaranya KLHS untuk kebijakan, rencana, program; hasil pengukuran indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan; penghargaan lingkungan hidup; peran dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA); penanganan persampahan; dan lain-lain.

Ketersediaan dokumen RPPLH Kota Palu sampai dengan Tahun 2020 belum terpenuhi sehingga pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan pun belum sesuai harapan. Isu lingkungan hidup yang dituangkan dalam dokumen perencanaan hanya

terbatas pada penanganan persampahan dan ketersediaan air bersih (air minum) bagi masyarakat di Kota Palu.

Tabel 2.77 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten	Air dalam kemasan	Leding	Sumur Bor / Pompa	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Total
1	Banggai Kepulauan	0,30	20,66	0,66	5,10	1,23	40,00	1,07	0,00	2,22	0,00	100
2	Banggai	0,04	4,52	10,04	11,03	0,70	8,40	1,55	1,66	0,00	0,00	100
3	Morowali	0,81	4,14	9,95	14,59	2,17	6,65	0,25	0,52	4,22	0,12	100
4	Poso	0,59	13,70	3,53	2,82	1,68	31,96	1,78	12,42	0,00	0,00	100
5	Donggala	0,26	6,73	37,12	0,05	2,94	36,14	2,57	2,74	0,00	0,00	100
6	Toli-toli	0,62	24,27	2,72	9,91	1,74	16,68	0,94	9,86	0,30	0,00	100
7	Buol	0,46	7,70	4,54	6,66	2,97	10,96	1,72	7,88	0,12	0,00	100
8	Parigi Moutong	0,78	5,68	23,56	8,71	3,16	9,75	2,38	10,85	0,11	0,00	100
9	Tojo Una-una	0,51	21,19	4,50	7,11	2,73	35,86	0,00	3,33	0,00	0,00	100
10	Sigi	0,70	0,96	27,83	1,05	1,68	23,93	11,04	18,04	0,00	0,00	100
11	Baggai Laut	0,14	18,97	0,84	4,87	4,84	38,99	7,24	0,00	0,00	0,00	100
12	Morowali Utara	3,07	0,42	3,08	11,18	0,35	14,74	3,33	5,43	0,00	0,95	100
13	Palu	6,07	1,95	12,82	0,12	0,00	2,08	0,19	0,00	0,00	0,00	100
14	Sul-Teng	1,42	8,43	14,12	7,25	3,00	17,22	2,44	6,28	0,32	0,05	100

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021

Mayoritas rumah tangga di Kota Palu menggunakan sumber air minum dari sumur bor/pompa dengan persentase sebesar 12,82%, air dalam kemasan sebesar 6,07%, mata air terlindungi sebesar 2,08%, leding sebesar 1,95%, mata air tak terlindungi 0,19%, dan sumur terlindungi sebesar 0,12%.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil suatu daerah menerbitkan beberapa dokumen atau

surat/akta untuk masing-masing penduduk yang melakukan pengurusan administrasi pencatatan sipil di antaranya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, dan kartu keluarga (KK).

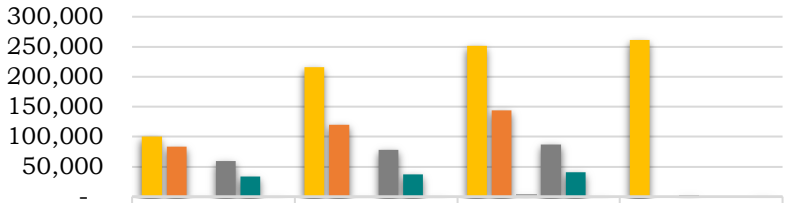

	2016	2017	2018	2019
Penduduk ber KTP	100,568	215,547	251,137	260,960
Penduduk ber akta kelahiran	83,682	119,594	143,704	-
Penduduk ber akta kematian	381	837	2,995	1,755
Penduduk memiliki KK	59,106	78,117	86,778	-
Penduduk ber akta nikah	33,194	37,484	41,129	-
Penduduk ber akta cerai	96	424	307	-

Gambar 2.40 Penduduk yang Memiliki KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, Akta Cerai, dan Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2016-2019

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Kenaikan jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu tiap tahunnya periode 2016-2019 kecuali kepemilikan akta perceraian yang menurun sebesar 117 orang hingga menjadi 307 orang pada Tahun 2018, dan akta kematian yang juga turun sebesar 1.240 orang pada Tahun 2019.

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta cerai seperti yang tertera dalam gambar 2.40 di atas, maka dapat diketahui rasio atau perbandingannya terhadap jumlah penduduk dengan status kepemilikan yang belum tersedia.

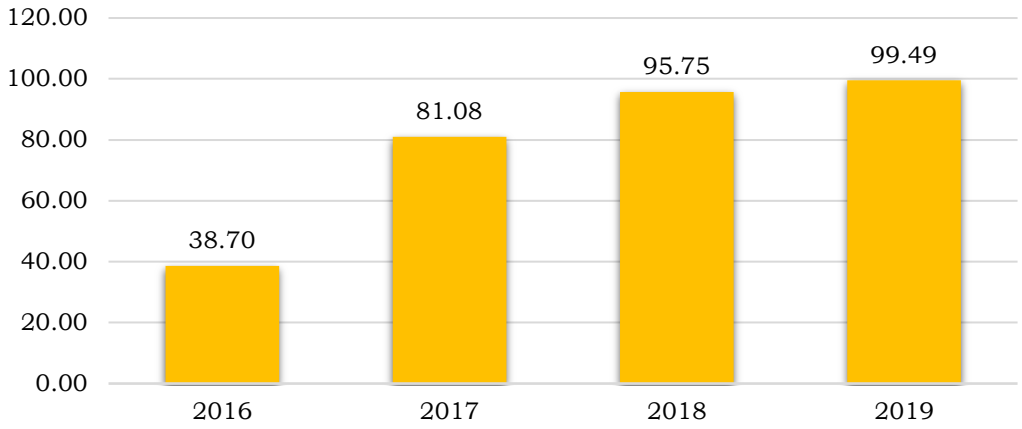

Gambar 2.41 Rasio Penduduk yang Memiliki KTP di Kota Palu Tahun 2016-2019

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2019 naik sebesar 3,75% hingga mencapai 99,49% dari tahun sebelumnya yang mencapai 95,75%. Kenaikan ini adalah kenaikan terendah selama kurun waktu empat tahun terakhir dari Tahun 2016-2019. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 42,37% hingga mencapai 81,08% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 38,70%.

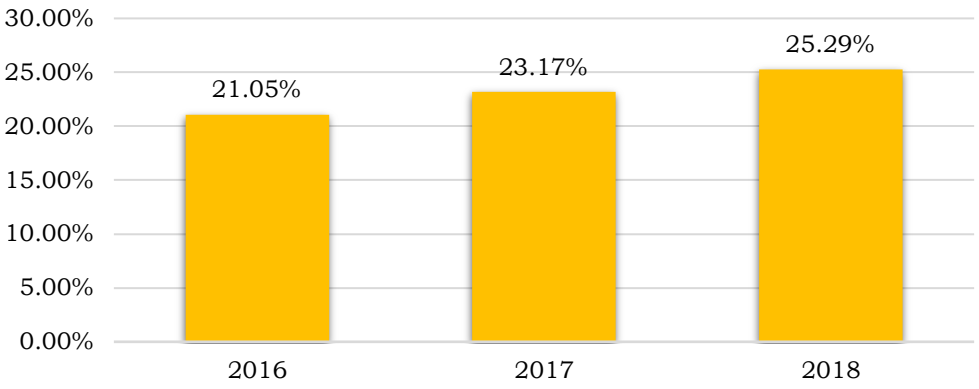

Gambar 2.42 Rasio Pasangan yang Memiliki Akta Nikah di Kota Palu Tahun 2016-2018

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Kenaikan rasio pasangan berakte nikah tiap tahunnya sebesar 2,12 %. Tahun 2016 sebesar 21,05 %, Tahun 2017 sebesar 23,17 % dan Tahun 2018 sebesar 25,29 %. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan jumlah pasangan nikah disertai dengan pengurusan dan penerbitan surat akta nikah, kenaikan ini masih terbilang rendah karena perbandingannya terhadap penduduk yang belum memiliki akta nikah jauh di atas penduduk yang telah memiliki akta nikah sebesar 74,71 % pada Tahun 2018, sehingga perlu untuk mengejar ketertinggalan.

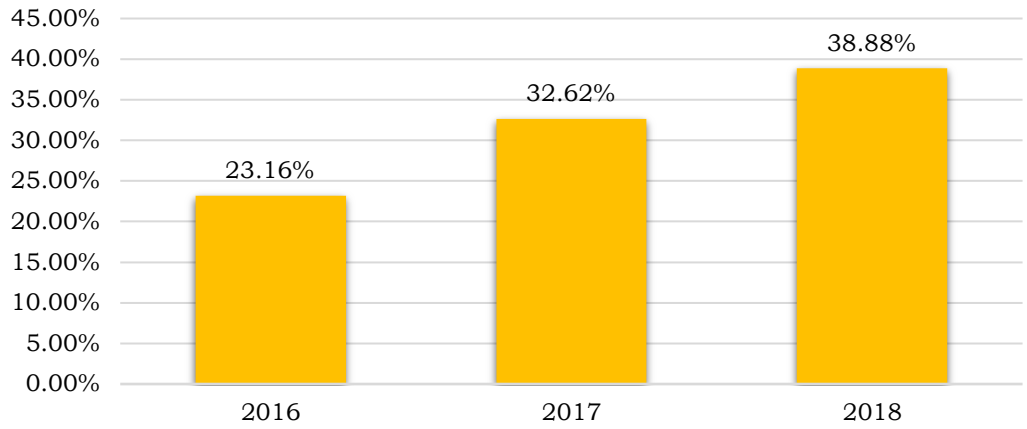

Gambar 2.43 Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2016-2018

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Rasio kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2016-2018. Pada Tahun 2016 rasionya sebesar 23,16% naik 15,72% menjadi 38,88% di Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu terhadap penduduk yang belum memiliki akta kelahiran masih di bawah separuh penduduk yang seharusnya memiliki akta kelahiran, sehingga sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

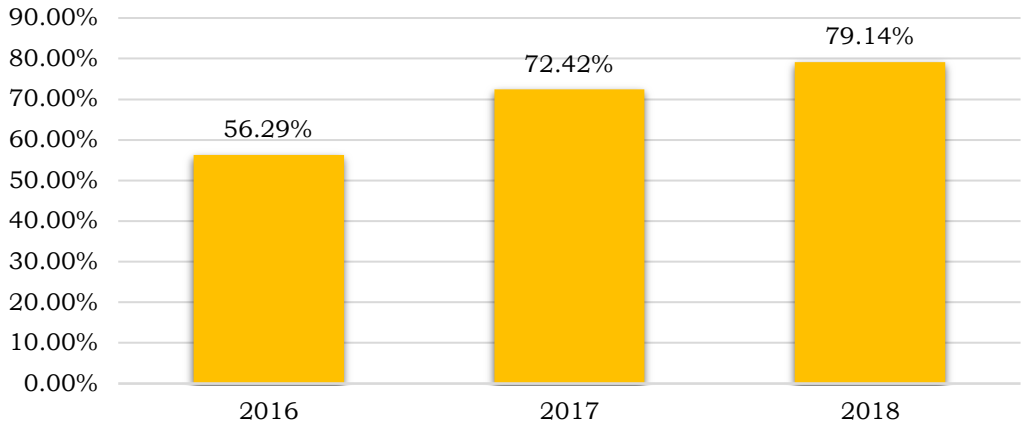

Gambar 2.44 Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Palu Tahun 2016 – 2018

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Kenaikan rasio kepemilikan kartu keluarga tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 16,13 % hingga mencapai 72,42 %. Tahun 2018 naik sebesar 6,72 % hingga mencapai 79,14 % dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,43 % tiap tahunnya periode 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan, jumlah penduduk dengan kepemilikan kartu keluarga lebih besar dibandingkan dengan yang belum memiliki kartu keluarga. Meskipun demikian masih terdapat 20,86 % penduduk yang belum memiliki kartu keluarga dari jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memiliki kartu keluarga.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak. Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1

Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Sejak Tahun 2015, sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Pada Tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat menjadi total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Hingga Tahun 2021, Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi.

Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu diukur melalui tingkat keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi. Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata jumlah anak di Kota Palu Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, yang pada Tahun 2016 sebesar 1,10 menjadi 1,16 di Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,03. Kondisi ini

menjelaskankan bahwa bertambahnya jumlah anak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah keluarga yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palu hingga Tahun 2020 adalah 1 atau 2 orang per keluarga.

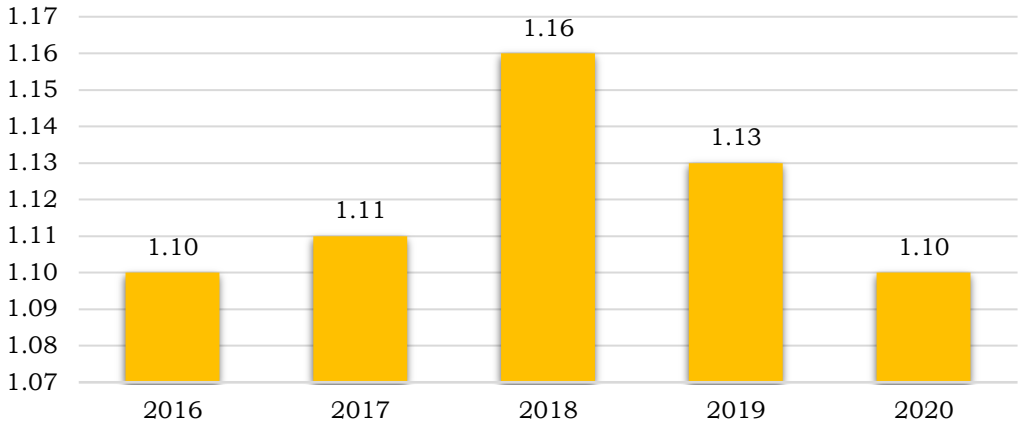

Gambar 2.45 Rata-Rata Anak per Keluarga di Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Rasio akseptor KB di Kota Palu dari Tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 rasionya sebesar 45,77 menjadi 70,02 di Tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan menjadi 79,73 di Tahun 2020.

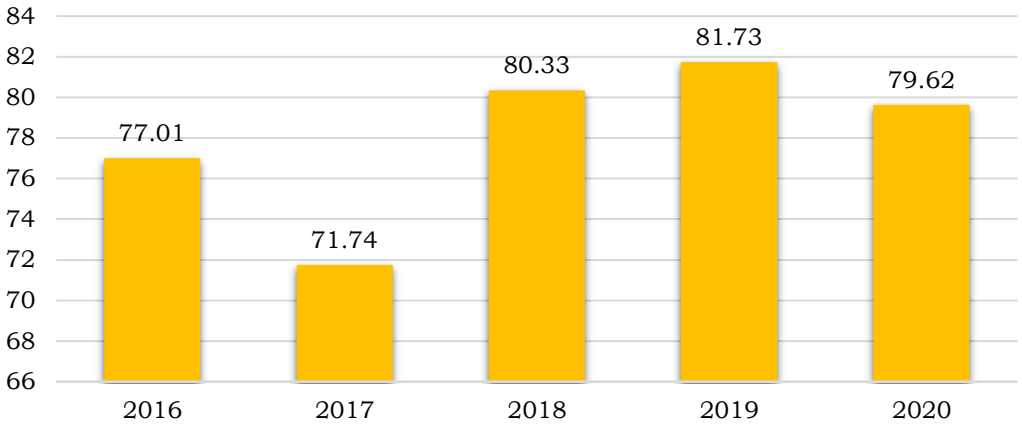

Gambar 2.46 Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016 - 2020
Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

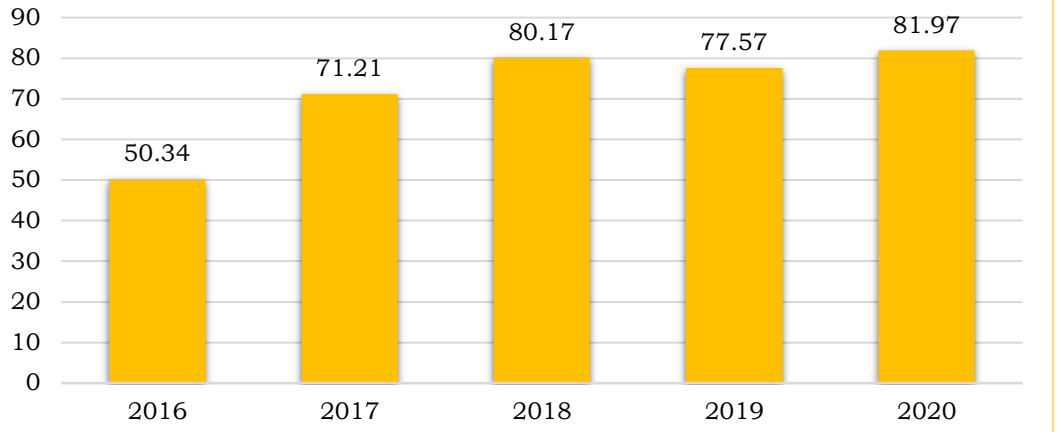

Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Cakupan peserta KB aktif di Kota Palu Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebesar 50,34 menjadi 71,21 pada Tahun 2017 dan kembali meningkat diTahun 2018 sebesar 80,17. Pada Tahun 2019 cakupan peserta KB aktif menurun menjadi 77,57 dan kembali meningkat menjadi 81,97 pada Tahun 2020. Besarnya angka partisipasi KB *(akseptor)* menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

9. Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah arus penumpang dari Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2016 arus penumpang sebesar 1.423.318 penumpang menjadi 1.515.257 penumpang di Tahun 2017 dan terus meningkat hingga mencapai 1.886.175 penumpang di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 1.025.689 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.78 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	93.557	112.838	108.547	75.745	N/A
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut	N.A	59.450	548.055	326.987	N/A
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	1.329.761	1.342.969	1.229.573	622.957	245.549
Total Jumlah Penumpang		**1.423.318**	**1.515.257**	**1.886.175**	**1.025.689**	**N/A**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Rasio izin trayek di Kota Palu mengalami fluktuasi selama Tahun 2017-2020. Pada Tahun 2017, rasionya mencapai 0,0000158 menjadi 0,0000156 di Tahun 2018, kemudian kembali mengalami fluktuatif di Tahun 2019 dan 2020 dengan capaian berturut-turut 0,0000162 dan 0,0000161. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu.

Tabel 2.79 Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Trayek	N/A	6	6	6	6
2	Jumlah Penduduk	374.620	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio izin Trayek		**N/A**	**0,0000158**	**0,0000156**	**0,0000162**	**0,0000161**

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Persentase uji Kir di Kota Palu Tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2017 persentase uji Kir mencapai 70,42 % dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 35,50 % pada Tahun 2020 dengan rata-rata penurunan

sebesar 11,64 % tiap tahunnya periode Tahun 2017-2020. Hal ini menunjukan kurangnya pemeriksaan uji berkala pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

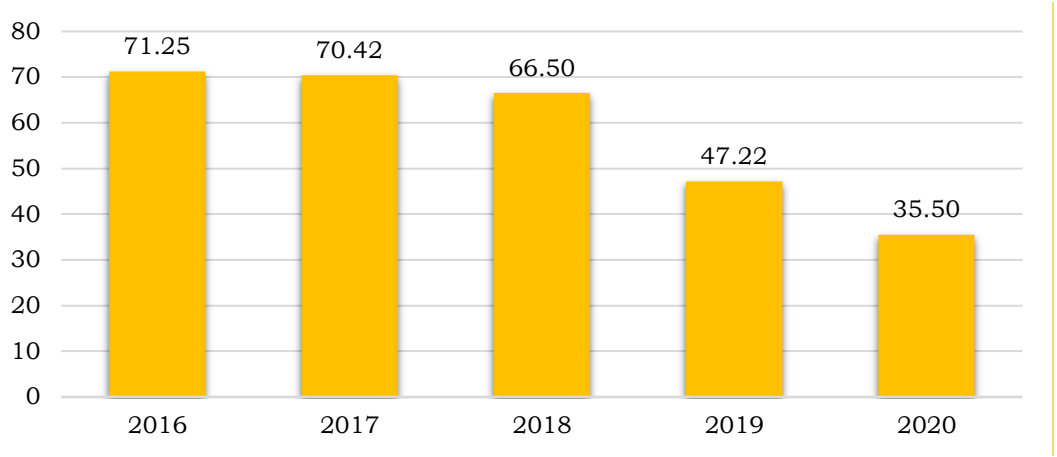

Gambar 2.48 Persentase Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah pelabuahan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan dengan total sebanyak 7 unit.

Tabel 2.80 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	4	4	4	4	4
Jumlah		**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2021

Ketersediaan pelabuhan laut/udara/terminal bis dengan jumlah ketersediaan sebanyak 7 unit tersebut masih mampu melayani kebutuhan arus keberangkatan dan kedatangan jumlah penumpang di Kota Palu yang terus menurun dan berfluktuasi sejak Tahun 2016-2020 di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu sampai dengan Tahun 2016 telah membangun jalan sepanjang 851,558 km, sementara jumlah kendaraan yang wajib uji mencapai angka yang berbeda dan cenderung menuirun setiap tahun.

Tabel 2.81 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan (km)	851,558	851,558	851,558	851,558	851,558
2	Jumlah Kendaraan (unit)	NA	NA	NA	12.642	12.642
Rasio Panjang Jalan = Panjang Jalan/ Jumlah Kendaraan		**NA**	**NA**	**NA**	**0,067**	**0,067**

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2016-2021, diolah

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah kendaraan di Kota Palu yang tersedia hanya data Tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah 12.642 unit kendaraan. Data panjang jalan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 sepanjang 851,558 km. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rasio panjang jalan pada Tahun 2019 dan 2020 adalah 0,067.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2017 mengalami peningkatan di Tahun 2018. Namun demikian, peningkatan angka tersebut terbilang cukup rendah karena tingkat pertumbuhannya hanya mencapai 9,47 % tiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun. Rendahnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum disebabkan oleh

pengaturan trayek angkutan umum di Kota Palu masih belum optimal, sehingga masyarakat (penumpang) lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan online dibanding angkutan umum.

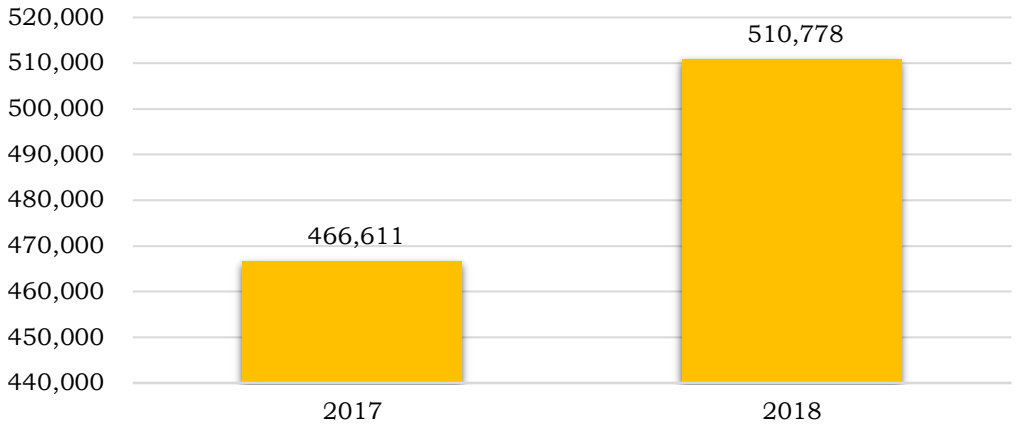

Gambar 2.49 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2018

Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi udara di Kota Palu, yaitu Bandara Udara Mutiara Sis Aljufri yang memiliki luas 12.511 meter persegi dengan daya tampung 800 penumpang dalam dua terminal. Bandara inilah yang menjadi pintu gerbang angkutan udara dari dan ke Kota Palu. Rata-rata pertumbuhan jumlah penumpang datang dan berangkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir masing-masing sebesar (17,03) % dan (16,65) %.

Tabel 2.82 Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2016-2020

Tahun	Penumpang (Orang)		
	Datang	Berangkat	Transit
2016	661.940	667.821	16.284
2017	663.206	679.763	26.251
2018	745.077	760.863	31.150
2019	604.820	622.957	34.773

2020	230.910	235.441	10.108

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Pada transportasi laut, Kota Palu memiliki dua 2 pelabuhan, yaitu Pantoloan dan Taipa. Pelabuhan Pantoloan melayani kapal yang memiliki kapasitas besar dengan rute antar pelabuhan dan antar pulau dan bahkan antar negara, sedangkan Pelabuhan Taipa melayani kapal yang berkapasitas kecil (kapal feri) dengan rute penyeberangan antar pulau. Jumlah penumpang pelabuhan pantoloan cenderung mengalami peningkatan pada periode 2016-2019 dan menurun pada Tahun 2020, baik penumpang orang maupun barang. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah akibat adanya pendemi Covid 19.

Tabel 2.83 Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan) Tahun 2016-2020

Tahun	Penumpang (Org)		Barang (Ton)	
	Datang	Berangkat	Dibongkar	Dimuat
2016	13.675	18.854	486.936	19.642
2017	10.293	15.799	307.498	2.747
2018	23.276	26.627	201.873	8.235
2019	38.112	36.991	268.810	144.643
2020	12.267	14.118	261.638	30.023

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Sedangkan untuk transportasi darat, Kota Palu memiliki beberapa terminal angkutan umum yakni Terminal Mamboro, Terminal Tipo, Terminal Manonda, dan Terminal Petobo.

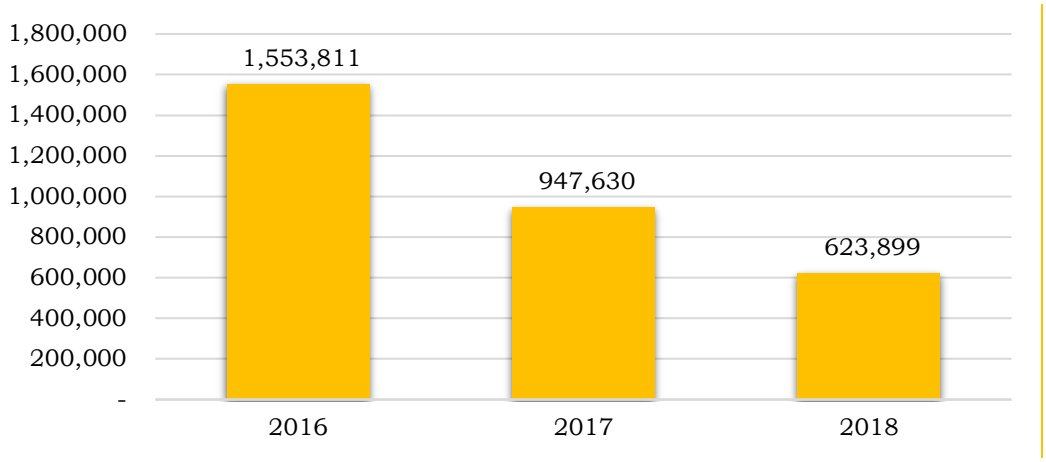

Gambar 2.50 Jumlah Orang Yang Melalui Terminal
Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas, terjadi penurunan jumlah orang/penumpang yang melalui terminal selama periode 2016-2018. Rata-rata penurunan jumlah orang/penumpang pada periode ini sebesar 14,89 %. Kondisi ini disebabkan oleh belum tertibnya penetapan sistem trayek/jalur angkutan oleh Pemerintah Kota Palu dan maraknya kendaraan angkutan *online*. Upaya menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas di Kota Palu, diperlukan ketersediaan rambu jalan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir perkembangan rambu dan marka jalan di Kota Palu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 jumlah rambu lalu lintas di Kota Palu sebanyak 299 unit meningkat menjadi 2.474 unit pada Tahun 2020.

Tabel 2.84 Jumlah Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2017-2020

Tahun	Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah	Ket
2017	Rambu Lalu Lintas	299	Unit
2018	Rambu Lalu Lintas	549	Unit
2019	Rambu Lalu Lintas	472	Unit
2020	Rambu Lalu Lintas	474	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

10. Komunikasi dan Informatika

Pada indikator komunikasi dan informatika, dalam periode 2016-2020 di Kota Palu terdapat 4 jaringan telepon genggam, namun tidak tersedia jaringan stasioner.

Tabel 2.85 Jaringan Komunikasi Provinsi/Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
3	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami penurunan selama Tahun 2016-2020, khususnya pada Tahun 2018. Pada periode 2016-2017 rasionya masih berada sekitar angka 2,3, namun terdapat penurunan pada tahun sebesar 1,02 dari rasio 2,34 di Tahun 2017 menjadi 1,32 di Tahun 2018.

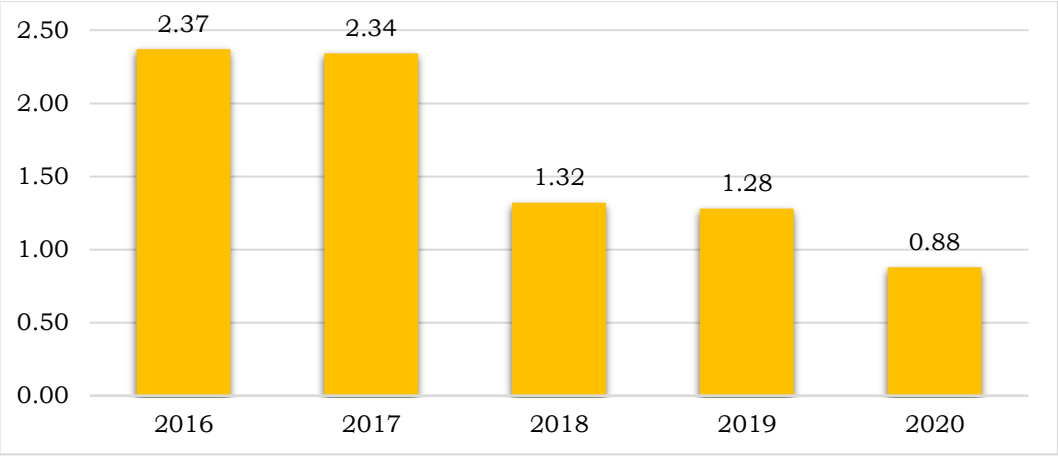

Gambar 2.51 Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Penurunan rasio ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah wartel/warnet di Kota Palu yang berbalik dengan jumlah

penduduk terus meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemasangan jaringan internet pribadi pada rumah-rumah masyarakat Kota Palu dan berkembangnya teknologi telepon genggam dalam periode tersebut.

Pada Tahun 2020, terdapat total 18 surat kabar nasional/lokal di Kota Palu. Jumlah jenis surat kabar nasional/lokal di Kota Palu selama Tahun 2016-2018 meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami situasi stagnan sehingga jumlah tidak berubah dari 18 surat kabar. Penambahan yang terjadi pada periode 2016-2020 terdapat pada jenis surat kabar terbitan lokal.

Tabel 2.86 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	5	5	5	5
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	10	12	13	13	13
3	Total jenis surat kabar	15	17	18	18	18

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Website milik pemerintah Kota Palu adalah http://palukota.go.id, hal ini untuk mempermudah masyarakat Kota Palu untuk mengakses perkembangan Kota Palu. Salah satu dasar daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika terdapat pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Energi listrik yang dikelola oleh PLN juga merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal tidak mengalami peningkatan selama Tahun 2015-2019, yaitu berjumlah 37 stasiun penyiaran.

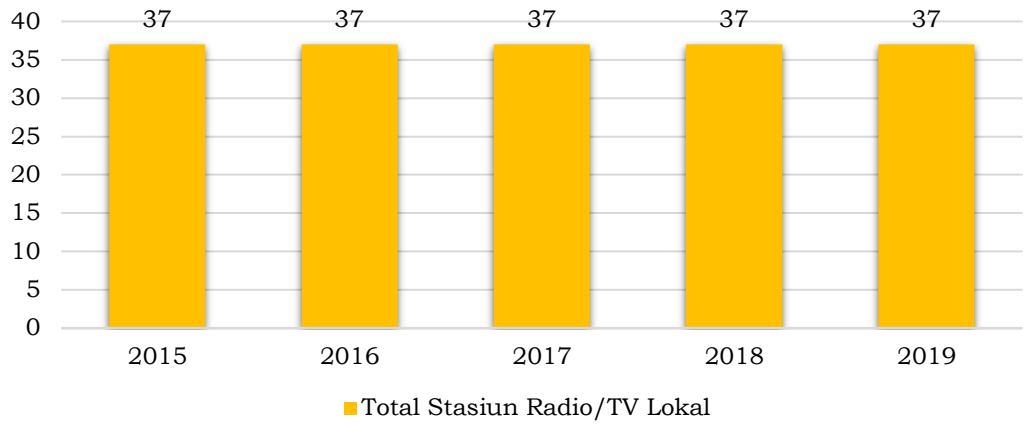

Gambar 2.52 Total Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu Tahun 2015-2019

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Meski umum dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN cenderung mengalami fluktuasi, jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN menunjukkan tren kenaikan pada dalam dua tahun terakhir

Tabel 2.87 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2016-2020

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWH)	Listrik Terjual (KWH)	Dipakai Sendiri/Susut/Hilang (KWH)
2016	235.399,735	511.086.908	459.521.413	306.652
2017	262.881,235	510.761.690	458.461.811	306.457
2018	256.186,00	490.879.890	447.610.719	294.744
2019	290.189,00	516.135.639	453.953.681	NA
2020	183.010,00	557.896.714	506.708.300	334.738

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2021

. Pada periode 2016-2018 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 3,95 persen dari 511 juta di Tahun 2016, atau hanya diproduksi sekitar 490 juta kwh pada Tahun 2018. Namun di periode 2019-2020 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 516 juta Kwh di 2019 dan 557 juta Kwh di Tahun 2020. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

Secara umum, pada periode 2016-2020 jumlah rumah tangga pengguna listrik menunjukkan kenaikan sehingga persentasenya juga menjadi naik. Pada Tahun 2016 persentasenya sebesar 143,83%, Tahun 2017 sebesar 149,67%, Tahun 2018 sebasar 149,83%, Tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 163,64% dan 171,16%.

Tabel 2.88 Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tangga	Jumlah Pelanggan Listrik	Persentase (%)
2016	104.998	151.020	143,83
2017	107.871	161.449	149,67
2018	109.654	164.298	149,83
2019	113.344	185.474	163,64
2020	115.696	198.031	171,16

Sumber: BPS Kota Palu 2021, Dukcapil Kota Palu 2020, diolah

Selain listrik, kebutuhan masyarakat akan telepon juga sangat penting sebagai alat komunikasi.

Tabel 2.89 Penduduk yang Menggunakan Telepon Tahun 2016-2020

Tahun	Pengguna Telepon	Penduduk	Rasio (%)
2016	79.254	374.020	21.19
2017	65.019	379.782	17.12
2018	52.531	385.691	13.62

Tahun	Pengguna Telepon	Penduduk	Rasio (%)
2019	42.855	370.376	11.57
2020	84.808	373.218	22,72

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Rasio penduduk yang menggunakan telepon cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan rasio pengguna telepon terhadap penduduk disebabkan oleh peralihan pengguna telepon pelanggan menjadi pengguna telepon bergerak.

11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 63,24% terus meningkat sampai pada Tahun 2017 yaitu sebesar 83,25%, pada Tahun 2018 mencapai 84,26% dan 2019 mencapai 100% Kemudian Tahun 2020 sangat menurun mencapai 39,25%. Sedangkan data jumlah UKM non BPR/LKM tidak tersedia.

Tabel 2.90 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	172	174	182	215	84
2	Jumlah koperasi	272	209	216	215	214
Persentase koperasi aktif		**63,24%**	**83,25%**	**84,26%**	**100%**	**39,25%**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

12. Penanaman Modal

Jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, namun menunjukkan tren meningkat. Pada Tahun 2016 jumlah investor berjumlah 1 investor dan menjadi 4 investor pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018

mengalami peningkatan mencapai 5 investor, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 4 investor pada Tahun 2019 pasca bencana gempa bumi dan tsunami Tahun 2018. Tahun 2020 total investor adalah sebanyak 15 investor, dengan komposisi PMDN yang berjumlah 8 investor, dan PMA sejumlah 7 investor.

Tabel 2.91 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2016	Jumlah Investor	2	0	1
2017	Jumlah Investor	2	2	4
2018	Jumlah Investor	2	3	5
2019	Jumlah Investor	4	0	4
2020	Jumlah Investor	8	7	15

Sumber: Administrator KEK Tahun 2021

Tabel 2.92 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	1	5.340.000.000
2017	2	155.122.760.000
2018	2	2.027.507.880.000
2019	1	87.500.000.000
2020	2	36.058.613.903.200

Sumber: Administrator KEK Tahun 2021

Jumlah investor dalam asing maupun dalam negeri yang ingin melakukan rencana investasi di Kota Palu mengalami perkembangan, yang belum sejalan dengan realisasi nilai investasi. Untuk itu masih diperlukan upaya kerja keras dari instansi yang menangani penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama Tahun 2016-2020 di Kota Palu tidak mengalami banyak perubahan dari segi jumlah proyek, namun menunjukkan banyak

perubahan dari sisi nilai yang diinvestasikan. Jumlah proyek investasi berskala nasional di Kota Palu selama periode 2016-2020 berkisar di antara 1 hingga 2 proyek setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah nilai investasi yang ditanamkan untuk proyek-proyek tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020, namun sesungguhnya relatif naik jika memperhitungkan Tahun 2019 sebagai tahun yang paling terdampak bencana 2018 dari sisi penanaman modal.

Sebagai penggambaran, nilai investasi untuk proyek berskala nasional sejak Tahun 2016-2018 meningkat jumlahnya dari 5,34 Miliar Rupiah pada Tahun 2016 ke angka 155,12 Miliar Rupiah pada Tahun 2017, dan bahkan menyentuh angka 2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Jumlah tersebut turun dengan sangat drastis hingga ke 87,5 Miliar Rupiah di Tahun 2019 sebagai efek dari bencana yang terjadi pada tahun sebelumnya. Di Tahun 2020, nilai investasi dari proyek berskala nasional yang ditanamkan di Kota Palu kembali meningkat dengan sangat menjadi 36,06 Trilyun Rupiah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda di Kota palu Tahun 2016-2020 memiliki jumlah yang sama dari tahun ke tahun. Organisasi Pemuda yang jumlahnya paling banyak berada di Kecamatan Palu Selatan yang berjumlah 91 organisasi, Palu Barat memiliki 65 organisasi dan Tawaeli memiliki 63 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga dengan jumlah 25 organisasi, Palu Utara dengan 28 organisasi, dan Mantikulore dengan 29 organisasi kepemudaan.

Tabel 2.93 Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	91
2	Kecamatan Palu Barat	65	65	65	65	65
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
4	Kecamatan Palu Utara	28	28	28	28	28
5	Kecamatan Tawaeli	65	65	65	65	65
6	Kecamatan Mantikulore	29	29	30	30	30
7	Kecamatan Tatanga	25	25	25	25	25
8	Kecamatan Ulujadi	35	35	35	35	35
	Kota Palu	**384**	**384**	**385**	**385**	**385**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Selanjutnya untuk jumlah organisasi olahraga dalam periode 2016-2020 mengalami sedikit peningkatan. Dari jumlah organisasi olahraga yang sebesar 204 organisasi pada Tahun 2016-2017, menjadi 205 organisasi pada Tahun 2018-2020. Jumlah Organisasi Olahraga yang paling banyak, yaitu pada Kecamatan Palu Timur berjumlah 54 organisasi, Mantikulore dengan 36 organisasi dan Palu Selatan dengan 33 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Ulujadi dengan jumlah 14 organisasi, Tatanga dengan 19 organisasi, dan Palu Barat dengan 19 organisasi.

Tabel 2.94 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2016-2019

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	13	13	14	14	14
	Jumlah	**204**	**204**	**205**	**205**	**205**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Total jumlah kegiatan kepemudaan selama periode 2016-2020 sebanyak 26 kegiatan yang di antaranya terdapat 6 kegiatan di Tahun 2016 dan 5 kegiatan di masing-masing Tahun 2017-2020. Sedangkan kegiatan olahraga selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari segi jumlah *event*. Pada Tahun 2016 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 25, kemudian dan perlahan-lahan meningkat hingga terdapat 28 kegiatan di Tahun 2020.

Tabel 2.95 Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	5	5	5	5
2	Jumlah kegiatan olahraga	25	27	27	27	28

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

14. Statistik

Kota Palu melalui Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan ketiga komponen indikator tersebut sebagai kebutuhan informasi yang tersusun dan tersaji dengan berbagai jenis data yang meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, serta ekonomi dan keuangan. Buku Kota Palu Dalam Angka dan buku PDRB Kota Palu selama periode 2016-2020 telah tersedia dengan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Palu.

15. Perpustakaan

Kota Palu telah memiliki perpustakaan dengan jenis kepemilikan yang berbeda. Berikut jumlah perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertara dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.96 Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	61	61	61	61	61
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	36	36	36	36	36
	Total	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

Jumlah perpustakaan dengan kepemilikan Pemda dan non Pemda yang tidak ada perubahan jumlah ketersediaaanya di Kota Palu sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 dimana untuk kepemilikan pemda berjumlah 61 unit dan non pemda berjumlah 36 unit dengan total perpustakaan berjumlah 97 unit di Kota Palu. Selain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016-2019 juga tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.97 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016–2019

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	2.306	2.138	2.081	1.897
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	935	600	350	237
	Total	**3.241**	**2.738**	**2.431**	**2.134**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2019

Jumlah total pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016–2019 cenderung mengalami penurunan sejak Tahun 2017 dengan rata-rata penurunan sebesar 299 pengunjung, yang pada

Tahun 2017 berjumlah 2.738 pengunjung menjadi 2.431 pengunjung di Tahun 2018, dan 2.134 pengunjung di Tahun 2019.

16. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di OPD Kota Palu sudah dilaksanakan oleh semua OPD, namun hanya terdapat satu OPD yang melakukan pengarsipan secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk semua OPD di Kota Palu sejak Tahun 2015.

2.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan di Kota Palu Tahun 2020 tercatat sebesar 1.116,71 ton, atau turun 1,85 % dari Tahun 2019 yaitu sebesar 1.137,75 ton. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 997,30 ton, dan perikanan budidaya sebesar 119,41 ton. Sementara itu, nilai produksi perikanan Kota Palu mengalami peningkatan yaitu yaitu dari Rp. 34.107.769.953 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 43.457.548.960 pada Tahun 2020.

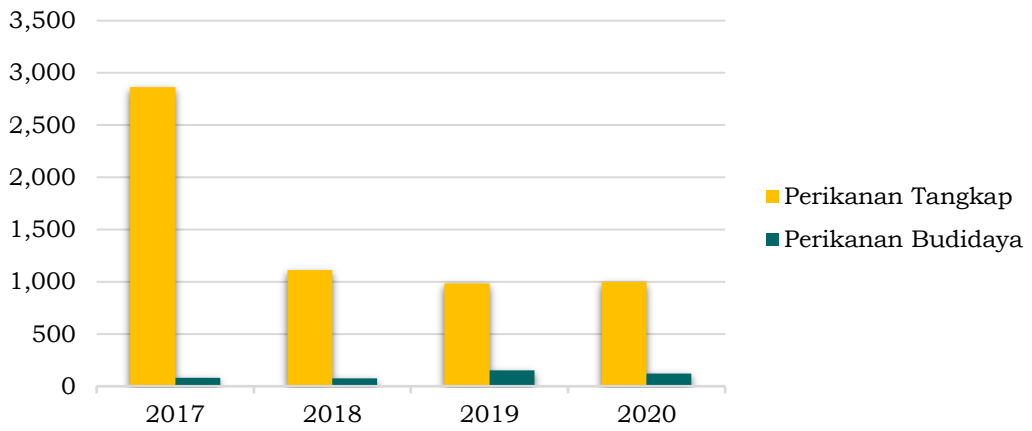

Gambar 2.53 Produksi Perikanan di Kota Palu (Ton) Tahun 2017-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Produksi perikanan di Kota Palu empat tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan persentase pertumbuhan yang menurun rata-rata sebesar 21,94% per tahun. Meskipun dua tahun terakhir persentase penurunan masing-masing rendah yaitu 4,39% pada Tahun 2019 dan 1,85% pada Tahun 2020, namun karena persentase penurunan yang signifikan terjadi pada Tahun 2018 sebesar 59,59% sehingga hal ini mempengaruhi rata-rata persentase penurunan tiap tahunnya.

2. Pariwisata

Pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Kota Palu, memerlukan ketersediaan sarana akomodasi (hotel) yang memadai. Jumlah hotel di Kota Palu pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 116 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 49 unit hotel dari keadaan Tahun 2019.

Jumlah tamu yang menginap di hotel pada Tahun 2020 sebanyak 7.250 orang, terdiri dari 194 orang tamu asing dan 70.562 orang tamu dalam negeri. Jumlah ini menurun drastis 45,02 % dibanding Tahun 2019.

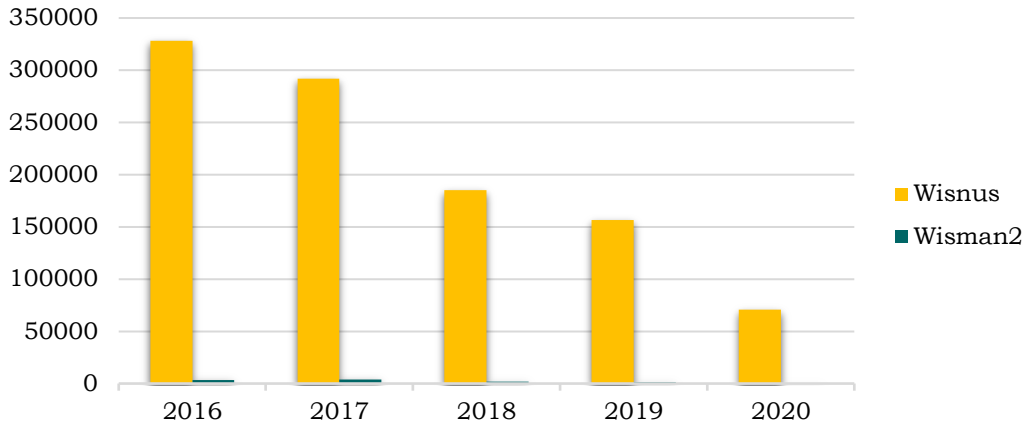

Gambar 2.54 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) di Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Selain itu, ada pesona budaya dan peninggalan sejarah yang layak untuk dikunjungi.

Tabel 2.98 Destinasi Wisata di Kota Palu

Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
Gedung Bersejarah	Gedung Juang	Lolu Utara	Pemerintah
	Banua Madika	Kabonena	Pemerintah
	Sou Raja	Lere	Pemerintah
Tempat Spiritual	Makam Datokarama	Lere	Pemerintah
	Makam Pue Paso	Watusampu	Pemerintah
	Makam Pue Ndjidi	Kabonena	Pemerintah
	Makam Pue Mpoloku	Lasoani	Pemerintah
	Vatu Posambaya	Donggala Kodi	Pemerintah
	Sumur Yoga	Donggala Kodi	Pemerintah
	Masjid Jami	Baru	Pemerintah
	Makam Gala	Bayaoge	Pemerintah
	Makam SIS Al-Jufri	Siranindi	Pemerintah
Taman Rekreasi	Pantai Taman Ria	Lere	Pemerintah
	Pantai Talise	Talise	Pemerintah
	Pantai Kampung Nelayan	Talise	Pemerintah
	Pantai Mamboro	Mamboro	Pemerintah
	Danau Sibili	Paantoloan	Pemerintah
Wisata Tirta	Taipa *Beach*	Taipa	Non Pemerintah
	Pantai Tombelaka	Tipo	Non Pemerintah
	Amazing Beach	Tipo	Non Pemerintah

Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
	Graha Tirta	Birobuli Selatan	Non Pemerintah
	Milenium Water Park	Lolu Selatan	Non Pemerintah
	Winner	Silae	Non Pemerintah
	Mandi Sauna	Kabonena	Non Pemerintah

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Sektor pariwisata sangat didukung oleh sektor akomodasi dan makan minum. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi sektor ini terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya dengan capaian 0,86% pada Tahun 2020. Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman bagi PDRB (ADHB) Kota Palu.

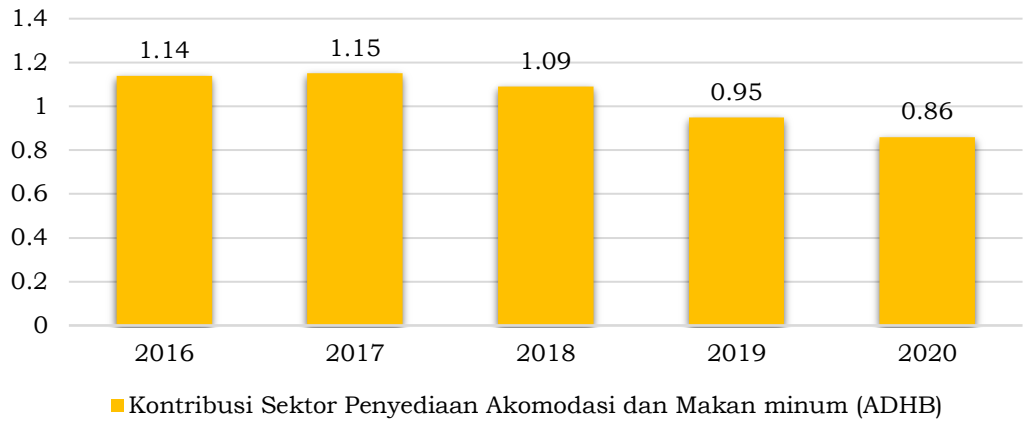

Gambar 2.55 Kontribusi Sektor PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2021

3. Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian Kota Palu.

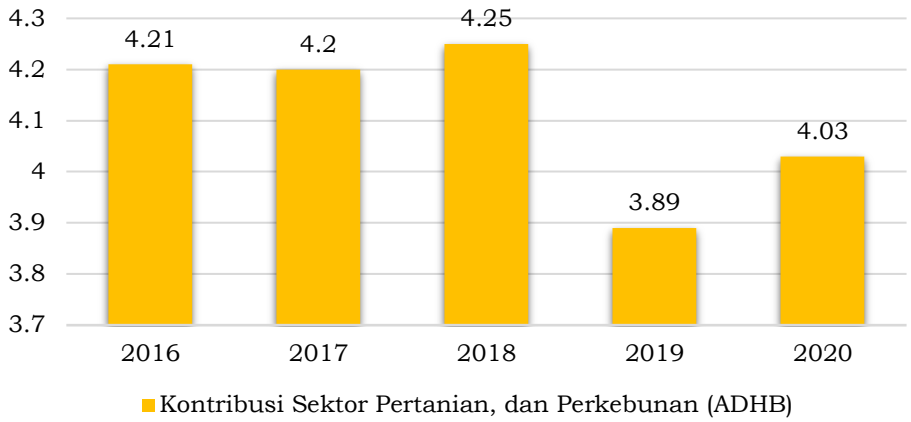

Gambar 2.56 Kontribusi Sektor Pertanian, dan Perkebunan (ADHB) terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang fluktuatif dalam waktu lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan kontribusi menurun sebesar 0,04 %, dengan persentase penurunan sebesar 0,98 % per tahun. Pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar -0,36 % dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,14 % dari tahun sebelumnya. Seiring dengan fluktuatifnya pertumbuhan kontribusi sektor ini, persentase pertumbuhannya pun mengikuti trend yang terjadi. Persentase pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar -8,47% dan persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 3,60%.

b. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun 2019 turun sebesar 0,13 %, dan Tahun

2020 sebesar 0,06 % dengan rata-rata penurunan sebesar 0,10 % per tahun.

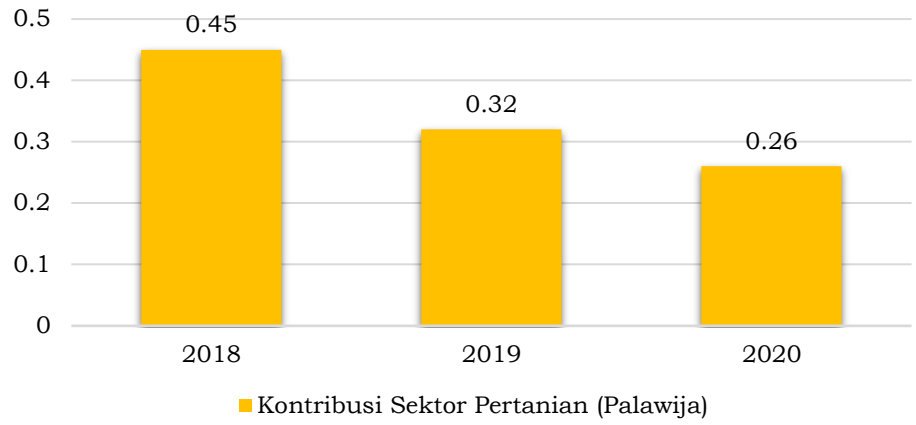

Gambar 2.57 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2018-2020
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021, diolah

Luas panen jagung Tahun 2016 sebesar 700,1 Ha naik menjadi 825,6 Ha pada Tahun 2017. Tahun 2018 turun menjadi 712,3 Ha dan terus menurun hingga menjadi 371,4 Ha pada Tahun 2020. Demikian pula dengan produksinya yang juga terus mengalami penurunan dari 4.430 Ton pada Tahun 2016 menjadi 1.980,29 Ton pada Tahun 2020.

c. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Tahun 2020, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu melaporkan produksi tanaman padi yang semakin menurun akibat menurunnya luas panen padi jika dibandingkan dengan Tahun 2016, di mana persentase pertumbuhan luas panen padi menurun sebesar 45,74 %, dan produksinya menurun sebesar 45,18 %. Tahun 2016

luas panen jagung sebesar 700,1 Ha menjadi 371,4 Ha pada Tahun 2020 mengalami penurunan luas panen sebesar 328,70 Ha dengan persentase penurunan 46,95 %. Produksi jagung pada Tahun 2016 sebesar 4.430 ton menjadi 1.980,29 ton pada Tahun 2020, mengalami penurunan produksi sebesar 2.449,71 ton dengan persentase penurunan 55,30 %.

4. Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kota Palu Tahun 2020 tercatat seluas 16.318 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 6,67 ribu Ha (41,26 persen), Hutan produksi terbatas seluas 4,42 ribu Ha (27,52 persen) dan Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 5,02 ribu Ha (31,12 persen).

Tabel 2.99 Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Tanaman Pangan di Kota Palu Tahun 2016-2020

No.	Komoditi	2016			2017			2018			2019			2020		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	350,9	54,06	1.897	527,3	56,92	3.002	353	54,62	1928	181,2	54,62	989,72	190,4	54,62	1039,96
2	Jagung	700,1	63,28	4.430	825,6	49,92	4.121	712,3	46,76	3.300,70	622.4	46,76	2.910,30	371,4	46,76	1980,29
3	Kacang Tanah	62,5	10,57	66	71,1	7,96	57	66,4	11,2	74,36	37.9	11,2	42,44	77,2	11,2	88,03
4	Kacang Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ubi Kayu	29,5	171,93	507	47,5	282,22	1341	35	278,65	975,29	24	278,65	668,76	22	278,65	640,90
6	Ubi Jalar	3,5	125,49	44	5,8	111,81	65	1	127,08	12,71	-	-	-	-	-	-
7	Kedelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palu Tahun 2021

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen . Secara umum dalam kurun waktu 2016 -2020 produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 produksi tersebut mengalami penurunan sebesar 8,23 % mencapai 171,87 % dari tahun sebelumnya sebesar 163,64 %. Adapun persentase pelanggan pengguna listrik terhadap jumlah rumah tangga di Kota Palu tertera pada gambar 2.58.

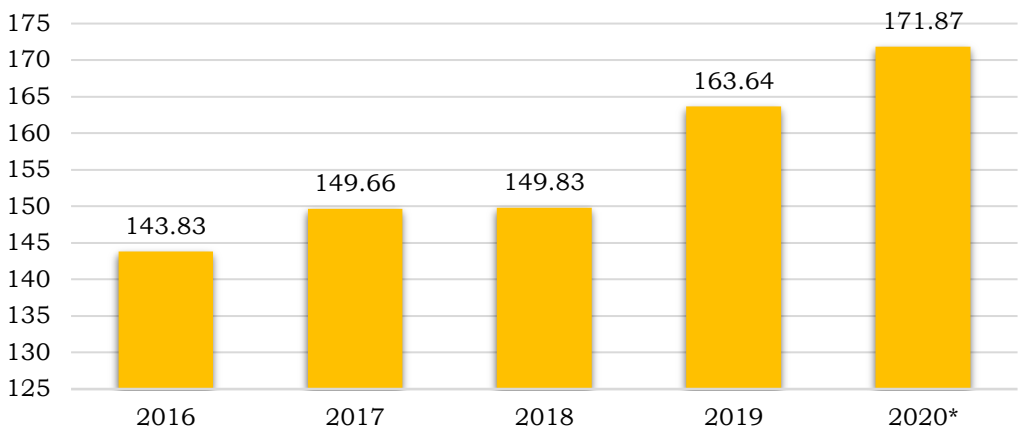

Gambar 2.58 Persentase Pelanggan Pengguna Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Kontribusi di sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Gambar 2.59 memperlihatkan kontribusi yang diberikan sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB di Kota Palu pada Tahun 2016-2020 yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perubahan terjadi pada Tahun 2018, kontribusi sektor ini sebesar

6,39 %, naik menjadi 7,22 % pada Tahun 2019. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada saat itu tengah dilakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Tahun 2018, akan tetapi terjadi penurunan kembali pada Tahun 2020.

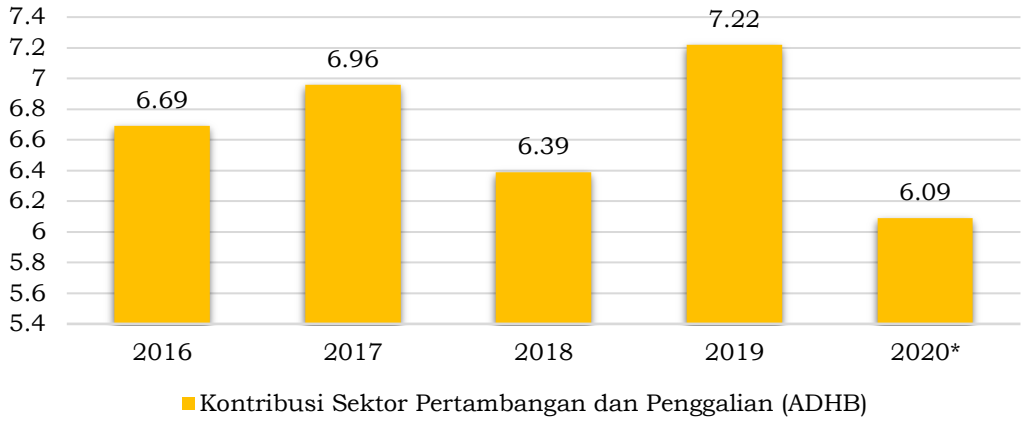

Gambar 2.59 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

6. Perdagangan

Nilai riil PDRB dari sektor perdagangan ADHK selama Tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,88% per tahun. Lain halnya dengan ADHB, sektor ini cenderung mengalami kenaikan dalam rentang Tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,31% setiap tahunnya.

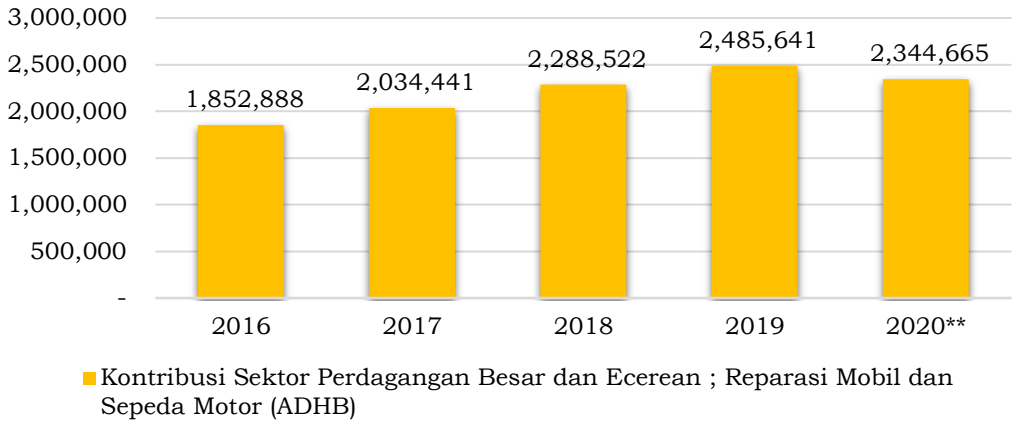

Gambar 2.60 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

7. Perindustrian

Perkembangan industri di Kota Palu yang fluktuatif disebabkan oleh banyaknya industri berkembang masih berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah yang dikelola secara formal maupun informal.

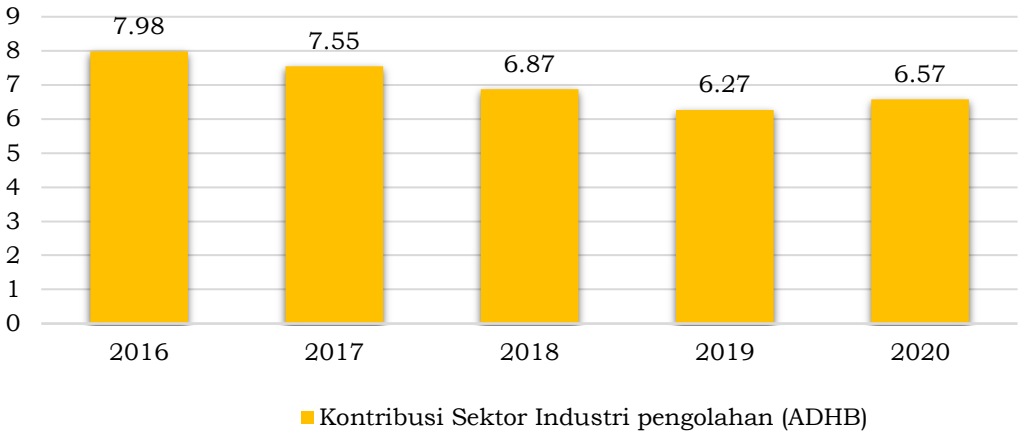

Gambar 2.61 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota Palu cenderung fluktuatif, dengan capaian pada Tahun 2016 sebesar 7,98%, dan mencapai angka 6,57% pada Tahun 2020. Pertumbuhan industri di Kota Palu cederung mengalami fluktuatif selama periode Tahun 2016-2020 dengan capaian pada setiap tahunnya berturut-turut -5,39%, -9,01%, -8,73% dan 4,78%.

2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Sekretariat Daearah

Sekretariat Daerah Kota Palu adalah unsur pendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan Kota Palu baik yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain hal tersebut sekretariat daerah juga mendukung unsur-unsur lainnya seperti unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Sekretariat Daerah Kota Palu secara bagian organisasinya terdiri dari beberapa bagian, yaitu Pemerintahan, Umum, Pembangunan, Hukum, Organisasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Hubungan Masyarakat.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang umum, persidangan dan risalah, dan keuangan DPRD. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, rapat-rapat DPRD, dan penyediaan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari beberapa unsur yaitu perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan perbatasan.

1. Perencanaan Pembangunan

Diperhatikan dari aspek dokumen perencanaan, Kota Palu telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai payung hukum atas tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepemimpinan Kota Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)/ Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang disertai dengan tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Ketersediaan dokumen perencanaan ini juga telah ditunjang dengan ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda, serta penjabaran konsistensi dari program-program seperti program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD. Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2020 sebesar 81,67% atau pada tingkat Konsistensi Tinggi, sedangkan konsistensi program

RKPD kedalam APBD Tahun 2020 sebesar 83,55% atau pada tingkat Konsistensi Tinggi.

2. Keuangan

Dari unsur keuangan yang menjadi perhatian adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, persentase silpa, persentase program yang tidak terlaksana, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan,

Tabel 2.100 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2019

No	Indikator		Tahun		
			2017	2018	2019
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD		0,12%	0,04%	0,47%
3	Persentase belanja pendidikan (20%)		29,55%	27,49%	9,31%
4	Persentase belanja kesehatan (10%)		21,82%	23,77%	23,74%
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	BL	56,65%	57,18%	58,62%
		BTL	43,35%	42,82%	41,38%
6	Bagi hasil Kabupaten/ Kota dan Desa		0,05%	0,05%	0,04%
7	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Palu Tahun 2017-2019

3. Kepegawaian

Target capaian Indikator Kinera Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu berdasarkan RENSTRA setiap tahun naik secara berjenjang. Pada Tahun 2020, masing-masing indikator memiliki

target 36 OPD. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2020 di gambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.101 Capaian IKU Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan akunTabel	Jumlah Perangkat Daerah yang kebutuhan ASN sesuai dengan standar	Jumlah OPD yang Kebutuhan ASN sesuai dengan standar	36 OPD	33 OPD	91,6%
	Jumlah Perangkat Daerah yang ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah OPD yang penempatan ASN sesuai standar kompetensi jabatannya.	36 OPD	35 OPD	97,2%

Sumber: Dokumen LAKIP BKPSDMD Kota Palu Tahun 2020

Dari tabel diatas, didapatkan bahwa sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah OPD yang kebutuhan ASN sesuai dengan standar memiliki target sebanyak 36 OPD dengan realisasi sebesar 33 OPD atau 91,6%.Sedangkan Jumlah OPD yang penempatan ASN sesuai standar kompetensi jabatan menargetkan 36 OPD dengan realisasisebesar 97,2%.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara demi mendukung kelancaran tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang urusan yang diembannya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan untuk Kota Palu dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palu dengan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Kinerja Balitbangda Kota Palu diukur melalui indikator persentase hasil kelibangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Adapun realisasi dan capaian kinerja Balitbangda Tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.102 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian
		Target	Realisasi	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan Kota Palu	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	94%	93 %	98,94 %

Sumber: Dokumen Lakip Balitbangda Kota Palu Tahun 2020

Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan Kota Palu Tahun 2020 dengan indikator kinerja Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, telah direalisasikan sebesar 93% atau lebih rendah dari target kinerja sebesar 94%, sehingga angka capaian kinerja sasaran strategishanya mencapai 98,94% dengan predikat sangat berhasil.

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat yang merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governenance*.

Dalam mewujudkan hal tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
3. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
4. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025.

Inspektorat Kota Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Palu Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Persentase menurunnya jumlah temuan keuangan.
2. Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pengawasan BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat.

3. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B.

Tahun 2020 merupakan tahun ke 4 pelaksanaandari Rencana Strategis lnspektorat Kota Palu, sehingga Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) lnspektorat Kota Palu yang disusun Tahun 2021 melaporkan ketercapaian lndikator sasaran pada Tahun 2020 dan ketercapaian Tujuan serta penjabaran melalui alat ukur sasaran dan indikator sasaran setiap tahunnya sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Strategis 2016-2021. Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 2.103 Pengukuran IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palu	Persentase menurunnya jumlah temuan keuangan	80%	56.10%	70.12%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat	80%	29.91%	37.38%
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan Pemda Kota Palu	100%	62,5%	62.5%
		Persentase Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B	100%	81.8	81.8
2	Meningkatnya profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Level 2

2.4.4.7 Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya, selain itu Camat sebagai pemimpin kecamatan mendapatkan kewenangan melalui pelimpahan sebagian kewenangan wali kota/bupati.

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Berikut jumlah kelurahan pada tiap Kecamatan se-Kota Palu disebutkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.104 Jumlah Kelurahan pada Kecamatan se-Kota Palu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	Palu Barat	6	Ujuna, Kamonji, Baru, Lere, Siranindi, Balaroa
2	Tatanga	6	Nunu, Boyaoge, Tawanjuka, Pengawu, Duyu, Palupi
3	Ulujadi	6	Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipo, Buluri, Watusampu
4	Palu Selatan	5	Birobuli Utara, Birobuli Selatan, Petobo, Tatura Utara, Tatura Selatan
5	Palu Timur	5	Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Barat, Lolu Utara, Lolu Selatan
6	Mantikulore	8	Talise, Talise Valangguni, Tanamodindi, Poboya, Lasoani, Kawatuna, Tondo, Layana Indah
7	Palu Utara	5	Mamboro, Mamboro Utara, Taipa, Kayumalue Ngapa, Kayumalue Pajeko
8	Tawaeli	5	Lambara, Pantoloan, Pantoloan Boya, Baiya, Panau
Kota Palu		**46**	

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2020

2.4.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan teknis mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2. Mengorganisir rakyat dan membentuk satuan linmas untuk menanggulangi akibat – akibat serangan musuh dari luar akibat bencana agar kerugian jiwa dan material dapat dihindari atau dibatasi.
3. Memelihara dan meningkatkan moril rakyat dalam keadaan darurat, serta memelihara ketahanan rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala gangguan dan ancaman.
4. Membantu kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan menjaga ketentraman dan ketertiban melaksanakan pengamanan pilkada secara langsung serta kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan daya bela negara dan daya tahan masyarakat.

2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu

Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				Target 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	33,33%	77,77%	100%		95%	>
2	Angka rata-rata lama sekolah	11,26	11,33	11,60	11,61	11,38	>
3	Angka harapan lama sekolah	15,92	16,20	16,22	16,23	16,65	<
4	Angka harapan hidup	69,93	70,31	70,68	71,04	70,56	>
5	Kontribusi sektor pertanian dan ekspor impor terhadap PDRB	14,14	13,90	13,10	13,73	23,35	<
6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,55	7,10	6,49	6,57	12,44	<
7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	76,77	77,48	86,75		79,48	<
		(Baik)	(Baik)	(Baik)		(Baik)	<
8	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,9999	3,00	2,90		3,015	<
9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	B	B	BB	
11	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	38%	86%	86,93%		95%	>
		(8 kw)	(18 kw)	(18 kw)		(20 kw)	>
12	Rasio Sampah Tertangani	68,52%	100%	94,47%	90,88%	100%	<
13	Cakupan Layanan Transportasi Kota	68,50%	79,10%	74,50%		77,13%	<
14	Indeks Kualitas Lingkungan	69,73	87,49	51		>70	<

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				Target 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
	Hidup						
15	Rasio Jalan Kondisi Mantap	72%	74,50%	53,97%		79%	<
16	Indeks resiko bencana	119,54	119,54	162,7		110,54	<
17	Indeks kerukunan beragama	69	71	90		72	<
18	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	25	16		27	<

2.6 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu

Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2019

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pertumbuhan PDRB	6,12	5,86	5,05	5,2	(4,54)	9,76	<
2	Laju inflasi	1,49	4,33	6,46	2,30	1,81	< 6,00	>
3	PDRB per kapita	49.650.000	53.760.000	58.650.000	67.000.000	N/A	48.500.000-52.000.000	
4	Indeks Gini	0,37	0,37	0,33	0,34	0,33	0,33 - 0,34	>
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia							
	a. 40% Penduduk	15,85	15,3	25	29,58	N/A	16,75	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Berpenghasilan Rendah							
	b. 40% Penduduk Berpenghasilan Menengah	38,9	39,2	39,4	39,7	N/A	39,8	
	c. 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	45,25	45,5	45,6	45,8	N/A	43,35	
6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	92,94	93,29	93,45	93,43	92,79	94,00-95,00	>
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,73	80,24	80,91	81,5	81,47	81,14	>
8	Angka melek huruf	99,89	99,69	99,68	99,84	99,78	100	>
9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,25	11,26	11,33	11,60	11,61	12,7	>
10	Angka usia harapan hidup	69,93	69,93	70,31	70,68	71,04	71	>
11	Prevalensi balita gizi kurang (%)	0,155%	0,162%	0,153%	0,101%	N/A	0,54	
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	-	66,28	65,81	65,95	66,46	69,15	>
13	Tingkat pengangguran terbuka	-	6,56	5,81	6,36	8,38	4,7	<
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) ADHB	1,14	1,15	1,09	0,95	0,86	1,22	>
15	Kontribusi sektor Ekspor impor terhadap PDRB (%) ADHB	9,98	9,96	10,7	9,92	9,7	10,62	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) ADHB	7,98	7,55	6,87	6,27	6,57	8,42	>
Aspek Daya Saing Daerah								
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-19,29%	-17,58%	-11,90%	-15,22%	-17,83%	65%	>
2	Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)	34,11	43,74	38,72	12,45	12,11	16,75	>
3	Rasio ketergantungan	37,65%	38,74%	39,13%	39,86%	44,89%	37,35	<
4	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,74	7,65	8,50	8,43	-9,92	3.5-3	>
Aspek Pelayanan Umum								
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar								
1.	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,89	68,38	36,36	34,03	37,45	71,58	>
1.2	Angka Partisipasi Kasar							
	1.2.1 Angka Partisipasi Kasar SD	115	126	110	111	104,8	112	>
	1.2.1 Angka Partisipasi Kasar SMP	102	107	109	105	91,85	103	>
1.3	Angka Partisipasi Murni							
	1.3.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	88,44	90,43	91,92	92,85	92,50	100	>
	1.3.2 Angka Partisipasi	68,25	74,17	75,32	76,88	78,81	82,31	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Murni SMP/MTS/Paket b							
1.4	Angka Partisipasi Sekolah							
	1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	98,28	99,03	98,22	90,00	98,56	100	>
	1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B	94,05	95,92	94,86	85,07	95,54	100	>
1.5	Angka Putus Sekolah							
	1.5.1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	N/A	0.04	0,05	0,03	N/A	0,02	
	1.5.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	N/A	0.01	0,26	0,09	N/A	0,15	
1.6	Angka Kelulusan (AL)							
	1.6.1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100	=
	1.6.2 Angka Kelulusan SMP/MTS/Paket B	100	100	100	100	100	100	=
1.7	Angka Melanjutkan (AM)							
	1.7.1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A	85,8%	86,7%	87,8%	85,86%	85,25%	95,9	>
	1.7.2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B	151,8%	140,4%	136,2%	141,62%	N/A	93,87	>
1.8	Fasilitas Pendidikan							
	1.8.1 Sekolah Pendidikan	88,04%	87,56%	76,75%	75,66%	76,31%	67,05	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SD/MI kondisi bangunan baik							
	1.8.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	64,78%	64,78%	65,71%	63,88%	63,01%	68	>
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar							
	SD	55,39	53,58	48,77	54,69	54,36	01:18	<
	SMP	37,70	54,29	51,30	44,39	46,73	01:31	<
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar							
	SD	58,66	54,68	58,87	63,52	67,86	01:26	<
	SMP	64,73	71,93	88,62	75,72	80,61	01:23	<
1.11	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar							
	SD	43,97	40,05	42,17	45,76	NA	01:28	
	SMP	96,32	108,98	136,75	120,57	NA	01:17	
1.12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,89	99,69	99,68	99,84	99,78	99,88	>
1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	67,95	74,48	73,20	76,88	66,18	87,95	>
2.	Kesehatan							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	995,83	998,58	997,33	997,28	997,99	0,9982	<
2.2	Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran hidup	4,89	1,70	2,67	1,62	2,35	3,17	>
2.3	Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran hidup	2,30	1,13	2,67	0,94	1,74	1,66	
2.4	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	2,94	0,53	1,04	1,28	0,53	206,9	>
2.5	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	3,48	3,42	3,63	3,77	3,75	3,8	>
2.6	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,583	0,840	0,998	1,010	1,002	46	<
2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	99,88	107,74	104,29	114,80	106,67	100	>
2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	96,16	97,50	96,67	100,28	100,30	98	>
2.9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,65	91,31	93,48	93,48	86,67	100	<
2.10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	=
2.11	AFP Rate per 100.000 penduduk	4,99	6,01	2,28	3,23	0	2	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	126,67	115,95	95,09	62,66	41,18	100	<
2.13	Cakupan penemuan &penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	50,59	61,69	49,32	50,84	50,52	75	<
2.14	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	=
2.15	Penderita Diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	=
2.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	6,93	8,66	24,05	4,01	N/A	100	
2.17	Cakupan kunjungan bayi	98,97	101,04	126,52	93,20	100,96	100	<
2.18	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	97,56	97,61	96,58	98,85	100,30	100	<
2.19	Cakupan pelayanan nifas	96,05	95,38	95,61	99,51	99,86	100	<
2.20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88,39	86,28	86,97	90,74	88,79	90	<
2.21	Cakupan pelayanan anak Balita	86,22	87,54	79,64	76,37	85,96	98	<
2.22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	N/A	N/A	13,34	N/A	N/A	95	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.23	Cakupan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar	99,24	100	99,66	96,17	66,16	100	<
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	87,64	84,12	175,59	54,04	N/A	65	
2.25	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidiki epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100	100	=
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum							
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	0,39	0,43	0,14	0,46	N/A	78,38	
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	0,21	>
3.1.3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	39,07	43,21	14,84	46,27	N/A	72,8	
3.1.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	61,35	64,61	67,995	N/A	N/A	4,17	
3.1.5	Persentase drainase	1,36	1,5	1,88	2,14	N/A	2,94	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat							
3.1.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0,7	2,14	4,3	6,1	N/A	6,91	
3.1.7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	72,08	77,3	66,76	44,38	N/A	84,92	
3.1.8	Rasio jaringan irigasi	11,26	11,58	11,85	12,15	N/A	12,28	
3.1.9	Persentase penduduk berakses air minum	79,01	79,27	79,58	79,87	N/A	80,13	
3.1.10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	99,77	97,77	97,30	96,95	99,21	44,09	>
3.2.	Penataan Ruang							
3.2.1	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	92	<
3.2.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	49,5	52,92	56,34	59,79	N/A	63,18	
3.2.3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	98,61	98,89	99,17	99,45	N/A	99,73	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Rasio rumah layak huni	25,97%	26,03%	26,10%	17,45%	N/A	26,24%	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,00%	97,22%	97,48%	88,60%	N/A	97,98%	
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,22%	0,18%	0,09%	16,80%	N/A	0,00%	
4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	99,22%	99,43%	99,78%	75,21%	N/A	100,00%	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	2,88	2,84	2,80	2,92	N/A	3,01	
5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	13,48	11,59	15,92	19,82	N/A	12	
5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	1	>
5.4	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	1	>
5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	=
5.6	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
5.7	Persentase kelompok siswa yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana	0%	0%	0%	20%	40%	40%	=
5.8	Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana	30%	50%	60%	75%	80%	80%	=
5.9	Persentase kelurahan di zona merah yang mendapat simulasi berbasis bencana	25%	25%	35%	40%	65%	65%	=
5.10	Persentase pembentukan kelurahan tangguh di daerah rawan bencana	25%	25%	35%	40%	60%	60%	=
5.11	Persentase pembentukan sekolah tangguh bencana di daerah rawan bencana	0%	0%	0%	0%	25%	35%	<
5.12	Persentase daerah rawan bencana yang terpetakan	45%	50%	65%	75%	85%	85%	=
5.13	Persentase pemasangan rambu rawan bencana	45%	50%	65%	75%	80%	80%	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terpenuhi di daerah rawan bencana							
5.14	Persentase penanganan bencana pada saat terjadinya bencana	35%	55%	65%	80%	85%	85%	=
5.15	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang terlatih	25%	30%	35%	40%	50%	50%	=
5.16	Persentase pengadaan logistik yang terlaksana	25%	25%	35%	40%	50%	50%	=
5.17	Persentase Tindak Lanjut Kajian Untuk Pemulihan Pasca Bencana (Jitu-Pasna)	15%	25%	35%	45%	65%	65%	=
6.	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40,05	NA	41,27%	10,60%	11,57%	92,45	<
6.2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	52,7	44,28	24,73	10,745	N/A	92,45	
6.3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha	0	35,71	71,43	71,43	N/A	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bersama (Kube) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya							
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	23,81	35,715	N/A	73,81	
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	N/A	100	
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	N/A	100	
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	21,9	29,61	46,37	58,605	N/A	79,89	
Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1.	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0%	55%	66%	66%	N/A	2,78%	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0%	39%	40%	60%	N/A	85,71%	
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	9,38%	10,34%	11,55%	12,64%	N/A	13,86%	
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	6,25%	12,50%	23,08%	31,50%	N/A	31,25%	
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	12,5%	25%	37,5%	50%	N/A	62,50%	
1.6	Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	12,5%	25%	37,5%	50%	N/A	62,50%	
1.7	Rasio lulusan S1/S2/S3	9,59	10,23	10,52	11,06	11,43	0,24	>
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	35,71	40,71	45,71	44,86	N/A	55,71	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	14,29	14,29	14,29	14,29	13,46	31,43	
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	64,29	69,29	74,29	52,64	N/A	84,29	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Rasio KDRT	0,14	0,053	0,038	0,039	0,053	0,1	>
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	90,63	89,81	95,13	94,49	94,91	26,38	>
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	=
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	=
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100	100	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	68,2	55,44	51,44	43,06		43,44	<
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100		100	<
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	4,78	2,5	2,11	0,775		1,18	<
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100		100	<
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,92	0,93	0,94	0,95	0,92	0,96	<
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,99	0,96	0,94	0,915	0,95	0,93	<
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di	1,08	1,1	1,08	1,08	N/A	1,11	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SMA							
2.16	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	189	180	241	267	N/A	228	
3.	Pangan							
3.1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	N/A	2090	1908	1960	2068	65	>
3.2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari	N/A	71,2	59,90	59,68	66,30	1.800	<
3.3	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	90,4	78,10	82,90	90,30	90	>
4.	Pertanahan							
4.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	189	180	241	267	N/A	276	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	2	2	2	2	N/A	2	
5.3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	7	10	10	10	9	10	<
5.4	Persentase sampah yang terangkut	87,14%	68,52%	100%	94,47%	90,88%	100%	<
5.5	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	12	15	18	21	26,83	50 ton	
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	87,14%	68,52%	100%	94,47%	70%	70	=
5.7	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0,43	0,43	0,66	77,5	81	81%	=
5.8	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	15	17	24	29	164	17	>
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	38,70	81,08	95,75	99,49	N/A	100	
6.2	Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran	54,84	85	30,1	17,73	N/A	100	
6.3	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6.4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	22,16	32,62	38,88	44,19	53,64	100	<
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	98%	100%	95%	>
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,61	1,49	1,73	1,79	1,16	1,16	=
8.2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	0	0	0	0	81,82	<
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0	72,73	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.4	Jumlahkebijakan (Peraturan Daerah/PeraturanKepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0	1	<
8.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	3	5	7	9	9	=
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,10	1,11	1,16	1,13	1,10	1,76	<
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,26	0,24	0,22	0,2	0,15	0,17	<
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	0,13	0,12	0,12	0,115	0,113	0,12	>
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,31	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	0,29	0,11	0,12	0,035	0,14	0,14	=
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	63,09%	66,24%	69,55%	72,78%	76,45%	76,68%	<
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65,09%	65,09%	68,35%	69,98%	74,40%	75,35%	<
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	34,63%	35,67%	36,74%	37,80%	38,92%	38,98%	>
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	12,50%	37,50%	75,00%	75,00%	100%	100,00%	=
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	69,47%	74,47%	79,47%	84,50%	86,15%	89,47%	<
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penduduk							
8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	46,95	47,82	48,69	49,56	58,76%	50,43	>
8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	49,16%	49,16%	51,16%	52,16%	54,90%	55,16%	<
8.20	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	43,75%	47,75%	51,75%	55,75%	0,53	59,75%	<
8.21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	1,26	1,32	1,38	1,44	1,52	1,52	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keluarga di setiap kelurahan							
8.22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	66,67%	66,67%	69,67%	71,17%	75,05%	75,67%	<
8.23	Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	37,02%	35,02%	33,02%	31,02%	25,5%	29,02%	<
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	93.557	112.838	108.547	75.745	N/A	165.372	
9.2	Jumlah trayek angkutan umum	N/A	6	6	6	6	12	<
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	110	104	74	55	175	2583	<
9.4	Persentase layanan angkutan darat	16,39%	17,04%	17,71%	18,37%	17,99%	19,14%	<
9.5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)	71,25	70,42	66,50	47,22	35,50	61%	<
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	N/A	299	549	472	474	91%	>
9.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	336,45	354,67	NA	369,59	797,33	3,7	>
10	Komunikasi dan							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Informatika							
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	1	>
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	1	>
10.3	Jumlah Staf IT yang terlatih	87 org	87 org	178 org	178 org		178 org	<
10.4	Jumlah OPD yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	39	39	39	39	N/A	39	
10.5	Jumlah sarana pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat (media	1 media	4 media	7 media	7 media	N/A	7 media	
10.6	Jumlah terlaksananya diseminasi informasi kegiatan pemerintah kota	4	4	4	4	N/A	4	
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif	63,24%	83,25%	84,26%	100%	39,35%	0,91%	>
11.2	Persentase BPR/LKM aktif	1%	1%	1%	1%	N/A	1%	
11.3	Persentase Usaha Mikro	0,77%	0,78%	0,78%	0,78%	N/A	0,77%	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penanaman Modal							
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	>
12.2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1	4	5	4	15	55	<
12.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	5.340.000.000	155.122.760.0000	2.027.507.880.000	87.500.000.000	36.058.613.903.200	950	
12.4	Kenaikan / Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	N/A	N/A	18,75%	-2475%	674%	5,00%	>
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	53	54	54	55	N/A	56	
14	Statistik							
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	"belum tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	tersedia	
15	Persandian							
15.1	Jumlah Sandiman yang tersedia	0	0	2	2	N/A	4	
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival	2	7	7	0	0	7	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	seni dan budaya							
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	9	10	10	10	12	<
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	3	4	6	6	6	6	=
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	9	6	6	6	3	>
17	Perpustakaan							
17.1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	0,82	0,84	0,88	0,88	0,183	0,95	>
17.2	Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	21,43	20	20,83	20,53	48,5	31,25	>
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,259	0,255	0,251	0,248	0,259	0,011	>
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	270	228	202	177	N/A	292	
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	2	2	36	3	>
18	Kearsipan							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10	15	20	20	25	29	<
18.2	Jumlah SDM Pengelola kearsipan	6	10	15	15	82	25	>
Urusan Pilihan								
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata (%)	n/a	451,82	-49,10	-77,57	N/A	99,03%	
1.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	1,45	1,5	1,55	2,5	N/A	150,30 Hari	
2	Pertanian							
2.1	Produksi tanaman pangan utama							
	1. Padi (ton)	1.897	3.002	1.928	989,72	1.039,9	2.674	<
	2. Jagung (ton)	4.430	4.121	3.300,7	2.910,3	1980,2	3.056	<
2.2	Produksi tanaman hortilkultura utama							
	- Bawang merah (ton)	8.554	9.539	7.022	7.609	5.112	18.156	>
2.3	Produksi peternakan utama							
	1. Sapi (ekor)	9.173	8.706	6.414	5.434	6.375	8.572	<
	2. Kambing/domba (ekor)	54.409	45.840	30.545	28.644	25.890	136.196	<
	3. Unggas (ekor)	4.152.622	7.453.885	7.948.994	3.452.237	N/A	6.957.144	
2.4	Produksi olahan pertanian							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	utama							
	1. Bawang goreng (kg)	198.000	200.000	204.000	207.000	182.500	212.242	<
	2. Minyak kelapa sehat (Ltr)	198	200	210	216	405	232	>
	3. Abon (Kg)	86.427	86.427	88.173	89.046	13.250	89.945	<
2.5	Nilai Tukar Petani (NTP)	98	99,35	100	100	N/A	104	
5	Ekspor impor							
5.1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3	4	4	6	N/A	6	
5.2	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	
5.3	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	35%	40%	55%	65%	N/A	75%	
6	Perindustrian							
6.1	Cakupan Bina IKM	3	4	4	6	N/A	43%	
6.2	Persentase IKM yang memiliki izin	100%	100%	100%	100%	N/A	70%	
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Produksi perikanan							
	1. Perikanan tangkap (ton)	2.753	2.865	1.113	985,6	997,3	2.865	>
	2. Perikanan budi daya	55,8	79,54	76,30	152,15	119,41	58,07	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ton)							
7.2	Nilai Tukar Nelayan	99	101	103	103	N/A	107	
Penunjang Urusan								
1.	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	=
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	=
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	=
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	=
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	=
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	=
2	Keuangan							
2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	1,49%	0,12%	0,04%	0,47%	46,18%	0,14%	>
2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	31,92%	29,55%	27,49%	9,31%	20,08%	23,80%	<
2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	21,41%	21,82%	23,77%	23,74%	15,32%	28,23%	<
2.4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	52,51%	56,65%	57,18%	58,62%	60,63%	58,26%	>
		47,49%	43,35%	42,82%	41,38%	39,37%	35,95%	>
2.5	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,036%	3,89%	<
2.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
3	Pendapatan							
3.1	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD	67,13	40,43	41,41	45,44	45,36	40,8	>
3.2	Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD	24,91	5,34	4,41	3,83	3,40	6,04	<
3.3	Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD	1,18	0,00	0,83	0,93	0,72	0,84	<
3.4	Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6,78	54,24	53,35	49,80	56,25	52,31	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang Sah terhadap PAD							
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
4.1	Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	18 JP	20	20	20	N/A	20 JP	
4.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2,04	3,06	3,79	0,00	N/A	5,7	
4.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	66,08	48,64	57,95	0,00	N/A	80,44	
4.4	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	37	887	870	41	N/A	39	
4.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada instansi pemerintah	2.944	2.067	1.798	N/A	N/A	3.122	
4.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5.183	3.690	3.557	N/A	N/A	4.156	
5	Penelitian dan pengembangan							
5.1	Persentase implementasi	0	50%	60%	60%	92%	80%	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	rencana Kelitbangan.							
5.2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan.	0	75%	80%	80%	93%	90%	>
5.3	Penerapan SIDa:							
5.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	60%	75%	75%	72%	90%	<
5.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	75%	80%	80%	95%	90%	>
6	Pengawasan							
6.1	Persentase tindak lanjut temuan	35,00%	50,00%	93,75%	67,74%	94,89%	97,50%	<
6.2	Persentase pelanggaran pegawai	0,81%	1,07%	1,00%	1%	N/A	0,50%	
7	Sekretariat Dewan							
7.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	=
7.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Target Kinerja	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
7.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	=

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka Pendanaan. Pengelolaan keuangan daerah yang dianalisa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Umumnya, pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD selalu melalui analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan maka dibutuhkan informasi tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Aspek-aspek yang dianalisa adalah kinerja masa lalu dan proyek selama tahun rencana yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap Kapasitas keuangan daerah yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mempertimbangkan alokasi anggaran pada program-program prioritas daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan pembangunan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara ringkas, salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Untuk mengetahui realisasi APBD dan rata-rata pertumbuhannya dapat di lihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**1,392,215,925,000.57**	**1,340,647,282,633.58**	**1,316,087,928,104.67**	**2,176,218,365,346.83**	**1,304,323,670,760.20**	**4.94**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**279,586,962,580.57**	**284,380,010,205.58**	**267,401,948,490.67**	**235,922,540,208.83**	**260,179,152,643.20**	**(1.44)**
1.1.1	Pajak Daerah	102,894,771,841.85	114,598,205,203.05	110,739,726,500.68	107,199,060,079.28	112,880,185,945.26	2.53
1.1.2	Retribusi Daerah	15,599,833,585.00	14,316,839,150.00	11,794,055,835.00	9,032,938,664.00	9,901,834,854.06	(9.91)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	4,014,388,613.19	2,536,110,131.00	2,209,626,764.00	2,193,768,512.00	2,048,503,784.00	(14.26)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	157,077,968,540.53	152,928,855,721.53	142,658,539,390.99	117,496,772,953.55	135,348,628,059.88	(2.95)
1.2	**Dana Perimbangan**	**1,035,430,761,259.00**	**928,017,146,208.00**	**910,693,127,994.00**	**940,428,625,740.00**	**886,421,012,129.00**	**(3.68)**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,717,834,775.00	33,148,908,973.00	43,921,500,794.00	30,692,496,200.00	57,467,020,999.00	24.38
1.2.2	Dana Alokasi Umum	683,609,353,000.00	671,600,535,000.00	671,600,535,000.00	698,733,242,000.00	648,403,965,000.00	(1.23)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	321,103,573,484.00	223,267,702,235.00	195,171,092,200.00	211,002,887,540.00	180,550,026,130.00	(12.34)
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**77,198,201,161.00**	**128,250,126,220.00**	**137,992,851,620.00**	**999,867,199,398.00**	**157,723,505,988.00**	**153.52**
1.3.1	Hibah	4,000,000,000.00	42,885,815,472.00	40,253,140,000.00	868,758,875,487.00	48,196,398,616.00	732.45
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari	66,983,056,284.00	77,514,310,748.00	75,488,711,620.00	79,207,565,911.00	74,790,199,372.00	3.11

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya						
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	18,750,000,000.00	51,780,758,000.00	31,231,328,000.00	84.12
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,215,144,877.00	350,000,000.00	3,501,000,000.00	120,000,000.00	3,505,580,000.00	888.46
2	**BELANJA**	**1,381,081,485,920.21**	**1,245,186,845,688.68**	**1,191,550,500,271.10**	**1,338,835,752,001.18**	**1,733,027,788,274.00**	**6.91**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**671,875,434,386.21**	**535,864,560,395.00**	**529,634,595,160.00**	**544,785,927,954.00**	**1,050,796,412,188.00**	**18.58**
2.1.1	Belanja Pegawai	651,060,039,043.21	522,743,975,018.00	519,532,991,192.00	525,868,254,729.00	552,059,713,079.00	(3.53)
2.1.2	Belanja Bunga	4,973,543,770.00	2,854,856,395.00	761,708,110.00	-	-	(71.97)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	6,793,975,000.00	5,580,834,500.00	7,336,125,000.00	12,084,881,673.00	69,784,545,762.00	138.95
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,717,185,175.00	4,062,756,000.00	27,750,000.00	6,350,000,000.00	409,665,000,000.00	7,246.91
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	612,431,000.00	619,470,000.00	366,750,430.00	186,131,552.00	629,167,400.00	37.28
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	718,260,398.00	2,668,482.00	1,609,270,428.00	296,660,000.00	18,657,985,947.00	16,553.69
2.2	**Belanja Langsung**	**709,206,051,534.00**	**709,322,285,293.68**	**661,915,905,111.10**	**794,049,824,047.18**	**682,231,376,086.00**	**(0.20)**
2.2.1	Belanja Pegawai	55,454,925,370.00	56,910,254,209.00	63,410,462,761.00	65,152,920,716.00	68,262,945,071.00	5.39

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	366,614,097,013.00	401,311,517,073.68	417,168,201,501.00	415,792,341,370.00	426,659,044,750.00	3.92
2.2.3	Belanja Modal	287,137,029,151.00	251,100,514,011.00	181,337,240,849.10	313,104,561,961.18	187,309,386,265.00	(1.96)
3	**PEMBIAYAAN**	**21,410,435,491.02**	**1,578,996,071.38**	**71,473,483,670.96**	**195,688,411,504.53**	**1,031,071,024,850.18**	**1,233.64**
3.1	**Penerimaan Pembiayaaan**	**54,772,580,891.02**	**32,536,677,560.38**	**97,221,420,670.96**	**196,010,911,504.53**	**1,033,071,024,850.18**	**171.72**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**33,362,145,400.00**	**30,957,681,489.00**	**25,747,937,000.00**	**322,500,000.00**	**2,000,000,000.00**	**99.34**

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa belanja daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,91% per tahun. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 18,58% per tahun, sementara rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar -0,20% per tahun. Terhitung tahun 2018 hingga tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan terdapat peningkatan pada belanja bantuan sosial yakni penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi dengan total anggaran Rp. 890 Miliar.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Taransfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3.2 Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2012-2016

Tahun	Rencana Pendapatan (Rp)	Capaian Pendapatan (Rp)	Rasio Pendapatan (%)
2016	1,439,152,214,772.63	1,392,215,925,000.57	96.74
2017	1,343,987,650,990.20	1,340,647,282,633.58	99.75
2018	1,338,505,411,883.00	1,316,087,928,104.67	98.33
2019	2,151,228,808,801.20	2,176,218,365,346.83	101.16
2020	1,231,232,010,908.66	1,304,323,670,760.20	105.94

Realisasi pendapatan daerah Kota Palu dari Tahun 2016 hingga 2018 hampir sesuai rencana yang ditetapkan dengan rasio antara 96,74% - 99,75%, selanjutnya rasio pendapatan Tahun 2016 dan 2020 realisasinya melampaui rencana yakni 101,16% dan 105,94%.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Guna meningkatkan PAD pemerintah Kota Palu melakukan beberapa langkah *Pertama*, Intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah. *Kedua*, Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD. *Ketiga*, Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pelayanan.

a. Pajak Daerah

Rencana dan Realisasi PAD Kota Palu selama periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

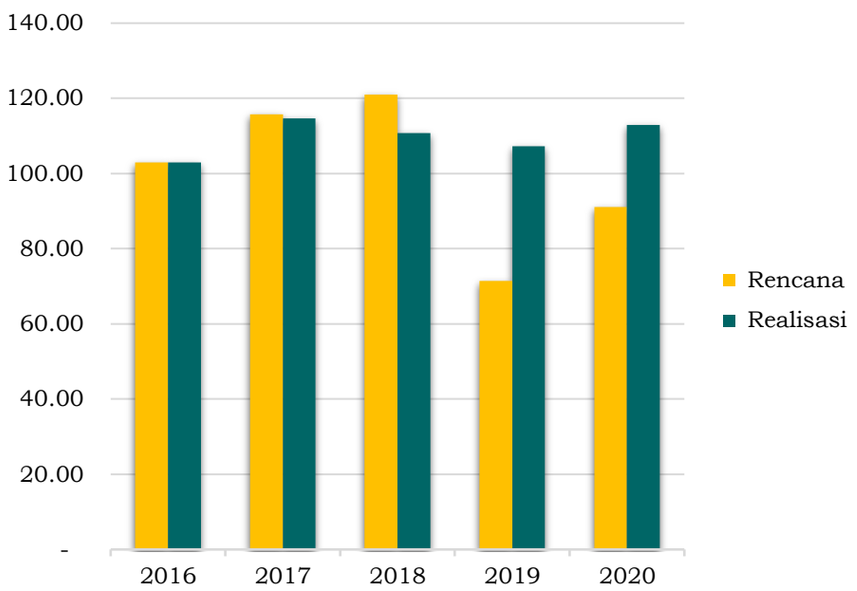

Gambar 3.1 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palu Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)
Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan Gambar 3.1, Perkembangan pajak daerah Tahun 2016 dan 2017 realisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Perkembangan pada dua tahun tersebut memperlihatkan tren pajak daerah rata-rata 99,42 %. Tahun 2018 penerimaan pajak daerah relatif sesuai dengan yang direncanakan, dengan realisasi sebesar 91,55 %. Selanjutnya, pada Tahun 2019 pelampuan realisasi pajak daerah sebesar 50,2 % dari target yang ditetapkan. Kondisi Kota Palu yang tengah berupaya bangkit pasca bencana alam maka target pajak daerah dikoreksi berdasarkan potensi yang ada, kenaikan realisasi pendapatan tersebut, diperoleh dari kotribusi sektor pajak Hotel (terutama hotel berkelas melati dan *homestay*), restoran/rumah makan, dan mineral bukan logal dari bantuan (Tambang galian C). Tahun 2020 bencana non alam melanda dunia dan memaksa meredam aktivitas masyarakat yang berdampak pada meredupnya perkonomian, berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan kebijakan relaksasi pajak yang juga diterapkan di Kota Palu sehingga target pajak daerah lebih rendah dari realisasi Tahun sebelumnya. Meski demikian pelampauan realisasi atas target pajak daerah hingga 23,9 %.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah PAD yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai unit penghasil pada Pemerintah Kota Palu. Pemungutan Retribusi pada Pemerintah Kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Rencana dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 3.2.

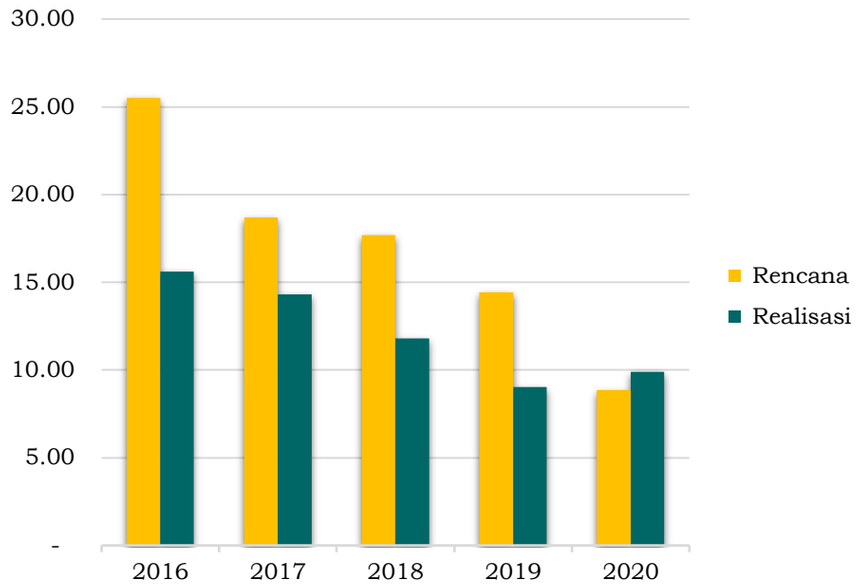

Gambar 3.2 Perkembangan Rencana dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palu Tahun 2026-2020 (Milyar Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.2. diatas, menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 dan 2017, realisasi penerimaan retribusi parkir belum sesuai dengan yang direncanakan. Jika diamati realisasi 2 tahun tersebut target yang dicapai dari retribusi rata-rata hanya mencapai 30,66 %. Misalnya tidak tercapainya retribusi parkir ditepi jalan umum yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, dindikasikan karena control aparat dari Dinas Perhubungan belum optimal, serta manajemen pengelolaan parkir yang lemah dan setiap pelayanan tidak menggunakan Karcis.

Tahun 2016 penerimaan retribusi parkir yang cukup sebasar, yaitu Rp. 2,1 Milyar, dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi Rp. 583 Juta (atau turun menjadi sebesar 367 %). Hal ini diindikasikan pada tahun 2016 masih diterapkan kebijakan "PANIN" yang diwajibkan bagi seluruh PNS pada Pemerintah Kota Palu untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, kebijakan tersebut ternyata bertentangan dengan regulasi tentang retribusi parkir, sehingga kebijakan PANIN tersebut dipenetapan cabut (dihentikan). Selanjutnya,

pada tahun 2018 terjadinya Gempa Bumi yang mengakibatkan lumpuhnya sektor ekonomi, sehingga penetapan rencana target dan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Demikian halnya tahun 2019, karena kondisi ekonomi pasca bencana belum pulih, maka realisasi tahun 2019 relatif kecil. Tahun 2020 target retribusi dilakukan penyesuaian dan capaian realisasi 111,8 %.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang barasal dari pembagian deviden bagian laba Pemerintah Daerah Kota Palu atas penyertaan modal/investasi kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Rincian rencana dan realisasi tahun anggaran 2016-2020 dapat disajikan pada Gambar 3.3.

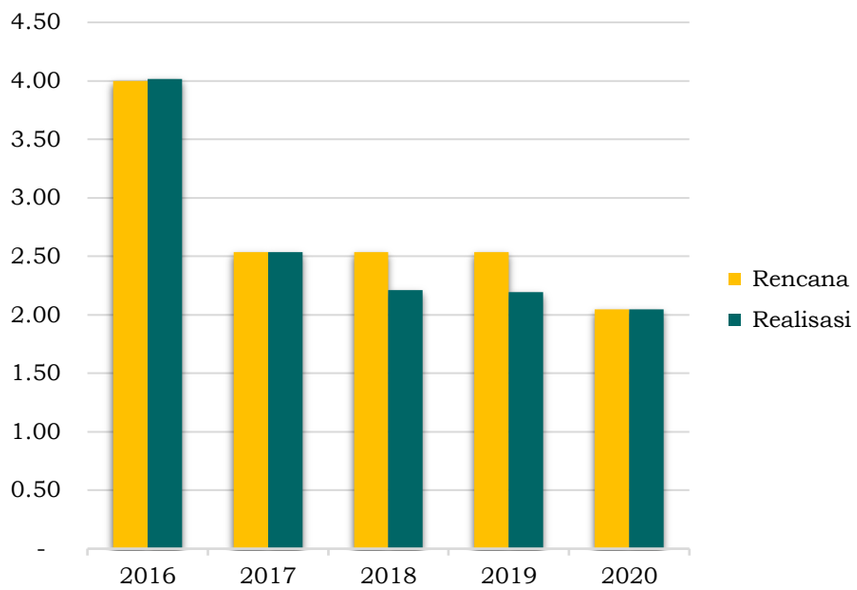

Gambar 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan pada Gambar 3.3 diatas, rencana dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tampak

bahwa tahun 2016 antara target dan realisasi relatif sama dan nampak bahwa kenaikan tersebut cukup signifikan. Kenaikan ini diindikasikan bersumber dari adanya ekspansi PT. Mall Tatura dan PT. Citra Nuansa Elok yang mengelola Palu Grand Mall. Namun, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kontribusi pendapatan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya berasal dari PT. Bank Sulteng.

d. Pendapatan Lain yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun pengelola keuangan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017 dikelolah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan RSU Anutapura, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Perkembangan pendapatan lain yang sah disajikan pada Gambar 3.4.

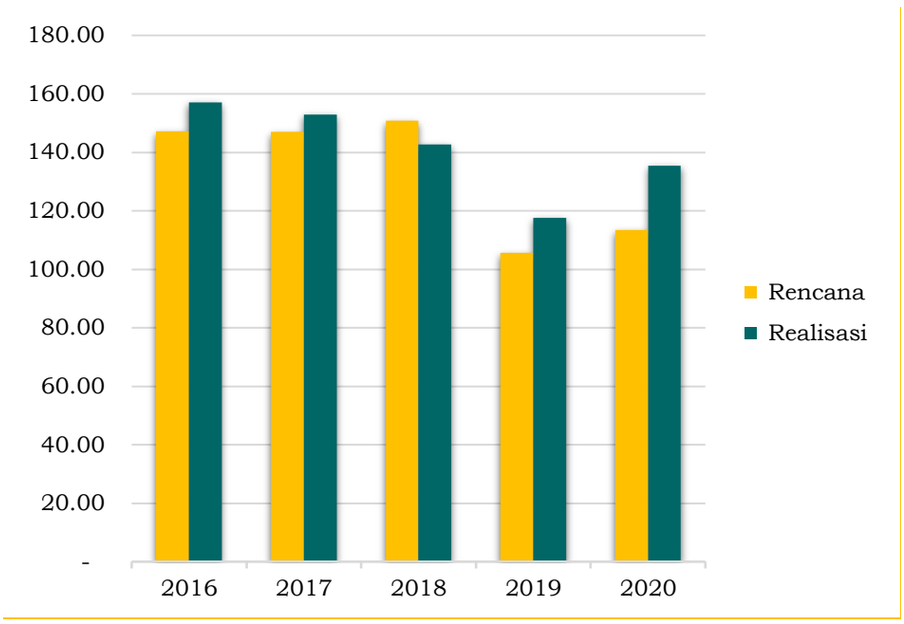

Gambar 3.4 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pendapatan Lain yang Sah Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan pada Gambar 3.4. diatas, tentang rencana dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan gabungan dari 11 item pendapatan, yakni hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan kerugian daerah, pendapatan keterlambatan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, hasil dan pemanfaatan dari kekayaan daerah, pendapatan dari denda pajak daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dana kapitasi JKN. Dana kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Dana tersebut dibayarkan dimuka setiap bulan tanpa memperhitungkan banyaknya pasien peserta JKN yang berobat dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas. Tampak pada Tahun 2016 dan 2017 realisasi melampaui target, selanjutnya Tahun 2018 dilakukan peningkatan atas target namun atas dampak bencana alam sehingga realisasi lebih rendah 5,4%. Tahun 2019 dan 2020, tren positif atas realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah kembali bias tercapai.

2. Dana Perimbangan

Secara umum tren positif realisasi dana perimbangan dari tahun 2016-2020 yakni dari 95,67% di tahun 2016 hingga 103,27% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 96,51% kemudian kembali melanjutkan tren positifnya di tahun 2020 dengan rata-rata realisasi sebesar 98,67%. Realisasi dana perimbangan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Persentase Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 2020

No.	Dana Perimbangan	Persentase Realisasi Dana Perimbangan				
		2016	2017	2018	2019	2020

No.	Dana Perimbangan	Persentase Realisasi Dana Perimbangan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	82,00	77,96	90,32	73,61	195,35
2	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00	98,85	99,63
3	Dana Alokasi Khusus	88,88	98,33	99,08	93,41	101,37
	Total Dana Perimbangan	95,67	98,60	99,29	96,51	103,27

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya secara umum kontribusinya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan namun berfluktuasi. Berikut data kontribusinya terhadap lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3.4 Kontribusi Pendapatan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Kontribusi yerhadap Lain-lain Pendapatan Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hibah	5,18	33,44	29,17	86,89	30,56
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86,77	60,44	54,70	7,92	47,42
3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	6,48	5,85	13,59	5,18	19,80
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,57	0,27	2,54	0,01	2,22

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi perubahan persentase kontribusi yang signifikan pada Tahun 2019, kondisi tersebut diakibatkan terdapat penerimaan hibah dari pemerintah pusat yang berjumlah sekitar Rp. 800 Miliar yang diperuntuk dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Kontribusi terhadap lain-lain penerimaan daerah yang sah terbesar yakni dana bagi hasil pajak

dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yakni sebesar Rp. 66,9 Miliar pada Tahun 2016 dan Rp. 74,8 Miliar pada tahun 2020.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan belanja daerah, diperoleh nilai belanja daerah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian Belanja Daerah (%)
2016	1,474,729,839,129.52	1,381,081,485,920.21	93.65
2017	1,342,484,148,799.58	1,245,186,845,688.68	92.75
2018	1,409,696,458,899.28	1,191,550,500,271.10	84.53
2019	2,346,917,220,306.33	1,338,835,752,001.18	57.05
2020	2,253,303,035,758.84	1,733,027,788,274.00	76.91

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Realisasi belanja daerah Kota Palu pada Tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target, masing-masing sebesar 93,65% dan 92,75%, dan pada mulai Tahun 2018 hinggi Tahun 2020 terus semakin menjauh dari target yang mana pada Tahun 2019 merupakan relalisasi belanja terendah pada periode tersebut yakni sebesar 57,05%. Realiasi tiga tahun tersebut rendah dikarenakan penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam membutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, hingga pembayaran melalui rekening penerima.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.6 di bawah berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

3.1.2 Necara Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6 Realiasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016–2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Tumbuh (%)
Pembiayaan	**21,410,435,491**	**1,578,996,071**	**71,473,483,670**	**195,688,411,504**	**1,031,071,024,850**	**1,233.64**
Penerimaan Pembiayaaan	54,772,580,891	32,536,677,560	97,221,420,670	196,010,911,504	1,033,071,024,850	171.72
Pengeluaran Pembiayaan	33,362,145,400	30,957,681,489	25,747,937,000	322,500,000	2,000,000,000	99.34

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Tabel 3.7 Neraca Daerah Kota Palu Tahun 2015-2019 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Aset					
Aset Lancar	**139.898.104.627**	**89.903.088.645**	**169.202.743.864,06**	**286,263,150,633.02**	**1,129,228,949,047.08**
Kas di Kas Daerah	27.857.167.950	4.916.041.927	84.006.180.884,05	177.603.057.906,62	1.021.928.422.911,27
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.077.618.847	545.148.121	401.796.607,00	988.548.263,00	371.982.840,00
Kas di Bendahara Penerimaan	173.633.469	54.853.819	176.276.954,28	93.768.746,00	141.237.434,00
Kas di Kas BLUD	21.491.858.288	25.775.692.986	10.333.726.028,91	15.510.680.177,91	8.857.295.491,91
Kas di Bendahara JKN Puskesmas	1.517.148.079	1.257.416.465	1.986.309.510,00	1.117.826.105,00	1.553.044.718,00
Kas Lainnya	11.110.416.687	497.142.880	335.105.021,00	5.265.337.040,92	4.369.176.950,00
Piutang Pajak	23.645.385.697	19.011.884.641	51.328.095.703,85	61.928.330.321,40	34.014.740.754,22
Piutang DBH					
Piutang Retribusi	63.248.813	39.993.192	574.015.250,00	603.096.550,00	490.968.250,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			53.328.403,00	53.328.400,00	53.328.400,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-		146.945.794,00	280.486.895,00	53.328.400,00
Piutang Lainnya	39.211.771.175	19.564.361.436	27.531.834.598.59	30.542.115.899,59	46.922.796.356,18
Penyisihan Piutang Tak Tertagih					
Persediaan	10.250.671.689	17.813.308.709	18.562.558.142.59	27.529.807.358,97	21.180.379.884,40
Belanja dibayar dimuka	499.183.933	427.244.468	670.038.831.66	1.887.543.428,33	5.053.139.852,00
Investasi Jangka Panjang	**74.239.553.364**	**75.317.856.586**	**77.277.249.222,31**	**59,599,312,135.48**	
Investasi Non Permanen	218.749.367	156.019.471	116.490.091,20	115.686.874,48	117.526.933,48
Dana Bergulir	218.749.367	156.019.471	116.490.091,20	115.686.874,48	117.526.933,48
Investasi Permanen	74.020.803.997	75.161.837.115	77.160.759.131.11	59.483.625.261,00	138.184.654.352,15

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	74.020.803.997	75.161.837.115	77.160.759.131.11	59.483.625.261,00	138.184.654.352,15
Aset Tetap	**1.605.272.282.023**	**1.899.713.004.252**	**2.057.804.535.905,2**	**1.858.878.950.161,15**	**2.065.277.498.512,48**
Tanah	444.613.413.966	452.628.466.966	456.700.800.716.00	472.946.305.864,00	544.962.298.543,00
Peralatan dan Mesin	291.292.116.393	358.513.556.000	418.525.715.817.65	400.281.099.711,19	433.442.219.476,56
Gedung dan Bangunan	649.639.207.479	709.911.833.791	640.643.011.389,93	554.929.290.195,28	596.697.277.659,65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	806.522.772.864	960.452.531.578	1.144.822.344.175,14	1.109.461.867.738,12	1.221.672.649.491,49
Aset Tetap Lainnya	35.368.632.420	37.187.363.556	26.689.535.227,93	27.194.975.791,93	27.742.673.957,93
Konstruksi dalam Pengerjaan	24.173.852.831	30.353.474.936	45.720.197.255,19	83.360.728.561,14	113.474.402.598,61
Akumulasi Penyusutan	(646.337.713.929)	(649.334.222.575)	(675.297.068.676,64)	(789.295.317.700,51)	(872.714.023.214,77)
Aset Lainnya	**21.467.508.526**	**24.632.856.965**	**119.259.024.087,07**	**308,754,087,766.13**	**324.385.706,00**
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	
Tagihan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	324.385.706,00
Aset Tidak Berwujud	3.920.138.040	7.069.856.479	7.803.231.146,05	17,877,198,931.76	21,700,222,181.76
Aset Lainnya	17.547.370.486	17.563.000.486		300.855.105.821,53	376,244,835,229.29
Jumlah Aset	**1.840.877.448.540**	**2.089.566.806.448**	**2.423.543.553.078,64**	**2.513.495.500.695,78**	**3.608.739.136.960,76**
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek	**65.337.328.644**	**62.358.835.584**	**75.928.534.877,25**	**56.781.861.636,39**	**51.784.111.052,36**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	256.450	830.158	10.859.888,00	0.00	233.297.650,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	39.346.003.170	39.346.003.170	31.990.574.170,15	12.546.003.170,15	12.546.003.170,15
Utang kepada Pihak Ketiga	4.425.845.400	970.181.489	33.410.605.701,14	33.298.909.351,48	18.399.911.586,13

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Utang Bunga	1.055.008.847	669.898.430	283.345.652,55	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.170.168.400	121.721.000	32.596.800,00	1.225.842.635,00	4.308.993.095,00
Pendapatan diterima dimuka	596.963.083	941.969.350	739.352.942,41	734.469.461,56	157.673.500,33
Utang beban	18.743.083.294	20.308.231.986	9.461.199.723,00	8.976.637.018,20	16.138.232.050,75
Kewajiban Jangka Panjang	**46.244.571.000**	**19.444.571.000**	**-**	**-**	**-**
Utang dalam negeri-Pemerintah pusat	46.244.571.000	19.444.571.000	-	-	-
Utang dalam negeri-Pusat investasi pemerintah	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	**111.581.899.644**	**81.803.406.584**	**75.928.534.877,25**	**56.781.861.636,39**	**51.784.111.052,36**
Ekuitas Dana					
Ekuitas Dana Lancar	**-**	**-**	**2.347.615.018.201,39**	**2.456.713.639.059,39**	**3,556,955,025,908.40**
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)					
Cadangan untuk piutang					
Cadangan untuk persediaan					
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek					
Pendapatan yang ditangguhkan					
Ekuitas Dana Investasi	**-**				
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang					

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Diinvestasikan dalam aset tetap					
Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan)					
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang					
Jumlah Ekuitas Dana	**1.729.295.548.895**	**2.007.763.399.864**	**2,347,615,018,201.39**	**2,456,713,639,059.39**	**3,556,955,025,908.40**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**1.840.877.448.540**	**2.089.566.806.448**	**2,423,543,553,078.64**	**2,531,495,500,695.78**	**3,608,739,136,960.76**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu, 2015-2019

Berdasarkan Tabel 3.7. di atas, dijabarkan beberapa rasio keuangan selama Tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Palu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Lancar (*Current Ratio*) %	2,14	1,44	2,23	5,04	21,81
2	Rasio Quick (*Quick Ratio*) %	1,98	1,16	1,98	4,56	21,40
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (%)	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01
4	Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu, 2015-2019

Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu daerah mengenai aset, hutang dan ekuitas. Untuk menentukan kinerja keuangan daerah, dapat menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini, yaitu:
   a. Metode *Current Ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Semakin besar nilai *Current Ratio* artinya semakin likuid, dan untuk prinsip kehati-hatian besarnya *Current Ratio* yang baik sekitar 200%. Tabel 3.8 menunjukkan hasil ratio lancar (*current rasio*), dapat dijelaskan bahwa tahun 2015 *Current Ratio* sebesar 2, 14 atau 214% artinya hutang lancar (kewajiban jangka pendek) sebesar Rp. 1 ditanggung atau dijamin dengan asset (aktiva lancar) sejumlah Rp. 2,14 atau sebesar 214%. Kemudian pada tahun 2016, rasio lancar menurun menjadi 1,44 atau sebesar 144%, artinya hutang lancar (kewajiban jangka pendek) sebesar Rp. 1 ditanggung atau dijamin dengan asset (aktiva lancar) sejumlah Rp. 1,14 atau sebesar 114%. Pada Tahun

2019, rasio lancar meningkat tajam, sebesar 21,81 atau 2.181%. Artinya bahwa pada tahun 2019 *Current Ratio* sebesar 21,81 atau 2.180% artinya hutang lancar (kewajiban jangka pendek) sebesar Rp. 1 ditanggung atau dijamin dengan asset (aktiva lancar) sejumlah Rp. 21.81 atau sebesar 2.181%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2019, bantuan dari pemerintahan pusat maupun dari lembaga Donor terhadap pembangunan sarana dan prasarana pada tahap pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi meningkat tajam, sehingga hutang lancar (jangka pendek) yang ada pada pemerintahan Kota Palu dapat dijaminkan dari total aktiva lancar sebesar 2.181 % (Sangat Likuid).

b. *Quick Ratio* yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid, yakni aktiva lancar selain persediaan. Kemudian untuk menjaga prinsip kehati-hatian keuangan daerah, secara teori menjelaskan besarnya *Quick Ratio* paling rendah sebesar 100%. Pada Tahun 2015 Quick Ratio sebesar 1,98 atau 198% artinya kewajiban (hutang) jangka pendek sebesar Rp. 1 dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan sebesar Rp. 1,98 atau 198%., artinya kewajiban jangka pendek Rp. 1 dijamin oleh aktiva selain persediaan Rp. 1,-. Peningkatan Quick Ratio paling tinggi terjadi pada tahun 2019, yakni mencapai 2.140%. Artinya hutang lancar dapat dijaminkan oleh aktiva lancar selain persediaan sebesar 2.140%, kondisi keuangan pemerintah Kota Palu sangat likuid.

2. Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu:

   a. *Debt Ratio* (Ratio Hutang) merupakan rasio antara total hutang (total debt) dengan total asset (total asset) yang dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen asset perusahan yang dibelanjai dengan hutang.

Berdasarkan Tabel 3.8, pada tahun 2015 menunjukan ratio hutang sebesar 0,06 (6%), artinya aset yang dimiliki pemerintahan Kota Palu dibiayai dari hutang sebesar 6%. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Rasio Hutang) setiap tahunnya menurun (2015 s/d 2019), sehingga pada tahun 2019, ratio hutang hanya 1%, artinya bahwa total asset yang ada di pemerintahan Kota Palu hanya dibiayai sebesar 1% dari hutang (kredit). Penurunan Rasio hutang menggambarkan bahwa total aset Kota Palu terus meningkat, sementara total hutang jangka panjang pemerintahan Kota Palu terus menurun.

b. *Total Debt to Equity Rasio*/DER (Rasio Total Hutang Terhadap Modal Sendiri). Rasio total hutang dengan modal sendiri merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki pemerintah Kota Palu, dengan modal sendiri (ekuitas). Hasil Rasio DER pada Tabel 3.8, pada tahu 2015 sebesar 0,06 (6%), artinya aset yang dimiliki pemerintahan Kota Palu yang dibiayai dari hutang dan modal sendiri, besarannya sebesar 6% (lebih tinggi pada ekuitas). Rasio Total Hutang terhadap modal sendiri (ekuitas) setiap tahunnya menurun (2015 s/d 2019), sehingga pada tahun 2019, ratio DER hanya 1%, artinya bahwa Total hutang pemerintahan Kota Palu semakin menurun, sementara total Ekuitas pemerintahan Kota Palu terus meningkat.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mempertimbangkan alokasi anggaran pada program-program prioritas daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan pembangunan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara ringkas, salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palu

No	Tahun	Belanja Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	651,060,039,043.21	1,381,081,485,920.21	47.14
2	2017	522,743,975,018.00	1,245,186,845,688.68	41.98
3	2018	519,532,991,192.00	1,191,550,500,271.10	43.60
4	2019	525,868,254,729.00	1,338,835,752,001.18	39.28
5	2020	552,059,713,079.00	1,733,027,788,274.00	31.86

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah

Dari Tabel 3.9 diatas dapat di ketahui bahwa persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung menurun selama lima tahun terakhir (2016-2020) masing-masing sebesar 47,14%, 41,98%, 43,60%, 39,28%, dan 31,86%. Berdasarkan persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja aparatur dari tahun ke tahun semakin menurun meskipun sejak Tahun 2020 Pemerintah Kota Palu mulai memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai guna meningkatkan kesejahteraan pegawai. Realitas ini menggambarkan proporsi untuk pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan

terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran. Untuk melihat perkembangan *defisit riil* anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Kota Palu

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,392,215,925,000	1,340,647,282,633	1,316,087,928,104	2,176,218,365,346	1,304,323,670,760
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1,381,081,485,920	1,245,186,845,688	1,191,550,500,271	1,338,835,752,001	1,733,027,788,274
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	33,362,145,400	30,957,681,489	25,747,937,000	322,500,000	2,000,000,000
	Surplus/ Defisit Riil	(22,227,706,319)	64,502,755,455	98,789,490,833	837,060,113,345	(430,704,117,513)

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui surplus/defisit riil anggaran Kota Palu tahun 20162020 masing-masing sebesar Rp. 22,227,706,319; Rp. 64,502,755,455; Rp. 98,789,490,833; Rp. 837,060,113,345; dan Rp. 430,704,117,513.

Selanjutnya, komposisi penutup *defisit riil* anggaran Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palu

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya		84.92	32.94	11.61	45.51
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	18.06	3.93	2.24	0.26	0.48
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuanga Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, tergambarkan pada Tahun 2016 terjadi defisit pembiayaan riil sebesar Rp. 22,227,706,320, Tahun 2017 hingga 2019 tidak terjadi defisit pembiayaan riil justru terdapat surplus anggaran masing-masing sebesar Rp. 64.502.755.456, Rp. 98.789.490.834, dan Rp. 837.060.113.346. Surplus pembiayaan pada Tahun 2019 sebagian besar merupakan sisa anggaran dana stimulan yang belum dapat disalurkan kepada korban terdampak bencana. Sedangkan pada Tahun 2020 terjadi defisit riil pembiayaan Rp. 430.704.117.514, dimana defisit tersebut sebagian besar berasal dari lanjutan penyaluran dana stimulan.

Selanjutnya analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama Tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Palu Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah SILPA	97,221,420,670.96	100.00	196,010,911,504.53	100.00	1,033,071,024,850.18	100.00
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	-		41,976,687,986.23	21.42	44,816,815,850.04	4.34
3.	Pelampauan Penerimaan dana Perimbangan	-		-		28,062,495,331.00	2.72
4.	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,604,100,255.00	8.85	17,025,601,818.80	8.69	212,348,670.50	0.02
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	218,190,958,628.18	224.43	1,155,366,720,035.23	589.44	529,275,247,484.84	51.23
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-		-		-	
7.	Kegiatan Lanjutan						

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama selain belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioitas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Guna mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan untuk tahun 2022-2026 di Kota Palu diperlukan analisa perhitungan terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

3.3.1 Proyeksi Pendanaan dan Belanja

Berdasarkan kondisi eksisting maka kebijakan penganggaran diharapkan untuk Keluar dari *Middle Income Trap* dengan menitikberatkan kepada

1. Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan, antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi tranformasi ekonomi

2. Recovery dan Reformasi Belanja, antara lain :
   a. Pendidikan, yakni peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0;
   b. Kesehatan, yakni pemulihan dan penguatan system kesehatan dan *health security preparedness*;
   c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
   d. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
   e. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil *(result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

Penyusunan proyeksi pendapatan belanja Kota Palu tahun 2022-2026 dengan mengacu pada prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengacu pada dokumen perencanaan daerah, visi, misi, tujuan, dan program strategis daerah. Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja Kota Palu Tahun 2022-2026, disajikan pada Tabel 3.13.

Proyeksi APBD Kota Palu Tahun 2022–2026 disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Dari sisi pendapatan, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah sehingga dapat dioptimalkan pada semua lini. Optimalisasi potensi pendapatan daerah tersebut diproyeksi dengan memperhatikan aspek hukum, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan masyarakat dengan tetap berpedoman pada asas akuntabilitas. Dari sisi PAD, peningkatan juga bertujuan untuk meningkatkan rasio kemandirian Kota Palu.

Belanja daerah Tahun 2022–2026 disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku serta pendekatan anggaran berbasis

kinerja, dengan memperhatikan program prioritas daerah dan memperhitungkan proyeksi kondisi pada tahun mendatang. Kebijakan belanja Daerah tahun 2022–2026 diarahkan untuk:

1. membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
2. pelaksanaan program yang bertujuan sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
3. mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
4. mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan; dan
5. mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakana penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota Palu, dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022-2026 Kota Palu

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,299,891,906,322.08**	**1,307,071,875,522.62**	**1,324,166,028,133.54**	**1,343,306,658,136.63**	**1,356,822,434,928.15**
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	330,503,252,984.00	347,591,772,913.88	366,195,072,271.83	386,430,374,162.50	408,471,135,934.17
4.1.01.	Pajak Daerah	117,989,660,000.00	125,069,039,600.00	132,573,181,976.00	140,527,572,894.56	148,959,227,268.23
4.1.02.	Retribusi Daerah	97,396,989,809.00	93,084,847,123.00	93,682,254,674.00	94,419,447,468.00	95,339,115,597.00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,500,000,000.00	2,750,000,000.00	3,025,000,000.00	3,327,500,000.00	3,660,250,000.00
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	112,616,603,175.00	126,687,886,190.88	136,914,635,621.83	148,155,853,799.94	160,512,543,068.94
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	918,731,895,151.99	916,790,506,513.34	913,146,879,961.53	909,811,004,278.94	898,932,755,314.03
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	832,343,193,887.76	826,082,370,185.90	817,903,336,817.72	809,805,283,977.94	793,926,748,997.99
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69,388,701,264.23	72,858,136,327.44	76,501,043,143.81	80,326,095,301.00	84,342,400,066.05
4.2.03.	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	17,000,000,000.00	17,850,000,000.00	18,742,500,000.00	19,679,625,000.00	20,663,606,250.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,656,758,186.10	42,689,596,095.41	44,824,075,900.18	47,065,279,695.18	49,418,543,679.94
4.3.01.	Pendapatan Hibah	10,000,000,000.00	-	-	-	-
4.3.02.	Dana Darurat	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	40,656,758,186.10	42,689,596,095.41	44,824,075,900.18	47,065,279,695.18	49,418,543,679.94
5	**BELANJA DAERAH**	**1,461,161,801,484.27**	**1,334,918,119,162.05**	**1,347,032,489,285.32**	**1,379,062,947,392.20**	**1,400,364,349,346.19**
5.1.	BELANJA OPERASI	1,183,249,710,486.80	1,110,554,087,819.24	1,150,567,126,759.96	1,123,169,731,153.06	1,132,455,373,050.54
5.1.1.	Belanja Pegawai	618,391,757,157.00	619,546,419,156.46	622,345,533,630.90	630,179,214,916.57	636,088,175,662.40
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	473,892,529,030.10	475,481,701,933.11	454,805,909,726.42	480,382,618,893.59	485,520,880,782.95
5.1.3.	Belanja Bunga	3,900,000,000.00	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	3,000,000,000.00	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	6,565,424,299.70	8,125,966,729.67	65,965,683,402.64	8,892,897,342.90	9,916,816,605.19
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	80,500,000,000.00	500,000,000.00	550,000,000.00	715,000,000.00	929,500,000.00
5.2.	BELANJA MODAL	260,912,090,997.47	206,104,031,342.81	178,911,562,525.37	235,507,422,239.14	244,648,029,075.65
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	21,585,000,000.00	6,843,500,000.00	7,527,850,000.00	9,291,775,000.00	9,720,952,500.00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	38,573,921,567.65	40,077,441,642.30	34,085,185,806.53	44,223,704,387.18	46,529,630,483.98
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	77,632,807,514.18	33,162,807,514.18	26,479,088,265.60	62,374,905,918.72	64,849,887,102.46
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	122,999,071,915.64	125,862,605,186.34	110,630,226,053.24	119,389,982,053.24	123,206,976,669.22
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	121,290,000.00	157,677,000.00	189,212,400.00	227,054,880.00	340,582,320.00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15,000,000,000.00	16,000,000,000.00	15,000,000,000.00	17,500,000,000.00	20,000,000,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000.00	16,000,000,000.00	15,000,000,000.00	17,500,000,000.00	20,000,000,000.00

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5.4.	BELANJA TRANSFER	2,000,000,000.00	2,260,000,000.00	2,553,800,000.00	2,885,794,000.00	3,260,947,220.00
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	2,000,000,000.00	2,260,000,000.00	2,553,800,000.00	2,885,794,000.00	3,260,947,220.00
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**161,269,895,162.18**	**27,846,243,639.43**	**22,866,461,151.79**	**35,756,289,255.57**	**43,541,914,418.04**
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184,936,561,828.85	59,712,910,306.10	54,953,127,818.46	55,084,955,922.24	46,549,974,418.04
6.1.1.	SiLPa	134,936,561,828.85	59,712,910,306.10	54,953,127,818.46	55,084,955,922.24	46,549,974,418.04
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	50,000,000,000.00	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23,666,666,666.67	31,866,666,666.67	32,086,666,666.67	19,328,666,666.67	3,008,060,000.00
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	21,666,666,666.67	29,666,666,666.67	29,666,666,666.67	16,666,666,666.67	-
6.2.2.	Penyertaan Modal	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00	2,420,000,000.00	2,662,000,000.00	3,008,060,000.00
6.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-

Tabel 3.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Palu

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,299,891,906,322	1,307,071,875,523	1,324,166,028,134	1,343,306,658,137	1,356,822,434,928
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Pembiayaan	184,936,561,829	59,712,910,306	54,953,127,818	55,084,955,922	46,549,974,418
	Total peneriamaan	1,484,828,468,151	1,366,784,785,829	1,379,119,155,952	1,398,391,614,059	1,403,372,409,346
	Dikurang:					
4	Pengeluaran Pembiayaan	23,666,666,667	31,866,666,667	32,086,666,667	19,328,666,667	3,008,060,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**1,461,161,801,484**	**1,334,918,119,162**	**1,347,032,489,285**	**1,379,062,947,392**	**1,400,364,349,346**

Dari tabel 3.14 diatas, dapat diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah kota palu dari tahun 2022 sampai dengan 2026 memiliki proyeksi masing-masing sebesar Rp. 1.461.161.801.484, Rp. 1.334.918.119.162, Rp. 1.347.032.489.285, Rp. 1.379.062.947.392, dan Rp. 1.400.364.349.346.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama limaTahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Berdasarkan analisis tersebut, maka diperoleh rencana alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Palu Tahun 2022-2026 adalah seperti pada Tabel 3.15.

Berdasarkan Tabel 3.15 tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2022 - 2026 dengan rencana penggunaan pada prioritas I yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp. 1.034.289.523.163, Rp. 898.702.353.596, Rp. 871.996.637.945, Rp. 930.213.862.043, Rp. 941.724.606.209. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah masing-masing berjumlah sebesar Rp. 426.872.278.322, Rp. 436.215.765.566, Rp. 475.035.851.340, Rp. 448.849.085.349, dan Rp. 458.639.743.138.

Kegiatan di semua OPD merupakan belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar yang terkait langsung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Tabel 3.15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palu Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	1,461,161,801,484	1,334,918,119,162	1,347,032,489,285	1,379,062,947,392	1,400,364,349,346
2	Prioritas I	1,034,289,523,163	898,702,353,596	871,996,637,945	930,213,862,043	941,724,606,209
3	Prioritas II	426,872,278,322	436,215,765,566	475,035,851,340	448,849,085,349	458,639,743,138

3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, KPBU/PPP, dana umat, dan swasta.

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

   Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah juga memperoleh dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. **Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

   Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan TJSL perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan Daerah. Penyelenggaraan program PKBL dan TJSL dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

   a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;

b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek, yaitu sebagai berikut:

a. sosial yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
b. lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan lingkungan;
c. kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
d. pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
e. peningkatan daya beli diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, dan pasar tradisional;
f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
g. sarana dan prasarana keagamaan; dan

h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi, dan Daerah.

3. APBD Provinsi Sulawesi Tengah

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dengan APBD Provinsi Solawesi Tengah. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program daerah sejalan dan sinergis dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga antara daerah dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

4. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko

operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
b. pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah;
c. pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
d. pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
e. pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
f. pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
g. pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
h. proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
i. seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang diantaranya adalah bersumber dari:

a. pemerintah pusat yaitu berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
b. pemerintah daerah lain;
c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
e. masyarakat yaitu berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu sebagai berikut :

a. pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
b. pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
c. pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagai berikut:
    1) menghasilkan penerimaan langsung;
    2) menghasilkan penerimaan tidak langsung; dan
    3) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
d. khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Kota Palu berencana akan melakukan pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari lembaga keuangan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang mana disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan

pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karateristik proyek KPBU meliputi:

a. proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
b. skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian atau kontrak kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
c. dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU;
d. perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang atau lebih dari 15 tahun untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan

e. basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri dari:

a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan rencana strategis sector infrastruktur;
b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
c. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d. memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan keamanan nasional; dan/atau
e. membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran atau on schedule-on budget;
b. menjamin kualitas pelayanan karena kinerja diperjanjikan dalam kontrak;
c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi availability payment atau AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah; dan

d. *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor. KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 (sembilan belas) sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi atau full cost recovery atau kelayakan marjinal. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha berjumlah 19 (sembilan belas) yaitu sebagai berikut:
   1) infrastruktur transportasi;
   2) infrastruktur jalan;
   3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
   4) infrastruktur air minum;
   5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
   6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
   7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
   8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
   9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
   10) infrastruktur minyak dan gas bumi;
   11) infrastruktur konservasi energi;
   12) infrastruktur fasilitas perkotaan;
   13) infrastruktur kawasan;
   14) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata atau *tourism information center*;
   15) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;
   16) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
   17) infrastruktur kesehatan;
   18) infrastruktur pemasyarakatan; dan
   19) infrastruktur perumahan rakyat.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari:

a. kelompok pertama terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas, yaitu:

1) transportasi;
2) jalan;
3) ketenagalistrikan;
4) migas dan energi baru serta terbarukan;
5) konservasi energy; dan
6) telekomunikasi dan informatika.

b. kelompok kedua terdiri dari 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan, yaitu:
1) air minum;
2) pengelolaan limbah setempat;
3) pengelolaan limbah terpusat;
4) pengelolaan sampah;
5) SDA dan irigasi;
6) pasar tradisional; dan
7) perumahan rakyat.

c. kelompok ketiga terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur fasilitas sosial, yaitu :
1) pariwisata;
2) fasilitas pendidikan;
3) Lembaga pemasyarakatan;
4) sarana olah raga dan budaya;
5) kawasan atau technopark; dan
6) kesehatan.

BAB IV

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dengan semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai seperti yang telah digambarkan di Bab II dalam dokumen Rancangan RPJMD Kota Palu ini. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidupserta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalah daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut gambaran

permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu.

Tabel 4.1 Permasalahan Kota Palu Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Data	Permasalahan
1	Pendidikan	2018 Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan 15,65%	Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi
		2020 SMP akreditasi A sejumlah 21 sekolah, B sejumlah 19 sekolah, dan C sejumlah 5 sekolah.	Masih terdapat sekolah yang terakreditasi standar
		2020 Jumlah kerusakan SMP pasca bencana sejumlah 3 sekolah.	Kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana
		APM Pendidikan Dasar Tahun 2019 SD : 92,86% SMP : 76,88% PAUD : 19,95% Angka Putus Sekolah Tahun 2018 SD : 18 % SMP : 12%	Masih terdapat Standar Pelayanan Minimal pendidikan Kota Palu yang belum terpenuhi (Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018)
2	Kesehatan	2019 Jumlah dokter spesialis: 165	Ketersediaan dokter spesialis RSUD Anutapura

No	Urusan	Data	Permasalahan
		(Berdasarkan hasil FGD kekurangan dokter spesialis urologi, anak, anastesi)	Kota Palu
		2020 Jumlah Puskesmas terakreditasi Dasar:4, Madya: 8, tidak terakreditasi: 2	Peningkatan akreditasi Puskesmas
		2019 Sampah: 1,84 (buruk) Air limbah: 1,62 (buruk) Drainase: 0,25 (sangat buruk)	Peningkatan cakupan indeks sanitasi
		2019 Prevalensi stunting Kota Palu 12% (Sulteng 9,6%)	Prevalensi stunting (kurus) pada anak balita
3	Pekerjaan Umum	2019 Kondisi jalan mantap sebesar 53,97%.	Masih terdapat jalan kota dalam kondisi belum mantap.
		2020 Panjang drainase :1321,5 km Kondisi baik: 903,6 km Kondisi sedang: 78,2 km Kondisi buruk: 339,7 km	Sistem drainase perkotaan belum berfungsi optimal
		2020 PDAM Donggala kapasitas terpasang 185,62 l/dt Kapasitas produksi 154,42 l/dt Sambungan rumah 14527 Tingkat layanan 19,55% PDAM Palu kapasitas terpasang 60 l/dt Kapasitas produksi 47 l/dt Sambungan rumah 7123 Tingkat layanan 9,6% Target 100% air bersih perpipaan, capaiannya 29,15%	Akses layanan air bersih perkotaan belum optimal.
		2019 Rasio panjang jalan 0,145 (capaian 65,91%)	Belum optimalnya rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2020 Rumah tangga kumuh 11.725 KK Luasan kawasan kumuh 335,63 Ha	Tingginya persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40%terbawah)

No	Urusan	Data	Permasalahan
		2019 Rumah tidak layak huni 11,4% (8.316 rumah)	Belum optimalnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
5	Penataan Ruang dan Pertanahan	2020 Target RTH 30% dari luas wilayah Kota Palu, capaiannya 18,48%	Cakupan persentase luas RTH dari luas wilayah kota belum terpenuhi
		2019 Ketaatan terhadap RTRW 65,62%	Kurangnya ketaatan terhadap RTRW (%)
		2020 Aset daerah yang sudah tersertifikasi 11,88%	Belum optimalnya sertifikasi pertanahan aset daerah
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP, BPBD, Damkar)	2020 Kerusakan bangunan Rusak berat 11.643 unit Sedang 16.050 unit Ringan 21.354 unit Hilang 6.522 unit	Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian pasca bencana
		2020 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu 75,94 % Respon Time Rate 60%	Belum terbangunnya sistem pencegahan kebakaran
7	Sosial	2020 Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial 19.848 jiwa Jumlah penduduk miskin 26.731 jiwa	Belum optimalnya program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan di perkotaan
		2020 Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA 50 jiwa	Belum optimalnya pembinaanpenyalahgunaan Napza
		2020 Orang dengan HIV/AIDS 112 jiwa	Belum optimalnya penanganan penderita ODHA
		2020 Orang dengan gangguan jiwa 51 jiwa	Belum optimalnya penanganan ODGJ
		2020 : Penyandang tuna netra 113 jiwa Penyandang tuna rungu 35 jiwa Penyandang tuna wicara 72 jiwa Penyandang tuna rungu wicara 34 jiwa	Belum optimalnya pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada tuna netra, rungu, wicara, rungu wicara, grahita, daksa dan cacat

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Penyandang tuna grahita 128 jiwa Penyandang tuna daksa 155 jiwa Penyandang cacat ganda 151 jiwa	ganda
		2020 Gelandangan dan pengemis 59 jiwa Anak jalanan 12 jiwa Anak terlantar 0 kasus Lansia terlantar 25 jiwa Disabilitas terlantar 2 kasus Orang terlantar 8 jiwa Mantan narapidana 0 kasus Tuna susila 186 jiwa Bayi terlantar 0 kasus	Belum optimalnya pembinaan pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada gelandang dan pengemis serta anak jalanan

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan Kota Palu Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan	Data	Permasalahan
1	Tenaga Kerja	Tingkat pengganggguran terbuka Kota Palu tahun 2018, 5,81%, meningkat menjadi 6,32% di tahun 2019 dan terus mengalami peningkatan ditahun 2020 menjadi 8,38%	Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga profesional
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2017 : 92 kasus 2018 : 79 kasus 2019 : 85 kasus 2020 : 70 kasus	Kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat
		2014-2019 : 5 orang	Rendahnya

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		2019-2024 : 4 orang Standar 30% dari 35 kursi DPRD Kota Palu	keterwakilan perempuan dalam parlemen
		2017 : 35 kasus 2018 : 33 kasus 2019 : 59 kasus 2020 : 63 kasus	Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak
		2017 : 35 kasus 2018 : 32 kasus 2019 : 30 kasus	Masih tingginyaanak yang berhadapan dengan hukum
		2020 Jumlah pernikahan dini 179	Masih tingginya angka pernikahan dini
3	Pangan	Nilai skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020 sebesar 89,6	Ketersediaan, distribusi dan akses pangan belum merata
		Konsumsi energy tahun 2020 sesesar 2.093 gr/kap/hari	
		Konsumsi protein tahun 2020 sebesar 64,4 gr/kap/hari	
4	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase sampah yang tertangani Tahun 2018 hanya sebesar 37,18%	Pengelolaan persampahan Kota belum optimal
		Terdapat 44 unit RTH dengan Luas 51.899 meter^2 pada tahun 2018	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum Terpenuhi
5	Kependudukan dan Catatan Sipil	Masih terdapat 1.334 yang belum memiliki E-KTP (Tahun 2019)	Masih terdapat Penduduk Belum memiliki identitas kependudukan
		Rasio anak (0-18 Tahun) yang ber Akte Kelahiran Tahun 2018 sebesar 30,1%	Masih rendanya Rasio anak (0-18 Tahun) yang belum ber Akte kelahiran
6	Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2020 sebanyak 46 LPM	LPM Belum berfungsi secara optimal
		Tahun 2020: Presentase PKK Aktif sebesar 100%	PKK belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahun 2018: Rasio akseptor KB sebesar 79,68%	Masih terdapat pasangan usiasubur yang belum menjadi akseptor KB
		Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 sebesar 1,23%	Masih Tingginya Laju Pertumbuhan

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		dan sebesar 1,19 % pada Tahun 2018.	Penduduk
		2020 Akseptor KB : 2.375	Belum optimalnya pelayanankontrasepsi
8	Perhubungan	2020 Jumlah angkutan kota 468	Belum optimalnya sistem transportasi Kota Palu
		2018 Jumlah titik parkir 704	Belum optimalnya manajemen perpakiran di Kota Palu
9	Komunikasi dan Informatika	2019 Jumlah OPD yang terintegrasi dalam sisteminformasi (Website) 39 OPD	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai *Good Governance*
		2018 Terdapat 44 unit RTH	Belum tersedianya untuk pemanfaatan TIK di Ruang Terbuka Hijau (Ruang Publik)
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2018 Jumlah Koperasi Primer sebanyak 270 Buah dan dinyatakan tidak aktif sebanyak 100 Buah.	Menurunnya status koperasi aktif
		2020 Jumlah UMKM : 1.488	UMKM Belum berkembang dengan baik.
11	Penanaman Modal dan Perizinan	2019 Jumlah Investor Berskala dan Nasional (PMDN/PMA) 45	Belum updatenya data dan peta potensi investasi Kota Palu. Belum optimalnya manajemen dan kewirausahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
12	Pemuda dan Olah Raga	Jumlah organisasi pemuda sebanyak 378 organisasi di Tahun 2018	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda dalam peningkatan peran pemuda di masyarakat
		Jumlah organisasi olahraga 2019	Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		sebanyak 205 organisasi. Organisasi yang melakukan pembinaan sebanyak 62 organisasi atau sekitar 30% dari jumlah organisasi yang ada.	organisasi olahraga dalam menciptakan atlet berprestasi
		2020 Lapangan Voly sebanyak 70 unit. Lapangan Basket sebanyak 14 unit. Lapangan Tenis sebanyak 15 unit. Lapangan futsal sebanyak 33 unit. Stadion Sepak Bola sebanyak 2 unit. Stadion Atletik 1 unit. Lapangan Bulu tangkis sebanyak 37 unit. Gedung olahraga sebanyak 3 unit. Rumah Biliar sebanyak 12 unit. Lapangan olahraga terbuka sebanyak 6 unit.	Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas.
13	Statistik	Persentase keterisian data 75%	Belum optimal keterisian data OPD
14	Persandian	Kategori pemilahan kerahasiaan dokumen negara: Cukup	Belum optimalnya tugas dan fungsi kelembagaan persandian
15	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan di Kota Palu Sebanyak 60 unit di Tahun 2019	Rendahnya minat baca dan koleksi bahan pustaka
16	Kearsipan	Jumlah pengelola arsip sebanyak 13 Orang pada 2020 Jumlah arsip dinamis 340 dokumen terduplikasi	Masih terbatasnya SDM ahli dan trampil di bidang kearsipan.

4.1.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut.

Tabel 4.3 Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
1	Perikanan dan Kelautan	Data Tahun 2020 : Kawasan perikanan budidaya sebesar 20,33 Produksi olaha perikanan sebesar 8.802 Ton. Produksi perikanan Tangkap sebesar 997,30 Ton. Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan sebesar 63 kelompok. Jumlah pemasar hasil perikanan sebesar 800 orang. Jumlah pembudidaya ikan sebesar 448 orang. Luas lahan potensi budidaya 0,55 Km^2. Jumlah BBI UPTD tersedia 1 unit Ha. Produksi perikanan budidaya sebesar 119,41 Ton.	Produksi kelautan dan perikanan belum optimal
2	Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata Tahun 2019 turun sebesar 91,29% dari tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisata (wisman dan wisnus) Tahun 2018 sebesar 291.104 orang, Tahun 2019 sebesar 25.349 orang.	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata/agrowisata
		PP No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2011 -2025	Belum tersedia Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Palu (RIPARKOTA)
3	Kebudayaan	Masih kurangnya SDM pelaku kebudayaan yang terlatih.	Peningkatan *Skill* pelaku kebudayaan
4	Pertanian	Kawasan perkebunan sebesar 4.893,97 Ha.	Produksi dan Produktivitas

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Kawasan tanaman pangan sebesar 427,45 Ha. Produksi tanaman pangan dari Tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat luas panen yang semakin menurun.	Pertanian Belum Optimal
5	Perdagangan dan Perindustrian	2020 : Jumlah Pasar Harian sebanyak 6 pasar Jumlah Pasar Mingguan sebanyak 4 pasar. 2019 : Persentase retibusi pasar Tahun 2019 adalah 86%.	Belum optimal pengelolaan retribusi pasar
		Data jumlah IKM yang masuk dalam kelurahan Inovasi (33 IKM di Kota Palu) Kontribusi sektor Industri pengolahan/ *Manufacturing* terhadap PDRB ADHB Tahun 2019 turun 0,62%, sedangkan ADHK turun sebesar 0,19%.	Belum optimalnya penanganan sektor industri khususnya IKM dibidang SDM, produksi dan pemasaran.

4.1.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahanberkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang

No.	Bidang	Data	Permasalahan
1	Perencanaan	Tahun 2020: Capaian pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2016-2020 sebesar 71,25 % (Kategori : Sedang).	Belum optimalnya capaian pembangunan jangka menengah Kota Palu.
		Sistem informasi pembangunan daerah belum berjalan maksimal akibat perubahan regulasi (Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangkaian penyajian data, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.
2	Keuangan	Tahun 2020 : Jumlah program : 254 Jumlah kegiatan : 976	Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja.
		Tahun 2020 : Aset daerah (tanah) yang terregistrasisebanyak 2.141 bidang tanah, namun yang bersertifikat baru 10,88%.	Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
3	Pendapatan	Penerimaan Retribusi daerah Kota Palu, Tahun 2019 hanya tercapai 62,64 persen, Kontribusi PAD tahun 2018 terhadap pendapatan daerah sebesar 19,09 persen.	Belum optimalnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu
			Belum optimalnyapemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
			Belum terintegrasinya sistem informasi yang mengintergrasikan berbagai lembaga

No.	Bidang	Data	Permasalahan
			pengelola pajak dan retribusi dengan lembaga perbankan
			Belum Optimalnya kinerja masing-masing bidang sebagai sumber penghasil pengelola pendapatan
4	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Data Tahun 2020: - 66 pejabat struktural yang belum sesuai kualifikasi pendidikan formal. 9 pejabat Eselon II yang belum mengikuti Diklat PIM II. 101 Pejabat Eselon III belum mengikuti Diklat PIM III. 380 pejabat Eselon IV belum mengikuti Diklat Pim.IV. 155 guru belum berkualifikasi Pendidikan S1.	Masih terdapat pejabat struktural dan fungsional yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan formal serta pejabat struktural belum mengikuti Diklat kepemimpinan.
			Redistribusi pejabat pelaksana pada setiap OPD belum dapat dilakukan secara tuntas karena Analisis Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pegawai belum ditetapkan.
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen ASN.
5	Penelitian dan Pengembangan	Permendagri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan.
			Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan.
			Belum tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu

No.	Bidang	Data	Permasalahan
6	Pemerintahan Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.	Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan.
		Tahun 2019 : Serapan dana kelurahan sebesar 92,15%. Tahun 2020 : Serapan dana kelurahan sebesar 90,87%.	Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan.
7	Inspektorat	Data Tahun 2019 : Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pengawasan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat sebesar 83,5 %. Persentase penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebesar 75%. Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B sebesar 63%.	Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu
		Data Tahun 2020 : Pejabat Fungsional Auditor 22 orang. Pejabat Fungsional P2UPD sebanyak 7 orang. Level kapasitas APIP : Level 2 Penuh.	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM APIP.
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Tahun 2020: Kasus Narkoba sebanyak 88 Kasus.	Masih tingginya potensi penyebaran Narkoba.
		Tahun 2020 : 289 kasus Curanmor. 249 kasus pencurian biasa.	Masih adanya potensi konflik, gangguan keamanan,dan kekerasan di

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Pencurian dengan kekerasan sebanyak 87 kasus. Unjuk rasa sebanyak 81 kegiatan. Pelanggaran UU ITE sebanyak 77 Kasus (Polres Kota Palu, 2020).	masyarakat.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis yang berkembang dalam masyarakat global antara lain:

1. Pandemi covid-19
2. Merosotnya pertumbuhan ekonomi
3. Konstelasi politik dan perang dagang Amerika-China
4. Pencapaian target dan sasaran SDGs

4.2.2 Isu Strategis RPJMN 2020-2024

Isu strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, meliputi:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

   Isu strategisnya adalah:

   a. **Keberlanjutan Sumber DayaAlam**

      Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modalutama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

   b. **Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi**

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang sempat terhenti akibat krisis moneter pada tahun 1997-1998. Transformasi struktural saat ini juga masih berjalan lambat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga menjadi rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kontribusi PDB industri pengolahan terus menurun menjadi 19,9 persen pada tahun 2018. Di sisi lain, pada tahun yang sama kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2 persen dan kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9 persen.

d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making* Indonesia 4.0. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan Industry 4.0 sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan yakni masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah

satunya dengan menurunkan ratarata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) nasional sampai pada tingkat *replacement rate* yaitu 2,1. Laju pertumbuhan penduduk telah menurun dari 1,49 persen (SP 2010) menjadi 1,43 persen (Supas 2015). Namun, jumlah penduduk secara absolut meningkat dari 237,6 juta pada tahun 2010 menjadi 255,2 juta di tahun 2015, di mana lebih dari 60 persennya merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun).

b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Selain program bantuan sosial, terdapat pula program-program subsidi, seperti LPG dan listrik yang ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi akan terus disempurnakan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi dan tepat sasaran, agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai kendala seperti permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama, menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal. Dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan perbaikan data dan perluasan

penyaluran secara non-tunai, untuk mempercepat integrasi bantuan sosial.

c. Pemenuhan Layanan Dasar

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.

d. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta

terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

e. Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (Susenas, 2018). Di sisi lain, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah, rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah Rp. 743.399,- sementara sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya produktivitas di sektor ini karena masih minimnya kepemilikan aset

produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan hanya sekitar 25,6 persen (Susenas, 2018). Selain minimnya pendanaan yang sesuai dengan profil usaha kelompok miskin dan rentan dibutuhkan juga pengembangan skema pendanaan bagi dunia usaha dengan kegiatan yang memiliki dampak sosial (*social impact fund*). Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

f. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

a. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruh bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi politik transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri kukuh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa

depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

c. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

d. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama

Dalam kerangka pembangunan nasional agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas bangsa. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Namun, karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas keagamaan tersebut belum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

f. Belum Optimalnya Peran Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui internalisasi nilai dalam proses pengasuhan, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun masyarakat. Keluarga merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Sebagai orang tua, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan mengasuh anak di dalam keluarga.

g. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan

berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Pada era ini wajah dunia akan banyak berubah dengan adanya proses otomatisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas antara manusia dan piranti lunak. Akibatnya akan banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh mesin, meskipun di sisi lain muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang berbasiskan pada inovasi dan kreativitas yang didasarkan pada akal budi dan karya budaya manusia.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Meskipun tingkat kepemilikan rumah berada pada kisaran 80 persen dalam dasawarsa terakhir, namun masih terdapat 45,9 persen rumah tangga pada tahun 2018 yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi

ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang

sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

3) **Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan**

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

4) **Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Isu utama keselamatan moda transportasi jalan adalah tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2018, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 29.478 orang, atau rata-rata mencapai 3-4 orang setiap jam. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ke-3 terbesar di Indonesia, setelah penyakit jantung dan stroke. Tingginya tingkat fatalitas mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan, mengingat sebagian besar korban (77 persen) berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang pada umumnya merupakan pencari nafkah. Tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai aspek, meliputi kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan. Koordinasi yang kurang optimal dari berbagai

pemangku kepentingan menjadi kendala terwujudnya sistem lalu lintas jalan yang lebih berkeselamatan.

5) **Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur**

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (*International Disaster Database*, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana.

6) **Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi**

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m3 dari target 14,7 miliar m3

pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19 persen, bahkan di pulau Jawa mencapai 31 persen.

b. Infrastruktur Ekonomi

1) Konektivitas Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total panjang jaringan jalan mencapai 582.200 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.183 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8 persen dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92 persen, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92 persen dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68 persen untuk provinsi, dan 57 persen untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan

jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

2) Konektivitas Kereta Api

Isu utama konektivitas KA adalah masih rendahnya peran KA dalam mendukung angkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota secara lebih cepat dan efisien. Porsi angkutan barang yang diangkut oleh KA baru mencapai 2 persen dari jumlah barang yang diangkut oleh seluruh moda transportasi. Angkutan barang yang diangkut oleh KA masih didominasi oleh barang tambang. Sementara angkutan peti kemas yang berperan penting dalam sistem logistik belum memanfaatkan moda KA secara optimal. Peran KA juga masih terbatas dalam mendukung angkutan penumpang aglomerasi perkotaan dan koridor konurbasi kota-kota utama yang memiliki tingkat permintaan perjalanan antarkota yang tinggi. Waktu tempuh koridor aglomerasi Jakarta-Surabaya melalui KA saat ini masih 9 jam, demikian juga koridor Jakarta-Bandung yang masih memerlukan waktu 3-4 jam, sehingga tidak kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.

3) Konektivitas Laut

Isu strategis transportasi laut adalah belum terwujudnya efisiensi kinerja angkutan logistik yang antara lain disebabkan oleh kinerja pelabuhan yang belum memenuhi standar (panjang dermaga, kedalaman kolam, dan alur pelayaran), jaringan pelayaran yang masih menggunakan ukuran kapal yang

belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan hinterland, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman. Di samping itu, armada kapal niaga dalam negeri masih didominasi oleh kapal berumur di atas 25 tahun. Isu strategis lainnya adalah kebutuhan peran angkutan laut yang lebih besar dalam menjangkau daerah kepulauan dan 3T dalam rangka mengurangi disparitas harga barang antarwilayah. Moda angkutan laut yang melayani wilayah 3T masih belum mengoptimalkan keterpaduan antar moda transportasi termasuk moda jalan, angkutan perintis darat, dan udara. Keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T juga disebabkan oleh belum memadainya fasilitas pelabuhan termasuk ketersediaan peralatan bongkar muat.

4) Konektivitas Udara

Isu strategis pembangunan transportasi udara adalah belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandara-bandara utama. Kapasitas bandara termasuk landasan dan terminal masih belum optimal dalam memenuhi peningkatan pertumbuhan volume angkutan udara nasional yang mencapai 9 persen per tahun pada periode 2015-2017. Di samping itu, peran angkutan udara perintis belum optimal dalam mendukung pergerakan penumpang dan distribusi barang yang dapat menjangkau daerah 3T.

Prasarana lapangan terbang kecil (airstrip) untuk mendukung angkutan di wilayah 3T, khususnya di wilayah Papua kondisinya kurang memadai, belum dikelola dengan baik, serta belum memenuhi standar keselamatan. Peran angkutan udara untuk mendukung sektor pariwisata masih terbatas. Kualitas pelayanan bandara serta rute angkutan udara yang mendukung pariwisata belum optimal. Selain itu, pengembangan bandara perairan (waterbased airport) dalam mendukung peningkatan destinasi pariwisata perairan belum berkembang.

5) Konektivitas Darat

Isu penting dalam penyelenggaraan transportasi darat adalah masih tingginya angka pelanggaran muatan berlebih (*overloading*) di jalan. Pada jalur Pantura Jawa, terdapat rata-rata 12.000 truk barang yang melintas per harinya, dimana sebanyak 67,5 persen truk yang diperiksa melanggar ketentuan batas maksimal kapasitas angkut. Pada sisi lain, angkutan feri jarak jauh (*long distance ferry*/LDF) yang berpotensi untuk menurunkan beban angkutan jalan belum cukup berkembang. Pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih terbatas, khususnya untuk mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3T yang berbasis kepulauan. Selain itu, terdapat isu penggunaan kapal penyeberangan yang belum memenuhi spesifikasi dan berumur di atas 25 tahun, termasuk untuk mendukung angkutan perintis.

c. Infrastrutur Perkotaan

1) Transportasi Perkotaan

Isu strategis transportasi perkotaan adalah belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan beberapa kota di Asia, jaringan MRT yang terbangun di Jakarta baru sepanjang 15 km, masih jauh di bawah Tokyo (304 km), Singapura (200 km), Hong Kong (187 km), dan Kuala Lumpur (52 km). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pangsa angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia. Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih di bawah 20 persen, sementara kota-kota besar lain di Asia telah memiliki pangsa angkutan umum di atas 50 persen, seperti Hong Kong (92 persen), Singapura (61 persen), dan Tokyo (51 persen). Rendahnya pangsa angkutan umum berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data Tomtom Traffic Index (2019), Jakarta menempati urutan ke-7 kota termacet di dunia dari 403 kota yang disurvey di 56 negara. Nilai kerugian akibat kemacetan lalu lintas lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Upaya pengembangan angkutan umum massal masih dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, sehingga sulit untuk mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi dan berdaya jangkau di luar batas administrasi kota/daerah. Di samping itu, kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai untuk membangun sistem angkutan umum massal perkotaan yang modern.

2) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan jika tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih menggunakan sumber energi fosil. Potensi tenaga surya yang merupakan salah satu sumber energi bersih di perkotaan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut karena pemanfaatan atap panel surya (*solar rooftop*) masih terkendala keterbatasan produksi sel surya dalam negeri, kebijakan harga yang belum mendukung, sifat energi surya yang tidak stabil (*intermitten*) dan jaringan listrik yang belum sepenuhnya dapat menerima pembangkit listrik yang berasal dari EBT.

3) Infrastrutur dan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Infrastruktur dan pemanfaatan TIK merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan di berbagai kota besar. Pengembangan kota cerdas, sebagai salah satu tujuan pembangunan perkotaan, saat ini belum didukung pemanfaatan TIK yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Pemanfaatan TIK di berbagai kota di tanah air saat ini masih rendah. Baru sedikit kota yang terlayani sistem layanan darurat 112 terintegrasi, sistem pelaporan masyarakat terpadu seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), serta layanan pemerintah berbasis digital lainnya. Selain itu, penetrasi akses infrastruktur TIK juga belum optimal. Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar di perkotaan masih rendah yaitu di bawah 9 persen dari rumah

tangga perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan akses nirkabel. Di samping itu, pemanfaatan akses nirkabel tersebut juga masih lebih banyak dipergunakan untuk interaksi dan media sosial dibanding untuk mengakses layanan pemerintah atau kegiatan yang produktif, sehingga manfaat dari layanan TIK yang telah disediakan pemerintah menjadi kurang maksimal.

4) **Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan**

Penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan masih lemah. Tingkat pelayanan air minum layak di kawasan perkotaan baru mencapai 51,54 persen, termasuk di dalamnya cakupan layanan akses air minum perpipaan yang baru mencapai 29,30 persen. Begitu halnya dengan layanan air limbah domestik yang layak di perkotaan hanya 69,36 persen, termasuk di dalamnya terdapat akses aman 11,12 persen.Permasalahan lainnya adalah masih terdapat rumah tangga yang mempraktikan BuangAir Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (3,85 persen), dan rumah tangga yangmemiliki toilet namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/sawah/sungai/danau/lautdan/ atau pantai/tanah lapang/kebun) sebesar 8,52 persendi perkotaan. Permasalahan tersebut menimbulkan penurunan kualitas lingkunganpermukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan *stunting*.

5) **Penyediaaan Akses Perumahan dan Permukiman**

Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Saat ini terdapat sekitar 40,39 persen rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan dibutuhkan upaya pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pada daerah tertentu, dibutuhkan konsolidasi tanah vertikal dalam rangka menangani permukiman kumuh sekaligus menyediakan pasokan rumah baru di perkotaan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

d. Energi dan Ketenaga listrikan

Pembangunan energi dan ketenaga listrikan akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu: (i) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; (ii) akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; serta (iii) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

e. Transformasi Digital

Transformasi digital, meliputi:

1) Penuntasan infrastruktur TIK.

2) Pemanfaatan infrastruktur TIK.

3) Fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

a. Konsolidasi demokrasi.

b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.

c. Penegakan hukum nasional.

d. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

e. Menjaga stabilitas nasional.

4.2.3 Isu Strategis Regional Sulawesi

Isu strategis untuk wilayah regional Sulawesi adalah:

1. Ibu Kota Baru Indonesia.
2. Industri Berbasis Kakao dan Agro Industri Lainnya.
3. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional.
4. Pengembangan Industri Kelautan dan Berbasis Kemaritiman.
5. Konektifitas Jaringan Infrastruktur se-Sulawesi.
6. Pencapaian Target dan sasaran SDGs.

4.2.4 Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.

2. SDM yang Unggul.
3. Daya Saing Infrastruktur Daerah.
4. Mitigasi Bencana.
5. Pencapaian Target dan sasaran SDGs.

4.2.5 Isu, Masalah, dan Harapan Warga Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis Kota Palu dan harapan warga yang dilakukan selama ini sejak 2003, 2005 dan 2011, baik studi literature (Sekunder), lokakarya kelurahan, Kecamatan dan Kota oleh bersama BAPPEDA dan lokakarya bertingkat lainnya, diskusi terfokus menyangkut masalah dan solusi permasalahan kota dengan berbagai dinas terkait. Diskusi permasalahan tematik yang digagas publik (Simpul Warga/SIAGA/YPR), *Focus Group Discussion* (FGD), temu Warga setiap Kecamatan se Kota Palu dan Silaturahmi Warga Kota Palu, penyebaran 3.500 Angket, penjaringan aspirasi dan harapan warga di kalangan professional (Petani, Guru, Mahasiswa, Pengusaha, Pedagang kaki lima, Nelayan, Pemulung, Ojek, Becak, Dokar, dll). Pertemuan-pertemuan informal dengan DPRD dan Pemerintah Kota. Diskusi lepas dengan kalangan LSM termasuk dengan Dewan Kesenian di Kota Palu serta diskusi komparasi dengan warga Kota Palu yang studi di berbagai negara, diperoleh sejumlah issu, masalah dan harapan warga antara lain:

1. **Isu Kota Palu yang menonjol**
   a. Pengembangan Ekonomi Lokal (kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat)
   b. Isu Kinerja Apparatur Kota dan Kualitas Pelayanan Publik (ata kelola pemerintahan);

c. Isu Infrastruktur (energi, air bersih, transaportasi, dan komunikasi);
d. Isu Lingkungan Hidup dan Mitigasi bencana
e. Tata Ruang Kota;
f. Sosial budaya (pendidikan dan kesehatan masyarakat).

2. Masalah Kota Palu yang menonjol

a. Kemiskinan
b. Kebersiahan dan Sampah Kota;
c. Energi Listrik;
d. Air Minum;
e. Pelayanan Publik;
f. Keamanan dan Ketertiban;
g. Transportasi;
h. Ketenagakerjaan;
i. Sarana Prasarana
j. Tata Ruang
k. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam.

3. Harapan Warga Kota

Harapan warga tentang Karakter Kota Palu ke depan, antara lain:

a. Palu Kota Bersih, Indah dan Nyaman;
b. Palu Kota Idaman;
c. Palu Kota Kunjungan Wisata;
d. Palu Kota Wisata;
e. Palu Kota Jasa;
f. Palu Kota Transit;
g. Palu Kota Transit, Barang dan Jasa;
h. Palu Kota Transit Orang, Barang dan Jasa;

i. Palu Kota Wisata dan Jasa;
j. Palu Kota Paling Maju dan Lestari;
k. Palu Kota Religius;
l. Palu Kota Pendidikan.
m. Palu Kota Binter
n. Palu Kota Budaya
o. Palu Kota Seni dan Budaya

Atas berbagai masukan stakeholder, masalah, Isu strategi, dan potensi dan harapan berbagai stakeholder, maka dicapailah kesepakatan tentang visi daerah Kota Palu, yaitu Kota Untuk Semua atau ***"City For All"***.

4.2.6 Telaahan RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Pendekatan spasial mengacu pada Dokumen RTRW Kota Palu Tahun 2021-2026, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor, dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Palu. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
5. Penataan ruang KSK.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kota harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kota Palu, yaitu untuk **mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional berbasis industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang berkearifan lokal dan tangguh bencana**.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala kota. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya, dalam perumusan rencana pembangunan, penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Palu.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang diterapkan sebagai pendekatan spasial, meliputi:

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang
   a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan infrastruktur perkotaan meliputi SPAM, SPALD, sistem pengolahan limbah B3, sistem jaringan persampahan kota, sistem drainase;
   b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan pejalan kaki.
2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang
   a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan infrastruktur perkotaan meliputi SPAM, SPALD, sistem pengolahan limbah B3, sistem jaringan persampahan kota, sistem drainase;
   b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan pejalan kaki.
3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK)
   a. Kawasan Tondo-Talise dari sudut kepentingan ekonomi; dan
   b. Kawasan Kota Tua di Kecamatan Palu Barat dari sudut kepentingan sosial budaya.
4. Indikasi Program Utama Perwujudan Ruang
   a. Perwujudan Struktur Ruang
      1) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi pusat-pusat pelayanan perkotaan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan

transportasi, pusat pemerintahan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan pendidikan dan pusat pelayanan sosial dan budaya;

2) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan jaringan transportasi udara;
3) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
4) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
5) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumberdaya air meliputi sumber air dan prasarana sumberdaya air;
6) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan infrastruktur perkotaan meliputi SPAM, SPALD, sistem pengolahan limbah B3, sistem jaringan persampahan kota, sistem drainase;
7) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
8) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan pejalan kaki.

b. Perwujudan Pola Ruang

1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hutan produksi;
2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertanian;

3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perikanan;
4) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi;
5) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri;
6) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata;
7) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan permukiman; dan
8) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

c. Perwujudan KSK, yaitu penyusunan, penetapan, pengembangan, dan peningkatan fungsi KSK.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kota Palu, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 mengarahkan:

1. Pembangunan sektoral sesuai dengan kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk pengembangan sektor ekonomi;
2. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam pemenuhunan kuantitas dan kualitas air

bersih, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana;

3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Palu dan rencana pembangunan Tahun 2021-2026, dengan lintas sektoral, lintas wilayah pusat/provinsi/kabupaten/kota, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pembangunan Kota Palu; dan
4. Peningkatan tertib ruang melalui inovasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan penataan ruang dan pembangunan.

4.2.7 Rekomendasi Isu Strategis KLHS

Isu-isu strategis/permasalahan yang disusun merupakan pokok permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palu. Isu-isu strategis prioritas atau pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

4.2.8 Isu Strategis Kota Palu

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Palu, maka dirumuskan isu strategis Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, inklusif, dan merata**

   Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyaraka yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

   Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,00%, Tahun 2019 tumbuh menjadi 5,79 %, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2020 yakni tumbuh -4,54 %. Meskipun secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Palu tumbuh -4,54%, namun beberapa sektor masih tumbuh positif seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Palu juga mengalami fluktuasi, Tahun 2018 berkontribusi sebesar 10,64%, selanjutnya tumbuh menjadi 11,11% pada Tahun 2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 10,12%. Untuk sektor sekunder, mengalami trend kontribusi yang positif, Tahun 2018 sebesar 23,69 % dan naik pada Tahun 2020 menjadi 26,41%. Kontribusi sektor tersier juga mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 65,66% turun menjadi 63,47% pada Tahun 2020 (BPS,2020, diolah).

   Data penduduk miskin Kota Palu, terus berfluktuasi mengikuti dinamika perkotaan, Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Palu menurun dari 6,83 persen (Tahun 2019)

menjdi 6,80 (Tahun 2020). Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan dari Tahun 2019 yakni dari 26.620 jiwa menjadi 26.890 jiwa. Raihan angka kemiskinan ini secara konsisiten terus berada di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah yang berada diangka 12,92 persen, dan angka kemiskinan nasional yang berada diangka 9,78 persen pada tahun 2020. Fakta ini juga mengambarkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kota Palu termaksud dalam kategori penduduk miskin.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan atau P1 yang mengambarkan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukan penurunan di tahun 2020, yaitu 0,97, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan atau P2, yang mengambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, angkanya tidak berubah sejak tahun 2019, hingga tahun 2020, yaitu pada angka 0,22.

2. SDM Unggul, Tangguh, dan Berdaya Saing.

Keberadaan sumberdaya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isyu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang srategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor sumberdaya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang ungul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumberdaya yang adauntuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penangulangan dimasa tanggap darurat. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia, ditujukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan kerja. Capaian IPM Kota Paludalam dua tahun terakhir (Tahun 2019 dan 2020) kategori "sangat tinggi", yaitu angka 81,50 di tahun 2019 dan 81, 47 di tahun 2020, dan Raihan ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indeks Kesehatan, digambarkan dengan instrumen Umur Harapan Hidup, angka tersebut di Kota Palu menunjukan peningkatan dari 70.68 tahun ditahun 2019 menjadi 71,04 tahun pada tahun 2020.

Indeks Pendidikan, digambarkan oleh angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah, untuk angka harapan sekolah, di Kota Palu meningkat dari 16,22 tahun di tahun 2019, naik menjadi 16,23 tahun pada tahun 2020, demikian juga pada angka rata rata lama sekolah, meningkat diangka 11,6 tahun pada tahun 2019 menjadi 11,61 tahun di tahun 2020.

Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2017 terus mengalami peningkatan sampai mencapai angka 202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 91,62 % pada Tahun 2020. Rendahnya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh naiknya angka atau jumlah pengangguran mencapai 16.960 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka

sebesar 8,38% pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 6,36%.

3. Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Tangguh, dan Inklusif

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujuduan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, smart dan inovatif.Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga kesiapan kelembagaan dan sumberdaya pembiayaan yang mendukung dalam kategotri mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memilki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

4. Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akanmemberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semu pihak, yang dijalankan dengansuasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan produktif kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Kosep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, etika dan budaya organisasi serta visi strategis.

6. Pencapaian Target dan Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator. Secara umum terdiri atas 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Hasil evaluasi Tahun 2020 terhadap capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Palu sebanyak 130 indikator atau sebesar 60,47% telah tercapai, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 35 indikator atau sebesar 16,28%. Selebihnya, masih ada indikator yang belum memiliki data sebesar 23,26%.

BAB V

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka Visi Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah:

Visi

"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan"

Adapun penjabaran Visi Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Kota Palu Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di

	dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
Mandiri	Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang menumbuhkan perekonomian kota yang positif sehingga memiliki daya saing yang kuat serta kemandirian usaha masyarakat dan ekonomi kerakyatan.
Aman dan Nyaman	Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik serta infrastruktur yang berkualitas dan berketahanan.
Tangguh	Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing, serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.
Profesional	Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.
Pembangunan Berkelanjutan	Merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi

berikutnya.

Kearifan Lokal	Kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.
Keagamaan	Nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

5.2 Misi

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional. Empat Pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

1. Ekonomi;
2. Lingkungan;
3. Sumber Daya Manusia (Sosial); dan
4. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, Lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan SDM yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan. Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun **perekonomian** yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan **lingkungan** yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan **sumber daya manusia** yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan **pemerintahan** yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukungan aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4 Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Mandiri – Aman – Nyaman – Tangguh – Profesional –
Berkelanjutan – Kearifan Lokal – Keagamaan
yang digaungkan dengan
PALU MANTAP BERGERAK

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

1. **Kota cerdas (*smart city*)**

   Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih "cerdas", saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

2. **Kota tangguh (*resilience city*)**

   Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

3. **Kota hijau (*green city*)**

   Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

4. **Kota inklusif (*inclusive city*)**

Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial,sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015).

Gambar 5.1 Konsep Pembangunan Kota Palu 2021-2026

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan

kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Palu secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Palu, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kota Palu yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Palu sampai dengan Tahun 2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Palu Tahun 2005-2025.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026 terdiri dari 4 (Empat) tujuan dan 15 (Lima Belas) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (5 indikator tujuan dan 28 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Visi: **Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan**										
Misi 1: Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global										
T.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	-4,54	3,21	3,73	4,20	4,32	4,42	4,42
	S.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Persen (%)	26,41	27,22	28,04	28,2	28,36	28,4	28,4
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Persen (%)	63,47	64,57	65,67	65,8	65,94	66,1	66,1
Misi 2: Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana										
T.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Indeks Kota Layak Huni	Poin	NA	60	62	63	63,5	64	64
		Indeks Risiko Bencana	Poin	150,16	137,62	125,08	112,54	100	100	100
	S.2 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,92	74,26	74,60	74,94	75,28	75,62	75,62
	S.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	Poin	100	100	100	100	100	100	100
	S.4 Meningkatnya	Persentase jalan	Persen	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	yang berkeselamatan	(%)						
			Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen (%)	17,99	19.51	21.04	23.14	25.92	29.51	29.51
			Persentase luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,67	0,55	0,31	0,07	0,03	0,00	0,00
			Persentase rumah tidak layak huni	Persen (%)	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66	8,66
	S.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen (%)	75	80	85	90	95	100	100
	S.6 Meningkatnya ketangguhan kota		Indeks ketangguhan kota	Poin	263	400	450	475	500	550	550
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19											
T.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,47	81,70	81,90	82,10	82,40	82,60	82,60
	S.7 Meningkatnya kualitas pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,23	16,50	17,00	17,40	17,60	18,00	18,00
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,61	11,63	11,65	11,71	11,81	12,00	12,00
	S.8 Meningkatnya derajat kesehatan		Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,40	71,60	71,80	72,00	72,20	72,20

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	masyarakat	*Case Fatality Rate* Covid-19	Persen (%)	2,89	1,75	1,50	1,00	1,00	< 1,00	< 1,00
	S.9 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Persen (%)	50	60	70	80	90	100	100
		Indeks Pembangunan Gender	Persen (%)	97,96	98,05	98,11	98,14	98,21	98,29	98,29
		Indeks Kota Layak Anak	Level	NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
	S.10 Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks kerukunan umat beragama	Persen (%)	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5
		Indeks Aktualisasi Pancasila	Poin	NA	68	69	70	71	72	72
		Indeks pembangunan kebudayaan	Persen (%)	48,11	51,56	52,42	53,28	54,14	55	55
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani										
T.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50,07	66	78	86	90	92	92
	S.11 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi AKIP	Level	B	B	BB	A	A	A	A
		Tingkat Maturitas	Level	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL III

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		SPIP					III	III	III	
	S.12 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	NA	71	75	80	85	90	90
	S.13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	C-	C	C	B-	B	B	B
	S.14 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	23	40	50	60	70	80	80
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	1,54	1,8	2,4	2,6	2,8	3	3
	S.15 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan)	Poin	NA	75	78	80	85	90	90

BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, namun juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Palu juga mempertimbangkan penciptaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi dan inovasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci sebagai berikut.

6.1.1 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Pembangunan ekonomi Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sector ekonomi potensial daerah.

Sektor sekunder yang akan didorong pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan yang bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan sektor tersier yang akan didorong sektor perdagangan, sektor transportasi, sektor akomodasi, sektor komunikasi, sektor real estat, serta sektor jasa-jasa dan sektor jasa lainnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Palu didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi capaian target pembangunan daerah, serta perbaikan kualitas kebijakan daerah.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pengembangan industri pengolahan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi;
   b. meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal; dan

c. meningkatkan pengembangan industri kreatif.

2. **Meningkatkan pengembangan pasar perdagangan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
   b. Mengembangkan pasar berbasis segmentasi.
3. **Mempercepat pengembangan pariwisata** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi;
   b. mengembangkan industri wisata yang tersegmentasi dan inklusif;
   c. meningkatkan promosi pariwisata melalui pelaksanaan *event* dan pemanfaatan tekonologi informasi;
   d. meningkatkan penataan kelembagaan pariwisata dan pelibatan masyarakat; dan
   e. Mengembangkan desa wisata.
4. **Mempercepat peningkatan investasi daerah,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi; dan
   b. meningkatkan pengembangan kawasan ekonomi khusus.
5. **Meningkatkan penguatan pada kelompok usaha,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. melakukan penguatan pada kelompok usaha;
   b. meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital; dan
   c. mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital.
6. **Mengembangkan kerjasama ekonomi** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah dan badan usaha;
b. Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

6.1.2 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan dan Infrastruktur

Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Tahun 2018, Kota Palu dihantam dengan bencana gempa bumi yang cukup dahsyat yang mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami dan likuifaksi. Bencana tersebut berdampak sangat fatal bagi kawasan pesisir dan kawasan permukiman, serta infrastruktur kota. Ditambah pada tahun 2019 hingga saat ini, Kota Palu juga terdampak oleh pandemic Covid-19. Oleh karena itu, pada lima tahun mendatang, Kota Palu ingin membangun kembali tatanan lingkungan kotanya dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan bencana.

Pembangunan Kota Palu dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan berbasiskan mitigasi bencana dengan dukungn infrastruktur berketahanan. Kawasan yang akan dikembangkan merupakan pusat kegiatan kota dan kawasan strategis (baik KSN dan KSP yang ada di Kota Palu maupun KSK Kota Palu), meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lolu-Besusu dan Tondo-Talise, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Pantoloan-Lambara-Panau, Tatura Utara-Tatura Selatan-Lolu Selatan, dan Siranindi-Kamonji, serta Pusat Lingkungan (PL) Taipa, Mamboro, Lasoani, Petobo, Tavanjuka, dan Tipo. PPK Tondo-Talise menjadi pusat kota baru yang diarahkan menjadi kota satelit dengan

fungsi utama sebagai *central business district* kota dan *civic center* skala kota dan regional, kawasan pemerintahan, dan kawasan pedidikan.

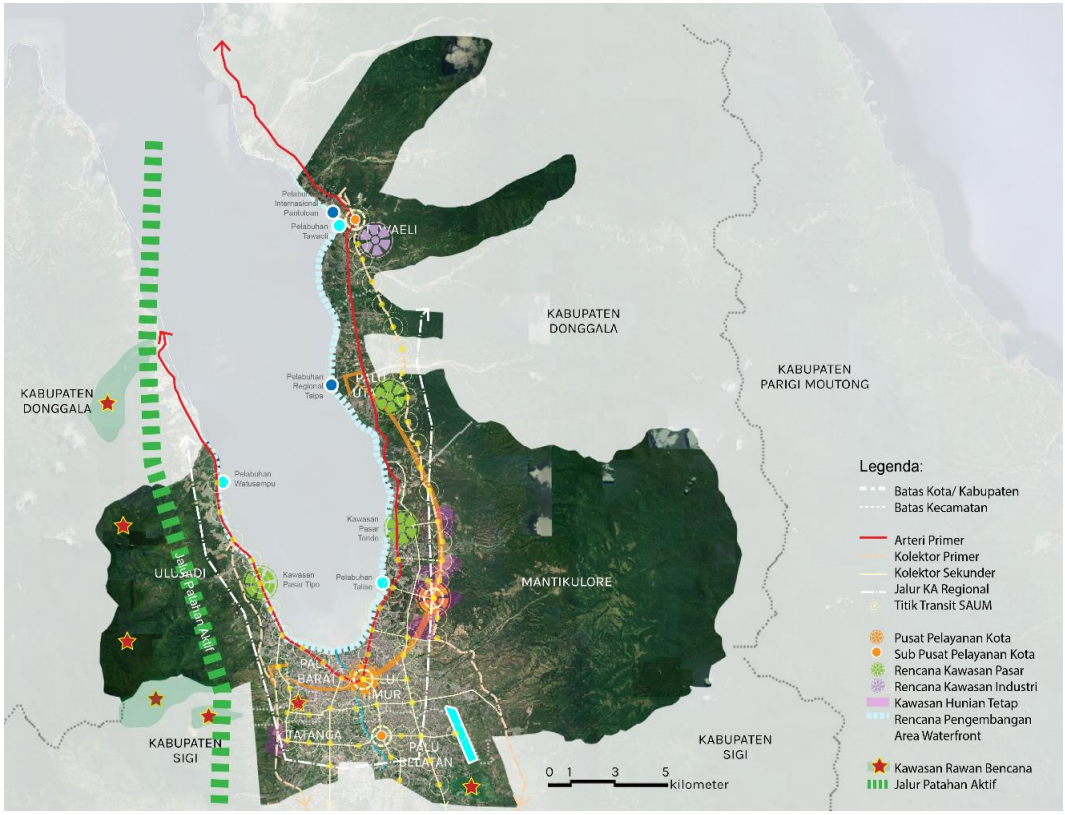

Pembangunan lingkungan Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana yang ditunjukkan dengan (i) meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, (ii) meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, (iii) meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan, (iv) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana; serta (v) meningkatnya ketangguhan kota.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan

Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan Terhadap Bencana adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
   b. meningkatkan pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman.
2. **Meningkatkan kualitas tutupan lahan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
   b. meningkatkan luasan ruang terbuka hijau
3. **Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan terpadu,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
   b. membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah di kecamatan; dan
   c. meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW.
4. **Meningkatkan pengendalian keamanan dan pengawasan ketertiban lingkungan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan;
   b. Meningkatkan pengawasan ketertiban lingkungan kota dan penanganan pelanggaran Perda; dan
   c. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat.

5. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan jaringan infrastruktur transportasi yang terpadu dan ramah lingkungan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. membangun dan meningkatkan kualitas prasarana jalan yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan; dan
   b. mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang terpadu, aman dan ramah lingkungan.
6. **Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA),** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air (SDA).
7. **Meningkatkan kualitas infrastruktur berbasis kawasan dan lingkungan permukiman** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan penyediaan rumah layak huni;
   b. meningkatkan cakupan layanan air minum;
   c. meningkatkan pengelolaan air limbah domestik;
   d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman; dan
   e. meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh.
8. **Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur kota,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan mengembangkan infrastruktur kota yang aman berbasiskan kawasan dengan memperhatikan pusat-pusat kegiatan kota.
9. **Mengembangkan pusat kegiatan kota sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. menetapkan seluruh rencana rinci tata ruang berbasis mitigasi bencana;
   b. mengembangkan pusat kegiatan baru sesuai dengan rencana tata ruang; dan

c. mengembangkan sistem perencanaan tata ruang berbasis teknologi informasi.

10. **Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    a. mengembangkan sistem inovatif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan; dan
    b. meningkatkan pemenuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
11. **Meningkatkan ketangguhan kota untuk mengurangi risiko bencana,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    a. meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas dalam penganggulangan bencana;
    b. meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana;
    c. mengembangkan sistem penanggulangan bencana dengan memanfaatkan tekonologi informasi;
    d. membentuk satuan respon cepat terhadap kejadian bencana; dan
    e. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

6.1.3 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya manusia

Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19

Pembangunan sumber daya manusia Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan (i) meningkatnya kualitas pendidikan, (ii) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (iii) meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan

sosial, serta (iv) meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebangsaan.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing, merata, dan terjangkau,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan penguatan akhlak, budi pekerti, dan karakter;
   b. mempercepat pemerataan kualitas sekolah;
   c. meningkatkan prestasi pendidikan; dan
   d. memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu.
2. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan;
   b. mengembangkan ruang kelas dengan memanfaatkan tekonologi informasi; dan
   c. mengembangkan sistem penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi.
3. **Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik; dan
   b. meningkatan jumlah pendidik bersertifikat.
4. **Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. menerapkan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan
b. meningkatkan jumlah sekolah berakreditasi A.

5. **Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
   b. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
   c. memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan;
   d. meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak;
   e. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga; dan
   f. meningkatkan penanggulangan *stunting*.
6. **Melakukan percepatan penanganan Covid-19,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19;
   b. meningkatkan pelaksanaan protokol Covid-19;
   c. mempercepat penyelesaian pemberian vaksin Covid-19; dan
   d. Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan pasien Covid-19.
7. **Mendorong peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan memberi ruang khusus bagi dunia usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
8. **Melakukan pemberdayaan masyarakat, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta perlindungan dan pemenuhan hak anak,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. memberikan pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat;
b. Mendorong pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa;
c. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga;
d. memberi ruang bagi peran serta perempuan dan PPKS dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kota;
e. meningkatkan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial;
f. mewujudkan kota layak anak;
g. mengembangkan ruang khusus anak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik; dan
h. meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

9. **Melakukan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja;
   b. melakukan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah; dan
   c. mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis.
10. **Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai keagamaan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan pelayanan terhadap rumah ibadah;
   b. meningkatkan peran rumah ibadah dalam pengembangan umat; dan
   c. meningkatkan peran tokoh agama dan forum kerukunan antarumat beragama.
11. **Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan kebangsaan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. meningkatkan peran tokoh adat dan forum pembauran kebangsaan;
b. meningkatkan promosi budaya dan penguatan kearifan lokal dan nilai kebangsaan;
c. mengembangkan kurikulum muatan lokal; dan
d. mendorong kesadaran minat baca masyarakat.

6.1.4 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintah

Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Pengelolaan Pemerintahan Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan dengan (i) meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan, (ii) meningkatnya mutu aparatur sipil negara, (iii) meningkatnya kinerja pelayanan publik, (iv) Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan tenologi informasi, serta (v) meningkatnya penataan regulasi daerah.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. menerapkan sistem perencanaan, pemprograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu;

b. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional;
c. melakukan penataan organisasi pemerintah daerah;
d. meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah;
e. meningkatkan pengelolaan aset daerah;
f. meningkatkan penerimaan sektor PAD; dan
g. meningkatkan pengelolaan arsip daerah.

2. **Melakukan percepatan peningkatan mutu aparatur sipil negara,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada ASN;
   b. melakukan magang ASN pada skala nasional; dan
   c. melakukan penataan pada sistem tenaga kontrak daerah di lingkungan pemerintah kota.
3. **Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional;
   b. mengembangkan sistem pelayanan publik yang cepat dan akurat; dan
   c. ,embentuk desa untuk menjamin hadirnya pelayanan pemerintah di pelosok wilayah.
4. **Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan menghadirkan inovasi pada setiap OPD (Satu OPD Lima Inovasi).
5. **Melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan,** yang dilaksanakan dengan

arah kebijakan menerapkan konsep *smart city* pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya.

6. **Mempercepat penataan regulasi daerah,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. melakukan penataan regulasi daerah; dan
   b. meningkatkan pembangunan hukum.

Selain strategi pembangunan dan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik yang telah dijabarkan di atas, dalam upaya mendekatkan, meningkatkan dan mempermudah pelayanan masyarakat, maka diperlukan adanya pemekaran kelurahan serta pembentukan desa. Kelurahan dan desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Kelayakan pemekaran kelurahan dan pembentukan desa tersebut akan dikaji, jika kelurahan tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta pengajuan pembentukkan desa disetujui kementerian terkait, maka disusun dalam Ranperda Kota Palu yang nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu 2021-2026

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1: Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global			
T.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	S.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi
			Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
			Meningkatkan pengembangan industri kreatif
		Meningkatkan pengembangan pasar perdagangan	Meningkatkan pengembangan pasar dalam dan luar negeri
			Mengembangkan pasar berbasis segmentasi
		Mempercepat pengembangan pariwisata	Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi
			Mengembangkan industri wisata yang tersegmentasi dan inklusif
			Meningkatkan promosi pariwisata melalui pelaksanaan *event* dan pemanfaatan tekonologi informasi
			Meningkatkan penataan kelembagaan pariwisata dan pelibatan masyarakat
			Mengembangkan desa wisata
		Mempercepat peningkatan investasi	Meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		daerah	Meningkatkan pengembangan kawasan ekonomi khusus
		Meningkatkan penguatan pada kelompok usaha	Melakukan penguatan pada kelompok usaha
			Meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital
			Mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital
		Mengembangkan kerjasama ekonomi	Mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah dan badan usaha
			Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Misi 2: Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana			
T.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	S.2 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan dan menjaga kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman
		Meningkatkan kualitas tutupan lahan	Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau
		Mengembangan sistem pengelolaan persampahan terpadu	Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
			Membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah di kecamatan

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW
	S.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pengendalian keamanan dan pengawasan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan
			Meningkatkan pengawasan ketertiban lingkungan kota dan penanganan pelanggaran Perda
			Meningkatkan Kewaspadaan dini masyarakat
	S.4 Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan jaringan infrastruktur transportasi yang terpadu dan ramah lingkungan	Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana jalan yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan
			Mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang terpadu, aman dan ramah lingkungan
		Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA)	Meningkatkan kualitas system jaringan sumber daya air
		Meningkatkan kualitas infrastruktur berbasis kawasan dan lingkungan permukiman	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
			Meningkatkan cakupan layanan air minum
			Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatkan penanganan kawasan permukiman

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			kumuh
		Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur kota	Mengembangkan infrastruktur kota yang aman berbasiskan kawasan dengan memperhatikan pusat-pusat kegiatan kota
	S.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Mengembangkan pusat kegiatan kota sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang	Menetapkan seluruh rencana rinci tata ruang berbasis mitigasi bencana
			Mengembangkan pusat kegiatan baru sesuai dengan rencana tata ruang
			Mengembangkan sistem perencanaan tata ruang berbasis teknologi informasi
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengembangkan sistem inovatif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan
			Meningkatkan pemenuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
	S.6 Meningkatnya ketangguhan kota	Meningkatkan ketangguhan kota untuk mengurangi risiko bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas dalam penganggulangan bencana
			Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana
			Mengembangkan sistem penanggulangan bencana dengan memanfaatkan tekonologi informasi
			Membentuk satuan respon cepat terhadap kejadian bencana

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19			
T.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	S.7 Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing, merata, dan terjangkau	Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan penguatan akhlak, budi pekerti, dan karakter
			Mempercepat pemerataan kualitas sekolah
			Meningkatkan prestasi pendidikan
			Memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan
			Mengembangkan ruang kelas dengan memanfaatkan tekonologi informasi
			Mengembangkan sistem penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
		Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik
			Meningkatkan jumlah pendidik bersertifikat
		Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan	Menerapkan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
			Meningkatkan jumlah sekolah berakreditasi A
	S.8 Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	masyarakat	pelayanan kesehatan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			Memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
			Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
			Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
			Meningkatkan penanggulangan *stunting*
		Melakukan percepatan penanganan Covid-19	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19
			Meningkatkan pelaksanaan protokol Covid-19
			Mempercepat penyelesaian pemberian vaksin Covid-19
			Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan pasien Covid-19
	S.9 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Mendorong peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Memberi ruang khusus bagi dunia usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
		Melakukan pemberdayaan masyarakat, perempuan, Pemerlu Pelayanan	Memberikan pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat
			Mendorong pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa
			Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	Memberi ruang bagi peran serta perempuan dan PPKS dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kota
			Meningkatkan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial
			Mewujudkan Kota Layak Anak
			Mengembangkan ruang khusus anak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik
			Meningkatka Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Melakukan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dan Kesempatan kerja	Memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja
			Melakukan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah
			Mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis
	S.10 Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan pelayanan terhadap rumah ibadah
			Meningkatkan peran rumah ibadah dalam pengembangan umat
			Meningkatkan peran tokoh agama dan forum kerukunan antarumat beragama
		Meningkatkan pengembangan dan	Meningkatkan peran tokoh adat dan forum pembauran kebangsaan

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan kebangsaan	Meningkatkan promosi budaya dan penguatan kearifan lokal dan nilai kebangsaan
			Mengembangkan kurikulum muatan lokal
			Mendorong kesadaran minat baca masyarakat
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
T.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	S.11 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Mengembangkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Menerapkan sistem perencanaan, pemprogramman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu
			Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional
			Melakukan penataan organisasi pemerintah daerah
			Meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah
			Meningkatkan pengelolaan aset daerah
			Meningkatkan penerimaan sektor PAD
			Meningkatkan pengelolaan arsip daerah
	S.12 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Melakukan percepatan peningkatan mutu aparatur sipil negara	Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada ASN
			Melakukan magang ASN pada skala nasional
			Melakukan penataan pada sistem tenaga Kontrak Daerah di lingkungan pemerintah kota
	S.13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan	Menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional
			Mengembangkan sistem pelayanan publik yang

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		hadir melayani	cepat dan akurat
			Membentuk desa untuk menjamin hadirnya pelayanan pemerintah di pelosok wilayah
	S.14 Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya	Menghadirkan inovasi pada setiap OPD (Satu OPD Lima Inovasi)
		Melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan	Menerapkan konsep *smart city* pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya
	S.15 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Mempercepat penataan regulasi daerah	Melakukan penataan regulasi daerah
			Meningkatkan pembangunan hukum

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu 2021-2026 yang telah dirumuskan dicapai dengan menentukan beberapa fokus pengembangan inti (*core*) yang menjadi panduan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan ke depan.

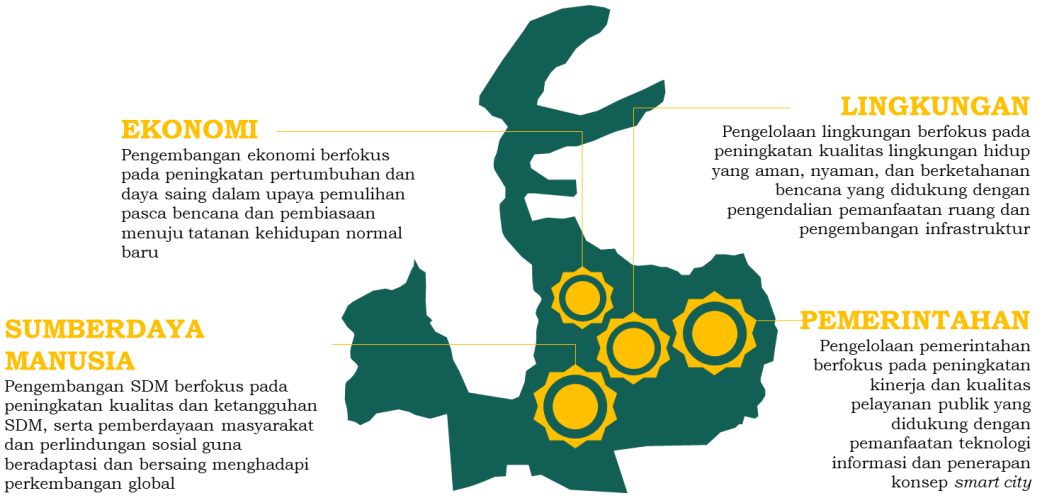

Gambar 6.1 Fokus Pengembangan Kota Palu 2021-2026

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Tabel 6.2 Tema Pembangunan Kota Palu 2021-2026

No.	Tahun	Tema Pembangunan
1	2022	Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan

No.	Tahun	Tema Pembangunan
2	2023	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Transformasi Digital dalam Penatakelolaan Pemerintahan menuju Palu Adipura
3	2024	Pengembangan SDM yang Adaptif, Tangguh, dan Berdaya Saing melalui Pelayanan Dasar yang Berkualitas
4	2025	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Ketangguhan Daerah
5	2026	Pemantapan Kinerja Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar 6.2 Tema/Fokus Pembangunan Kota Palu 2021-2026

6.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

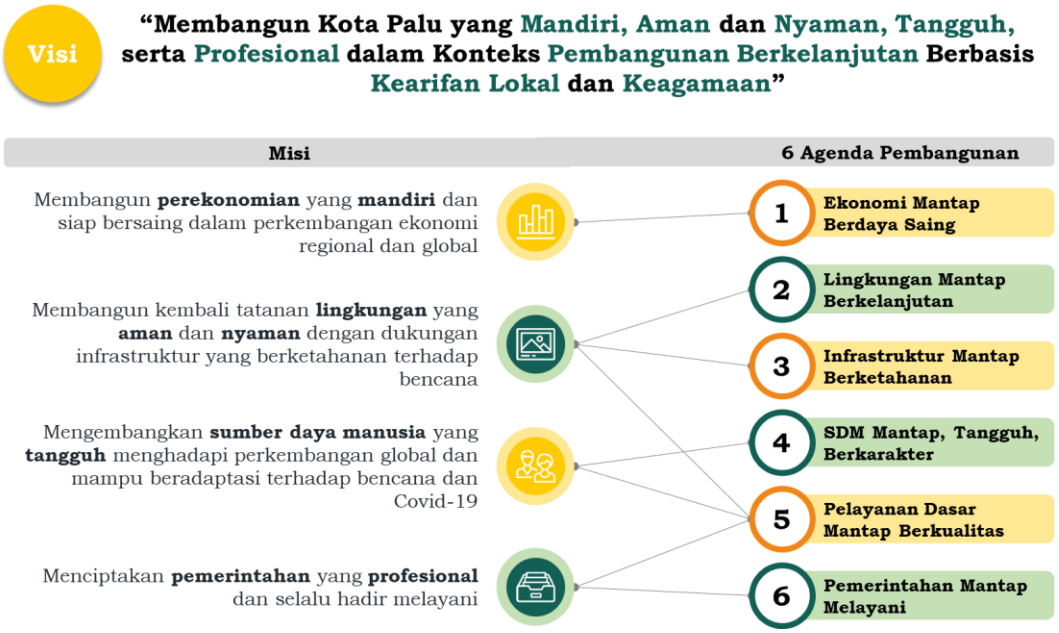

Gambar 6.3 Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yang diturunkan ke dalam enam Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Ekonomi Mantap Berdaya Saing;
2. Lingkungan Mantap Berkelanjutan;
3. Infrastruktur Mantap Berketahanan;
4. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter;
5. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan
6. Pemerintahan Mantap Melayani.

Gambar 6.4 Kerangka Pikir 6 Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026

Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
3. Penguatan UMKM dan Palu Market Place
4. Revitalisasi Perparkiran Kota Palu
5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
7. Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
10. 1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
11. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Forum Komunitas Kreatif Kota Palu (Palu Creative Hub)

Lingkungan Mantap Berkelanjutan

1. Palu Adipura
2. Palu Terang
3. Palu Hijau
4. Palu Ramah, Aman, dan Tertib
5. CSR Forum
6. Satgas Cepat Tanggap
7. Kelurahan Mantap 2 Miliar

Infrastruktur Mantap Berketahanan

1. Bangun Palu Tahan Gempa (Palu Tangguh Bencana)
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu

SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya
2. Badan Pelayanan Rumah Ibadah
3. Palu Berbagi
4. Palu Religi
5. Pelestarian Seni Budaya
6. Palu Ramah Difable
7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu
8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu

Gambar 6.5 Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026

Tabel 6.3 Agenda Prioritas Pembangunan Kota Palu 2021-2026

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
A.	**Agenda 1: Ekonomi Mantap Berdaya Saing**				
1	4 Miliar Bedah Rumah + Modal Usaha per Kelurahan	• 100 rumah/ kelurahan pada 46 kelurahan. Total 4.600 rumah • 30 juta untuk bedah rumah • 10 juta untuk modal usaha	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM
2	Inkubator Bisnis berbasis Digital per Kelurahan	• 1 inkubator bisnis per kelurahan • Mengembangkan usaha berbasis digital	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian, OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
3	Penguatan UMKM	• Dukungan permodalan • Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan • Peningkatan jangkauan pasar dan *branding*	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
4	Revitalisasi Perparkiran	• Pemetaan lokasi parkir tepi jalan dan lokasi khusus • Pengembangan sistem e-parking • Pengembangan parkir berlangganan • Penanganan juru parkir	APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (pendapatan)
5	Reformasi dan Revitalisasi Moda	• Pengembangan moda angkutan massal • Mendorong berkembangnya moda	APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan	

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
	Transportasi	transportasi alternatif			
6	Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi	• Kawasan/koridor ekonomi kreatif • Kawasan/koridor wisata religi	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM, OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
7	Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo	• Kawasan agrowisata berbasis peternakan di Layana • Kawasan agrowisata berbasis tanaman pangan dan holtikultura di Petobo	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pertanian, OPD Pelaksana Urusan Pangan	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
8	Revitalisasi Pasar berbasis Segmentasi	• Pengembangan pasar khusus, seperti pasar burung, pasar buah, dan sebagainya • Target revitalisasi pasar eksisting	APBN, APBD, KPBU, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
9	Wisata Pasar Ikan	Pasar ikan yang akan terintegrasi dengan tempat penyedia makanan *seafood*	APBN, APBD, KPBU, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
				Pelaksana Urusan Perindustrian	Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
10	1.000 Perahu untuk Nelayan	• 10 juta/ 1 perahu/ keluarga nelayan • Dapat kumulatifkan ke dalam kelompok nelayan. Contoh 1 kelompok beranggotakan 10 nelayan, dapat diberikan 1 kapal senilai 100 juta	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM
11	Kerjasama antar Pemerintah Daerah	• Kerjasama ketenagakerjaan • Kerjasama ekonomi dan perdagangan • Dapat dilakukan kerjasama dengan BUMN dan swasta	APBN, APBD, KPBU	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
12	Forum Komunitas Kreatif	• 1 forum komunitas kreatif • Membangun 1 bangunan sebagai *creative hub* • Fasilitasi kegiatan forum kreatif	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga
B.	**Agenda 2: Lingkungan Mantap Berkelanjutan**				
1	Palu Adipura	• Pengelolaan sampah terpadu • Penerapan 3R di kelurahan dan RT/RW • Pembentukan UPTD pengelola sampah di setiap kecamatan	APBN, APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
		• Penanganan TPA sampah • Penghargaan Adipura tahun 2023			Kecamatan
2	Palu Terang	• Cakupan listrik 100% • Seluruh jalan di Kota Palu mendapatkan PJU	APBN, APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3	Palu Hijau	• Kualitas lingkungan meningkat • Pengembangan kota hijau • Peningkatan luasan ruang terbuka hijau • Penanaman dan pemeliaharan pohon	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
4	Palu Ramah, Aman, dan Tertib	• PKL tertib • Tingkat kejahatan menurun • Bebas pengemis, anak jalanan, gepeng, dsb • Bebas hewan ternak berkeliaran	APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
5	CSR Forum	• Terbentuknya 1 forum • Pengalokasian pembangunan dengan dana CSR guna mendukung program prioritas	APBD, CSR	Sekretariat Daerah	
6	Satgas Cepat Tanggap	• Terbentuknya 1 satgas yang beranggotakan lintas OPD • Tersusunnya SOP pelaksanaan tugas • Terintegrasi dengan web/aplikasi	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Kesehatan,

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
		lapor		serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Perhubungan, OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
7	Kelurahan Mantap 2 Miliar	• *Award* bagi kelurahan terbaik dari sisi pelayanan dan kebersihan lingkungan • Total 2 miliar/ tahun. Terbaik 1 1 miliar, terbaik 2 600 juta, terbaik 3 400 juta	APBD, CSR	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
C.	**Agenda 3: Infrastruktur Mantap Berketahanan**				
1	Bangun Palu Tahan Gempa	• Rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana • Perda standar bangunan tahan gempa • Pembangunan kota dengan konsep mitigasi bencana • Edukasi mitigasi bencana	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
2	Pembangunan Gudang Logistik Bencana	• 1 pusat gudang logistik dan 4 gudang yang tersebar di setiap TEA • Kerjasama dengan BUMN dan swasta	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Sosial
3	Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)	Pengembangan waterfront sisi timur dan sisi barat Teluk Palu	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga
4	Pembangunan Kawasan Olahraga	• Kawasan olahraga terpusat • 10 lapangan bola direvitalisasi untuk mendukung event olahraga tahun 2022	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
5	RTH Publik per Kecamatan	1 RTH 1 kecamatan	APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	Kecamatan
6	Pembangunan Gedung Kesenian	1 gedung pusat kesenian beserta pengembangan kawasannya	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
D.	**Agenda 4: SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter**				
1	Peningkatan	• Meningkatnya nilai insentif padat	APBD	Kecamatan	OPD Pelaksana Urusan

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
	Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya	karya secara bertahap hingga Rp 1 juta/orang • Pembagian wilayah kerja per orang per ruas jalan • Usia > 55 tahun akan dipensiunkan dari padat karya			Lingkungan Hidup, OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
2	Badan Pelayanan Rumah Ibadah	• Terfasilitasinya pembangunan rumah ibadah • Pembangunan rumah ibadah lebih terrencana dan teratur • Meningkatnya peran rumah ibadah • Meningkatnya peran tokoh agama	APBD, CSR	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Palu Berbagi	• Dapat berupa hibah yang diberikan Pemkot kepada lembaga/individu maupun ke daerah lain • Dapat berupa penggalangan dana bersama untuk korban bencana, dsb	APBD, Swasta, CSR	Sekretariat Daerah	
4	Palu Religi	• Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam karakter SDM kota • Meningkatnya kerukunan antarumat beragama • Dapat terintegrasi dengan pelayanan rumah ibadah • Meningkatnya peran rumah ibadah dan tokoh agama	APBD	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, OPD Pelaksana Urusan Pendidikan, OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
5	Palu Ramah Difabel	Pemberian pelatihan dan modal usaha	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Sosial	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM, OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
6	Pembangunan Prasarana dan Pelestarian Seni Budaya	Prasarana dan sarana pelestarian seni budaya pada gedung kesenian dan kawasannya	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
7	Event Olahraga Tahunan	• Event 11 cabang olahraga dimulai tahun 2022 dan selanjutnya rutin setiap tahun • Kerjasama dengan persatuan/asosiasi olahraga • Konsep pekan olahraga dan sport tourism	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
8	Event Komunitas Anak Muda	• Event komunitas anak muda dimulai tahun 2022 dan selanjutnya rutin setiap tahun • Kerjasama dengan seluruh komunitas anak muda dari berbagai fokus pergerakan • Konsep pekan pemuda dan festival	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
E.	**Agenda 5: Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas**				
1	Palu Kota Sehat	• Program Palu Kota Sehat didorong dari sisi kesehatan fisik dan mental	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
		• Mendorong kesehatan keluarga • Turunnya persentase stunting • Meningkatnya rumah sehat • Psikolog di puskesmas dan penyediaan mobil curhat			KB, OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern	• Pelayanan dan fasilitas puskesmas layaknya klinik modern • Penempatan dokter spesialis di puskesmas yang menjadi klinik modern	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan	
3	Satu Ambulans Satu Kelurahan	• Ambulans dapat berupa mobil siaga yang ditempatkan di kelurahan	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan	Kecamatan
4	BPJS Gratis Warga Tidak Mampu	• Pemutakhiran data penerima langsung oleh RT/RW dan kelurahan • Pemberian BPJS gratis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	APBD	OPD Pelaksana Urusan Sosial	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
5	Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW	• Seluruh ketua RT dan ketua RW • 1 orang petugas per 1 rumah ibadah	APBD	Sekretariat Daerah	Kecamatan

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
	dan Petugas Rumah Ibadah				
6	1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu	Total 1.000 beasiswa yang akan diberikan bertahap setiap tahun	APBN, APBD, Swasta, CSR	Sekretariat Daerah OPD Pelaksana Urusan Sosial	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
7	Reward Prestasi SD dan SMP 2 Miliar	• Total reward Rp 2 miliar. Terbaik 1 Rp 1 miliar, terbaik 2 Rp 600 juta, terbaik 3 Rp 400 juta • Penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari sisi sekolah berpresatsi, pengembangan, inovasi, dan kriteria lainnya	APBD	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
8	Percepatan Peningkatan Persamaan Kualitas Sekolah SD dan SMP se-Kota Palu	• Pemerataan penempatan guru • Pemerataan pembangunan sekolah	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
9	Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan	• Terintegrasi dengan program nasional • Kerjasama dengan asosiasi/ lembaga pelatihan kerja • Tenaga kerja bersertifikat akan didorong mengikuti program	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja	Kecamatan

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
		kerjasama ketenagakerjaan dengan daerah lainnya			
10	Update Berkala Kompetensi dan Kapasitas Guru/ Pengajar	• *Skill upgrading* dilakukan pada setiap sekolah • Peningkatan kemampuan guru dari sisi teknis dan non teknis, termasuk pemahaman kondisi psikologis peserta didik	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
11	Bus Gratis untuk Siswa Sekolah	• Bus gratis khusus bagi anak sekolah • 5 koridor bus gratis setiap pagi dan sore	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
12	Kepala Sekolah Magang	• Kepala sekolah SMP akan dimagangkan di sekolah berkualitas pada skala nasional • Target seluruh kelapa sekolah SMP se-Kota Palu	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan
F.	**Agenda 6: Pemerintahan Mantap Melayani**				
1	Audit APBD oleh Auditor Independen	Audit khusus terhadap proyek dan BUMD	APBD	Inspektorat	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (pengelola keuangan)
2	E-Government	• Penerapan smart city • Pengembangan e-planning, e-budgeting, e-monitoring, dll	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika OPD Pelaksana Urusan Statistik	Seluruh OPD

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
				OPD Pelaksana Urusan Persandian	
3	Quick Service Lisence	Penyusunan SOP pelayanan publik	APBD	Sekretariat Daerah	Seluruh OPD Pelayanan Publik
4	One Touch Info Kota Palu	• Satu aplikasi digital untuk seluruh informasi • Bank data	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika OPD Pelaksana Urusan Statistik	Seluruh OPD
5	Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi	Penerapan ISO Pelayanan Publik	APBD	Sekretariat Daerah	Seluruh OPD Pelayanan Publik
6	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honor	• Reformasi sistem penerimaan honorer • Merampingkan jumlah honorer • Meningkatnya nilai insentif honorer • Mengembangkan sistem pegawai kontrak daerah	APBD	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian	Seluruh OPD
7	PNS Magang Nasional	• Magang PNS ke kementerian/lembaga/ BUMN • 2-6 PNS per OPD • PNS yang mengikuti program diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	APBN, APBD	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD

No.	Program Unggulan	Sasaran Program Unggulan	Indikasi Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana	
				Pengampu	Pendukung
8	Pelayanan Pembuatan KTP, KK, dan Akte Lahir di Kantor Kelurahan	• Seluruh urusan dokumen kependudukan selesai di kelurahan • Pemutakhiran data kependudukan secara mendetail • Terhubung dengan sistem digital	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika, Kecamatan

Pelaksanaan program unggulan kepala daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kota. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Palu.

Program pembangunan daerah Kota Palu tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan program unggulan wali kota dan wakil wali kota sebagai janji kepada masyarakat termasuk penerapan SPM.

Dalam mencapai target sasaran sesuai strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah dapat saja mendukung beberapa sasaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi yang menjadi salah satu semangat dalam pembangunan Kota Palu selama lima tahun mendatang. Hal ini juga menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan.

Tabel 6.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikbud
2	Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikbud
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikbud
SPM KESEHATAN							
4	Pelayanan kesehatan ibu	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
	hamil						
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes mellitus	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	75%	80%	90%	100%	100%	Dinas PU
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Permukiman
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP
21	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
22	Pelayanan pencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SPM SOSIAL							
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setalah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial

Program pembangunan daerah Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka

menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah disajikan dalam Tabel 6.5 yang memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif.

Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MISI 1: Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global															
			Tujuan															
		1.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,54%	3,21%		3,73%		4,20%		4,32%		4,42%		4,42%		
			Sasaran															
		1.1.1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	26,41%	27,22%		28,04%		28,20%		28,36%		28,40%		28,40%		
				Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	63,47%	64,57%		65,67%		65,80%		65,94%		66,10%		66,10%		
			Program															
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,59	3	32.246.500	3	32.643.715	3	181.340.788	3	33.858.000	3	34.393.256	3	34.393.256	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	.	100%	2.134.027.000	100%	2.148.181.057	100%	2.054.485.424	100%	2.228.089.318	100%	2.263.312.852	100%	2.263.312.852	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	.	100%	57.980.000	100%	58.364.556	100%	55.818.912	100%	60.535.606	100%	61.492.605	100%	61.492.605	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan	Cakupan pengelolaan informasi dan	100%	100%	180.284.576	100%	181.480.324	100%	173.564.830	100%	188.231.048	100%	191.206.764	100%	191.206.764	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Komunikasi Publik	komunikasi publik														dan Informatika
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	86,28%	87,14%	78.186.675	88,01%	78.705.253	88,89%	75.272.424	90,67%	81.632.939	99,74%	82.923.462	99,74%	82.923.462	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	.	5%	79.006.250	5%	79.530.263	5%	76.061.451	5%	82.488.638	5%	83.792.689	5%	83.792.689	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	100%	100%	59.583.600	100%	59.978.792	100%	57.362.741	100%	62.209.889	100%	63.193.356	100%	63.193.356	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	27	46		46		46		46		46		46		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	100%	21.115.300	100%	21.255.348	100%	20.328.270	100%	22.046.007	100%	22.394.529	100%	22.394.529	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	132.567.350	100%	133.446.611	100%	127.626.168	100%	138.410.571	100%	140.598.684	100%	140.598.684	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan	Cakupan pengembangan	.	5%	312.538.250	5%	314.611.178	5%	300.889.014	5%	326.314.117	5%	331.472.769	5%	331.472.769	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			UMKM	UMKM														Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7,2	9		10,8		12,6		14,4		16,2		16,2		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	222.652.500	Baik	224.129.256	Sangat Baik	214.353.575	Sangat Baik	232.466.439	Sangat Baik	236.141.466	Sangat Baik	236.141.466	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55	55	86.050.290	58	86.621.023	61	82.842.938	64	89.843.161	67	91.263.479	67	91.263.479	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal dan Administrator KEK
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	950	367,5		385,9		405,2		425,4		446,7		446,7		
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	89.652.500	100%	90.247.125	100%	86.310.883	100%	93.604.147	100%	95.083.921	100%	95.083.921	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	135.125.000	100%	136.021.224	100%	130.088.487	100%	141.080.956	100%	143.311.284	100%	143.311.284	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0,06%	0,14%	17.940.000	0,18%	18.058.988	0,31%	17.271.322	0,44%	18.730.748	0,57%	19.026.860	0,57%	19.026.860	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administra tor

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		KEK)
2	18	05	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	18.170.000	100%	18.290.514	100%	17.492.750	100%	18.970.886	100%	19.270.794	100%	19.270.794	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	997,30	1058,04	1.394.872.760	1089,78	1.688.664.558	1122,47	1.603.315.699	1156,14	4.203.880.374	1190,83	4.255.182.283	1190,83	4.255.182.283	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program pengelolan perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	119,41	126,68	1.119.527.360	130,48	983.398.772	134,40	962.954.046	138,43	1.075.188.572	142,58	1.576.293.272	142,58	1.576.293.272	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	100%	273.589.611	100%	272.172.994	100%	265.175.285	100%	273.684.364	100%	303.941.592	100%	303.941.592	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
				Konsumsi ikan (Kg/Kap/ Tahun)	73,87	74,61		75,35		76,11		76,87		77,64		77,64		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	100%	183.542.435	100%	184.759.791	100%	176.701.259	100%	191.632.505	100%	194.661.994	100%	194.661.994	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	.	100%	141.143.986	100%	142.080.132	100%	135.883.127	100%	147.365.243	100%	149.694.918	100%	149.694.918	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui	100%	100%	84.789.000	100%	85.351.368	100%	81.628.660	100%	88.526.277	100%	89.925.776	100%	89.925.776	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	102.510.000	100%	103.189.903	100%	98.689.145	100%	107.028.372	100%	108.720.368	100%	108.720.368	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	27	02	Program Penyedian dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	100%	2.326.774.100	100%	2.387.970.352	100%	2.313.025.296	100%	2.512.031.483	100%	2.801.147.419	100%	2.801.147.419	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,46	5,57		5,63		5,68		5,74		5,80		5,80		
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	100%	857.615.750	100%	898.965.544	100%	876.342.881	100%	904.135.845	100%	1.068.137.594	100%	1.068.137.594	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	356.972.764	100%	359.586.218	100%	350.341.070	100%	395.864.883	100%	430.945.757	100%	430.945.757	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-21%	-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%	100%	737.712.500	100%	727.022.887	100%	708.774.418	100%	757.096.571	100%	711.729.371	100%	711.729.371	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	4,9	10		15		20		25		30		30		
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	100%	25.600.000	100%	25.769.793	100%	24.645.811	100%	26.728.381	100%	27.150.926	100%	27.150.926	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84,50%	88,20%		92,30%		94,50%		97,80%		100%		100%		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	1.499.990.000	100%	1.509.938.770	100%	1.444.080.882	100%	1.566.105.629	100%	1.590.863.961	100%	1.590.863.961	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	170.755.000	100%	171.887.542	100%	164.390.450	100%	178.281.433	100%	181.099.858	100%	181.099.858	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	06	Program	Persentase	100%	100%	187.774.580	100%	189.020.006	100%	180.775.659	100%	196.051.191	100%	199.150.536	100%	199.150.536	OPD Pelaksana

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen														Urusan Perdagangan
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	57%	64%	-	71%	-	78%	-	85%	-	92%	-	100%		
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	892.183.205	100%	898.100.661	100%	858.928.866	100%	931.508.303	100%	946.234.380	100%	946.234.380	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Cakupan Bina IKM	40%	42%		45%		48%		51%		54%		54%		
				Persentase IKM yang memiliki izin	60%	63%		65%		66%		67%		68%		68%		
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Palu	1.860	1.915		1.970		2.025		2.080		2.135		2.135		
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	10%	5%		10%		15%		20%		25%		25%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP														
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	103.225.000	100%	103.909.646	100%	99.377.495	100%	107.774.888	100%	109.478.685	100%	109.478.685	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	.	1,03%		1,10%		1,18%		1,25%		1,32%		1,32%		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	.	0,40%		1,40%		2,40%		3,40%		4,40%		4,40%		
3	31	04	Program Pengelolaan	Cakupan pengelolaan	100%	100%	115.152.000	100%	115.915.752	100%	110.859.940	100%	120.227.598	100%	122.128.259	100%	122.128.259	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sistem Informasi Industri Nasional	Sistem Informasi Industri Nasional														Perindustrian
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20		30		40		50		60		60		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5.875.586.884	100%	5.914.557.052	100%	5.656.586.169	100%	6.134.567.358	100%	6.231.547.825	100%	6.231.547.825	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1.189.059.758	100%	1.196.946.265	100%	1.144.739.941	100%	1.241.470.396	100%	1.261.096.618	100%	1.261.096.618	Sekretariat Daerah
			MISI 2 : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana															
			Tujuan															
		2.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Indeks Kota Layak Huni	Na	60		62		63		63.5		64		64		
				Indeks Resiko Bencana	150.16	137.62		125.08		112.54		100		100		100		
			Sasaran															
		2.1.1	Meningkatnya pengelolaan	Indeks Kualitas Lingkungan	73,92	74,26		74,6		74,94		75,28		75,62		75,62		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			lingkungan hidup	Hidup														
			Program															
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	80%	609.603.750	85%	613.646.982	90%	586.881.993	95%	636.473.486	100%	646.535.401	100%	646.535.401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	670.883.350	100%	675.333.022	100%	645.877.519	100%	700.454.130	100%	711.527.506	100%	711.527.506	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	192.556.450	100%	193.833.592	100%	185.379.295	100%	201.043.834	100%	204.222.106	100%	204.222.106	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	100%	3.382.393.300	100%	3.404.827.218	100%	3.256.321.374	100%	3.531.480.334	100%	3.587.308.983	100%	3.587.308.983	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	.	100%	44.312.000	100%	44.605.902	100%	42.660.359	100%	46.265.157	100%	46.996.556	100%	46.996.556	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin	100%	100%	61.066.125	100%	61.471.150	100%	58.790.008	100%	63.757.760	100%	64.765.697	100%	64.765.697	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)														
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	10	15		17		18		19		20		20		
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	24.437.100	100%	24.599.180	100%	23.526.256	100%	25.514.223	100%	25.917.574	100%	25.917.574	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74	73	15.091.579.300	72	15.191.675.067	71	14.529.070.954	70	15.756.776.571	70	16.005.873.118	70	16.005.873.118	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
			Sasaran															

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1.2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program															
1	05	02	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2.400.970.000	100%	2.416.894.572	100%	2.311.478.659	100%	2.506.798.466	100%	2.546.428.072	100%	2.546.428.072	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75,94%	100%	1.481.956.740	100%	1.491.785.903	100%	1.426.719.775	100%	1.547.277.510	100%	1.571.738.191	100%	1.571.738.191	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91,61%	96,77%		97,16%		97,51%		97,95%		97,88%		97,88%		
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	N/A	5%	201.470.600	7%	222.797.026	8%	151.470.600	9%	230.345.941	12%	234.434.331	12%	234.434.331	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Konflik Sosial															
			Sasaran															
		2.1.3	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang berketahanan	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	1,34%	2,74%		4,39%		6,27%		8,38%		10,72%		10,72%		
				Persentase Layanan Angkutan Darat	17,99%	19,51%		21,04%		23,14%		25,92%		29,51%		29,51%		
				Persentase Luas Kawasan Kumuh	0,67%	0,55%		0,31%		0,07%		0,03%		0,00%		0,00%		
				Persentase Rumah tidak Layak Huni	11,40%	10,85%		10,30%		9,75%		9,21%		8,66%		8,66%		
			Program															
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	.	100%	5.362.320.000	100%	5.397.885.896	100%	5.162.450.278	100%	5.598.677.015	100%	5.687.185.671	100%	5.687.185.671	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35,69	36,89		39,28		39,28		40,48		41,68		41,68		
				Rasio jaringan irigasi	80,14	80,14		80,14		80,14		80,14		80,14		80,14		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	94,91	95,31	10.469.520.000	95,71	10.538.959.693	96,11	10.079.289.643	96,51	10.930.989.008	96,92	11.103.795.395	96,92	11.103.795.395	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air	30,44	31,11		31,78		32,45		33,12		33,79		33,79		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				minum layak, perkotaan dan pedesaan														
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,21	5,75	401.263.710	6,42	403.925.115	7,22	386.307.410	8,16	418.950.363	9,23	425.573.487	9,23	425.573.487	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	58,68	61,68	7.903.815.000	63,18	7.956.237.507	64,68	7.609.216.150	66,18	8.252.194.455	67,68	8.382.652.175	67,68	8.382.652.175	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase jalan yang memiliki drainase	1,34	2,74		4,39		6,27		8,38		10,72		10,72		
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	.	100%	72.929.187.353	100%	20.363.358.600	100%	19.475.184.971	100%	21.120.836.924	100%	21.454.733.108	100%	21.454.733.108	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63,69	67,45	79.029.621.172	71,56	79.553.789.677	76,14	76.083.950.567	81,07	82.690.082.932	86,23	83.997.318.210	86,23	83.997.318.210	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	44%	45%		45%		46%		47%		47%		47%		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	245.157.791	100%	246.783.814	100%	236.020.026	100%	255.963.704	100%	260.010.196	100%	260.010.196	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang	38,31	40,81		44,56		48,31		52,06		55,81		55,81		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				memiliki sertifikat kompetensi														
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2,16	1,68		1,28		1,16		0,63		0,38		0,38		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	0,778	0,7834	11.100.000.000	0,7887	500.000.000	0,794	600.000.000	0,7994	1.600.000.000	0,8047	1.838.254.080	0,8047	1.838.254.080	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	N/A	18,76%	9.345.000.000	54,23%	10.644.000.000	89,69%	10.025.000.000	94,85%	30.600.000.000	100%	30.748.000.000	100%	30.748.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,114	0,1085	2.750.000.000	0,103	2.750.000.000	0,0975	2.806.000.000	0,0921	9.632.653.617	0,0866	9.800.000.000	0,0866	9.800.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	33.700.160.000	100%	41.770.610.548	100%	38.972.822.171	100%	16.100.000.000	100%	16.300.000.000	100%	16.300.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Sarana dan Utilitas Umum)														
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100%	5.615.562.038	100%	5.312.327.394	100%	5.317.348.872	100%	6.214.685.706	100%	6.486.048.983	100%	6.486.048.983	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	17.99%	19.51%		21.04%		23.14%		25.92%		29.51%		29.51%		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,43	0,58		0,58		0,72		0,72		0,8		0,8		
			Sasaran															
		2.1.4	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
			Program															
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	94,91	95,31	10.469.520.000	95,71	10.538.959.693	96,11	10.079.289.643	96,51	10.930.989.008	96,92	11.103.795.395	96,92	11.103.795.395	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30,44	31,11		31,78		32,45		33,12		33,79		33,79		
1	03	06	Program	Persentase	58,68	61,68	7.903.815.000	63,18	7.956.237.507	64,68	7.609.216.150	66,18	8.252.194.455	67,68	8.382.652.175	67,68	8.382.652.175	OPD Pelaksana

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	drainase dalam kondisi baik														Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase jalan yang memiliki drainase	1,34	2,74		4,39		6,27		8,38		10,72		10,72		
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,332	0,34	74.424.417.978	0,34	21.868.506.428	0,34	20.914.683.874	0,34	22.681.973.397	0,34	23.040.549.356	0,34	23.040.549.356	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	.	100%	111.813.575	100%	112.555.185	100%	107.645.948	100%	116.742.024	100%	118.587.582	100%	118.587.582	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63,69	67,45	79.029.621.172	71,56	79.553.789.677	76,14	76.083.950.567	81,07	82.690.082.932	86,23	83.997.318.210	86,23	83.997.318.210	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	44%	45%		45%		46%		47%		47%		47%		
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	80%	609.603.750	85%	613.646.982	90%	586.881.993	95%	636.473.486	100%	646.535.401	100%	646.535.401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	33.700.160.000	100%	41.770.610.548	100%	38.972.822.171	100%	16.100.000.000	100%	16.300.000.000	100%	16.300.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)														
2	10	04	Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	.	20%	47.912.125	40%	48.229.905	60%	46.126.297	80%	50.023.966	100%	50.814.787	100%	50.814.787	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaiaan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	26.322.500	100%	26.497.085	100%	25.341.382	100%	27.482.727	100%	27.917.197	100%	27.917.197	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah	100%	100%	190.243.505	100%	191.505.306	100%	183.152.560	100%	198.628.940	100%	201.769.036	100%	201.769.036	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
			Sasaran															
		2.1.5	Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks Ketangguhan Kota	263	400		450		475		500		550		550		
			Program															
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75,06%	80,07%	609.603.750	85,07%	613.646.982	90,08%	586.881.993	95,08%	636.473.486	100%	646.535.401	100%	646.535.401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	10%	35%	82.445.630.000	50%	2.461.850.782	75%	2.354.474.047	85%	2.553.426.962	100%	2.593.793.711	100%	2.593.793.711	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	35%	50%		65%		75%		85%		100%		100%		
				persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	35%		45%		50%		75%		85%		85%		
				Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35%	45%		50%		65%		75%		90%		90%		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	76%	100%	1.481.956.740	100%	1.491.785.903	100%	1.426.719.775	100%	1.547.277.510	100%	1.571.738.191	100%	1.571.738.191	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	91,61%	96,77%		97,16%		97,51%		97,95%		97,88%		97,88%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				korban kebakaran														
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase capaian penanganan bencana	100%	100%	1.497.058.510	100%	1.506.987.837	100%	1.441.258.657	100%	1.563.044.926	100%	1.587.754.872	100%	1.587.754.872	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	99,35%		99,49%		99,63%		99,70%		99,85%		99,85%		
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	100%	402.850.600	100%	466.866.084	100%	454.862.715	100%	496.541.632	100%	552.522.393	100%	552.522.393	OPD Pelaksana Urusan Pangan
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,3	92,12		93,04		93,97		94,91		95,86		95,86		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	100%	727.349.000	100%	595.999.256	100%	580.675.807	100%	781.955.325	100%	868.404.548	100%	868.404.548	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100%	100%	43.933.400	100%	64.566.586	100%	62.906.546	100%	63.533.870	100%	70.557.869	100%	70.557.869	OPD Pelaksana Urusan Pangan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MISI 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19															
			Tujuan															
		3.1	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	81.47	81.70		81.90		82.10		82.40		82.60		82.60		
			Sasaran															
		3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	16,23 tahun	16,5 tahun		17 tahun		17,4 tahun		17,6 tahun		18 tahun		18 tahun		
				Rata-rata Lama Sekolah	11,61 tahun	11,63 tahun		11,65 tahun		11,71 tahun		11,81 tahun		12 tahun		12 tahun		
			Program															
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	83%	100%	60.354.088.513	100%	54.934.840.558	100%	51.747.026.573	100%	59.827.420.414	100%	64.042.070.913	100%	64.042.070.913	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	.	100%	2.223.691.647	100%	1.841.842.253	100%	588.694.127	100%	2.198.833.638	100%	1.790.694.801	100%	1.790.694.801	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ	100%	100%	1.922.549.550	100%	1.935.300.970	100%	1.850.890.372	100%	2.007.290.496	100%	2.039.023.455	100%	2.039.023.455	OPD Pelaksana Urusan Sosial

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				terlantar dan gelandangan pengemis														
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15,91%	16,04%		16,18%		16,31%		16,45%		16,58%		16,58%		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5.875.586.884	100%	5.914.557.052	100%	5.656.586.169	100%	6.134.567.358	100%	6.231.547.825	100%	6.231.547.825	Sekretariat Daerah
			Sasaran															
		3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04 Tahun	71.04 Tahun		71.6 Tahun		71.8 Tahun		72 Tahun		72,2 Tahun		72,2 Tahun		
				Case Fatality Rate Covid-19	2,89%	1,75%		1,50%		1%		1%		<1%		<1%		
			Program															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan	A (67,94%)	A	87.360.000.000	A	87.939.420.221	A	88.694.326.171	A	91.160.930.646	AA	92.652.534.757	AA	92.652.534.757	RSU Anutapura

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota	Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016														
				Nilai SAKIP OPD	B (65,41)	B	-	B	-	B	-	B	-	BB	-	BB	-	0
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	100%	82.596.879.308	100%	79.437.938.950	100%	73.695.846.903	100%	85.258.654.364	100%	86.594.134.706	100%	86.594.134.706	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Angka kelangsungan hidup bayi	0,9980	0,9980	-	0,9975	-	0,9972	-	0,9968	-	0,9965	-	0,9965	-	
				Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	2,01	19,50	-	16,50	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	
				Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	2,01	12,20	-	11,60	-	11,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	
				Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	81,30	182,25	-	180,31	-	178,94	-	177,64	-	175,59	-	175,59	-	
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3,77	3,78	-	3,79	-	3,79	-	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	106,67	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh	100,30	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan														
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,65	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				AFP Rate per 100.000 penduduk	0,00	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	98,02	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Penderita Diare yang ditangani	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	95,55	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88,79	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65,50	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	78,72	86,50	-	87,00	-	87,50	-	88,00	-	88,00	-	88,00	-	
				Prevalensi balita Stunting	14,90	0,16	-	0,14	-	0,12	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	59,00	59,33	475.072.400	60,33	469.677.823	61,33	458.741.453	62,33	474.844.236	63,33	502.447.481	63,33	502.447.481	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	616.311.000	100%	704.074.830	100%	591.407.902	100%	604.295.874	100%	767.149.412	100%	767.149.412	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	1.635.353.150	100%	1.625.204.773	100%	1.588.440.120	100%	1.624.817.778	100%	1.712.307.647	100%	1.712.307.647	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	05	02	Program Peningkatan	Persentase Gangguan	100%	100%	2.400.970.000	100%	2.416.894.572	100%	2.311.478.659	100%	2.506.798.466	100%	2.546.428.072	100%	2.546.428.072	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Trantibum yang dapat diselesaikan														Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	100%	2.748.155.000	100%	2.766.382.296	100%	2.645.723.035	100%	2.869.286.471	100%	2.914.646.596	100%	2.914.646.596	OPD Pelaksana Urusan Sosial
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	100%	727.349.000	100%	595.999.256	100%	580.675.807	100%	781.955.325	100%	868.404.548	100%	868.404.548	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	1,80	792.074.000	1,75	797.327.476	1,70	762.551.030	1,65	826.986.546	1,60	840.060.254	1,60	840.060.254	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				TFR (Angka Kelahiran Total)	32,92%	32,97%		33,02%		33,07%		33,12%		33,17%		33,17%		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	1.377.774.772	100%	1.386.912.942	100%	1.326.420.981	100%	1.438.503.474	100%	1.461.244.562	100%	1.461.244.562	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4,60%	4,10%		3,60%		4,60%		4,10%		3,60%		3,60%		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,50%	7,10%		6,60%		7,50%		7,10%		6,60%		6,60%		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	750.456.950	100%	755.434.399	100%	722.485.173	100%	783.535.126	100%	795.921.917	100%	795.921.917	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73%	74%		76%		77%		79%		81%		81%		
				Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29%	27%		25%		24%		22%		21%		21%		
			Sasaran															
		3.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang diberdayakan														
				Indeks Pembangunan Gender	97,96%	98,05%		98,11%		98,14%		98,21%		98,29%		98,29%		
				Indeks Kota Layanak Anak	NA	Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		Madya		
			Program															
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	799.465.000	100%	804.767.498	100%	769.666.546	100%	834.703.322	100%	847.899.024	100%	847.899.024	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	108.060.000	100%	108.776.714	100%	104.032.280	100%	112.823.002	100%	114.606.604	100%	114.606.604	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	100%	1.922.549.550	100%	1.935.300.970	100%	1.850.890.372	100%	2.007.290.496	100%	2.039.023.455	100%	2.039.023.455	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	15,91%	16,04%		16,18%		16,31%		16,45%		16,58%		16,58%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti														
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	100%	2.748.155.000	100%	2.766.382.296	100%	2.645.723.035	100%	2.869.286.471	100%	2.914.646.596	100%	2.914.646.596	OPD Pelaksana Urusan Sosial
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	.	-	100%	170.693.662	.	-	.	-	.	-	.	-	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,59	300%	32.246.500	3	32.643.715	3	181.340.788	3	33.858.000	3	34.393.256	300%	34.393.256	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72%	8,72%	315.767.100	8,72%	15.961.321	8,72%	116.007.925	8,72%	16.555.051	8,72%	16.816.768	8,72%	16.816.768	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	88%	85%	337.836.250	83%	641.793.752	80%	647.578.484	78%	665.667.263	75%	676.190.698	75%	676.190.698	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	42%	43%		44%		45%		46%		48%		48%		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,96	98,05	95.063.900	98,11	95.694.417	98,14	93.529.661	98,21	99.254.067	98,29	100.823.160	98,29	100.823.160	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,07%	0,07%	169.655.300	0,07%	170.780.548	0,06%	166.917.227	0,06%	177.133.261	0,06%	179.933.534	0,06%	179.933.534	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,84	6886%	164.336.700	68,89	165.426.673	66,91	161.684.465	64,94	171.580.231	62,96	174.292.718	6296%	174.292.718	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	22.530.550	100%	22.679.985	100%	22.166.929	100%	23.523.638	100%	23.895.519	100%	23.895.519	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	N/A	Pratama	508.390.100	Pratama	511.762.027	Madya	500.185.175	Madya	530.798.603	Madya	539.189.920	Madya	539.189.920	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100%	100%	21.263.750	100%	21.404.783	100%	20.920.574	100%	22.201.000	100%	22.551.973	100%	22.551.973	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	.	100%	1.050.240.000	100%	1.057.205.777	100%	1.011.094.411	100%	1.096.531.827	100%	1.113.866.737	100%	1.113.866.737	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	.	5%	312.538.250	5%	314.611.178	5%	300.889.014	5%	326.314.117	5%	331.472.769	5%	331.472.769	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7,2	9		10,8		12,6		14,4		16,2		16,2		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	132.567.350	100%	133.446.611	100%	127.626.168	100%	138.410.571	100%	140.598.684	100%	140.598.684	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	19	02	Program Pengembangan	Cakupan pengembangan	100%	100%	1.601.372.500	100%	1.611.993.695	100%	1.541.684.552	100%	1.671.956.804	100%	1.698.388.521	100%	1.698.388.521	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	kapasitas daya saing kepemudaan														Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	100%	3.546.728.984	100%	3.570.252.868	100%	3.414.531.775	100%	3.703.059.504	100%	3.761.600.623	100%	3.761.600.623	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	100%	126.737.000	100%	127.577.590	100%	122.013.133	100%	132.323.235	100%	134.415.113	100%	134.415.113	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	46.073.634.175	100%	46.379.220.202	100%	44.356.331.879	100%	48.104.439.241	100%	48.864.915.199	100%	48.864.915.199	Kecamatan
			Sasaran															
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks kerukunan umat beragama	82%	82,50%		83%		83,50%		84%		84,50%		84,50%		
				Indeks Aktualisasi Pancasila	Na	68		69		70		71		72		72		
				Indeks pembangunan kebudayaan	48,11%	51,56%		52,42%		53,28%		54,14%		55%		55%		
			Program															
1	01	03	Program pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	.			100%	323.428.950	100%	278.470.077	100%	296.419.180	100%	283.595.513	100%	283.595.513	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
2	22	02	Program	Cakupan	.	100%	114.280.880	100%	119.885.622	100%	43.555.074	100%	134.402.214	100%	202.243.339	100%	202.243.339	OPD Pelaksana

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengembangan Kebudayaan	pengembangan kebudayaan														Urusan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	.	100%	330.993.000	100%	331.047.195	100%	100.000.000	100%	146.196.000	100%	225.083.098	100%	225.083.098	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	.	100%	130.786.000	100%	79.578.546	100%	183.049.302	100%	121.937.825	100%	149.890.748	100%	149.890.748	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestraian dan pengelolaan cagar budaya	.	100%	185.535.000	100%	30.528.177	100%	63.309.860	100%	97.887.947	100%	80.478.073	100%	80.478.073	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
				Terlestarikannya Cagar Budaya	.	75%		78%		83%		87%		90%		90%		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	.	100%	254.505.325	100%	256.193.346	100%	245.019.150	100%	265.723.253	100%	269.924.032	100%	269.924.032	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	100%	43.227.500	100%	43.514.209	100%	41.616.282	100%	45.132.855	100%	45.846.354	100%	45.846.354	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5.875.586.884	100%	5.914.557.052	100%	5.656.586.169	100%	6.134.567.358	100%	6.231.547.825	100%	6.231.547.825	Sekretariat Daerah
7	01	05	Program Penyelenggara an	Cakupan Penyelenggaraan	100%	100%	663.707.000	100%	668.109.075	100%	`	100%	692.961.465	100%	703.916.391	100%	703.916.391	Kecamatan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum														
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	90%	92%	2.893.052.300	94%	2.913.580.902	96%	2.853.052.300	98%	2.971.302.592	100%	3.018.275.475	100%	3.018.275.475	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila	70%	80%	2.820.733.090	85%	3.815.692.980	90%	60.784.535.655	95%	988.838.496	100%	1.008.524.013	100%	1.008.524.013	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka tan	Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	NA	55%	54.659.975	60%	55.047.833	65%	49.659.975	70%	56.138.399	80%	57.025.883	80%	57.025.883	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan	90%	92%	1.264.400.508	94%	1.248.501.445	96%	1.234.400.508	98%	1.298.599.582	100%	1.319.128.950	100%	1.319.128.950	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Ekonomi, Sosial, dan Budaya	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan														Politik
			MISI 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani															
			Tujuan															
		4.1	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi	50,07	66		78		86		90		92		92		
			Sasaran															
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Nilai Evaluasi AKIP	B	B		BB		A		A		A		Level A		
				Tingkat Maturitas SPIP	Level II	Level III		Level III		Level III		Level III		Level III		Level III		
			Program															
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	311.097.607.043	B	313.134.791.277	B	310.472.266.036	BB	319.765.751.260	BB	319.817.573.543	BB	319.817.573.543	Semua OPD
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100%	100%	129.156.800	100%	130.013.440	100%	124.342.739	100%	134.849.693	100%	136.981.512	100%	136.981.512	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan	Persentase pemenuhan	100%	100%	64.213.800	100%	64.639.702	100%	61.820.359	100%	67.044.176	100%	68.104.067	100%	68.104.067	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Penyelamatan Arsip	kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip														Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan perizinan penggunaan arsip	-	100%	44.626.600	100%	44.922.588	100%	42.963.233	100%	46.593.624	100%	47.330.215	100%	47.330.215	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	14.154.454.625	100%	14.262.264.905	100%	13.640.198.190	100%	14.792.794.113	100%	15.026.651.205	100%	15.026.651.205	Sekretariat DPRD
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1.189.059.758	100%	1.196.946.265	100%	1.144.739.941	100%	1.241.470.396	100%	1.261.096.618	100%	1.261.096.618	Sekretariat Daerah
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	91%	100%	4.959.347.650	100%	4.992.240.808	100%	4.774.497.914	100%	5.177.942.699	100%	5.259.800.029	100%	5.259.800.029	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	25.580.175.720	WTP	29.599.837.706	WTP	27.308.803.364	WTP	28.234.999.743	WTP	28.181.362.674	WTP	28.181.362.674	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	03	Program Pengelolaan	Cakupan pengelolaan aset	100%	100%	2.234.024.900	100%	2.248.842.199	100%	2.150.756.103	100%	2.332.494.864	100%	2.369.368.930	100%	2.369.368.930	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Barang Milik Daerah	daerah														Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	121%	100%	2.306.295.822	100%	2.354.318.143	100%	2.198.236.935	100%	2.745.453.552	100%	3.029.679.661	100%	3.029.679.661	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Pendapatan)
				Rasio PAD	7,22	7,92		8,02		8,17		7,99		7,61		7,61		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100%	100%	1.834.647.500	100%	1.846.815.905	100%	1.766.264.695	100%	1.915.513.954	100%	1.945.796.031	100%	1.945.796.031	Inspektorat
				Persentase tindak lanjut temuan	82%	82%		82%		82%		82%		82%		82%		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	72.156.200	100%	72.634.780	100%	69.466.722	100%	75.336.656	100%	76.527.642	100%	76.527.642	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	NA	30%		25%		20%		15%		10%		10%		
			Sasaran															
		4.1.2	Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Na	71		75		80		85		90		90		
			Program															
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100%	100%	2.858.476.245	100%	2.987.435.253	100%	2.857.134.488	100%	3.098.562.179	100%	3.147.546.890	100%	3.147.546.890	OPD Pelaksana Urusan Kepegawaian
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar	0,13	0,14		0,14		0,15		0,15		0,16		0,16		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)														
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,03	0,03		0,04		0,05		0,06		0,07		0,07		
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98,70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	100%	4.960.101.825	100%	4.992.999.985	100%	4.775.223.979	100%	5.278.730.116	100%	5.362.180.779	100%	5.362.180.779	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan
				Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP	20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6	6,5		7		7,5		8		9		9		
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan	80,56	88,85		88,89		90		90,55		95		95		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pelatihan Struktural														
			Sasaran															
		4.1.3	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	C-	C		C		B-		B		B		B		
			Program															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A (67,94%)	A	87.360.000.000	A	87.939.420.221	A	88.694.326.171	A	91.160.930.646	AA	92.652.534.757	AA	92.652.534.757	RSU Anutapura
				Nilai SAKIP OPD	B (65,41)	B		B		B		B		BB		BB		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	100%	82.596.879.308	100%	79.437.938.950	100%	73.695.846.903	100%	85.258.654.364	100%	86.594.134.706	100%	86.594.134.706	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	49%	46.5%	103.780.000	47.6%	104.468.327	48.5%	102.105.091	49.5%	110.288.543	50%	134.624.382	50%	134.624.382	RSU Anutapura
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	67%	67%	988.141.075	67%	994.241.992	67%	971.750.696	66%	1.031.225.910	66%	1.047.528.408	66%	1.047.528.408	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	23%	30%	-	30%	-	30%	-	50%	-	50%	-	50%		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase/ cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	100%	189.964.000	100%	191.223.948	100%	186.898.164	100%	198.337.115	100%	201.472.597	100%	201.472.597	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Kepemilikan akta kelahiran	54%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	.	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	55%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	12%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	106.713.695	100%	107.323.786	100%	104.895.956	100%	111.316.027	100%	113.075.806	100%	113.075.806	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	19.860.000	100%	19.991.722	100%	19.539.479	100%	20.735.377	100%	21.063.179	100%	21.063.179	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		Sipil
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	.	100%	2.134.027.000	100%	2.148.181.057	100%	2.054.485.424	100%	2.228.089.318	100%	2.263.312.852	100%	2.263.312.852	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	.	100%	57.980.000	100%	58.364.556	100%	55.818.912	100%	60.535.606	100%	61.492.605	100%	61.492.605	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa	.	100%	156.073.000	100%	157.108.163	100%	150.255.692	100%	162.952.289	100%	165.528.377	100%	165.528.377	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	5%	137.646.750	5%	138.559.700	5%	132.516.243	5%	143.713.858	5%	145.985.809	5%	145.985.809	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	222.652.500	Baik	224.129.256	Sangat Baik	214.353.575	Sangat Baik	232.466.439	Sangat Baik	236.141.466	Sangat Baik	236.141.466	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal
2	18	06	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	4.695.000	100%	4.726.140	100%	4.520.003	100%	4.901.943	100%	4.979.437	100%	4.979.437	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi	100%	100%	135.125.000	100%	136.021.224	100%	130.088.487	100%	141.080.956	100%	143.311.284	100%	143.311.284	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penanaman Modal	penanaman modal														(DPMPTSP)
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	100%	40.083.000	100%	40.306.184	100%	39.269.891	100%	43.984.987	100%	46.676.744	100%	46.676.744	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	100%	25.600.000	100%	25.769.793	100%	24.645.811	100%	26.728.381	100%	27.150.926	100%	27.150.926	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84,50%	88,20%		92,30%		94,50%		97,80%		100%		100%		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	1.499.990.000	100%	1.509.938.770	100%	1.444.080.882	100%	1.566.105.629	100%	1.590.863.961	100%	1.590.863.961	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%	187.774.580	100%	189.020.006	100%	180.775.659	100%	196.051.191	100%	199.150.536	100%	199.150.536	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase alat-	57%	64%		71%		78%		85%		92%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku														
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	103.225.000	100%	103.909.646	100%	99.377.495	100%	107.774.888	100%	109.478.685	100%	109.478.685	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	.	1,03%		1,10%		1,18%		1,25%		1,32%		1,32%		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	.	0,40%		1,40%		2,40%		3,40%		4,40%		4,40%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (78,99)	Baik	265.482.800	Baik	267.243.630	Baik	255.587.461	Baik	277.184.586	Baik	281.566.556	Baik	281.566.556	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	46.073.634.175	100%	46.379.220.202	100%	44.356.331.879	100%	48.104.439.241	100%	48.864.915.199	100%	48.864.915.199	Kecamatan
			Sasaran															
		4.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	23	40		50		60		70		80		80		
				Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.54	1.8		2.4		2.6		2.8		3		3		
			Program															
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	180.284.576	100%	181.480.324	100%	173.564.830	100%	188.231.048	100%	191.206.764	100%	191.206.764	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	100%	3.340.244.902	100%	3.362.399.268	100%	3.215.743.973	100%	3.487.474.145	100%	3.542.607.107	100%	3.542.607.107	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	.	100%	69.522.500	100%	69.983.612	100%	66.931.188	100%	72.586.870	100%	73.734.385	100%	73.734.385	OPD Pelaksana Urusan Statistik
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah														
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	109.234.000	100%	109.958.501	100%	105.162.522	100%	114.048.748	100%	115.851.728	100%	115.851.728	OPD Pelaksana Urusan Persandian
3	31	04	Program Pegelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	115.152.000	100%	115.915.752	100%	110.859.940	100%	120.227.598	100%	122.128.259	100%	122.128.259	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20		30		40		50		60		60		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	66,67%	50,00%	435.414.650	80,00%	438.302.563	87,50%	358.387.479	90,91%	454.606.587	92,86%	564.823.935	92,86%	564.823.935	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	25,00%	100,00 %		75,00%		85,71%		0,9		92,31%		92,31%		
				Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	97,12%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase implementasi inovasi daerah	NA	62,50%		66,67%		0,75		0,8		83,33%		83,33%		
			Sasaran															
		4.1.5	Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	NA	75		78		80		85		90		90		
			Program															
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5.875.586.884	100%	5.914.557.052	100%	5.656.586.169	100%	6.134.567.358	100%	6.231.547.825	100%	6.231.547.825	Sekretariat Daerah

Tabel 6.5
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MISI 1: Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global															
			Tujuan															
		1.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4.54%	3.21%		3.73%		4.20%		4.32%		4.42%		4.42%		
			Sasaran															
		1.1.1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	26.41%	27.22%		28.04%		28.20%		28.36%		28.40%		28.40%		
				Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	63.47%	64.57%		65.67%		65.80%		65.94%		66.10%		66.10%		
			Program															
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.59	3	32,246,500	3	32,643,715	3	181,340,788	3	33,858,000	3	34,393,256	3	34,393,256	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	.	100%	2,134,027,000	100%	2,148,181,057	100%	2,054,485,424	100%	2,228,089,318	100%	2,263,312,852	100%	2,263,312,852	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	.	100%	57,980,000	100%	58,364,556	100%	55,818,912	100%	60,535,606	100%	61,492,605	100%	61,492,605	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	180,284,576	100%	181,480,324	100%	173,564,830	100%	188,231,048	100%	191,206,764	100%	191,206,764	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	0.8628	0.8714	78,186,675	0.8801	78,705,253	0.8889	75,272,424	0.9067	81,632,939	0.9974	82,923,462	0.9974	82,923,462	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	.	5%	79,006,250	5%	79,530,263	5%	76,061,451	5%	82,488,638	5%	83,792,689	5%	83,792,689	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	100%	100%	59,583,600	100%	59,978,792	100%	57,362,741	100%	62,209,889	100%	63,193,356	100%	63,193,356	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	27	46		46		46		46		46		46		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	100%	21,115,300	100%	21,255,348	100%	20,328,270	100%	22,046,007	100%	22,394,529	100%	22,394,529	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	132,567,350	100%	133,446,611	100%	127,626,168	100%	138,410,571	100%	140,598,684	100%	140,598,684	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	.	5%	312,538,250	5%	314,611,178	5%	300,889,014	5%	326,314,117	5%	331,472,769	5%	331,472,769	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7.2	9		10.8		12.6		14.4		16.2		16.2		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	222,652,500	Baik	224,129,256	Sangat Baik	214,353,575	Sangat Baik	232,466,439	Sangat Baik	236,141,466	Sangat Baik	236,141,466	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55	55	86,050,290	58	86,621,023	61	82,842,938	64	89,843,161	67	91,263,479	67	91,263,479	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal dan Administrator KEK
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	950	367.5		385.875		405.16875		425.4271875		446.6985469		446.6985469		
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	89,652,500	100%	90,247,125	100%	86,310,883	100%	93,604,147	100%	95,083,921	100%	95,083,921	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	135,125,000	100%	136,021,224	100%	130,088,487	100%	141,080,956	100%	143,311,284	100%	143,311,284	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0.06%	0.14%	17,940,000	0.18%	18,058,988	0.31%	17,271,322	0.44%	18,730,748	0.57%	19,026,860	0.57%	19,026,860	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	05	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	18,170,000	100%	18,290,514	100%	17,492,750	100%	18,970,886	100%	19,270,794	100%	19,270,794	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	997.3	1058.03557	1,394,872,760	1089.776637	1,688,664,558	1122.469936	1,603,315,699	1156.144034	4,203,880,374	1190.828355	4,255,182,283	1190.828355	4,255,182,283	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program pengelolan perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	119.41	126.682069	1,119,527,360	130.4825311	983,398,772	134.397007	962,954,046	138.4289172	1,075,188,572	142.5817847	1,576,293,272	142.5817847	1,576,293,272	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	100%	273,589,611	100%	272,172,994	100%	265,175,285	100%	273,684,364	100%	303,941,592	100%	303,941,592	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
				Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	73.87	74.61		75.35		76.11		76.87		77.64		77.64		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	100%	183,542,435	100%	184,759,791	100%	176,701,259	100%	191,632,505	100%	194,661,994	100%	194,661,994	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	.	100%	141,143,986	100%	142,080,132	100%	135,883,127	100%	147,365,243	100%	149,694,918	100%	149,694,918	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100%	100%	84,789,000	100%	85,351,368	100%	81,628,660	100%	88,526,277	100%	89,925,776	100%	89,925,776	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	102,510,000	100%	103,189,903	100%	98,689,145	100%	107,028,372	100%	108,720,368	100%	108,720,368	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	27	02	Program Penyedian dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana	100%	100%	2,326,774,100	100%	2,387,970,352	100%	2,313,025,296	100%	2,512,031,483	100%	2,801,147,419	100%	2,801,147,419	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.46	5.57		5.63		5.68		5.74		5.80		5.80		
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	100%	857,615,750	100%	898,965,544	100%	876,342,881	100%	904,135,845	100%	1,068,137,594	100%	1,068,137,594	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	356,972,764	100%	359,586,218	100%	350,341,070	100%	395,864,883	100%	430,945,757	100%	430,945,757	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	-21%	-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%	100%	737,712,500	100%	727,022,887	100%	708,774,418	100%	757,096,571	100%	711,729,371	100%	711,729,371	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	4.9	10		15		20		25		30		30		
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	100%	25,600,000	100%	25,769,793	100%	24,645,811	100%	26,728,381	100%	27,150,926	100%	27,150,926	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84.50%	88.20%		92.30%		94.50%		97.80%		100%		100%		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	1,499,990,000	100%	1,509,938,770	100%	1,444,080,882	100%	1,566,105,629	100%	1,590,863,961	100%	1,590,863,961	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	170,755,000	100%	171,887,542	100%	164,390,450	100%	178,281,433	100%	181,099,858	100%	181,099,858	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%	187,774,580	100%	189,020,006	100%	180,775,659	100%	196,051,191	100%	199,150,536	100%	199,150,536	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	57%	64%	-	71%	-	78%	-	85%	-	92%	-	100%		
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	892,183,205	100%	898,100,661	100%	858,928,866	100%	931,508,303	100%	946,234,380	100%	946,234,380	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Cakupan Bina IKM	40%	42%		45%		48%		51%		54%		54%		
				Persentase IKM yang memiliki izin	60%	63%		65%		66%		67%		68%		68%		
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	1,860	1,915		1,970		2,025		2,080		2,135		2,135		
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	10%	5%		10%		15%		20%		25%		25%		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	103,225,000	100%	103,909,646	100%	99,377,495	100%	107,774,888	100%	109,478,685	100%	109,478,685	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	.	1.03%		1.10%		1.18%		1.25%		1.32%		1.32%		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	.	0.40%		1.40%		2.40%		3.40%		4.40%		4.40%		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	115,152,000	100%	115,915,752	100%	110,859,940	100%	120,227,598	100%	122,128,259	100%	122,128,259	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20		30		40		50		60		60		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5,875,586,884	100%	5,914,557,052	100%	5,656,586,169	100%	6,134,567,358	100%	6,231,547,825	100%	6,231,547,825	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1,189,059,758	100%	1,196,946,265	100%	1,144,739,941	100%	1,241,470,396	100%	1,261,096,618	100%	1,261,096,618	Sekretariat Daerah
																	-	
			MISI 2 : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana															
			Tujuan															
		2.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Indeks Kota Layak Huni	Na	60		62		63		63.5		64		64		
				Indeks Resiko Bencana	150.16	137.62		125.08		112.54		100		100		100		
			Sasaran															
		2.1.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.92	74.26		74.6		74.94		75.28		75.62		75.62		
			Program															
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	80%	609,603,750	85%	613,646,982	90%	586,881,993	95%	636,473,486	100%	646,535,401	100%	646,535,401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	670,883,350	100%	675,333,022	100%	645,877,519	100%	700,454,130	100%	711,527,506	100%	711,527,506	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100%	100%	192,556,450	100%	193,833,592	100%	185,379,295	100%	201,043,834	100%	204,222,106	100%	204,222,106	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	100%	3,382,393,300	100%	3,404,827,218	100%	3,256,321,374	100%	3,531,480,334	100%	3,587,308,983	100%	3,587,308,983	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	.	100%	44,312,000	100%	44,605,902	100%	42,660,359	100%	46,265,157	100%	46,996,556	100%	46,996,556	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	61,066,125	100%	61,471,150	100%	58,790,008	100%	63,757,760	100%	64,765,697	100%	64,765,697	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	15		17		18		19		20		20		
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	24,437,100	100%	24,599,180	100%	23,526,256	100%	25,514,223	100%	25,917,574	100%	25,917,574	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	7400%	7300%	15,091,579,300	7200%	15,191,675,067	7100%	14,529,070,954	7000%	15,756,776,571	7000%	16,005,873,118	7000%	16,005,873,118	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
																	-	
			Sasaran															
		2.1.2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program															
1	05	02	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2,400,970,000	100%	2,416,894,572	100%	2,311,478,659	100%	2,506,798,466	100%	2,546,428,072	100%	2,546,428,072	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75.94%	100%	1,481,956,740	100%	1,491,785,903	100%	1,426,719,775	100%	1,547,277,510	100%	1,571,738,191	100%	1,571,738,191	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91.61%	96.77%		97.16%		97.51%		97.95%		97.88%		97.88%		
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	N/A	5%	201,470,600	7%	222,797,026	8%	151,470,600	9%	230,345,941	12%	234,434,331	12%	234,434,331	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
																	-	
			Sasaran															
		2.1.3	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	1.34%	2.74%		4.39%		6.27%		8.38%		10.72%		10.72%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			berketahanan	Persentase Layanan Angkutan Darat	17.99%	19.51%		21.04%		23.14%		25.92%		29.51%		29.51%		
				Persentase Luas Kawasan Kumuh	0.67%	0.55%		0.31%		0.07%		0.03%		0.00%		0.00%		
				Persentase Rumah tidak Layak Huni	11.40%	10.85%		10.30%		9.75%		9.21%		8.66%		8.66%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program															
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	.	100%	5,362,320,000	100%	5,397,885,896	100%	5,162,450,278	100%	5,598,677,015	100%	5,687,185,671	100%	5,687,185,671	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35.69	36.89		39.28		39.28		40.48		41.68		41.68		
				Rasio jaringan irigasi	80.14	80.14		80.14		80.14		80.14		80.14		80.14		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	94.91	95.31	10,469,520,000	95.71	10,538,959,693	96.11	10,079,289,643	96.51	10,930,989,008	96.92	11,103,795,395	96.92	11,103,795,395	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30.44	31.11		31.78		32.45		33.12		33.79		33.79		
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5.21	5.75	401,263,710	6.42	403,925,115	7.22	386,307,410	8.16	418,950,363	9.23	425,573,487	9.23	425,573,487	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	58.68	61.68	7,903,815,000	63.18	7,956,237,507	64.68	7,609,216,150	66.18	8,252,194,455	67.68	8,382,652,175	67.68	8,382,652,175	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase jalan yang memiliki drainase	1.34	2.74		4.39		6.27		8.38		10.72		10.72		
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	.	100%	72,929,187,353	100%	20,363,358,600	100%	19,475,184,971	100%	21,120,836,924	100%	21,454,733,108	100%	21,454,733,108	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63.69	67.45	79,029,621,172	71.56	79,553,789,677	76.14	76,083,950,567	81.07	82,690,082,932	86.23	83,997,318,210	86.23	83,997,318,210	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	44%	45%		45%		46%		47%		47%		47%		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	245,157,791	100%	246,783,814	100%	236,020,026	100%	255,963,704	100%	260,010,196	100%	260,010,196	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38.31	40.81		44.56		48.31		52.06		55.81		55.81		
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2.16	1.68		1.28		1.16		0.63		0.38		0.38		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	0.778	0.7834	11,100,000,000	0.7887	500,000,000	0.794	600,000,000	0.7994	1,600,000,000	0.8047	1,838,254,080	0.8047	1,838,254,080	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	N/A	18.76%	9,345,000,000	54.23%	10,644,000,000	89.69%	10,025,000,000	94.85%	30,600,000,000	100%	30,748,000,000	100%	30,748,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.114	0.1085	2,750,000,000	0.103	2,750,000,000	0.0975	2,806,000,000	0.0921	9,632,653,617	0.0866	9,800,000,000	0.0866	9,800,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	33,700,160,000	100%	41,770,610,548	100%	38,972,822,171	100%	16,100,000,000	100%	16,300,000,000	100%	16,300,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100%	5,615,562,038	100%	5,312,327,394	100%	5,317,348,872	100%	6,214,685,706	100%	6,486,048,983	100%	6,486,048,983	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	17.99%	19.51%		21.04%		23.14%		25.92%		29.51%		29.51%		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.43	0.58		0.58		0.72		0.72		0.8		0.8		
																	-	
			Sasaran															
		2.1.4	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
			Program															
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	94.91	95.31	10,469,520,000	95.71	10,538,959,693	96.11	10,079,289,643	96.51	10,930,989,008	96.92	11,103,795,395	96.92	11,103,795,395	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30.44	31.11		31.78		32.45		33.12		33.79		33.79		
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	58.68	61.68	7,903,815,000	63.18	7,956,237,507	64.68	7,609,216,150	66.18	8,252,194,455	67.68	8,382,652,175	67.68	8,382,652,175	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase jalan yang memiliki drainase	134%	274%		439%		627%		838%		1072%		1072%		
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.332	0.34	74,424,417,978	0.34	21,868,506,428	0.34	20,914,683,874	0.34	22,681,973,397	0.34	23,040,549,356	0.34	23,040,549,356	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	.	100%	111,813,575	100%	112,555,185	100%	107,645,948	100%	116,742,024	100%	118,587,582	100%	118,587,582	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	6369%	6745%	79,029,621,172	7156%	79,553,789,677	7614%	76,083,950,567	8107%	82,690,082,932	8623%	83,997,318,210	8623%	83,997,318,210	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	44%	45%		45%		46%		47%		47%		47%		
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	80%	609,603,750	85%	613,646,982	90%	586,881,993	95%	636,473,486	100%	646,535,401	100%	646,535,401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	33,700,160,000	100%	41,770,610,548	100%	38,972,822,171	100%	16,100,000,000	100%	16,300,000,000	100%	16,300,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	04	Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	.	20%	47,912,125	40%	48,229,905	60%	46,126,297	80%	50,023,966	100%	50,814,787	100%	50,814,787	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaiaan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	26,322,500	100%	26,497,085	100%	25,341,382	100%	27,482,727	100%	27,917,197	100%	27,917,197	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah	100%	100%	190,243,505	100%	191,505,306	100%	183,152,560	100%	198,628,940	100%	201,769,036	100%	201,769,036	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
																	-	
			Sasaran															
		2.1.5	Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks Ketangguhan Kota	263	400		450		475		500		550		550		
			Program															
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75.06%	80.07%	609,603,750	85.07%	613,646,982	90.08%	586,881,993	95.08%	63647348593.63%	100.00%	646,535,401	100.00%	646,535,401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	10%	35%	82,445,630,000	50%	2,461,850,782	75%	2,354,474,047	85%	2,553,426,962	100%	2,593,793,711	100%	2,593,793,711	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
				Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	35%	50%		65%		75%		85%		100%		100%		
				persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	35%		45%		50%		75%		85%		85%		
				Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35%	45%		50%		65%		75%		90%		90%		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	76%	100%	1,481,956,740	100%	1,491,785,903	100%	1,426,719,775	100%	1,547,277,510	100%	1,571,738,191	100%	1,571,738,191	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91.61%	96.77%		97.16%		97.51%		97.95%		97.88%		97.88%		
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase capaian penanganan bencana	100%	100%	1,497,058,510	100%	1,506,987,837	100%	1,441,258,657	100%	1,563,044,926	100%	1,587,754,872	100%	1,587,754,872	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	99.35%		99.49%		99.63%		99.70%		99.85%		99.85%		
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	100%	402,850,600	100%	466,866,084	100%	454,862,715	100%	496,541,632	100%	552,522,393	100%	552,522,393	OPD Pelaksana Urusan Pangan
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.3	92.12		93.04		93.97		94.91		95.86		95.86		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	100%	727,349,000	100%	595,999,256	100%	580,675,807	100%	781,955,325	100%	868,404,548	100%	868,404,548	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100%	100%	43,933,400	100%	64,566,586	100%	62,906,546	100%	63,533,870	100%	70,557,869	100%	70,557,869	OPD Pelaksana Urusan Pangan
																	-	
			MISI 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19															
			Tujuan															
		3.1	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	81.47	81.70		81.90		82.10		82.40		82.60		82.60		
			Sasaran															

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	16,23 tahun	16,5 tahun		17 tahun		17,4 tahun		17,6 tahun		18 tahun		18 tahun		
				Rata-rata Lama Sekolah	11,61 tahun	11,63 tahun		11,65 tahun		11,71 tahun		11,81 tahun		12 tahun		12 tahun		
			Program															
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	83%	100%	60,354,088,513	100%	54,934,840,558	100%	51,747,026,573	100%	59,827,420,414	100%	64,042,070,913	100%	64,042,070,913	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	.	100%	2,223,691,647	100%	1,841,842,253	100%	588,694,127	100%	2,198,833,638	100%	1,790,694,801	100%	1,790,694,801	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan	100%	100%	1,922,549,550	100%	1,935,300,970	100%	1,850,890,372	100%	2,007,290,496	100%	2,039,023,455	100%	2,039,023,455	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	15.91%	16.04%		16.18%		16.31%		16.45%		16.58%		16.58%		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5,875,586,884	100%	5,914,557,052	100%	5,656,586,169	100%	6,134,567,358	100%	6,231,547,825	100%	6,231,547,825	Sekretariat Daerah
																	-	
			Sasaran															
		3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04 Tahun	71.04 Tahun		71.6 Tahun		71.8 Tahun		72 Tahun		72,2 Tahun		72,2 Tahun		
				Case Fatality Rate Covid-19	2.89%	1.75%		1.50%		1%		1%		<1%		<1%		
			Program															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A (67,94%)	A	87,360,000,000	A	87,939,420,221	A	88,694,326,171	A	91,160,930,646	AA	92,652,534,757	AA	92,652,534,757	RSU Anutapura
				Nilai SAKIP OPD	B (65,41)	B	-	B	-	B	-	B	-	BB	-	BB	-	0
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	100%	82,596,879,308	100%	79,437,938,950	100%	73,695,846,903	100%	85,258,654,364	100%	86,594,134,706	100%	86,594,134,706	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Angka kelangsungan hidup bayi	0.9980	0.9980	-	0.9975	-	0.9972	-	0.9968	-	0.9965	-	0.9965	-	
				Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	2.01	19.50	-	16.50	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	
				Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	2.01	12.20	-	11.60	-	11.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	
				Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	81.30	182.25	-	180.31	-	178.94	-	177.64	-	175.59	-	175.59	-	
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3.77	3.78	-	3.79	-	3.79	-	3.80	-	3.80	-	3.80	-	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	106.67	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki	100.30	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95.65	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				AFP Rate per 100.000 penduduk	0.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	98.02	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Penderita Diare yang ditangani	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	95.55	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88.79	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65.50	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
				Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	78.72	86.50	-	87.00	-	87.50	-	88.00	-	88.00	-	88.00	-	
				Prevalensi balita Stunting	14.90	0.16	-	0.14	-	0.12	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	59.00	59.33	475,072,400	60.33	469,677,823	61.33	458,741,453	62.33	474,844,236	63.33	502,447,481	63.33	502,447,481	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	616,311,000	100%	704,074,830	100%	591,407,902	100%	604,295,874	100%	767,149,412	100%	767,149,412	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	1,635,353,150	100%	1,625,204,773	100%	1,588,440,120	100%	1,624,817,778	100%	1,712,307,647	100%	1,712,307,647	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2,400,970,000	100%	2,416,894,572	100%	2,311,478,659	100%	2,506,798,466	100%	2,546,428,072	100%	2,546,428,072	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	100%	2,748,155,000	100%	2,766,382,296	100%	2,645,723,035	100%	2,869,286,471	100%	2,914,646,596	100%	2,914,646,596	OPD Pelaksana Urusan Sosial
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	100%	727,349,000	100%	595,999,256	100%	580,675,807	100%	781,955,325	100%	868,404,548	100%	868,404,548	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.85	1,80	792,074,000	1,75	797,327,476	1,70	762,551,030	1,65	826,986,546	1,60	840,060,254	1,60	840,060,254	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				TFR (Angka Kelahiran Total)	32.92%	32.97%		33.02%		33.07%		33.12%		33.17%		33.17%		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	1,377,774,772	100%	1,386,912,942	100%	1,326,420,981	100%	1,438,503,474	100%	1,461,244,562	100%	1,461,244,562	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4.60%	4.10%		3.60%		4.60%		4.10%		3.60%		3.60%		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.50%	7.10%		6.60%		7.50%		7.10%		6.60%		6.60%		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	750,456,950	100%	755,434,399	100%	722,485,173	100%	783,535,126	100%	795,921,917	100%	795,921,917	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73%	74%		76%		77%		79%		81%		81%		
				Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29%	27%		25%		24%		22%		21%		21%		
																	-	
			Sasaran															
		3.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				Indeks Pembangunan Gender	97.96%	98.05%		98.11%		98.14%		98.21%		98.29%		98.29%		
				Indeks Kota Layanak Anak	Na	Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		Madya		
			Program															
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	799,465,000	100%	804,767,498	100%	769,666,546	100%	834,703,322	100%	847,899,024	100%	847,899,024	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	108,060,000	100%	108,776,714	100%	104,032,280	100%	112,823,002	100%	114,606,604	100%	114,606,604	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan	100%	100%	1,922,549,550	100%	1,935,300,970	100%	1,850,890,372	100%	2,007,290,496	100%	2,039,023,455	100%	2,039,023,455	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	15.91%	16.04%		16.18%		16.31%		16.45%		16.58%		16.58%		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	100%	2,748,155,000	100%	2,766,382,296	100%	2,645,723,035	100%	2,869,286,471	100%	2,914,646,596	100%	2,914,646,596	OPD Pelaksana Urusan Sosial
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	.	-	100%	170,693,662	.	-	.	-	.	-	.	-	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.59	300%	32,246,500	3	32,643,715	3	181,340,788	3	33,858,000	3	34,393,256	300%	34,393,256	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	0.0872	0.0872	315,767,100	0.0872	15,961,321	0.09	116,007,925	0.09	16,555,051	0.09	16,816,768	0.09	16,816,768	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	88%	85%	337,836,250	83%	641,793,752	80%	647,578,484	78%	665,667,263	75%	676,190,698	75%	676,190,698	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	42%	43%		44%		45%		46%		48%		48%		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.96	98.05	95,063,900	98.11	95,694,417	98.14	93,529,661	98.21	99,254,067	98.29	100,823,160	98.29	100,823,160	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0.07%	0.07%	169,655,300	0.07%	170,780,548	0.06%	166,917,227	0.06%	177,133,261	0.06%	179,933,534	0.06%	179,933,534	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68.84	6886%	164,336,700	68.89	165,426,673	66.91	161,684,465	64.94	171,580,231	62.96	174,292,718	6296%	174,292,718	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	22,530,550	100%	22,679,985	100%	22,166,929	100%	23,523,638	100%	23,895,519	100%	23,895,519	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	N/A	Pratama	508,390,100	Pratama	511,762,027	Madya	500,185,175	Madya	530,798,603	Madya	539,189,920	Madya	539,189,920	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100%	100%	21,263,750	100%	21,404,783	100%	20,920,574	100%	22,201,000	100%	22,551,973	100%	22,551,973	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	.	100%	1,050,240,000	100%	1,057,205,777	100%	1,011,094,411	100%	1,096,531,827	100%	1,113,866,737	100%	1,113,866,737	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	.	5%	312,538,250	5%	314,611,178	5%	300,889,014	5%	326,314,117	5%	331,472,769	5%	331,472,769	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7.2	9		10.8		12.6		14.4		16.2		16.2		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	132,567,350	100%	133,446,611	100%	127,626,168	100%	138,410,571	100%	140,598,684	100%	140,598,684	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	100%	1,601,372,500	100%	1,611,993,695	100%	1,541,684,552	100%	1,671,956,804	100%	1,698,388,521	100%	1,698,388,521	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	100%	3,546,728,984	100%	3,570,252,868	100%	3,414,531,775	100%	3,703,059,504	100%	3,761,600,623	100%	3,761,600,623	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	100%	126,737,000	100%	127,577,590	100%	122,013,133	100%	132,323,235	100%	134,415,113	100%	134,415,113	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	46,073,634,175	100%	46,379,220,202	100%	44,356,331,879	100%	48,104,439,241	100%	48,864,915,199	100%	48,864,915,199	Kecamatan
																	-	
			Sasaran															
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks kerukunan umat beragama	82%	82.50%		83%		83.50%		84%		84.50%		84.50%		
				Indeks Aktualisasi Pancasila	Na	68		69		70		71		72		72		
				Indeks pembangunan kebudayaan	48.11%	51.56%		52.42%		53.28%		54.14%		55%		55%		
			Program															
1	01	03	Program pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	.			100%	323,428,950	100%	278,470,077	100%	296,419,180	100%	283,595,513	100%	283,595,513	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	.	100%	114,280,880	100%	119,885,622	100%	43,555,074	100%	134,402,214	100%	202,243,339	100%	202,243,339	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	.	100%	330,993,000	100%	331,047,195	100%	100,000,000	100%	146,196,000	100%	225,083,098	100%	225,083,098	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	.	100%	130,786,000	100%	79,578,546	100%	183,049,302	100%	121,937,825	100%	149,890,748	100%	149,890,748	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestraian dan pengelolaan cagar budaya	.	100%	185,535,000	100%	30,528,177	100%	63,309,860	100%	97,887,947	100%	80,478,073	100%	80,478,073	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
				Terlestarikannya Cagar Budaya	.	75%		78%		83%		87%		90%		90%		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	.	100%	254,505,325	100%	256,193,346	100%	245,019,150	100%	265,723,253	100%	269,924,032	100%	269,924,032	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	100%	43,227,500	100%	43,514,209	100%	41,616,282	100%	45,132,855	100%	45,846,354	100%	45,846,354	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5,875,586,884	100%	5,914,557,052	100%	5,656,586,169	100%	6,134,567,358	100%	6,231,547,825	100%	6,231,547,825	Sekretariat Daerah
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	663,707,000	100%	668,109,075	100%	638,968,653	100%	692,961,465	100%	703,916,391	100%	703,916,391	Kecamatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	90%	92%	2,893,052,300	94%	2,913,580,902	96%	2,853,052,300	98%	2,971,302,592	100%	3,018,275,475	100%	3,018,275,475	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila	70%	80%	2,820,733,090	85%	3,815,692,980	90%	60,784,535,655	95%	988,838,496	100%	1,008,524,013	100%	1,008,524,013	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	N/A	55%	54,659,975	60%	55,047,833	65%	49,659,975	70%	56,138,399	80%	57,025,883	80%	57,025,883	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang	90%	92%	1,264,400,508	94%	1,248,501,445	96%	1,234,400,508	98%	1,298,599,582	100%	1,319,128,950	100%	1,319,128,950	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
																	-	
			MISI 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani															
			Tujuan															
		4.1	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi	50.07	66		78		86		90		92		92		
			Sasaran															
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Nilai Evaluasi AKIP	B	B		BB		A		A		A		Level A		
				Tingkat Maturitas SPIP	Level II	Level III		Level III		Level IV		Level IV		Level IV		Level IV		
			Program															
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	311,097,607,043	B	313,134,791,277	B	310,472,266,036	BB	319,765,751,260	BB	319,817,573,543	BB	319,817,573,543	Semua OPD
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100%	100%	129,156,800	100%	130,013,440	100%	124,342,739	100%	134,849,693	100%	136,981,512	100%	136,981,512	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan	100%	100%	64,213,800	100%	64,639,702	100%	61,820,359	100%	67,044,176	100%	68,104,067	100%	68,104,067	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan perizinan penggunaan arsip	-	100%	44,626,600	100%	44,922,588	100%	42,963,233	100%	46,593,624	100%	47,330,215	100%	47,330,215	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	14,154,454,625	100%	14,262,264,905	100%	13,640,198,190	100%	14,792,794,113	100%	15,026,651,205	100%	15,026,651,205	Sekretariat DPRD
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1,189,059,758	100%	1,196,946,265	100%	1,144,739,941	100%	1,241,470,396	100%	1,261,096,618	100%	1,261,096,618	Sekretariat Daerah
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	91%	100%	4,959,347,650	100%	4,992,240,808	100%	4,774,497,914	100%	5,177,942,699	100%	5,259,800,029	100%	5,259,800,029	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	25,580,175,720	WTP	29,599,837,706	WTP	27,308,803,364	WTP	28,234,999,743	WTP	28,181,362,674	WTP	28,181,362,674	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	100%	2,234,024,900	100%	2,248,842,199	100%	2,150,756,103	100%	2,332,494,864	100%	2,369,368,930	100%	2,369,368,930	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	121%	100%	2,306,295,822	100%	2,354,318,143	100%	2,198,236,935	100%	2,745,453,552	100%	3,029,679,661	100%	3,029,679,661	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Pendapatan)
				Rasio PAD	7.22	7.92		8.02		8.17		7.99		7.61		7.61		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100%	100%	1,834,647,500	100%	1,846,815,905	100%	1,766,264,695	100%	1,915,513,954	100%	1,945,796,031	100%	1,945,796,031	Inspektorat
				Persentase tindak lanjut temuan	82%	82%		82%		82%		82%		82%		82%		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	72,156,200	100%	72,634,780	100%	69,466,722	100%	75,336,656	100%	76,527,642	100%	76,527,642	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	NA	30%		25%		20%		15%		10%		10%		
																	-	
			Sasaran															
		4.1.2	Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Na	71		75		80		85		90		90		
			Program															
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100%	100%	2,858,476,245	100%	2,987,435,253	100%	2,857,134,488	100%	3,098,562,179	100%	3,147,546,890	100%	3,147,546,890	OPD Pelaksana Urusan Kepegawaian
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	0.13	0.14		0.14		0.15		0.15		0.16		0.16		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0.03	0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.07		
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98.70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	100%	4,960,101,825	100%	4,992,999,985	100%	4,775,223,979	100%	5,278,730,116	100%	5,362,180,779	100%	5,362,180,779	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan
				Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP	20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6	6.5		7		7.5		8		9		9		
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80.56	88.85		88.89		90		90.55		95		95		
																	-	
			Sasaran															
		4.1.3	Meningkatnya kinerja pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	C-	C		C		B-		B		B		B		
			Program															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A (67,94%)	A	87,360,000,000	A	87,939,420,221	A	88,694,326,171	A	91,160,930,646	AA	92,652,534,757	AA	92,652,534,757	RSU Anutapura
				Nilai SAKIP OPD	B (65,41)	B		B		B		B		BB		BB		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	100%	82,596,879,308	100%	79,437,938,950	100%	73,695,846,903	100%	85,258,654,364	100%	86,594,134,706	100%	86,594,134,706	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	49%	46.5%	103,780,000	47.6%	104,468,327	48.5%	102,105,091	49.5%	110,288,543	50%	134,624,382	50%	134,624,382	RSU Anutapura
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	67%	67%	988,141,075	67%	994,241,992	67%	971,750,696	66%	1,031,225,910	66%	1,047,528,408	66%	1,047,528,408	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki	23%	30%	-	30%	-	30%	-	50%	-	50%	-	50%		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	100%	189,964,000	100%	191,223,948	100%	186,898,164	100%	198,337,115	100%	201,472,597	100%	201,472,597	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Kepemilikan akta kelahiran	54%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	.	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	55%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	12%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	106,713,695	100%	107,323,786	100%	104,895,956	100%	111,316,027	100%	113,075,806	100%	113,075,806	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	19,860,000	100%	19,991,722	100%	19,539,479	100%	20,735,377	100%	21,063,179	100%	21,063,179	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	.	100%	2,134,027,000	100%	2,148,181,057	100%	2,054,485,424	100%	2,228,089,318	100%	2,263,312,852	100%	2,263,312,852	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	.	100%	57,980,000	100%	58,364,556	100%	55,818,912	100%	60,535,606	100%	61,492,605	100%	61,492,605	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa	.	100%	156,073,000	100%	157,108,163	100%	150,255,692	100%	162,952,289	100%	165,528,377	100%	165,528,377	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	5%	137,646,750	5%	138,559,700	5%	132,516,243	5%	143,713,858	5%	145,985,809	5%	145,985,809	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	222,652,500	Baik	224,129,256	Sangat Baik	214,353,575	Sangat Baik	232,466,439	Sangat Baik	236,141,466	Sangat Baik	236,141,466	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal
2	18	06	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	4,695,000	100%	4,726,140	100%	4,520,003	100%	4,901,943	100%	4,979,437	100%	4,979,437	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	135,125,000	100%	136,021,224	100%	130,088,487	100%	141,080,956	100%	143,311,284	100%	143,311,284	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	100%	40,083,000	100%	40,306,184	100%	39,269,891	100%	43,984,987	100%	46,676,744	100%	46,676,744	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	100%	25,600,000	100%	25,769,793	100%	24,645,811	100%	26,728,381	100%	27,150,926	100%	27,150,926	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84.50%	88.20%		92.30%		94.50%		97.80%		100%		100%		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	1,499,990,000	100%	1,509,938,770	100%	1,444,080,882	100%	1,566,105,629	100%	1,590,863,961	100%	1,590,863,961	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%	187,774,580	100%	189,020,006	100%	180,775,659	100%	196,051,191	100%	199,150,536	100%	199,150,536	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	57%	64%		71%		78%		85%		92%		100%		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	103,225,000	100%	103,909,646	100%	99,377,495	100%	107,774,888	100%	109,478,685	100%	109,478,685	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	.	1.03%		1.10%		1.18%		1.25%		1.32%		1.32%		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	.	0.40%		1.40%		2.40%		3.40%		4.40%		4.40%		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (78,99)	Baik	265,482,800	Baik	267,243,630	Baik	255,587,461	Baik	277,184,586	Baik	281,566,556	Baik	281,566,556	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	46,073,634,175	100%	46,379,220,202	100%	44,356,331,879	100%	48,104,439,241	100%	48,864,915,199	100%	48,864,915,199	Kecamatan
																	-	
			Sasaran															
		4.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	23	40		50		60		70		80		80		
				Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.54	1.8		2.4		2.6		2.8		3		3		
			Program															
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	180,284,576	100%	181,480,324	100%	173,564,830	100%	188,231,048	100%	191,206,764	100%	191,206,764	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	100%	3,340,244,902	100%	3,362,399,268	100%	3,215,743,973	100%	3,487,474,145	100%	3,542,607,107	100%	3,542,607,107	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	.	100%	69,522,500	100%	69,983,612	100%	66,931,188	100%	72,586,870	100%	73,734,385	100%	73,734,385	OPD Pelaksana Urusan Statistik
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	109,234,000	100%	109,958,501	100%	105,162,522	100%	114,048,748	100%	115,851,728	100%	115,851,728	OPD Pelaksana Urusan Persandian
3	31	04	Program Pegelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	115,152,000	100%	115,915,752	100%	110,859,940	100%	120,227,598	100%	122,128,259	100%	122,128,259	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20		30		40		50		60		60		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	66.67%	50.00%	435,414,650	80.00%	438,302,563	87,50%	358,387,479	90,91%	454,606,587	92,86%	564,823,935	92,86%	564,823,935	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	25.00%	100.00%		75.00%		85,71%		0.9		92,31%		92,31%		
				Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	97.12%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase implementasi inovasi daerah	N/A	62,50%		66,67%		0.75		0.8		83,33%		83,33%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sasaran															
		4.1.5	Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Na	75		78		80		85		90		90		
			Program															
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5,875,586,884	100%	5,914,557,052	100%	5,656,586,169	100%	6,134,567,358	100%	6,231,547,825	100%	6,231,547,825	Sekretariat Daerah
																	-	

BAB VII

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan rencana program prioritas yang disertai dengan indikasi rencana kebutuhan pendanaan. Program prioritas yang dimaksud selaras dengan program dan kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyajian program prioritas disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urutan urusan pemerintahan tersebut terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan; perpustakaan, dan kearsipan.

3. Urusan pilihan, meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan, yaitu inspektorat daerah.
7. Unsur kewilayahan, yaitu kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum, yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Program prioritas dibedakan menjadi program prioritas perencanaan operasional dan program prioritas perencanaan strategis. Program prioritas yang dimaksudkan untuk urusan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan perencanaan operasional, sementara suatu urusan pemerintahan menjadi strategis ditentukan oleh tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya. Oleh karena itu, suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis pada tahun/periode tertentu tetapi menjadi operasional pada tahun/periode berikutnya dan sebaliknya. Dalam hal suatu program prioritas menjadi urusan pemerintahan strategis maka dalam penganggarannya diprioritaskan terlebih dahulu, demikian pula perencanaan,

pengendalian dan evaluasinya dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding progran operasional.

Program prioritas baik strategis maupun operasional pencapaian kinerjanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah, namun demikian program prioritas yang merupakan perencanaan strategis menjadi tangggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakannya. Uraian rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.030.789.523.163**		**895.173.953.801**		**868.569.298.864**		**926.731.255.609**		**938.186.943.766**		**938.186.943.766**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**373.675.387.204**		**370.234.903.038**		**363.086.456.814**		**382.088.424.491**		**385.933.934.769**		**385.933.934.769**	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	311.097.607.043	B	313.134.791.277	B	310.472.266.036	BB	319.765.751.260	BB	319.817.573.543	BB	319.817.573.543	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	83%	100%	60.354.088.513	100%	54.934.840.558	100%	51.747.026.573	100%	59.827.420.414	100%	64.042.070.913	100%	64.042.070.913	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	.			100%	323.428.950	100%	278.470.077	100%	296.419.180	100%	283.595.513	100%	283.595.513	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	.	100%	2.223.691.647	100%	1.841.842.253	100%	588.694.127	100%	2.198.833.638	100%	1.790.694.801	100%	1.790.694.801	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**267.069.316.794**		**267.464.035.449**		**259.889.224.470**		**277.413.190.358**		**280.798.774.411**		**280.798.774.411**	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	B	94.385.700.936	B	97.287.718.852	B	94.860.461.920	BB	98.289.647.459	BB	98.570.200.408	BB	98.570.200.408	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	100%	66.404.755.308	100%	63.138.419.757	100%	60.509.280.182	100%	68.305.088.918	100%	69.445.599.613	100%	69.445.599.613	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Angka kelangsungan hidup bayi	0,998	0,998		0,9975		0,9972		0,9968		0,9965		0,9965		
				Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	2,01	19,5		16,5		15		15		15		15		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	2,01	12,2		11,6		11		10		10		10		
				Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	81,3	182,25		180,31		178,94		177,64		175,59		175,59		
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3,77	3,78		3,79		3,79		3,8		3,8		3,8		
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	106,67	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	100,3	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,65	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100		100		100		100		100		100		
				AFP Rate per 100.000 penduduk	0	2		2		2		2		2		2		
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	98,02	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100	100		100		100		100		100		100		
				Penderita Diare yang ditangani	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	95,55	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88,79	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65,5	100		100		100		100		100		100		
				Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	78,72	86,5		87		87,5		88		88		88		
				Prevalensi balita Stunting	14,9	0,16		0,14		0,12		0,1		0,1		0,1		
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100	100		100		100		100		100		100		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	59	59,33	371.292.400	60,33	365.209.496	61,33	356.636.362	62,33	364.555.693	63,33	367.823.099	63,33	367.823.099	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	616.311.000	100%	704.074.830	100%	591.407.902	100%	604.295.874	100%	767.149.412	100%	767.149.412	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	1.635.353.150	100%	1.625.204.773	100%	1.588.440.120	100%	1.624.817.778	100%	1.712.307.647	100%	1.712.307.647	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU				103.655.904.000		104.343.407.741		101.982.997.983		108.224.784.636		109.935.694.232		109.935.694.232	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A (67,94%)	A	87.360.000.000	A	87.939.420.221	A	88.694.326.171	A	91.160.930.646	AA	92.652.534.757	AA	92.652.534.757	RSU Anutapura
				Nilai SAKIP OPD	B (65,41)	B		B		B		B		BB		BB	0	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan RS	.	70%	16.192.124.000	75%	16.299.519.193	80%	13.186.566.721	85%	16.953.565.446	90%	17.148.535.093	90%	17.148.535.093	RSU Anutapura
				Persentase Capaian akreditasi RS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSU Anutapura
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	49%	46.5%	103.780.000	47.6%	104.468.327	48.5%	102.105.091	49.5%	110.288.543	50%	134.624.382	50%	134.624.382	RSU Anutapura
1	**03**	**01**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**201.311.674.090**		**149.755.929.439**		**143.224.135.253**		**155.503.609.165**		**157.961.942.699**		**157.961.942.699**	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	16.182.024.050	B	16.426.036.350	B	15.709.594.009	B	17.037.053.753	B	17.306.390.013	B	17.306.390.013	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	.	100%	5.362.320.000	100%	5.397.885.896	100%	5.162.450.278	100%	5.598.677.015	100%	5.687.185.671	100%	5.687.185.671	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35,69	36,89		39,28		39,28		40,48		41,68		41,68		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Rasio jaringan irigasi	80,14	80,14		80,14		80,14		80,14		80,14		80,14		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	94,91	95,31	10.469.520.000	95,71	10.538.959.693	96,11	10.079.289.643	96,51	10.930.989.008	96,92	11.103.795.395	96,92	11.103.795.395	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30,44	31,11		31,78		32,45		33,12		33,79		33,79		
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,21	5,75	401.263.710	6,42	403.925.115	7,22	386.307.410	8,16	418.950.363	9,23321	425.573.487	9,23	425.573.487	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	58,68	61,68	7.903.815.000	63,18	7.956.237.507	64,68	7.609.216.150	66,18	8.252.194.455	67,68	8.382.652.175	67,68	8.382.652.175	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase jalan yang memiliki drainase	1,34	2,74		4,39		6,27		8,38		10,72		10,72	0	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	.	100%	72.929.187.353	100%	20.363.358.600	100%	19.475.184.971	100%	21.120.836.924	100%	21.454.733.108	100%	21.454.733.108	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63,69	67,45	79.029.621.172	71,56	79.553.789.677	76,14	76.083.950.567	81,07	82.690.082.932	86,23	83.997.318.210	86,23	83.997.318.210	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,438	0,445		0,452		0,46		0,467		0,474		0,474	0	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	245.157.791	100%	246.783.814	100%	236.020.026	100%	255.963.704	100%	260.010.196	100%	260.010.196	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,31	40,81		44,56		48,31		52,06		55,81		55,81		
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2,16	1,68		1,28		1,16		0,63		0,38		0,38		
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	6.572.117.065	B	6.637.602.792	B	6.348.095.355	BB	6.884.509.029	BB	6.993.345.213	BB	6.993.345.213	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,332	0,3381	1.495.230.625	0,3388	1.505.147.828	0,3394	1.439.498.903	0,3402	1.561.136.473	0,341	1.585.816.248	0,341	1.585.816.248	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	.	100%	111.813.575	100%	112.555.185	100%	107.645.948	100%	116.742.024	100%	118.587.582	100%	118.587.582	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75,06%	80,07%	609.603.750	85,07%	613.646.982	90,08%	586.881.993	95,08%	636.473.486	100%	646.535.401	100%	646.535.401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**62.035.109.750**		**60.430.098.355**		**57.143.063.781**		**62.677.983.417**		**63.668.850.377**		**63.668.850.377**	
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.139.949.750	B	4.765.487.807	B	4.739.241.611	BB	4.745.329.800	BB	4.982.596.297	BB	4.982.596.297	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	77,80%	78,34%	11.100.000.000	78,87%	500.000.000	79,40%	600.000.000	79,94%	1.600.000.000	80,47%	1.838.254.080	80,47%	1.838.254.080	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	N/A	18,76%	9.345.000.000	54,23%	10.644.000.000	89,69%	10.025.000.000	94,85%	30.600.000.000	100%	30.748.000.000	100%	30.748.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,40%	10,85%	2.750.000.000	10,30%	2.750.000.000	9,75%	2.806.000.000	9,21%	9.632.653.617	8,66%	9.800.000.000	8,66%	9.800.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	33.700.160.000	100%	41.770.610.548	100%	38.972.822.171	100%	16.100.000.000	100%	16.300.000.000	100%	16.300.000.000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN**				**112.819.861.206**		**33.261.303.931**		**31.810.570.110**		**34.498.561.361**		**35.043.944.010**		**35.043.944.010**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	9.249.329.335	B	9.388.802.007	B	8.979.297.538	B	9.738.047.637	B	9.891.994.991	B	9.891.994.991	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75,94%	100%	1.481.956.740	100%	1.491.785.903	100%	1.426.719.775	100%	1.547.277.510	100%	1.571.738.191	100%	1.571.738.191	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91,61%	96,77%		97,16%		97,51%		97,95%		97,88%		97,88%		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	12.859.752.979	B	13.053.668.023	B	12.484.315.790	BB	13.539.239.719	BB	13.753.279.556	BB	13.753.279.556	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2.400.970.000	100%	2.416.894.572	100%	2.311.478.659	100%	2.506.798.466	100%	2.546.428.072	100%	2.546.428.072	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.382.222.152	B	4.448.302.644	B	4.254.284.300	BB	4.613.771.067	BB	4.686.709.490	BB	4.686.709.490	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		Perlindungan Masyarakat (BPBD)
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	10%	35%	82.445.630.000	50%	2.461.850.782	75%	2.354.474.047	85%	2.553.426.962	100%	2.593.793.711	100%	2.593.793.711	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
				Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	35%	50%		65%		75%		85%		100%		100%		
				persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	35%		45%		50%		75%		85%		85%		
				Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35%	45%		50%		65%		75%		90%		90%		
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**13.878.174.119**		**14.027.683.589**		**13.415.848.436**		**14.549.486.817**		**14.779.497.500**		**14.779.497.500**	
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	6.802.886.059	B	6.905.468.275	B	6.604.277.546	B	7.162.338.599	B	7.275.566.950	B	7.275.566.950	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	799.465.000	100%	804.767.498	100%	769.666.546	100%	834.703.322	100%	847.899.024	100%	847.899.024	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	108.060.000	100%	108.776.714	100%	104.032.280	100%	112.823.002	100%	114.606.604	100%	114.606.604	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	100%	1.922.549.550	100%	1.935.300.970	100%	1.850.890.372	100%	2.007.290.496	100%	2.039.023.455	100%	2.039.023.455	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase (%) penyandang	15,91%	16,04%		16,18%		16,31%		16,45%		16,58%		16,58%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti														
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	100%	2.748.155.000	100%	2.766.382.296	100%	2.645.723.035	100%	2.869.286.471	100%	2.914.646.596	100%	2.914.646.596	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase capaian penanganan bencana	100%	100%	1.497.058.510	100%	1.506.987.837	100%	1.441.258.657	100%	1.563.044.926	100%	1.587.754.872	100%	1.587.754.872	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	99,35%		99,49%		99,63%		99,70%		99,85%		99,85%		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**112.205.163.629**		**113.301.535.934**		**109.215.658.350**		**117.496.166.271**		**120.757.200.339**		**120.757.200.339**	
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**685.849.850**		**861.092.451**		**944.927.197**		**716.080.314**		**727.400.722**		**727.400.722**	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	.		100%	170.693.662	.		.		.		.	0	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,59	3	32.246.500	3	32.643.715	3	181.340.788	3	33.858.000	3	34.393.256	3	34.393.256	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72%	8,72%	315.767.100	8,72%	15.961.321	8,72%	116.007.925	8,72%	16.555.051	8,72%	16.816.768	8,72%	16.816.768	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per	88%	85%	337.836.250	83%	641.793.752	80%	647.578.484	78%	665.667.263	75%	676.190.698	75%	676.190.698	OPD Pelaksana Urusan Tenaga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tahun														Kerja
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	42%	43%		44%		45%		46%		48%		48%		
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.012.309.265**		**5.079.602.774**		**4.964.694.279**		**5.268.554.364**		**5.351.844.160**		**5.351.844.160**	
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	B	4.031.068.965	B	4.091.854.341	B	3.999.290.248	B	4.244.063.563	B	4.311.157.335	B	4.311.157.335	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,96	98,05	95.063.900	98,11	95.694.417	98,14	93.529.661	98,21	99.254.067	98,29	100.823.160	98,29	100.823.160	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,07%	0,07%	169.655.300	0,07%	170.780.548	0,06%	166.917.227	0,06%	177.133.261	0,06%	179.933.534	0,06%	179.933.534	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,84	68,86	164.336.700	68,89	165.426.673	66,91	161.684.465	64,94	171.580.231	62,96	174.292.718	62,96	174.292.718	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	22.530.550	100%	22.679.985	100%	22.166.929	100%	23.523.638	100%	23.895.519	100%	23.895.519	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	N/A	Pratama	508.390.100	Pratama	511.762.027	Madya	500.185.175	Madya	530.798.603	Madya	539.189.920	Madya	539.189.920	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100%	100%	21.263.750	100%	21.404.783	100%	20.920.574	100%	22.201.000	100%	22.551.973	100%	22.551.973	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**1.174.133.000**		**1.127.431.926**		**1.098.445.067**		**1.342.030.827**		**1.491.484.810**		**1.491.484.810**	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	100%	402.850.600	100%	466.866.084	100%	454.862.715	100%	496.541.632	100%	552.522.393	100%	552.522.393	OPD Pelaksana Urusan Pangan
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,3	92,12		93,04		93,97		94,91		95,86		95,86		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	100%	727.349.000	100%	595.999.256	100%	580.675.807	100%	781.955.325	100%	868.404.548	100%	868.404.548	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100%	100%	43.933.400	100%	64.566.586	100%	62.906.546	100%	63.533.870	100%	70.557.869	100%	70.557.869	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**264.478.130**		**266.232.296**		**254.620.238**		**276.135.633**		**280.501.020**		**280.501.020**	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	.	20%	47.912.125	40%	48.229.905	60%	46.126.297	80%	50.023.966	100%	50.814.787	100%	50.814.787	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	26.322.500	100%	26.497.085	100%	25.341.382	100%	27.482.727	100%	27.917.197	100%	27.917.197	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah	100%	100%	190.243.505	100%	191.505.306	100%	183.152.560	100%	198.628.940	100%	201.769.036	100%	201.769.036	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**30.511.067.912**		**30.806.717.916**		**29.463.043.968**		**31.952.669.401**		**32.457.804.421**		**32.457.804.421**	
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	11.043.840.287	B	11.210.372.785	B	10.721.418.203	BB	11.627.377.393	BB	11.811.192.881	BB	11.811.192.881	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota															
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	670.883.350	100%	675.333.022	100%	645.877.519	100%	700.454.130	100%	711.527.506	100%	711.527.506	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	192.556.450	100%	193.833.592	100%	185.379.295	100%	201.043.834	100%	204.222.106	100%	204.222.106	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	100%	3.382.393.300	100%	3.404.827.218	100%	3.256.321.374	100%	3.531.480.334	100%	3.587.308.983	100%	3.587.308.983	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	.	100%	44.312.000	100%	44.605.902	100%	42.660.359	100%	46.265.157	100%	46.996.556	100%	46.996.556	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	61.066.125	100%	61.471.150	100%	58.790.008	100%	63.757.760	100%	64.765.697	100%	64.765.697	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	10	15		17		18		19		20		20		
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH													0	0	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	24.437.100	100%	24.599.180	100%	23.526.256	100%	25.514.223	100%	25.917.574	100%	25.917.574	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74	73	15.091.579.300	72	15.191.675.067	71	14.529.070.954	70	15.756.776.571	70	16.005.873.118	70	16.005.873.118	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7.076.457.091**		**7.172.144.363**		**7.009.899.331**		**7.438.934.532**		**7.556.535.547**		**7.556.535.547**	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.771.778.321	B	5.859.362.915	BB	5.726.815.036	BB	6.077.320.103	A	6.173.395.556	A	6.173.395.556	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0,674	0,671	988.141.075	0,668	994.241.992	0,665	971.750.696	0,662	1.031.225.910	0,659	1.047.528.408	0,659	1.047.528.408	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,50%	30%		30%		30%		50%		50%		50%		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	100%	189.964.000	100%	191.223.948	100%	186.898.164	100%	198.337.115	100%	201.472.597	100%	201.472.597	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Kepemilikan akta kelahiran	54%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	55%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	12%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	04	Program Pengelolaan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi	100%	100%	106.713.695	100%	107.323.786	100%	104.895.956	100%	111.316.027	100%	113.075.806	100%	113.075.806	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Informasi Administrasi Kependudukan	kependudukan														Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	19.860.000	100%	19.991.722	100%	19.539.479	100%	20.735.377	100%	21.063.179	100%	21.063.179	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**3.398.320.000**		**3.420.859.553**		**3.271.654.439**		**3.548.109.041**		**3.604.200.571**		**3.604.200.571**	
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	.	100%	2.134.027.000	100%	2.148.181.057	100%	2.054.485.424	100%	2.228.089.318	100%	2.263.312.852	100%	2.263.312.852	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	.	100%	57.980.000	100%	58.364.556	100%	55.818.912	100%	60.535.606	100%	61.492.605	100%	61.492.605	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa	.	100%	156.073.000	100%	157.108.163	100%	150.255.692	100%	162.952.289	100%	165.528.377	100%	165.528.377	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	.	100%	1.050.240.000	100%	1.057.205.777	100%	1.011.094.411	100%	1.096.531.827	100%	1.113.866.737	100%	1.113.866.737	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**8.000.381.959**		**8.096.354.642**		**7.743.221.899**		**8.397.523.681**		**8.530.278.890**		**8.530.278.890**	
2	14	01	Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.080.076.237	B	5.156.679.824	B	4.931.764.715	BB	5.348.498.535	BB	5.433.052.156	BB	5.433.052.156	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	1,8	792.074.000	1,75	797.327.476	1,7	762.551.030	1,65	826.986.546	1,6	840.060.254	1,6	840.060.254	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				TFR (Angka Kelahiran Total)	32,92%	32,97%		33,02%		33,07%		33,12%		33,17%		33,17%		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	1.377.774.772	100%	1.386.912.942	100%	1.326.420.981	100%	1.438.503.474	100%	1.461.244.562	100%	1.461.244.562	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4,60%	4,10%		3,60%		4,60%		4,10%		3,60%		3,60%		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,50%	7,10%		6,60%		7,50%		7,10%		6,60%		6,60%		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	750.456.950	100%	755.434.399	100%	722.485.173	100%	783.535.126	100%	795.921.917	100%	795.921.917	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73%	74%		76%		77%		79%		81%		81%		
				Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29%	27%		25%		24%		22%		21%		21%		
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**17.032.497.052**		**17.152.256.607**		**16.764.245.953**		**17.790.288.026**		**18.071.532.055**		**18.071.532.055**	
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	11.416.935.014	B	11.839.929.213	BB	11.446.897.081	BB	11.575.602.320	A	11.585.483.073	A	11.585.483.073	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan
2	15	02	Program	Cakupan penyelenggaraan	100%	100%	5.615.562.038	100%	5.312.327.394	100%	5.317.348.872	100%	6.214.685.706	100%	6.486.048.983	100%	6.486.048.983	OPD Pelaksana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)														Urusan Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	17.99%	19.51%		21.04%		23.14%		25.92%		29.51%		29.51%		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,43	0,58		0,58		0,72		0,72		0,8		0,8		
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.466.358.051**		**8.564.287.403**		**8.190.745.181**		**8.882.862.653**		**9.023.290.514**		**9.023.290.514**	
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.945.828.573	B	5.020.407.811	B	4.801.436.377	BB	5.207.157.461	BB	5.289.476.642	BB	5.289.476.642	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	180.284.576	100%	181.480.324	100%	173.564.830	100%	188.231.048	100%	191.206.764	100%	191.206.764	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	100%	3.340.244.902	100%	3.362.399.268	100%	3.215.743.973	100%	3.487.474.145	100%	3.542.607.107	100%	3.542.607.107	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**5.420.606.402**		**5.496.575.870**		**5.256.835.764**		**5.701.038.069**		**5.791.164.935**		**5.791.164.935**	
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.737.608.977	B	4.809.048.425	B	4.599.295.698	BB	4.987.935.907	BB	5.066.789.447	BB	5.066.789.447	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	86,28%	87,14%	78.186.675	88,01%	78.705.253	88,89%	75.272.424	90,67%	81.632.939	99,74%	82.923.462	99,74%	82.923.462	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	.	5,20%	79.006.250	5,20%	79.530.263	5,20%	76.061.451	5,20%	82.488.638	5,20%	83.792.689	5%	83.792.689	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan	Persentase pemenuhan	100%	100%	59.583.600	100%	59.978.792	100%	57.362.741	100%	62.209.889	100%	63.193.356	100%	63.193.356	OPD Pelaksana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Latihan Perkoperasian	kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian														Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	27	46		46		46		46		46		46		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	100%	21.115.300	100%	21.255.348	100%	20.328.270	100%	22.046.007	100%	22.394.529	100%	22.394.529	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	132.567.350	100%	133.446.611	100%	127.626.168	100%	138.410.571	100%	140.598.684	100%	140.598.684	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	.	4,70%	312.538.250	4,80%	314.611.178	4,90%	300.889.014	5%	326.314.117	5,10%	331.472.769	5,10%	331.472.769	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7,2	9		10,8		12,6		14,4		16,2		16,2		
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**8.822.568.702**		**8.949.592.707**		**8.559.244.907**		**9.282.500.584**		**9.429.246.261**		**9.429.246.261**	
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	B	B	5.153.912.288	B	5.231.629.266	BB	5.003.445.141	BB	5.426.235.953	A	5.512.018.514	A	5.512.018.514	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	4,50%	5%	137.646.750	5%	138.559.700	5%	132.516.243	5%	143.713.858	5%	145.985.809	5%	145.985.809	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55	55	46.340.000	58	46.647.353	61	44.612.769	64	48.382.546	67	49.147.418	67	49.147.418	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	950	367,5		385,9		405,17		425,43		446,7		446,7		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	121.012.500	Baik	121.815.122	Sangat Baik	116.502.002	Sangat Baik	126.346.414	Sangat Baik	128.343.806	Sangat Baik	128.343.806	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	89.652.500	100%	90.247.125	100%	86.310.883	100%	93.604.147	100%	95.083.921	100%	95.083.921	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	135.125.000	100%	136.021.224	100%	130.088.487	100%	141.080.956	100%	143.311.284	100%	143.311.284	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	2.956.724.374	B	3.001.309.471	B	2.870.403.564	BB	3.112.952.492	BB	3.162.164.697	BB	3.162.164.697	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0,06%	0,14%	17.940.000	0,18%	18.058.988	0,31%	17.271.322	0,44%	18.730.748	0,57%	19.026.860	0,57%	19.026.860	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	32	36	39.710.290	40	39.973.671	42	38.230.169	45	41.460.616	47	42.116.060	47	42.116.060	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	38.360	38.385		38.400		38.450		38.500		38.550		38.550		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	101.640.000	Baik	102.314.133	Baik	97.851.573	Baik	106.120.025	Baik	107.797.661	Baik	107.797.661	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	18.170.000	100%	18.290.514	100%	17.492.750	100%	18.970.886	100%	19.270.794	100%	19.270.794	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		KEK)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	4.695.000	100%	4.726.140	100%	4.520.003	100%	4.901.943	100%	4.979.437	100%	4.979.437	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**9.690.645.293**		**9.792.217.884**		**9.365.117.922**		**10.156.469.820**		**10.317.031.948**		**10.317.031.948**	
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.415.806.809	B	4.482.393.731	B	4.286.888.462	BB	4.649.130.278	BB	4.722.627.690	BB	4.722.627.690	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	100%	1.601.372.500	100%	1.611.993.695	100%	1.541.684.552	100%	1.671.956.804	100%	1.698.388.521	100%	1.698.388.521	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	100%	3.546.728.984	100%	3.570.252.868	100%	3.414.531.775	100%	3.703.059.504	100%	3.761.600.623	100%	3.761.600.623	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	100%	126.737.000	100%	127.577.590	100%	122.013.133	100%	132.323.235	100%	134.415.113	100%	134.415.113	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**69.522.500**		**69.983.612**		**66.931.188**		**72.586.870**		**73.734.385**		**73.734.385**	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	.	100%	69.522.500	100%	69.983.612	100%	66.931.188	100%	72.586.870	100%	73.734.385	100%	73.734.385	OPD Pelaksana Urusan Statistik
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**				**109.234.000**		**109.958.501**		**105.162.522**		**114.048.748**		**115.851.728**		**115.851.728**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERSANDIAN															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	109.234.000	100%	109.958.501	100%	105.162.522	100%	114.048.748	100%	115.851.728	100%	115.851.728	OPD Pelaksana Urusan Persandian
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**761.594.880**		**561.039.540**		**389.914.236**		**500.423.986**		**657.695.259**		**657.695.259**	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	.	100%	114.280.880	100%	119.885.622	100%	43.555.074	100%	134.402.214	100%	202.243.339	100%	202.243.339	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	.	100%	330.993.000	100%	331.047.195	100%	100.000.000	100%	146.196.000	100%	225.083.098	100%	225.083.098	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	.	100%	130.786.000	100%	79.578.546	100%	183.049.302	100%	121.937.825	100%	149.890.748	100%	149.890.748	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestraian dan pengelolaan cagar budaya	.	100%	185.535.000	100%	30.528.177	100%	63.309.860	100%	97.887.947	100%	80.478.073	100%	80.478.073	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
				Terlestarikannya Cagar Budaya	.	75%		78%		83%		87%		90%		90%		
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**297.732.825**		**299.707.555**		**286.635.431**		**310.856.108**		**315.770.386**		**315.770.386**	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	.	100%	254.505.325	100%	256.193.346	100%	245.019.150	100%	265.723.253	100%	269.924.032	100%	269.924.032	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	100%	43.227.500	100%	43.514.209	100%	41.616.282	100%	45.132.855	100%	45.846.354	100%	45.846.354	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**5.411.406.716**		**5.475.480.335**		**5.480.318.828**		**5.745.053.613**		**6.961.832.726**		**6.961.832.726**	
2	24	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.173.409.516	B	5.235.904.605	B	5.251.192.497	BB	5.496.566.120	BB	6.709.416.931	BB	6.709.416.931	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100%	100%	129.156.800	100%	130.013.440	100%	124.342.739	100%	134.849.693	100%	136.981.512	100%	136.981.512	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	100%	64.213.800	100%	64.639.702	100%	61.820.359	100%	67.044.176	100%	68.104.067	100%	68.104.067	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan perizinan penggunaan arsip		100%	44.626.600	100%	44.922.588	100%	42.963.233	100%	46.593.624	100%	47.330.215	100%	47.330.215	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**35.853.080.775**		**36.324.937.878**		**35.106.241.072**		**39.503.496.110**		**40.999.763.015**		**40.999.763.015**	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2.787.989.731**		**2.944.236.324**		**2.831.445.030**		**5.552.753.310**		**6.135.417.146**		**6.135.417.146**	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	997	1058	1.394.872.760	1090	1.688.664.558	1122	1.603.315.699	1156	4.203.880.374	1191	4.255.182.283	1191	4.255.182.283	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	119	127	1.119.527.360	130	983.398.772	134	962.954.046	138	1.075.188.572	143	1.576.293.272	143	1.576.293.272	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	100%	273.589.611	100%	272.172.994	100%	265.175.285	100%	273.684.364	100%	303.941.592	100%	303.941.592	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
				Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	73,87	74,61		75,35		76,11		76,87		77,64		77,64		
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5.214.455.256**		**5.288.760.606**		**5.058.084.626**		**5.485.492.471**		**5.572.211.809**		**5.572.211.809**	
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.702.469.835	B	4.773.379.412	B	4.565.182.434	BB	4.950.940.074	BB	5.029.208.753	BB	5.029.208.753	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	100%	183.542.435	100%	184.759.791	100%	176.701.259	100%	191.632.505	100%	194.661.994	100%	194.661.994	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	.	100%	141.143.986	100%	142.080.132	100%	135.883.127	100%	147.365.243	100%	149.694.918	100%	149.694.918	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui	100%	100%	84.789.000	100%	85.351.368	100%	81.628.660	100%	88.526.277	100%	89.925.776	100%	89.925.776	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	102.510.000	100%	103.189.903	100%	98.689.145	100%	107.028.372	100%	108.720.368	100%	108.720.368	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**18.904.498.715**		**19.069.814.827**		**18.588.096.732**		**19.107.518.226**		**19.786.466.954**		**19.786.466.954**	
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	14.585.340.601	BB	14.655.963.642	BB	14.300.343.175	A	14.494.404.457	A	14.727.830.070	A	14.727.830.070	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	100%	2.326.774.100	100%	2.387.970.352	100%	2.313.025.296	100%	2.512.031.483	100%	2.801.147.419	100%	2.801.147.419	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,46	5,57		5,63		5,68		5,74		5,8		5,8		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	100%	857.615.750	100%	898.965.544	100%	876.342.881	100%	904.135.845	100%	1.068.137.594	100%	1.068.137.594	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	356.972.764	100%	359.586.218	100%	350.341.070	100%	395.864.883	100%	430.945.757	100%	430.945.757	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-21,44%	-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	100%	40.083.000	100%	40.306.184	100%	39.269.891	100%	43.984.987	100%	46.676.744	100%	46.676.744	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%	100%	737.712.500	100%	727.022.887	100%	708.774.418	100%	757.096.571	100%	711.729.371	100%	711.729.371	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	4,9	10		15		20		25		30		30		
3	**3**		**URUSAN**				**7.835.576.868**		**7.904.200.062**		**7.559.448.383**		**8.198.221.315**		**8.327.825.782**		**8.327.825.782**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	0		**PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.951.457.288	B	6.007.583.950	B	5.745.555.581	BB	6.231.054.681	BB	6.329.560.502	BB	6.329.560.502	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	100%	25.600.000	100%	25.769.793	100%	24.645.811	100%	26.728.381	100%	27.150.926	100%	27.150.926	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84,50%	88,20%		92,30%		94,50%		97,80%		100%		100%		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	1.499.990.000	100%	1.509.938.770	100%	1.444.080.882	100%	1.566.105.629	100%	1.590.863.961	100%	1.590.863.961	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	170.755.000	100%	171.887.542	100%	164.390.450	100%	178.281.433	100%	181.099.858	100%	181.099.858	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%	187.774.580	100%	189.020.006	100%	180.775.659	100%	196.051.191	100%	199.150.536	100%	199.150.536	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	57%	64%		71%		78%		85%		92%		100%		
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1.110.560.205**		**1.117.926.059**		**1.069.166.301**		**1.159.510.789**		**1.177.841.323**		**1.177.841.323**	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	892.183.205	100%	898.100.661	100%	858.928.866	100%	931.508.303	100%	946.234.380	100%	946.234.380	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Cakupan Bina IKM	40%	42%		45%		48%		51%		54%		54%		
				Persentase IKM yang memiliki izin	60%	63%		65%		66%		67%		68%		68%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Palu	1.860	1.915		1.970		2.025		2.080		2.135		2.135		
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	10%	5%		10%		15%		20%		25%		25%		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	103.225.000	100%	103.909.646	100%	99.377.495	100%	107.774.888	100%	109.478.685	100%	109.478.685	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	.	1,03%		1,10%		1,18%		1,25%		1,32%		1,32%		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	.	0,40%		1,40%		2,40%		3,40%		4,40%		4,40%		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	115.152.000	100%	115.915.752	100%	110.859.940	100%	120.227.598	100%	122.128.259	100%	122.128.259	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20		30		40		50		60		60		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**75.561.474.544**		**76.320.775.707**		**72.991.948.589**		**79.159.763.831**		**80.411.188.817**		**80.411.188.817**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**32.495.566.059**		**32.711.094.768**		**31.284.359.016**		**33.927.885.461**		**34.464.246.379**		**34.464.246.379**	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				32.495.566.059		32.711.094.768		31.284.359.016		33.927.885.461		34.464.246.379		34.464.246.379	
4	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Sakip OPD	B	B	25.430.919.417	BB	25.599.591.451	BB	24.483.032.907	BB	26.551.847.707	A	26.971.601.936	A	26.971.601.936	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			kabupaten/kota															
				Nilai Sakip	B	B		BB		A		A		A		A	0	
				Indeks Reformasi Birokrasi	50,07	66		78		86		90		92		92	0	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5.875.586.884	100%	5.914.557.052	100%	5.656.586.169	100%	6.134.567.358	100%	6.231.547.825	100%	6.231.547.825	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1.189.059.758	100%	1.196.946.265	100%	1.144.739.941	100%	1.241.470.396	100%	1.261.096.618	100%	1.261.096.618	Sekretariat Daerah
4	**01**		**SEKRETARIAT DPRD**				**43.065.908.486**		**43.609.680.939**		**41.707.589.573**		**45.231.878.370**		**45.946.942.438**		**45.946.942.438**	
4	01		SEKRETARIAT DPRD				43.065.908.486		43.609.680.939		41.707.589.573		45.231.878.370		45.946.942.438		45.946.942.438	
4	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	28.911.453.861	B	29.347.416.034	B	28.067.391.382	BB	30.439.084.257	BB	30.920.291.233	BB	30.920.291.233	Sekretariat DPRD
4	01	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	14.154.454.625	100%	14.262.264.905	100%	13.640.198.190	100%	14.792.794.113	100%	15.026.651.205	100%	15.026.651.205	Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**83.334.962.176**		**87.992.506.494**		**83.575.720.762**		**88.799.765.077**		**90.618.639.913**		**90.618.639.913**	
5	**01**		**PERENCANAAN**				**11.551.906.837**		**11.684.210.645**		**11.174.589.027**		**12.118.841.124**		**12.310.426.089**		**12.310.426.089**	
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	6.592.559.187	BB	6.691.969.837	BB	6.400.091.113	A	6.940.898.425	A	7.050.626.060	A	7.050.626.060	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	91,30%	100%	4.959.347.650	100%	4.992.240.808	100%	4.774.497.914	100%	5.177.942.699	100%	5.259.800.029	100%	5.259.800.029	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan
5	**02**		**KEUANGAN**				**53.696.112.104**		**58.101.389.923**		**54.895.729.685**		**57.796.755.654**		**58.888.563.807**		**58.888.563.807**	
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	10.448.110.028	B	10.605.659.378	BB	10.143.080.136	BB	11.000.169.794	A	11.174.069.850	A	11.174.069.850	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota															Aset)
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	25.580.175.720	WTP	29.599.837.706	WTP	27.308.803.364	WTP	28.234.999.743	WTP	28.181.362.674	WTP	28.181.362.674	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	100%	2.234.024.900	100%	2.248.842.199	100%	2.150.756.103	100%	2.332.494.864	100%	2.369.368.930	100%	2.369.368.930	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	13.127.505.634	B	13.292.732.499	BB	13.094.853.146	BB	13.483.637.700	A	14.134.082.693	A	14.134.082.693	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Pendapatan)
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	120,81%	100%	2.306.295.822	100%	2.354.318.143	100%	2.198.236.935	100%	2.745.453.552	100%	3.029.679.661	100%	3.029.679.661	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Pendapatan)
				Rasio PAD	7,22	7,92		8,02		8,17		7,99		7,61		7,61		
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**				**8.744.636.742**		**8.802.636.048**		**8.418.697.948**		**9.030.077.416**		**9.172.832.573**		**9.172.832.573**	
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.886.160.497	B	5.815.200.795	BB	5.561.563.460	BB	5.931.515.237	A	6.025.285.683	A	6.025.285.683	OPD Pelaksana Urusan Kepegawaian
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100%	100%	2.858.476.245	100%	2.987.435.253	100%	2.857.134.488	100%	3.098.562.179	100%	3.147.546.890	100%	3.147.546.890	OPD Pelaksana Urusan Kepegawaian
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,13	0,14		0,1445		0,15		0,1542		0,16		0,16		
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,03	0,03		0,04		0,05		0,06		0,07		0,07		
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98,70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**4.960.101.825**		**4.992.999.985**		**4.775.223.979**		**5.278.730.116**		**5.362.180.779**		**5.362.180.779**	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	100%	4.960.101.825	100%	4.992.999.985	100%	4.775.223.979	100%	5.278.730.116	100%	5.362.180.779	100%	5.362.180.779	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Manusia															Pelatihan
				Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP	20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6	6,5		7		7,5		8		9		9		
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80,56	88,85		88,89		90		90,55		95		95		
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**4.382.204.668**		**4.411.269.892**		**4.311.480.124**		**4.575.360.767**		**4.884.636.666**		**4.884.636.666**	
5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	3.946.790.018	BB	3.972.967.329	BB	3.953.092.645	A	4.120.754.180	A	4.319.812.731	A	4.319.812.731	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	67%	50%	435.414.650	80%	438.302.563	87,50%	358.387.479	90,91%	454.606.587	92,86%	564.823.935	92,86%	564.823.935	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	25%	100%		75%		85,71%		90%		92,31%		92,31%		
				Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase implementasi inovasi daerah	N/A	62,50%		66,67%		0,75		0,8		83,33%		83,33%		
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**10.507.539.801**		**10.649.879.178**		**10.185.371.234**		**11.046.034.487**		**11.220.659.611**		**11.220.659.611**	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				10.507.539.801		10.649.879.178		10.185.371.234		11.046.034.487		11.220.659.611		11.220.659.611	
6	01		INSPEKTORAT				10.507.539.801		10.649.879.178		10.185.371.234		11.046.034.487		11.220.659.611		11.220.659.611	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	8.600.736.101	BB	8.730.428.493	BB	8.349.639.817	A	9.055.183.876	A	9.198.335.938	A	9.198.335.938	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100%	100%	1.834.647.500	100%	1.846.815.905	100%	1.766.264.695	100%	1.915.513.954	100%	1.945.796.031	100%	1.945.796.031	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengawasan															
				Persentase tindak lanjut temuan	82%	82%		82%		82%		82%		82%		82%		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	72.156.200	100%	72.634.780	100%	69.466.722	100%	75.336.656	100%	76.527.642	100%	76.527.642	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	NA	30%		25%		20%		15%		10%		10%		
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**				**101.807.080.086**		**102.945.234.452**		**98.455.147.907**		**106.774.601.952**		**108.462.585.826**		**108.462.585.826**	
7	01		KECAMATAN				101.807.080.086		102.945.234.452		98.455.147.907		106.774.601.952		108.462.585.826		108.462.585.826	
7	01		KECAMATAN PALU SELATAN				13.751.747.157		13.907.370.098		13.300.782.569		14.424.697.892		14.652.735.805		14.652.735.805	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	7.625.933.557	B	7.740.926.687	B	7.403.296.383	B	8.028.874.480	B	8.155.801.768	B	8.155.801.768	Kecamatan Palu Selatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (80,80)	Baik	33.978.000	Baik	34.203.361	Baik	32.711.538	Baik	35.475.661	Baik	36.036.491	Baik	36.036.491	Kecamatan Palu Selatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	6.006.890.600	100%	6.046.731.647	100%	5.782.995.802	100%	6.271.658.598	100%	6.370.806.320	100%	6.370.806.320	Kecamatan Palu Selatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	84.945.000	100%	85.508.403	100%	81.778.846	100%	88.689.153	100%	90.091.227	100%	90.091.227	Kecamatan Palu Selatan
7	01		KECAMATAN MANTIKULORE				16.873.123.861		17.065.934.545		16.321.582.235		17.700.754.947		17.980.583.561		17.980.583.561	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	9.577.595.861	B	9.722.018.536	B	9.297.980.407	B	10.083.659.189	B	10.243.070.264	B	10.243.070.264	Kecamatan Mantikulore
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (78,63)	Baik	25.188.000	Baik	25.355.061	Baik	24.249.168	Baik	26.298.221	Baik	26.713.966	Baik	26.713.966	Kecamatan Mantikulore
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	7.207.370.000	100%	7.255.173.296	100%	6.938.729.740	100%	7.525.051.984	100%	7.644.014.417	100%	7.644.014.417	Kecamatan Mantikulore

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	62.970.000	100%	63.387.652	100%	60.622.920	100%	65.745.553	100%	66.784.914	100%	66.784.914	
7	01		KECAMATAN PALU BARAT				11.331.215.705		11.457.569.181		10.957.832.817		11.883.769.027		12.071.637.772		12.071.637.772	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	6.061.392.455	B	6.152.793.526	B	5.884.431.658	B	6.381.665.777	B	6.482.552.586	B	6.482.552.586	Kecamatan Palu Barat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik (70,77)	Baik	35.591.200	Baik	35.827.261	Baik	34.264.609	Baik	37.159.967	Baik	37.747.423	Baik	37.747.423	Kecamatan Palu Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5.145.254.050	100%	5.179.380.243	100%	4.953.475.026	100%	5.372.043.366	100%	5.456.969.204	100%	5.456.969.204	Kecamatan Palu Barat
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	88.978.000	100%	89.568.152	100%	85.661.524	100%	92.899.917	100%	94.368.558	100%	94.368.558	Kecamatan Palu Barat
7	01		KECAMATAN PALU TIMUR				11.299.765.012		11.430.598.837		10.932.038.819		11.855.795.438		12.043.221.952		12.043.221.952	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	6.616.516.787	B	6.716.288.699	B	6.423.349.277	B	6.966.121.903	B	7.076.248.292	B	7.076.248.292	Kecamatan Palu Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik (71,71)	Baik	36.527.600	Baik	36.769.871	Baik	35.166.107	Baik	38.137.641	Baik	38.740.553	Baik	38.740.553	Kecamatan Palu Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	4.555.401.625	100%	4.585.615.588	100%	4.385.608.167	100%	4.756.191.792	100%	4.831.381.724	100%	4.831.381.724	Kecamatan Palu Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	91.319.000	100%	91.924.679	100%	87.915.267	100%	95.344.102	100%	96.851.383	100%	96.851.383	Kecamatan Palu Timur
7	01		KECAMATAN TATANGA				13.275.367.892		13.426.175.250		12.840.575.643		13.925.603.508		14.145.751.313		14.145.751.313	
7	01	01	Program Penunjang	Nilai Sakip OPD	.	B	7.429.883.392	B	7.541.920.238	BB	7.212.969.852	A	7.822.465.369	A	7.946.129.566	A	7.946.129.566	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															Tatanga
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik (69,73)	Baik	36.270.000	Baik	36.510.563	Baik	34.918.109	Baik	37.868.687	Baik	38.467.347	Baik	38.467.347	Kecamatan Tatanga
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5.718.539.500	100%	5.756.468.042	100%	5.505.392.411	100%	5.970.597.737	100%	6.064.986.032	100%	6.064.986.032	Kecamatan Tatanga
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	90.675.000	100%	91.276.407	100%	87.295.271	100%	94.671.716	100%	96.168.368	100%	96.168.368	Kecamatan Tatanga
7	01		KECAMATAN TAWAELI				11.367.389.161		11.492.101.590		10.990.859.051		11.919.585.976		12.108.020.946		12.108.020.946	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	5.838.704.661	B	5.926.747.773	B	5.668.245.176	B	6.147.211.550	B	6.244.391.908	B	6.244.391.908	Kecamatan Tawaeli
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (82,44)	Baik	36.270.000	Baik	36.510.563	Baik	34.918.109	Baik	37.868.687	Baik	38.467.347	Baik	38.467.347	Kecamatan Tawaeli
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5.401.739.500	100%	5.437.566.848	100%	5.200.400.495	100%	5.639.834.023	100%	5.728.993.324	100%	5.728.993.324	Kecamatan Tawaeli
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	90.675.000	100%	91.276.407	100%	87.295.271	100%	94.671.716	100%	96.168.368	100%	96.168.368	Kecamatan Tawaeli
7	01		KECAMATAN ULUJADI				12.807.716.849		12.943.320.771		12.378.781.473		13.424.787.759		13.637.018.241		13.637.018.241	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	5.997.162.049	B	6.087.594.575	B	5.822.076.442	B	6.314.041.549	B	6.413.859.297	B	6.413.859.297	Kecamatan Ulujadi
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87,70)	Baik	35.770.000	Baik	36.007.247	Baik	34.436.745	Baik	37.346.648	Baik	37.937.055	Baik	37.937.055	Kecamatan Ulujadi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	6.685.359.800	100%	6.729.700.833	100%	6.436.176.424	100%	6.980.032.942	100%	7.090.379.249	100%	7.090.379.249	Kecamatan Ulujadi
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	89.425.000	100%	90.018.116	100%	86.091.863	100%	93.366.620	100%	94.842.639	100%	94.842.639	Kecamatan Ulujadi
7	01		KECAMATAN PALU UTARA				11.100.754.449		11.222.164.180		10.732.695.302		11.639.607.406		11.823.616.236		11.823.616.236	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	5.657.067.349	B	5.742.371.512	B	5.491.910.719	B	5.955.976.843	B	6.050.133.999	B	6.050.133.999	Kecamatan Palu Utara
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (78,99)	Baik	25.888.000	Baik	26.059.704	Baik	24.923.077	Baik	27.029.075	Baik	27.456.374	Baik	27.456.374	Kecamatan Palu Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5.353.079.100	100%	5.388.583.705	100%	5.153.553.814	100%	5.589.028.800	100%	5.677.384.929	100%	5.677.384.929	Kecamatan Palu Utara
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	64.720.000	100%	65.149.259	100%	62.307.692	100%	67.572.688	100%	68.640.935	100%	68.640.935	Kecamatan Palu Utara
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**11.102.977.310**		**12.209.295.718**		**68.933.102.508**		**9.551.864.055**		**9.707.368.059**		**9.707.368.059**	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**11.102.977.310**		**12.209.295.718**		**68.933.102.508**		**9.551.864.055**		**9.707.368.059**		**9.707.368.059**	
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	B	3.868.660.837	B	3.953.675.533	B	3.859.983.470	B	4.006.639.043	B	4.069.979.407	B	4.069.979.407	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	90%	92%	2.893.052.300	94%	2.913.580.902	96%	2.853.052.300	98%	2.971.302.592	100%	3.018.275.475	100%	3.018.275.475	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan	70%	80%	2.820.733.090	85%	3.815.692.980	90%	60.784.535.655	95%	988.838.496	100%	1.008.524.013	100%	1.008.524.013	OPD Pelaksana Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila														Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	N/A	55%	54.659.975	60%	55.047.833	65%	49.659.975	70%	56.138.399	80%	57.025.883	80%	57.025.883	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	90%	92%	1.264.400.508	94%	1.248.501.445	96%	1.234.400.508	98%	1.298.599.582	100%	1.319.128.950	100%	1.319.128.950	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	N/A	5%	201.470.600	7%	222.797.026	8%	151.470.600	9%	230.345.941	12%	234.434.331	12%	234.434.331	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Total				**1.461.161.801.484**		**1.334.918.119.162**		**1.347.032.489.285**		**1.379.062.947.392**		**1.400.364.349.346**		**1.400.364.349.346**	

Tabel. 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,030,789,523,163**		**895,173,953,801**		**868,569,298,864**		**926,731,255,609**		**938,186,943,766**		**938,186,943,766**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**373,675,387,204**		**370,234,903,038**		**363,086,456,814**		**382,088,424,491**		**385,933,934,769**		**385,933,934,769**	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	311,097,607,043	B	313,134,791,277	B	310,472,266,036	BB	319,765,751,260	BB	319,817,573,543	BB	319,817,573,543	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	83%	100%	60,354,088,513	100%	54,934,840,558	100%	51,747,026,573	100%	59,827,420,414	100%	64,042,070,913	100%	64,042,070,913	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	.			100%	323,428,950	100%	278,470,077	100%	296,419,180	100%	283,595,513	100%	283,595,513	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	.	100%	2,223,691,647	100%	1,841,842,253	100%	588,694,127	100%	2,198,833,638	100%	1,790,694,801	100%	1,790,694,801	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**267,069,316,794**		**267,464,035,449**		**259,889,224,470**		**277,413,190,358**		**280,798,774,411**		**280,798,774,411**	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	B	94,385,700,936	B	97,287,718,852	B	94,860,461,920	BB	98,289,647,459	BB	98,570,200,408	BB	98,570,200,408	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	100%	66,404,755,308	100%	63,138,419,757	100%	60,509,280,182	100%	68,305,088,918	100%	69,445,599,613	100%	69,445,599,613	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Angka kelangsungan hidup bayi	0.9980	0.9980		0.9975		0.9972		0.9968		0.9965		0.9965		
				Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	2.01	19.50		16.50		15.00		15.00		15.00		15.00		
				Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	2.01	12.20		11.60		11.00		10.00		10.00		10.00		
				Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	81.30	182.25		180.31		178.94		177.64		175.59		175.59		
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3.77	3.78		3.79		3.79		3.80		3.80		3.80		
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	106.67	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	100.30	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95.65	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				AFP Rate per 100.000 penduduk	0.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	98.02	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Penderita Diare yang ditangani	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	95.55	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88.79	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65.50	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	78.72	86.50		87.00		87.50		88.00		88.00		88.00		
				Prevalensi balita Stunting	14.90	0.16		0.14		0.12		0.10		0.10		0.10		
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	59.00	59.33	371,292,400	60.33	365,209,496	61.33	356,636,362	62.33	364,555,693	63.33	367,823,099	63.33	367,823,099	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	616,311,000	100%	704,074,830	100%	591,407,902	100%	604,295,874	100%	767,149,412	100%	767,149,412	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	1,635,353,150	100%	1,625,204,773	100%	1,588,440,120	100%	1,624,817,778	100%	1,712,307,647	100%	1,712,307,647	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
1	**02**		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU**				**103,655,904,000**		**104,343,407,741**		**101,982,997,983**		**108,224,784,636**		**109,935,694,232**		**109,935,694,232**	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A (67,94%)	A	87,360,000,000	A	87,939,420,221	A	88,694,326,171	A	91,160,930,646	AA	92,652,534,757	AA	92,652,534,757	RSU Anutapura
				Nilai SAKIP OPD	B (65,41)	B		B		B		B		BB		BB		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan RS	.	70%	16,192,124,000	75%	16,299,519,193	80%	13,186,566,721	85%	16,953,565,446	90%	17,148,535,093	90%	17,148,535,093	RSU Anutapura
				Persentase Capaian akreditasi RS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSU Anutapura
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	49%	46.5%	103,780,000	47.6%	104,468,327	48.5%	102,105,091	49.5%	110,288,543	50%	134,624,382	50%	134,624,382	RSU Anutapura
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**201,311,674,090**		**149,755,929,439**		**143,224,135,253**		**155,503,609,165**		**157,961,942,699**		**157,961,942,699**	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	16,182,024,050	B	16,426,036,350	B	15,709,594,009	B	17,037,053,753	B	17,306,390,013	B	17,306,390,013	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	.	100%	5,362,320,000	100%	5,397,885,896	100%	5,162,450,278	100%	5,598,677,015	100%	5,687,185,671	100%	5,687,185,671	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35.69	36.89		39.28		39.28		40.48		41.68		41.68		
				Rasio jaringan irigasi	80.14	80.14		80.14		80.14		80.14		80.14		80.14		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	94.91	95.31	10,469,520,000	95.71	10,538,959,693	96.11	10,079,289,643	96.51	10,930,989,008	96.92	11,103,795,395	96.92	11,103,795,395	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30.44	31.11		31.78		32.45		33.12		33.79		33.79		
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	5.21	5.75	401,263,710	6.42	403,925,115	7.22	386,307,410	8.16	418,950,363	9.2332095	425,573,487	9.23	425,573,487	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	58.68	61.68	7,903,815,000	63.18	7,956,237,507	64.68	7,609,216,150	66.18	8,252,194,455	67.68	8,382,652,175	67.68	8,382,652,175	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase jalan yang memiliki drainase	1.34	2.74		4.39		6.27		8.38		10.72		10.72		
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	.	100%	72,929,187,353	100%	20,363,358,600	100%	19,475,184,971	100%	21,120,836,924	100%	21,454,733,108	100%	21,454,733,108	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63.69	67.45	79,029,621,172	71.56	79,553,789,677	76.14	76,083,950,567	81.07	82,690,082,932	86.23	83,997,318,210	86.23	83,997,318,210	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.438	0.445		0.452		0.460		0.467		0.474		0.474		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	245,157,791	100%	246,783,814	100%	236,020,026	100%	255,963,704	100%	260,010,196	100%	260,010,196	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38.31	40.81		44.56		48.31		52.06		55.81		55.81		
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2.16	1.68		1.28		1.16		0.63		0.38		0.38		
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	6,572,117,065	B	6,637,602,792	B	6,348,095,355	BB	6,884,509,029	BB	6,993,345,213	BB	6,993,345,213	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.332	0.3381	1,495,230,625	0.3388	1,505,147,828	0.3394	1,439,498,903	0.3402	1,561,136,473	0.341	1,585,816,248	0.341	1,585,816,248	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	.	100%	111,813,575	100%	112,555,185	100%	107,645,948	100%	116,742,024	100%	118,587,582	100%	118,587,582	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75.06%	80.07%	609,603,750	85.07%	613,646,982	90.08%	586,881,993	95.08%	636,473,486	100%	646,535,401	100%	646,535,401	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**62,035,109,750**		**60,430,098,355**		**57,143,063,781**		**62,677,983,417**		**63,668,850,377**		**63,668,850,377**	
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,139,949,750	B	4,765,487,807	B	4,739,241,611	BB	4,745,329,800	BB	4,982,596,297	BB	4,982,596,297	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	77.80%	78.34%	11,100,000,000	78.87%	500,000,000	79.40%	600,000,000	79.94%	1,600,000,000	80.47%	1,838,254,080	80.47%	1,838,254,080	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	N/A	18.76%	9,345,000,000	54.23%	10,644,000,000	89.69%	10,025,000,000	94.85%	30,600,000,000	100%	30,748,000,000	100%	30,748,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11.40%	10.85%	2,750,000,000	10.30%	2,750,000,000	9.75%	2,806,000,000	9.21%	9,632,653,617	8.66%	9,800,000,000	8.66%	9,800,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	33,700,160,000	100%	41,770,610,548	100%	38,972,822,171	100%	16,100,000,000	100%	16,300,000,000	100%	16,300,000,000	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman													0	0	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**112,819,861,206**		**33,261,303,931**		**31,810,570,110**		**34,498,561,361**		**35,043,944,010**		**35,043,944,010**	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	9,249,329,335	B	9,388,802,007	B	8,979,297,538	B	9,738,047,637	B	9,891,994,991	B	9,891,994,991	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75.94%	100%	1,481,956,740	100%	1,491,785,903	100%	1,426,719,775	100%	1,547,277,510	100%	1,571,738,191	100%	1,571,738,191	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91.61%	96.77%		97.16%		97.51%		97.95%		97.88%		97.88%		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	12,859,752,979	B	13,053,668,023	B	12,484,315,790	BB	13,539,239,719	BB	13,753,279,556	BB	13,753,279,556	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2,400,970,000	100%	2,416,894,572	100%	2,311,478,659	100%	2,506,798,466	100%	2,546,428,072	100%	2,546,428,072	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,382,222,152	B	4,448,302,644	B	4,254,284,300	BB	4,613,771,067	BB	4,686,709,490	BB	4,686,709,490	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	10%	35%	82,445,630,000	50%	2,461,850,782	75%	2,354,474,047	85%	2,553,426,962	100%	2,593,793,711	100%	2,593,793,711	OPD Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
				Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	35%	50%		65%		75%		85%		100%		100%		
				persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	35%		45%		50%		75%		85%		85%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35%	45%		50%		65%		75%		90%		90%		
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**13,878,174,119**		**14,027,683,589**		**13,415,848,436**		**14,549,486,817**		**14,779,497,500**		**14,779,497,500**	
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	6,802,886,059	B	6,905,468,275	B	6,604,277,546	B	7,162,338,599	B	7,275,566,950	B	7,275,566,950	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	799,465,000	100%	804,767,498	100%	769,666,546	100%	834,703,322	100%	847,899,024	100%	847,899,024	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	108,060,000	100%	108,776,714	100%	104,032,280	100%	112,823,002	100%	114,606,604	100%	114,606,604	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	100%	1,922,549,550	100%	1,935,300,970	100%	1,850,890,372	100%	2,007,290,496	100%	2,039,023,455	100%	2,039,023,455	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15.91%	16.04%		16.18%		16.31%		16.45%		16.58%		16.58%		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	100%	2,748,155,000	100%	2,766,382,296	100%	2,645,723,035	100%	2,869,286,471	100%	2,914,646,596	100%	2,914,646,596	OPD Pelaksana Urusan Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase capaian penanganan bencana	100%	100%	1,497,058,510	100%	1,506,987,837	100%	1,441,258,657	100%	1,563,044,926	100%	1,587,754,872	100%	1,587,754,872	OPD Pelaksana Urusan Sosial
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	100%	99.35%		99.49%		99.63%		99.70%		99.85%		99.85%		
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan													0	0	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**112,205,163,629**		**113,301,535,934**		**109,215,658,350**		**117,496,166,271**		**120,757,200,339**		**120,757,200,339**	
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**685,849,850**		**861,092,451**		**944,927,197**		**716,080,314**		**727,400,722**		**727,400,722**	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	.		100%	170,693,662	.		.		.		.	0	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.59	3	32,246,500	3	32,643,715	3	181,340,788	3	33,858,000	3	34,393,256	3	34,393,256	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	8.72%	8.72%	315,767,100	8.72%	15,961,321	8.72%	116,007,925	8.72%	16,555,051	8.72%	16,816,768	8.72%	16,816,768	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	88%	85%	337,836,250	83%	641,793,752	80%	647,578,484	78%	665,667,263	75%	676,190,698	75%	676,190,698	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	42%	43%		44%		45%		46%		48%		48%		
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5,012,309,265**		**5,079,602,774**		**4,964,694,279**		**5,268,554,364**		**5,351,844,160**		**5,351,844,160**	
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	B	4,031,068,965	B	4,091,854,341	B	3,999,290,248	B	4,244,063,563	B	4,311,157,335	B	4,311,157,335	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.96	98.05	95,063,900	98.11	95,694,417	98.14	93,529,661	98.21	99,254,067	98.29	100,823,160	98.29	100,823,160	OPD Pelaksana Urusan
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0.07%	0.07%	169,655,300	0.07%	170,780,548	0.06%	166,917,227	0.06%	177,133,261	0.06%	179,933,534	0.06%	179,933,534	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68.84	68.86	164,336,700	68.89	165,426,673	66.91	161,684,465	64.94	171,580,231	62.96	174,292,718	62.96	174,292,718	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	22,530,550	100%	22,679,985	100%	22,166,929	100%	23,523,638	100%	23,895,519	100%	23,895,519	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	N/A	Pratama	508,390,100	Pratama	511,762,027	Madya	500,185,175	Madya	530,798,603	Madya	539,189,920	Madya	539,189,920	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100%	100%	21,263,750	100%	21,404,783	100%	20,920,574	100%	22,201,000	100%	22,551,973	100%	22,551,973	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**1,174,133,000**		**1,127,431,926**		**1,098,445,067**		**1,342,030,827**		**1,491,484,810**		**1,491,484,810**	
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan													**0**	**0**	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	100%	402,850,600	100%	466,866,084	100%	454,862,715	100%	496,541,632	100%	552,522,393	100%	552,522,393	OPD Pelaksana Urusan Pangan
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.3	92.12		93.04		93.97		94.91		95.86		95.86		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	100%	727,349,000	100%	595,999,256	100%	580,675,807	100%	781,955,325	100%	868,404,548	100%	868,404,548	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100%	100%	43,933,400	100%	64,566,586	100%	62,906,546	100%	63,533,870	100%	70,557,869	100%	70,557,869	OPD Pelaksana Urusan Pangan
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**264,478,130**		**266,232,296**		**254,620,238**		**276,135,633**		**280,501,020**		**280,501,020**	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi													**0**	**0**	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	.	20%	47,912,125	40%	48,229,905	60%	46,126,297	80%	50,023,966	100%	50,814,787	100%	50,814,787	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	26,322,500	100%	26,497,085	100%	25,341,382	100%	27,482,727	100%	27,917,197	100%	27,917,197	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	08	Program Penggelolaan Tanah Kosong													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah													0	0	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah	100%	100%	190,243,505	100%	191,505,306	100%	183,152,560	100%	198,628,940	100%	201,769,036	100%	201,769,036	OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**30,511,067,912**		**30,806,717,916**		**29,463,043,968**		**31,952,669,401**		**32,457,804,421**		**32,457,804,421**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	11,043,840,287	B	11,210,372,785	B	10,721,418,203	BB	11,627,377,393	BB	11,811,192,881	BB	11,811,192,881	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	670,883,350	100%	675,333,022	100%	645,877,519	100%	700,454,130	100%	711,527,506	100%	711,527,506	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	192,556,450	100%	193,833,592	100%	185,379,295	100%	201,043,834	100%	204,222,106	100%	204,222,106	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	100%	3,382,393,300	100%	3,404,827,218	100%	3,256,321,374	100%	3,531,480,334	100%	3,587,308,983	100%	3,587,308,983	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	.	100%	44,312,000	100%	44,605,902	100%	42,660,359	100%	46,265,157	100%	46,996,556	100%	46,996,556	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	61,066,125	100%	61,471,150	100%	58,790,008	100%	63,757,760	100%	64,765,697	100%	64,765,697	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	10	15		17		18		19		20		20		
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH													0	0	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	24,437,100	100%	24,599,180	100%	23,526,256	100%	25,514,223	100%	25,917,574	100%	25,917,574	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat													0	0	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup													0	0	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74	73	15,091,579,300	72	15,191,675,067	71	14,529,070,954	70	15,756,776,571	70	16,005,873,118	70	16,005,873,118	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7,076,457,091**		**7,172,144,363**		**7,009,899,331**		**7,438,934,532**		**7,556,535,547**		**7,556,535,547**	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,771,778,321	B	5,859,362,915	BB	5,726,815,036	BB	6,077,320,103	A	6,173,395,556	A	6,173,395,556	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0.674	0.671	988,141,075	0.668	994,241,992	0.665	971,750,696	0.662	1,031,225,910	0.659	1,047,528,408	0.659	1,047,528,408	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22.50%	30%		30%		30%		50%		50%		50%		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	100%	189,964,000	100%	191,223,948	100%	186,898,164	100%	198,337,115	100%	201,472,597	100%	201,472,597	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Kepemilikan akta kelahiran	54%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	55%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	12%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	106,713,695	100%	107,323,786	100%	104,895,956	100%	111,316,027	100%	113,075,806	100%	113,075,806	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	19,860,000	100%	19,991,722	100%	19,539,479	100%	20,735,377	100%	21,063,179	100%	21,063,179	OPD Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**3,398,320,000**		**3,420,859,553**		**3,271,654,439**		**3,548,109,041**		**3,604,200,571**		**3,604,200,571**	
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	.	100%	2,134,027,000	100%	2,148,181,057	100%	2,054,485,424	100%	2,228,089,318	100%	2,263,312,852	100%	2,263,312,852	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	.	100%	57,980,000	100%	58,364,556	100%	55,818,912	100%	60,535,606	100%	61,492,605	100%	61,492,605	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa	.	100%	156,073,000	100%	157,108,163	100%	150,255,692	100%	162,952,289	100%	165,528,377	100%	165,528,377	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	.	100%	1,050,240,000	100%	1,057,205,777	100%	1,011,094,411	100%	1,096,531,827	100%	1,113,866,737	100%	1,113,866,737	OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**8,000,381,959**		**8,096,354,642**		**7,743,221,899**		**8,397,523,681**		**8,530,278,890**		**8,530,278,890**	
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,080,076,237	B	5,156,679,824	B	4,931,764,715	BB	5,348,498,535	BB	5,433,052,156	BB	5,433,052,156	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.85	1,80	792,074,000	1,75	797,327,476	1,70	762,551,030	1,65	826,986,546	1,60	840,060,254	1,60	840,060,254	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				TFR (Angka Kelahiran Total)	32.92%	32.97%		33.02%		33.07%		33.12%		33.17%		33.17%		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	1,377,774,772	100%	1,386,912,942	100%	1,326,420,981	100%	1,438,503,474	100%	1,461,244,562	100%	1,461,244,562	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4.60%	4.10%		3.60%		4.60%		4.10%		3.60%		3.60%		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.50%	7.10%		6.60%		7.50%		7.10%		6.60%		6.60%		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	750,456,950	100%	755,434,399	100%	722,485,173	100%	783,535,126	100%	795,921,917	100%	795,921,917	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73%	74%		76%		77%		79%		81%		81%		
				Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29%	27%		25%		24%		22%		21%		21%		
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**17,032,497,052**		**17,152,256,607**		**16,764,245,953**		**17,790,288,026**		**18,071,532,055**		**18,071,532,055**	
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	11,416,935,014	B	11,839,929,213	BB	11,446,897,081	BB	11,575,602,320	A	11,585,483,073	A	11,585,483,073	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100%	5,615,562,038	100%	5,312,327,394	100%	5,317,348,872	100%	6,214,685,706	100%	6,486,048,983	100%	6,486,048,983	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	17.99%	19.51%		21.04%		23.14%		25.92%		29.51%		29.51%		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.43	0.58		0.58		0.72		0.72		0.8		0.8		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran													0	0	
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan													0	0	
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8,466,358,051**		**8,564,287,403**		**8,190,745,181**		**8,882,862,653**		**9,023,290,514**		**9,023,290,514**	
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,945,828,573	B	5,020,407,811	B	4,801,436,377	BB	5,207,157,461	BB	5,289,476,642	BB	5,289,476,642	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	180,284,576	100%	181,480,324	100%	173,564,830	100%	188,231,048	100%	191,206,764	100%	191,206,764	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	100%	3,340,244,902	100%	3,362,399,268	100%	3,215,743,973	100%	3,487,474,145	100%	3,542,607,107	100%	3,542,607,107	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**5,420,606,402**		**5,496,575,870**		**5,256,835,764**		**5,701,038,069**		**5,791,164,935**		**5,791,164,935**	
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,737,608,977	B	4,809,048,425	B	4,599,295,698	BB	4,987,935,907	BB	5,066,789,447	BB	5,066,789,447	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam													0%	0	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	86.28%	87.14%	78,186,675	88.01%	78,705,253	88.89%	75,272,424	90.67%	81,632,939	99.74%	82,923,462	99.74%	82,923,462	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	.	5.2%	79,006,250	5.2%	79,530,263	5.2%	76,061,451	5.2%	82,488,638	5.2%	83,792,689	5%	83,792,689	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	100%	100%	59,583,600	100%	59,978,792	100%	57,362,741	100%	62,209,889	100%	63,193,356	100%	63,193,356	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	27	46		46		46		46		46		46		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	100%	21,115,300	100%	21,255,348	100%	20,328,270	100%	22,046,007	100%	22,394,529	100%	22,394,529	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	132,567,350	100%	133,446,611	100%	127,626,168	100%	138,410,571	100%	140,598,684	100%	140,598,684	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	.	4.7%	312,538,250	4.8%	314,611,178	4.9%	300,889,014	5%	326,314,117	5.1%	331,472,769	5.1%	331,472,769	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7.2	9		10.8		12.6		14.4		16.2		16.2		
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**8,822,568,702**		**8,949,592,707**		**8,559,244,907**		**9,282,500,584**		**9,429,246,261**		**9,429,246,261**	
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	B	B	5,153,912,288	B	5,231,629,266	BB	5,003,445,141	BB	5,426,235,953	A	5,512,018,514	A	5,512,018,514	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	4.5%	5%	137,646,750	5%	138,559,700	5%	132,516,243	5%	143,713,858	5%	145,985,809	5%	145,985,809	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55	55	46,340,000	58	46,647,353	61	44,612,769	64	48,382,546	67	49,147,418	67	49,147,418	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	950	367.5		385.9		405.17		425.43		446.7		446.70		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	121,012,500	Baik	121,815,122	Sangat Baik	116,502,002	Sangat Baik	126,346,414	Sangat Baik	128,343,806	Sangat Baik	128,343,806	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	89,652,500	100%	90,247,125	100%	86,310,883	100%	93,604,147	100%	95,083,921	100%	95,083,921	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	135,125,000	100%	136,021,224	100%	130,088,487	100%	141,080,956	100%	143,311,284	100%	143,311,284	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (DPMPTSP)
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	2,956,724,374	B	3,001,309,471	B	2,870,403,564	BB	3,112,952,492	BB	3,162,164,697	BB	3,162,164,697	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0.06%	0.14%	17,940,000	0.18%	18,058,988	0.31%	17,271,322	0.44%	18,730,748	0.57%	19,026,860	0.57%	19,026,860	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	32	36	39,710,290	40	39,973,671	42	38,230,169	45	41,460,616	47	42,116,060	47	42,116,060	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	38,360	38,385		38,400		38,450		38,500		38,550		38,550		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	101,640,000	Baik	102,314,133	Baik	97,851,573	Baik	106,120,025	Baik	107,797,661	Baik	107,797,661	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	18,170,000	100%	18,290,514	100%	17,492,750	100%	18,970,886	100%	19,270,794	100%	19,270,794	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	4,695,000	100%	4,726,140	100%	4,520,003	100%	4,901,943	100%	4,979,437	100%	4,979,437	OPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal (Administrator KEK)
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**9,690,645,293**		**9,792,217,884**		**9,365,117,922**		**10,156,469,820**		**10,317,031,948**		**10,317,031,948**	
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,415,806,809	B	4,482,393,731	B	4,286,888,462	BB	4,649,130,278	BB	4,722,627,690	BB	4,722,627,690	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	100%	1,601,372,500	100%	1,611,993,695	100%	1,541,684,552	100%	1,671,956,804	100%	1,698,388,521	100%	1,698,388,521	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	100%	3,546,728,984	100%	3,570,252,868	100%	3,414,531,775	100%	3,703,059,504	100%	3,761,600,623	100%	3,761,600,623	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	100%	126,737,000	100%	127,577,590	100%	122,013,133	100%	132,323,235	100%	134,415,113	100%	134,415,113	OPD Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**69,522,500**		**69,983,612**		**66,931,188**		**72,586,870**		**73,734,385**		**73,734,385**	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	.	100%	69,522,500	100%	69,983,612	100%	66,931,188	100%	72,586,870	100%	73,734,385	100%	73,734,385	OPD Pelaksana Urusan Statistik
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	.	25%		50%		75%		100%		100%		100%		
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**109,234,000**		**109,958,501**		**105,162,522**		**114,048,748**		**115,851,728**		**115,851,728**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	109,234,000	100%	109,958,501	100%	105,162,522	100%	114,048,748	100%	115,851,728	100%	115,851,728	OPD Pelaksana Urusan Persandian
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**761,594,880**		**561,039,540**		**389,914,236**		**500,423,986**		**657,695,259**		**657,695,259**	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	.	100%	114,280,880	100%	119,885,622	100%	43,555,074	100%	134,402,214	100%	202,243,339	100%	202,243,339	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	.	100%	330,993,000	100%	331,047,195	100%	100,000,000	100%	146,196,000	100%	225,083,098	100%	225,083,098	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	.	100%	130,786,000	100%	79,578,546	100%	183,049,302	100%	121,937,825	100%	149,890,748	100%	149,890,748	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestraian dan pengelolaan cagar	.	100%	185,535,000	100%	30,528,177	100%	63,309,860	100%	97,887,947	100%	80,478,073	100%	80,478,073	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
				Terlestarikannya Cagar Budaya	.	75%		78%		83%		87%		90%		90%		
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman													0%	0	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**297,732,825**		**299,707,555**		**286,635,431**		**310,856,108**		**315,770,386**		**315,770,386**	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	.	100%	254,505,325	100%	256,193,346	100%	245,019,150	100%	265,723,253	100%	269,924,032	100%	269,924,032	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	100%	43,227,500	100%	43,514,209	100%	41,616,282	100%	45,132,855	100%	45,846,354	100%	45,846,354	OPD Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**5,411,406,716**		**5,475,480,335**		**5,480,318,828**		**5,745,053,613**		**6,961,832,726**		**6,961,832,726**	
2	24	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,173,409,516	B	5,235,904,605	B	5,251,192,497	BB	5,496,566,120	BB	6,709,416,931	BB	6,709,416,931	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100%	100%	129,156,800	100%	130,013,440	100%	124,342,739	100%	134,849,693	100%	136,981,512	100%	136,981,512	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	100%	64,213,800	100%	64,639,702	100%	61,820,359	100%	67,044,176	100%	68,104,067	100%	68,104,067	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan perizinan penggunaan arsip		100%	44,626,600	100%	44,922,588	100%	42,963,233	100%	46,593,624	100%	47,330,215	100%	47,330,215	OPD Pelaksana Urusan Kearsipan
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**35,853,080,775**		**36,324,937,878**		**35,106,241,072**		**39,503,496,110**		**40,999,763,015**		**40,999,763,015**	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2,787,989,731**		**2,944,236,324**		**2,831,445,030**		**5,552,753,310**		**6,135,417,146**		**6,135,417,146**	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	997	1058	1,394,872,760	1090	1,688,664,558	1122	1,603,315,699	1156	4,203,880,374	1191	4,255,182,283	1191	4,255,182,283	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	119	127	1,119,527,360	130	983,398,772	134	962,954,046	138	1,075,188,572	143	1,576,293,272	143	1,576,293,272	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan													0	0	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	100%	273,589,611	100%	272,172,994	100%	265,175,285	100%	273,684,364	100%	303,941,592	100%	303,941,592	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
				Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	73.87	74.61		75.35		76.11		76.87		77.64		77.64		
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5,214,455,256**		**5,288,760,606**		**5,058,084,626**		**5,485,492,471**		**5,572,211,809**		**5,572,211,809**	
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,702,469,835	B	4,773,379,412	B	4,565,182,434	BB	4,950,940,074	BB	5,029,208,753	BB	5,029,208,753	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	100%	183,542,435	100%	184,759,791	100%	176,701,259	100%	191,632,505	100%	194,661,994	100%	194,661,994	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	.	100%	141,143,986	100%	142,080,132	100%	135,883,127	100%	147,365,243	100%	149,694,918	100%	149,694,918	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100%	100%	84,789,000	100%	85,351,368	100%	81,628,660	100%	88,526,277	100%	89,925,776	100%	89,925,776	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	102,510,000	100%	103,189,903	100%	98,689,145	100%	107,028,372	100%	108,720,368	100%	108,720,368	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**18,904,498,715**		**19,069,814,827**		**18,588,096,732**		**19,107,518,226**		**19,786,466,954**		**19,786,466,954**	
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	14,585,340,601	BB	14,655,963,642	BB	14,300,343,175	A	14,494,404,457	A	14,727,830,070	A	14,727,830,070	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	100%	2,326,774,100	100%	2,387,970,352	100%	2,313,025,296	100%	2,512,031,483	100%	2,801,147,419	100%	2,801,147,419	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.46	5.57		5.63		5.68		5.74		5.80		5.80		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	100%	857,615,750	100%	898,965,544	100%	876,342,881	100%	904,135,845	100%	1,068,137,594	100%	1,068,137,594	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	356,972,764	100%	359,586,218	100%	350,341,070	100%	395,864,883	100%	430,945,757	100%	430,945,757	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-21.44%	-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		-10%		
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian													0%	0	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	100%	40,083,000	100%	40,306,184	100%	39,269,891	100%	43,984,987	100%	46,676,744	100%	46,676,744	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%	100%	737,712,500	100%	727,022,887	100%	708,774,418	100%	757,096,571	100%	711,729,371	100%	711,729,371	OPD Pelaksana Urusan Pertanian
				Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	4.9	10		15		20		25		30		30		
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**7,835,576,868**		**7,904,200,062**		**7,559,448,383**		**8,198,221,315**		**8,327,825,782**		**8,327,825,782**	
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,951,457,288	B	6,007,583,950	B	5,745,555,581	BB	6,231,054,681	BB	6,329,560,502	BB	6,329,560,502	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	100%	25,600,000	100%	25,769,793	100%	24,645,811	100%	26,728,381	100%	27,150,926	100%	27,150,926	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84.50%	88.20%		92.30%		94.50%		97.80%		100%		100%		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	1,499,990,000	100%	1,509,938,770	100%	1,444,080,882	100%	1,566,105,629	100%	1,590,863,961	100%	1,590,863,961	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	170,755,000	100%	171,887,542	100%	164,390,450	100%	178,281,433	100%	181,099,858	100%	181,099,858	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor													0%	0	
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%	187,774,580	100%	189,020,006	100%	180,775,659	100%	196,051,191	100%	199,150,536	100%	199,150,536	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	57%	64%		71%		78%		85%		92%		100%		
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri													0	0	
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1,110,560,205**		**1,117,926,059**		**1,069,166,301**		**1,159,510,789**		**1,177,841,323**		**1,177,841,323**	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	892,183,205	100%	898,100,661	100%	858,928,866	100%	931,508,303	100%	946,234,380	100%	946,234,380	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Bina IKM	40%	42%		45%		48%		51%		54%		54%		
				Persentase IKM yang memiliki izin	60%	63%		65%		66%		67%		68%		68%		
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	1,860	1,915		1,970		2,025		2,080		2,135		2,135		
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	10%	5%		10%		15%		20%		25%		25%		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	103,225,000	100%	103,909,646	100%	99,377,495	100%	107,774,888	100%	109,478,685	100%	109,478,685	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	.	1.03%		1.10%		1.18%		1.25%		1.32%		1.32%		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	.	0.40%		1.40%		2.40%		3.40%		4.40%		4.40%		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	115,152,000	100%	115,915,752	100%	110,859,940	100%	120,227,598	100%	122,128,259	100%	122,128,259	OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20		30		40		50		60		60		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**75,561,474,544**		**76,320,775,707**		**72,991,948,589**		**79,159,763,831**		**80,411,188,817**		**80,411,188,817**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**32,495,566,059**		**32,711,094,768**		**31,284,359,016**		**33,927,885,461**		**34,464,246,379**		**34,464,246,379**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**32,495,566,059**		**32,711,094,768**		**31,284,359,016**		**33,927,885,461**		**34,464,246,379**		**34,464,246,379**	
4	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Sakip OPD	B	B	25,430,919,417	BB	25,599,591,451	BB	24,483,032,907	BB	26,551,847,707	A	26,971,601,936	A	26,971,601,936	Sekretariat Daerah
				Nilai Sakip	B	B		BB		A		A		A		A	0	
				Indeks Reformasi Birokrasi	50.07	66		78		86		90		92		92	0	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	5,875,586,884	100%	5,914,557,052	100%	5,656,586,169	100%	6,134,567,358	100%	6,231,547,825	100%	6,231,547,825	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1,189,059,758	100%	1,196,946,265	100%	1,144,739,941	100%	1,241,470,396	100%	1,261,096,618	100%	1,261,096,618	Sekretariat Daerah
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**				**43,065,908,486**		**43,609,680,939**		**41,707,589,573**		**45,231,878,370**		**45,946,942,438**		**45,946,942,438**	
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**				**43,065,908,486**		**43,609,680,939**		**41,707,589,573**		**45,231,878,370**		**45,946,942,438**		**45,946,942,438**	
4	02	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	28,911,453,861	B	29,347,416,034	B	28,067,391,382	BB	30,439,084,257	BB	30,920,291,233	BB	30,920,291,233	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	14,154,454,625	100%	14,262,264,905	100%	13,640,198,190	100%	14,792,794,113	100%	15,026,651,205	100%	15,026,651,205	Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**83,334,962,176**		**87,992,506,494**		**83,575,720,762**		**88,799,765,077**		**90,618,639,913**		**90,618,639,913**	
5	**01**		**PERENCANAAN**				**11,551,906,837**		**11,684,210,645**		**11,174,589,027**		**12,118,841,124**		**12,310,426,089**		**12,310,426,089**	
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	6,592,559,187	BB	6,691,969,837	BB	6,400,091,113	A	6,940,898,425	A	7,050,626,060	A	7,050,626,060	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	91.30%	100%	4,959,347,650	100%	4,992,240,808	100%	4,774,497,914	100%	5,177,942,699	100%	5,259,800,029	100%	5,259,800,029	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah													0	0	
5	**02**		**KEUANGAN**				**53,696,112,104**		**58,101,389,923**		**54,895,729,685**		**57,796,755,654**		**58,888,563,807**		**58,888,563,807**	
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	10,448,110,028	B	10,605,659,378	BB	10,143,080,136	BB	11,000,169,794	A	11,174,069,850	A	11,174,069,850	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	25,580,175,720	WTP	29,599,837,706	WTP	27,308,803,364	WTP	28,234,999,743	WTP	28,181,362,674	WTP	28,181,362,674	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	100%	2,234,024,900	100%	2,248,842,199	100%	2,150,756,103	100%	2,332,494,864	100%	2,369,368,930	100%	2,369,368,930	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Keuangan dan Aset)
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	13,127,505,634	B	13,292,732,499	BB	13,094,853,146	BB	13,483,637,700	A	14,134,082,693	A	14,134,082,693	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Pendapatan)
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	120.81%	100%	2,306,295,822	100%	2,354,318,143	100%	2,198,236,935	100%	2,745,453,552	100%	3,029,679,661	100%	3,029,679,661	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (Pendapatan)
				Rasio PAD	7.22	7.92		8.02		8.17		7.99		7.61		7.61		
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**				**8,744,636,742**		**8,802,636,048**		**8,418,697,948**		**9,030,077,416**		**9,172,832,573**		**9,172,832,573**	
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,886,160,497	B	5,815,200,795	BB	5,561,563,460	BB	5,931,515,237	A	6,025,285,683	A	6,025,285,683	OPD Pelaksana Urusan Kepegawaian
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100%	100%	2,858,476,245	100%	2,987,435,253	100%	2,857,134,488	100%	3,098,562,179	100%	3,147,546,890	100%	3,147,546,890	OPD Pelaksana Urusan Kepegawaian
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru	0.13	0.14		0.1445		0.15		0.1542		0.16		0.16		
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0.03	0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.07		
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan	98.7%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**4,960,101,825**		**4,992,999,985**		**4,775,223,979**		**5,278,730,116**		**5,362,180,779**		**5,362,180,779**	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	100%	4,960,101,825	100%	4,992,999,985	100%	4,775,223,979	100%	5,278,730,116	100%	5,362,180,779	100%	5,362,180,779	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan
				Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP	20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6	6.5		7		7.5		8		9		9		
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80.56	88.85		88.89		90		90.55		95		95		
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**4,382,204,668**		**4,411,269,892**		**4,311,480,124**		**4,575,360,767**		**4,884,636,666**		**4,884,636,666**	
5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	3,946,790,018	BB	3,972,967,329	BB	3,953,092,645	A	4,120,754,180	A	4,319,812,731	A	4,319,812,731	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	67%	50%	435,414,650	80%	438,302,563	87,50%	358,387,479	90,91%	454,606,587	92,86%	564,823,935	92,86%	564,823,935	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	25%	100%		75%		85,71%		90%		92,31%		92,31%		
				Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase implementasi inovasi daerah	N/A	62.50%		66,67%		0.75		0.8		83,33%		83,33%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**10,507,539,801**		**10,649,879,178**		**10,185,371,234**		**11,046,034,487**		**11,220,659,611**				**11,220,659,611**	
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**				**10,507,539,801**		**10,649,879,178**		**10,185,371,234**		**11,046,034,487**		**11,220,659,611**				**11,220,659,611**	
6	**01**		**INSPEKTORAT**				**10,507,539,801**		**10,649,879,178**		**10,185,371,234**		**11,046,034,487**		**11,220,659,611**				**11,220,659,611**	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	8,600,736,101	BB	8,730,428,493	BB	8,349,639,817	A	9,055,183,876	A	9,198,335,938			A	9,198,335,938	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100%	100%	1,834,647,500	100%	1,846,815,905	100%	1,766,264,695	100%	1,915,513,954	100%	1,945,796,031			100%	1,945,796,031	Inspektorat
				Persentase tindak lanjut temuan	82%	82%		82%		82%		82%		82%				82%		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	72,156,200	100%	72,634,780	100%	69,466,722	100%	75,336,656	100%	76,527,642			100%	76,527,642	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	NA	30%		25%		20%		15%		10%				10%		
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**				**101,807,080,086**		**102,945,234,452**		**98,455,147,907**		**106,774,601,952**		**108,462,585,826**				**108,462,585,826**	
7	**01**		**KECAMATAN**				**101,807,080,086**		**102,945,234,452**		**98,455,147,907**		**106,774,601,952**		**108,462,585,826**				**108,462,585,826**	
7	**01**		**KECAMATAN PALU SELATAN**				**13,751,747,157**		**13,907,370,098**		**13,300,782,569**		**14,424,697,892**		**14,652,735,805**				**14,652,735,805**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	7,625,933,557	B	7,740,926,687	B	7,403,296,383	B	8,028,874,480	B	8,155,801,768			B	8,155,801,768	Kecamatan Palu Selatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (80,80)	Baik	33,978,000	Baik	34,203,361	Baik	32,711,538	Baik	35,475,661	Baik	36,036,491			Baik	36,036,491	Kecamatan Palu Selatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	6,006,890,600	100%	6,046,731,647	100%	5,782,995,802	100%	6,271,658,598	100%	6,370,806,320			100%	6,370,806,320	Kecamatan Palu Selatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	84,945,000	100%	85,508,403	100%	81,778,846	100%	88,689,153	100%	90,091,227			100%	90,091,227	Kecamatan Palu Selatan
7	**01**		**KECAMATAN MANTIKULORE**				**16,873,123,861**		**17,065,934,545**		**16,321,582,235**		**17,700,754,947**		**17,980,583,561**				**17,980,583,561**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	9,577,595,861	B	9,722,018,536	B	9,297,980,407	B	10,083,659,189	B	10,243,070,264			B	10,243,070,264	Kecamatan Mantikulore
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (78,63)	Baik	25,188,000	Baik	25,355,061	Baik	24,249,168	Baik	26,298,221	Baik	26,713,966			Baik	26,713,966	Kecamatan Mantikulore
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	7,207,370,000	100%	7,255,173,296	100%	6,938,729,740	100%	7,525,051,984	100%	7,644,014,417			100%	7,644,014,417	Kecamatan Mantikulore
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	62,970,000	100%	63,387,652	100%	60,622,920	100%	65,745,553	100%	66,784,914			100%	66,784,914	
7	**01**		**KECAMATAN PALU BARAT**				**11,331,215,705**		**11,457,569,181**		**10,957,832,817**		**11,883,769,027**		**12,071,637,772**				**12,071,637,772**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	6,061,392,455	B	6,152,793,526	B	5,884,431,658	B	6,381,665,777	B	6,482,552,586			B	6,482,552,586	Kecamatan Palu Barat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik (70,77)	Baik	35,591,200	Baik	35,827,261	Baik	34,264,609	Baik	37,159,967	Baik	37,747,423			Baik	37,747,423	Kecamatan Palu Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5,145,254,050	100%	5,179,380,243	100%	4,953,475,026	100%	5,372,043,366	100%	5,456,969,204			100%	5,456,969,204	Kecamatan Palu Barat
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	88,978,000	100%	89,568,152	100%	85,661,524	100%	92,899,917	100%	94,368,558			100%	94,368,558	Kecamatan Palu Barat
7	**01**		**KECAMATAN PALU TIMUR**				**11,299,765,012**		**11,430,598,837**		**10,932,038,819**		**11,855,795,438**		**12,043,221,952**				**12,043,221,952**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	6,616,516,787	B	6,716,288,699	B	6,423,349,277	B	6,966,121,903	B	7,076,248,292			B	7,076,248,292	Kecamatan Palu Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik (71,71)	Baik	36,527,600	Baik	36,769,871	Baik	35,166,107	Baik	38,137,641	Baik	38,740,553			Baik	38,740,553	Kecamatan Palu Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	4,555,401,625	100%	4,585,615,588	100%	4,385,608,167	100%	4,756,191,792	100%	4,831,381,724			100%	4,831,381,724	Kecamatan Palu Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	91,319,000	100%	91,924,679	100%	87,915,267	100%	95,344,102	100%	96,851,383			100%	96,851,383	Kecamatan Palu Timur
7	**01**		**KECAMATAN TATANGA**				**13,275,367,892**		**13,426,175,250**		**12,840,575,643**		**13,925,603,508**		**14,145,751,313**				**14,145,751,313**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	.	B	7,429,883,392	B	7,541,920,238	BB	7,212,969,852	A	7,822,465,369	A	7,946,129,566			A	7,946,129,566	Kecamatan Tatanga
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik (69,73)	Baik	36,270,000	Baik	36,510,563	Baik	34,918,109	Baik	37,868,687	Baik	38,467,347			Baik	38,467,347	Kecamatan Tatanga
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5,718,539,500	100%	5,756,468,042	100%	5,505,392,411	100%	5,970,597,737	100%	6,064,986,032			100%	6,064,986,032	Kecamatan Tatanga
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	90,675,000	100%	91,276,407	100%	87,295,271	100%	94,671,716	100%	96,168,368			100%	96,168,368	Kecamatan Tatanga
7	**01**		**KECAMATAN TAWAELI**				**11,367,389,161**		**11,492,101,590**		**10,990,859,051**		**11,919,585,976**		**12,108,020,946**				**12,108,020,946**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	5,838,704,661	B	5,926,747,773	B	5,668,245,176	B	6,147,211,550	B	6,244,391,908			B	6,244,391,908	Kecamatan Tawaeli
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (82,44)	Baik	36,270,000	Baik	36,510,563	Baik	34,918,109	Baik	37,868,687	Baik	38,467,347			Baik	38,467,347	Kecamatan Tawaeli
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5,401,739,500	100%	5,437,566,848	100%	5,200,400,495	100%	5,639,834,023	100%	5,728,993,324			100%	5,728,993,324	Kecamatan Tawaeli
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								0		0		0			0%	0	Kecamatan Tawaeli
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	90,675,000	100%	91,276,407	100%	87,295,271	100%	94,671,716	100%	96,168,368			100%	96,168,368	Kecamatan Tawaeli
7	**01**		**KECAMATAN ULUJADI**				**12,807,716,849**		**12,943,320,771**		**12,378,781,473**		**13,424,787,759**		**13,637,018,241**				**13,637,018,241**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	5,997,162,049	B	6,087,594,575	B	5,822,076,442	B	6,314,041,549	B	6,413,859,297			B	6,413,859,297	Kecamatan Ulujadi
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87,70)	Baik	35,770,000	Baik	36,007,247	Baik	34,436,745	Baik	37,346,648	Baik	37,937,055			Baik	37,937,055	Kecamatan Ulujadi
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	6,685,359,800	100%	6,729,700,833	100%	6,436,176,424	100%	6,980,032,942	100%	7,090,379,249			100%	7,090,379,249	Kecamatan Ulujadi
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	Kecamatan Ulujadi
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	89,425,000	100%	90,018,116	100%	86,091,863	100%	93,366,620	100%	94,842,639			100%	94,842,639	Kecamatan Ulujadi
7	**01**		**KECAMATAN PALU UTARA**				**11,100,754,449**		**11,222,164,180**		**10,732,695,302**		**11,639,607,406**		**11,823,616,236**				**11,823,616,236**	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	.	B	5,657,067,349	B	5,742,371,512	B	5,491,910,719	B	5,955,976,843	B	6,050,133,999			B	6,050,133,999	Kecamatan Palu Utara
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (78,99)	Baik	25,888,000	Baik	26,059,704	Baik	24,923,077	Baik	27,029,075	Baik	27,456,374			Baik	27,456,374	Kecamatan Palu Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	5,353,079,100	100%	5,388,583,705	100%	5,153,553,814	100%	5,589,028,800	100%	5,677,384,929			100%	5,677,384,929	Kecamatan Palu Utara
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															0%	0	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	64,720,000	100%	65,149,259	100%	62,307,692	100%	67,572,688	100%	68,640,935			100%	68,640,935	Kecamatan Palu Utara
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**11,102,977,310**		**12,209,295,718**		**68,933,102,508**		**9,551,864,055**		**9,707,368,059**				**9,707,368,059**	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**11,102,977,310**		**12,209,295,718**		**68,933,102,508**		**9,551,864,055**		**9,707,368,059**				**9,707,368,059**	
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	B	3,868,660,837	B	3,953,675,533	B	3,859,983,470	B	4,006,639,043	B	4,069,979,407			B	4,069,979,407	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	90%	92%	2,893,052,300	94%	2,913,580,902	96%	2,853,052,300	98%	2,971,302,592	100%	3,018,275,475			100%	3,018,275,475	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila	70%	80%	2,820,733,090	85%	3,815,692,980	90%	60,784,535,655	95%	988,838,496	100%	1,008,524,013			100%	1,008,524,013	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	N/A	55%	54,659,975	60%	55,047,833	65%	49,659,975	70%	56,138,399	80%	57,025,883	80%	57,025,883	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	90%	92%	1,264,400,508	94%	1,248,501,445	96%	1,234,400,508	98%	1,298,599,582	100%	1,319,128,950	100%	1,319,128,950	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	N/A	5%	201,470,600	7%	222,797,026	8%	151,470,600	9%	230,345,941	12%	234,434,331	12%	234,434,331	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total							**1,461,161,801,484**		**1,334,918,119,162**		**1,347,032,489,285**		**1,379,062,947,392**		**1,400,364,349,346**		**1,400,364,349,346**	

BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan program prioritas dan pendanaan program pembangunan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan dan indikator penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan Daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, juga daya saingdaerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Target IKU Kota Palu disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Palu

No.	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,21	3,73	4,20	4,32	4,42
2	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22	28,04	28,2	28,36	28,4
3	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57	65,67	65,8	65,94	66,1
4	Indeks Kota Layak Huni	60	62	63	63,5	64
5	Indeks Risiko Bencana	137,62	125,08	112,54	100	100
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,26	74,60	74,94	75,28	75,62
7	Indeks ketentraman dan ketertiban	100	100	100	100	100
8	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72
9	Persentase Layanan Angkuntan Darat	19.51	21.04	23.14	25.92	29.51
10	Persentase luas kawasan kumuh	0,55	0,31	0,07	0,03	0,00
11	Persentase rumah tidak layak huni	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80	85	90	95	100
13	Indeks ketangguhan kota	400	450	475	500	550
14	Indeks Pembangunan Manusia	81,70	81,90	82,10	82,40	82,60
15	Harapan Lama Sekolah	16,50	17	17,40	17,60	18
16	Rata-rata Lama Sekolah	11,63	11,65	11,71	11,81	12
17	Angka Harapan Hidup	71,40	71,60	71,80	72	72,20

No.	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
18	Case Fatality Rate Covid-19	1,75	1,5	1	1	< 1
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	60	70	80	90	100
20	Indeks Pembangunan Gender	98,05	98,11	98,14	98,21	98,29
21	Indeks Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
22	Indeks kerukunan umat beragama	82,5	83	83,5	84	84,5
23	Indeks Aktualisasi Pancasila	68	69	70	71	72
24	Indeks pembangunan kebudayaan	51,56	52,42	53,28	54,14	55
25	Indeks Reformasi Birokrasi	66	78	86	90	92
26	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	A	A	A
28	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III
29	Indeks Profesionalitas ASN	71	75	80	85	90
30	Indeks Pelayanan Publik	C	C	B-	B	B
31	Indeks Inovasi Daerah	40	50	60	70	80
32	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,8	2,4	2,6	2,8	3
33	Indeks Kualitas Kebijakan)	75	78	80	85	90

Target indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Kunci Daerah Kota Palu

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Pertumbuhan PDRB	- 4,54%	3,21%	3,73%	4,20%	4,32%	4,42%
2	Laju inflasi	1,81	<2	<2	<2	<2	<2
3	PDRB per kapita ADHK (2010)	41.443.542	42.623.878	43.995.582	45.615.231	47.348.345	49.193.105
4	PDRB per kapita ADHB	64.776.859	73.423.481	78.170.432	83.224.282	88.604.871	94.333.324
5	Indeks Gini	0,304	0,330 - 0,350	0,300 - 0,330	0,300 - 0,330	0,300 - 0,330	0,300 - 0,320
6	Indeks Wiliamson	0,29	< 0,275	< 0,265	< 0,260	< 0,255	< 0,250
7	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia						
	a, 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	25	25	24,75	24,5	24	23,5
	b, 40% Penduduk Berpenghasilan Menengah	39,4	37,5	37,5	37,75	37,75	37,95
	c, 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	45,6	37	37,5	37,75	38	39
6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	93,2	94,5	95	95,25	95,5	96
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,97	0,94	0,9	0,85	0,85	0,8

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	(P1)						
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,2	0,2	0,19	0,19	0,16
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,47	81,7	81,9	82,1	82,4	82,6
8	Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,23	16,5	17	17,4	17,6	18
9	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,61	11,63	11,65	11,71	11,81	12
10	Angka harapan hidup	71,04	71,4	71,6	71,8	72	72,2
11	Pengeluaran Perkapita/ tahun (ribu rupiah)	14.839	15.305	15.605	15.905	16.250	16.630
12	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,216	0,48	0,46	0,44	0,42	0,4
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	65,81	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08
14	Tingkat pengangguran terbuka	8,38	8,5	8,25	8	7,5	7,25
15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) ADHB	0,86	1	1,12	1,22	1,25	1,27
16	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) ADHB	9,7	10,41	10,5	10,62	10,7	10,83
17	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) ADHB	6,57	6,83	7,1	7,42	7,9	8,2
	Aspek Daya Saing Daerah						
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan	-17,83%	-15,50%	-13,50%	-11,95%	-11,35%	-10,75%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	ekonomi)						
2	Angka kriminalitas (per 10,000 penduduk)	12,11	12,10	12,00	11,75	11,50	11,00
3	Rasio ketergantungan	39,125	37,68	37,5	37,35	37,35	37,02
4	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)	4,4	4-3,5	4 - 3,6	3,5-3	3,5-3	3-2,5
	Aspek Pelayanan Umum						
	Pelayanan Urusan Wajib						
	Terkait Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1,1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,23	16,5	17	17,4	17,6	18
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,61	11,63	11,65	11,71	11,81	12
1,2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,06	49,96	54,87	59,77	64,68	69,58
1,3	Angka Partisipasi Kasar						
	1,3,1 Angka Partisipasi Kasar SD	86,89	90	92	95	97	100
	1,3,2 Angka Partisipasi Kasar SMP	77,67	82	87	91	96	100
1,4	Angka Partisipasi Murni						
	1,4,1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	80,4	84,32	88,24	92,16	96,08	100
	1,4,2 Angka Partisipasi Murni	64,16	71,328	78,496	85,664	92,832	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	SMP/MTS/Paket B						
1,5	Angka Partisipasi Sekolah						
	1,5,1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	85	88	91	94	97	100
	1,5,2 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/ Paket B	69	75,2	81,4	87,6	93,8	100
1,6	Angka Putus Sekolah						
	1,6,1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	12	10	8	6	4	2
	1,6,2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	18	15	12	9	6	3
1,7	Angka Kelulusan (AL)						
	1,7,1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
	1,7,2 Angka Kelulusan SMP/MTS/Paket B	100	100	100	100	100	100
1,8	Angka Melanjutkan (AM)						
	1,8,1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A	85,86	88,69	91,52	94,35	97,17	100
	1,8,2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B	141,62	133,30	124,97	116,65	108,32	100
1,9	Fasilitas Pendidikan						
	1,9,1 Sekolah Pendidikan	69%	75,20%	81,40%	87,60%	93,80%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	SD/MI kondisi bangunan baik						
	1,9,2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	53%	62,40%	71,80%	81,20%	90,60%	100,00%
1,10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar						
	SD	42,73	44,38	46,03	47,69	49,34	51
	SMP	23,38	25,80	28,22	30,65	33,07	35,5
1,11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar						
	SD	17	19,2	21,4	23,6	25,8	28
	SMP	14	17,6	21,2	24,8	28,4	32
1,12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,68	99,85	99,95	99,88	99,88	99,9
1,13	Kualifikasi S1 / D-IV						
1,14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SD	86	88,8	92	94,4	97,2	100
1,15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SMP	95	96	97	98	99	100
1,16	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang	N/A	53,23	57,32	61,41	65,49	69,58

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	berpartisipasi dalam PAUD						
1,17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	N/A	90,00	92,50	95,00	97,50	100
1,18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	N/A	79,33	84,50	89,67	94,83	100
2	Kesehatan						
2,1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9980	0,998	0,9975	0,9972	0,9968	0,9965
2,2	Angka kematian Balita per-1,000 Kelahiran Hidup	2,01	19,5	16,5	15	15	15
2,3	Angka kematian Neonatal per-1,000 Kelahiran Hidup	2,01	12,2	11,6	11	10	10
2,4	Angka kematian Ibu per-100,000 Kelahiran Hidup	81,30	182,25	180,31	178,94	177,64	175,59
2,5	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100,000 pddk)	3,77	3,78	3,79	3,79	3,8	3,8
2,6	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	59	59,33	60,33	61,33	62,33	63,33
2,7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	106,67	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
2,8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	100,3	100	100	100	100	100
2,9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,65	100	100	100	100	100
2,10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
2,11	AFP Rate per 100,000 penduduk	0	2	2	2	2	2
2,12	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	98,02	100	100	100	100	100
2,13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
2,14	Penderita Diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100
2,15	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	95,55	100	100	100	100	100
2,16	Cakupan kunjungan bayi	100,96	100	100	100	100	100
2,17	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88,79	100	100	100	100	100
2,18	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam						
2,19	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65,5	100	100	100	100	100
2,20	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	98,85	100	100	100	100	100
2,21	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,30	100	100	100	100	100
2,22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	108,54	100	100	100	100	100
2,23	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76,21	100	100	100	100	100
2,24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	32,00	100	100	100	100	100
2,25	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25,03	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
2,26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,21	100	100	100	100	100
2,27	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19,11	100	100	100	100	100
2,28	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,71	100	100	100	100	100
2,29	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	87,41	100	100	100	100	100
2,30	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	37,81	100	100	100	100	100
2,31	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	101,01	100	100	100	100	100
2,32	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	78,72	86,5	87	87,5	88	88
2,33	Prevalensi balita Stunting	14,90	0,16	0,14	0,12	0,1	0,1
2,34	Persentase penanggulangan	100,00	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	kejadian luar biasa						
2,35	Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19	Na	1,75	1,5	1	<1	<1
2,36	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,531	0,531	0,531	0,531	0,531	0,531
2,37	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	92,31	95	95	100	100	100
2,41	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76,21	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3,1	Pekerjaan Umum						
3,1,1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	63,69	67,45	71,56	76,14	81,07	86,23
3,1,2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,438	0,445	0,452	0,460	0,467	0,474
3,1,3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	87,35	92,07	96,80	100,00	100,00	100,00
3,1,4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72
3,1,5	Persentase drainase dalam	58,68	61,68	63,18	64,68	66,18	67,68

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat						
3,1,6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	57,81	54,02	50,23	46,44	42,65	38,86
3,1,7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35,69	36,89	39,28	39,28	40,48	41,68
3,1,8	Rasio jaringan irigasi	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
3,1,9	Persentase penduduk berakses air minum	94,91	95,31	95,71	96,11	96,51	96,92
3,1,10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30,44	31,11	31,78	32,45	33,12	33,79
3,1,11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
3,1,12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94,91	95,31	95,71	96,11	96,51	96,92

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
3,1,13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,21	5,75	6,42	7,22	8,16	9,23
3,1,14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63,69	67,45	71,56	76,14	81,07	86,23
3,1,15	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,31	40,81	44,56	48,31	52,06	55,81
3,1,16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2,16	1,68	1,28	1,16	0,63	0,38
3,2	Penataan Ruang:						
3,2,1	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	4,15%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
3,2,2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,332	0,3381	0,3388	0,3394	0,3402	0,341
3,2,3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,06%	80,07%	85,07%	90,08%	95,08%	100,00%
3,2,4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	N/A	16,38%	34,40%	54,22%	76,02%	100,00%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4,1	Rasio rumah layak huni	0,886	0,892	0,897	0,903	0,908	0,913
4,2	Cakupan ketersediaan rumah	88,60%	89,15%	89,70%	90,25%	90,79%	91,34%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	layak huni						
4,3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,67%	0,55%	0,31%	0,07%	0,03%	0,00%
4,4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4,5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4,6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4,7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	N/A	18,76%	54,23%	89,69%	94,85%	100,00%
4,8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,40%	10,85%	10,30%	9,75%	9,21%	8,66%
4,9	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5,1	Jumlah Linmas per 10,000 penduduk	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
5,2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
5,3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5,4	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5,5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75,94%	101,25%	101,25%	101,25%	101,25%	101,25%
5,6	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
5,7	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	10%	35%	50%	75%	85%	100%
5,8	Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	35%	50%	65%	75%	85%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
5,9	persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5,10	Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	35%	45%	50%	75%	85%
5,11	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35%	45%	50%	65%	75%	90%
5,12	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	45%	50%	65%	75%	85%	100%
5,13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91,96%	96,77%	97,16%	97,51%	97,88%	97,95%
5,14	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5,15	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sosial						
6,1	Persentase PMKS yang	48,92	51,92	68,53	69,22	69,91	70,61

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	memperoleh bantuan sosial						
6,2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	46,43	58,23	64,05	70,46	77,50	85,25
6,3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	63,51	74,15	80,82	88,91	97,80	97,80
6,4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	73,81	80,09	88,10	96,91	100	100
6,5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
6,6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100
6,7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	64,47	73,52	75,73	78,00	80,34	82,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
6,8	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	15,91%	16,04%	16,18%	16,31%	16,45%	16,58%
6,9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	99,35%	99,49%	99,63%	99,70%	99,85%
	Urusan Wajib						
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1,1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	88%	85%	83%	80%	78%	75%
1,2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	42%	43%	44%	45%	46%	48%
1,3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13,97%	15,29%	16,75%	18,33%	20,07%	21,97%
1,4	Besaran tenaga kerja yang	44,24%	58,15%	37,79%	24,57%	15,97%	10,38%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi						
1,5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	62,50%	65,00%	74,00%	83,00%	91,00%	99,00%
1,6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan						
1,8	Prosentase terfasilitasi BPJS Ketanagakerjaan	N/A	0,2	0,33	0,47	0,6	0,73
1,9	Prosentase Pekerja yang terfasiltasi penyelesaian Perselisihan	N/A	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25
1,10	Prosentase tenaga kerja yang dilatih kopetensi keahlian dan keterampilan Tenaga kerja yang ditempatkan	N/A	0,178	0,373	0,5786	0,7842	1
1,11	Tenaga kerja yang ditempatkan	N/A	0,1363	0,3163	0,5433	0,7703	1
1,12	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A	100	100	100	100	100
1,13	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,59	3	3	3	3	3
1,14	Tingkat Produktivitas Tenaga	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Kerja						
1,15	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	2,02	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1,16	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55,71	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
2,2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	13,33	13,33	13,33	13,33	14	14
2,3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	84,29	89,29	89,29	89,29	89,29	89,29
2,4	Rasio KDRT	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
2,5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	26,38	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
2,6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
2,7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100
2,8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu,	100	100	100	100	100	100
2,9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	43,44	41,44	39,44	37,44	35,44	33,44

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
2,10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100
2,11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1,18	100%	100%	100%	100%	100%
2,12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
2,13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2,14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
2,15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
2,16	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	156	160	165	170	175	180
2,17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,96	98,05%	98,11%	98,14%	98,21%	98,29%
2,18	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,84	68,86	68,89	66,91	64,94	62,96
2,19	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	32,92	32,97	33,02	33,07	33,12	33,17

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0,046	0,041	0,036	0,046	0,041	0,036
2,21	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	0,075	0,071	0,066	0,075	0,071	0,066
3	Pangan						
3,1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
3,2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari	72,90	72,90	72,90	72,90	72,90	72,90
3,3	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,30	92,12	93,04	93,97	94,91	95,86
3,4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	167	150	150	150	150	150
4	Pertanahan						
4,1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	78%	80%	85%	90%	95%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
4,2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	N/A	20%	40%	60%	80%	100%
5	Lingkungan Hidup						
5,1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	10	15	17	18	19	20
5,2	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	81%	82%	83%	83%	84%	85%
5,3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota,	17	18,7	20,6	22,6	24,9	27,4
5,4	Persentase sampah yang terangkut	100	100	100	100	100	100
5,5	Jumlah sampah yang dikelola	775,11	786,1	786,1	822,6	872,2	872,2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	oleh masyarakat						
5,6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74	73	72	71	70	70
5,7	Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten/kota	72,95%	71,94%	70,95%	69,92%	68,86%	68,86%
5,8	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0
5,9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73,92	74,26	74,6	74,94	75,28	75,62
5,10	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	73,92	74,26	74,6	74,94	75,28	75,62
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6,1	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0,674	0,671	0,668	0,665	0,662	0,659
6,2	Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran	100	100	100	100	100	100
6,3	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6,4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	46%	92%	184%	368%	736%	1472%
6,5	Perekaman KTP elektronik	101%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
6,6	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,25%	30%	30%	50%	50%	50%
6,7	Kepemilikan akta kelahiran	54%	100%	100%	100%	100%	100%
6,8	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	11	22	22	22	22	22
6,9	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	231%	100%	100%	100%	100%	100%
6,1	Rasio anak (0-17 tahun kurang satu hari) ber-KIA	22,25%	30%	30%	50%	50%	50%
6,11	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	55%	100%	100%	100%	100%	100%
6,12	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	12%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7,1	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7,2	Persentase pengentasan desa tertinggal	N/A	N/A	0%	0%	50%	100%
7,3	Persentase peningkatan status desa mandiri	N/A	N/A	0%	0%	0%	50%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8,1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60
8,2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	61%	100%	100%	100%	100%	100%
8,3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	50	100	100	100
8,4	Jumlahkebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	1	1	1	1	1
8,5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	10	13	18	24	32	42
8,6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,98	2,02	2,06	2,11	2,15	2,19
8,7	Angka kelahiran remaja	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	(perempuan usia 15–19) per 1,000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)						
8,8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	11%	11%	10%	10%	9%	9%
8,9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30%	32%	34%	37%	40%	42%
8,10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	20%	27%	36%	47%	63%	84%
8,11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76%	79%	83%	87%	90%	94%
8,12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	72%	73%	75%	77%	79%	80%
8,13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	39%	40%	41%	42%	43%	45%
8,14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	138%	100%	100%	100%	100%	100%
8,15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	89%	95%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
8,16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	50,43	51,32	52,22	53,13	54,07	55,01
8,18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	53%	54%	55%	56%	57%	58%
8,20	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	60%	64%	69%	74%	79%	84%
8,21	Cakupan penyediaan Informasi	1,5	1,56	1,63	1,70	1,77	1,84

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan						
8,22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73%	74%	76%	77%	79%	81%
8,23	Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29%	27%	25%	24%	22%	21%
8,24	TFR (Angka Kelahiran Total)	32,92%	32,97%	33,02%	33,07%	33,12%	33,17%
8,25	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4,60%	4,10%	3,60%	4,60%	4,10%	3,60%
8,26	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,50%	7,10%	6,60%	7,50%	7,10%	6,60%
9	Perhubungan						
9,1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	81,992	94,701	108,906	130,687	163,359	212,366
9,2	Jumlah trayek angkutan umum	6 trayek	8 trayek	8 trayek	10 trayek	10 trayek	11 trayek
9,3	Jumlah uji kir angkutan umum	92 unit	97 unit	102 unit	112 unit	122 unit	132 unit
9,4	Persentase layanan angkutan darat	17,99%	19,51%	21,04%	23,14%	25,92%	29,51%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
9,5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)	2,19%	2,30%	2,42%	2,66%	2,90%	3,14%
9,6	Pemasangan Rambu-rambu	31,87%	45,48%	59,09%	72,70%	86,32%	99,93%
9,8	Tingkat pelayanan ruas jalan Kota Palu	10 ruas Jalan	14 ruas Jalan	17 ruas Jalan	20 ruas Jalan	22 ruas Jalan	25 ruas Jalan
9,9	Jumlah Titik Parkir yang direvitalisasi	0 Titik Parkir	50 titik Parkir	100 titik Parkir	160 titik Parkir	229 titik Parkir	279 titik Parkir
9,10	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,43	0,58	0,58	0,72	0,72	0,8
9,11	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	10 ruas Jalan	14 ruas Jalan	17 ruas Jalan	20 ruas Jalan	22 ruas Jalan	25 ruas Jalan
10	Komunikasi dan Informatika						
10,1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10,2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10,3	Jumlah Staf IT yang terlatih	178 org	190 org	192 org	192 org	193 org	193 org
10,4	Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	39	42	42	42	45	45
10,5	Rasio Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	informasi (Website)						
10,6	Jumlah sarana pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat (media)	7 media	7 media	7 media	7 media	7 media	7 media
10,7	Jumlah terlaksananya diseminasi informasi kegiatan pemerintah kota	4	4	4	4	4	4
10,8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,56%	100%	100	100	100	100
10,9	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	16,66%	33,33%	50,00%	66,66%	83,33%
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11,1	Persentase koperasi aktif	86,28%	87,14%	88,01%	88,89%	90,67%	99,74%
11,3	Persentase Usaha Mikro	0,78%	0,86%	0,94%	1,04%	1,14%	1,26%
11,4	Persentase usaha mikro Yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas produk	0,01	0,19	0,39	0,59	0,79	1
11,5	Presentase koperasi aktif yang menjalankan RAT	0,382	0,488	0,61	0,649	0,848	1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
11,6	Prosentase koperasi RAT yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas usaha	N/A	2	3	3	4	4
11,7	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	27	46	46	46	46	46
11,8	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2
12	Penanaman Modal						
12,1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
12,2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	87 Investor	146 Investor	208 Investor	271 Investor	338 Investor	407 Investor
12,3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)	39,310 M	38,752 M	38,785 M	38,855 M	38,925 M	38,996 M
12,4	Kenaikan / Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	0,06%	0,14%	0,18%	0,31%	0,44%	0,57%
12,5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	N/A	6,85	8,65	9,59	10,06	10,32
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
13,1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	56	54	54	55	56	57
13,2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	63,75	65	66,5	67,3	68,5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
13,3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	23,6	24,6	26,5	27,2	28,7
13,4	Peningkatan prestasi olahraga	0	2	2	2	2	2
14	Statistik						
14,1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14,2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	25	50	75	100	100
14,3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0	25	50	75	100	100
15	Persandian						
15,1	Jumlah Sandiman yang tersedia	4	4	5	5	7	7
16	Kebudayaan						
16,1	Penyelenggaraan festival seni	2	4	4	4	4	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	dan budaya						
16,2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11	11	11	11	11	11
16,3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6	6	6	6	6	6
16,4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	6	6	6	6	6
16,5	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	75	78	83	87	80
17	Perpustakaan						
17,1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05
17,2	Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31,25	32,27	33,29	34,31	35,33	36,35
17,3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,01	0,03	1,05	2,07	3,09	4,11
17,4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	292	293	294	295	296	297
17,5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	3	4	5	6	7	8
17,6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N/A	63,3	67,3	70,5	71,86	72,5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
17,7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00
18	Kearsipan						
18,1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	29	37	41	45	49	53
18,2	Jumlah SDM Pengelola kearsipan	25	35	40	45	50	55
18,3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	N/A	100	100	100	100	100
18,4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	N/A	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1,1	Kunjungan wisata	33,239	100,500	115,950	133,343	153,344	176,346
1,2	Lama kunjungan Wisata	1,53	1,59	1,75	1,92	2,12	2,33
1,3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-82,52	42,04	15,37	15	15	15
1,4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-54,98	25	15	15	15	15
1,5	Tingkat hunian akomodasi	5,45	5,6	5,85	6,05	6,25	6,45
1,6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,86%	1%	1,12%	1,22%	1,25%	1,27%
1,7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	8,05%	8,68%	9,20%	9,50%	9,80%	10%
2	Pertanian						
2,1	Produksi tanaman pangan utama						
	1, Padi (ton)	5,46	5,57	5,63	5,68	5,74	5,80
	2, Jagung (ton)	4,68	4,77	4,77	4,82	4,87	4,92
2,3	Produksi peternakan utama						
	1, Sapi (ekor)	6,275	6,529	6,659	6,792	6,928	7,067

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	2, Kambing/domba (ekor)	25,890	26,936	27,475	28,024	28,585	29,156
	3, Unggas (ekor)	4,472,645	4,653,340	4,746,407	4,841,335	4,938,161	5,036,925
2,5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	4,9	10	15	20	25	30
2,6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,46	5,57	5,63	5,68	5,74	5,80
2,7	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-21,44	-10	-10	-10	-10	-10
5	Perdagangan						
5,1	Jumlah pasar yang tersegmentasi	NA	1	2	2	3	3
5,2	Tipe pasar yang ditingkatkan	NA	1	2	3	3	4
5,3	Pasar Tematik	NA	0	1	1	1	1
5,4	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	57%	64%	71%	78%	85%	92%
5,5	Pengawasan UTTP dan BDKT	12	12	12	24	24	24
6	Perindustrian						
6,1	Cakupan Bina IKM	40%	42%	45%	48%	51%	54%
6,2	Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi halal	11%	16%	21%	26%	32%	37%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	dan HAKI						
6,3	Persentase pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil	12%	14%	19%	27%	32%	35%
6,4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Palu	1,860	1,915	1,970	2,025	2,080	2,135
6,5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	10,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
6,6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	68,00%	1,03%	1,10%	1,18%	1,25%	1,32%
6,7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	5,00%	0,40%	1,40%	2,40%	3,40%	4,40%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
6,8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	20	30	40	50	60
7	Kelautan dan Perikanan						
7,1	Produksi perikanan						
	1, Perikanan tangkap (ton)	997	1,058	1,090	1,122	1,156	1,191
	2, Perikanan budi daya (ton)	119	127	130	134	138	143
7,3	Konsumsi ikan (Kg/Kap/ Tahun)	73,87	74,61	75,35	76,11	76,87	77,64
7,4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	5	10	15	20	25	30
7,5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1,116,71	1,184,72	1,220,26	1,256,87	1,294,57	1,333,41
	Penunjang Urusan						
1	Perencanaan Pembangunan						
1,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1,5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten
1,6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten
1,7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
1,8	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	N/A	18,26%	19,69%	20,18%	20,68%	21,20%
1,9	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	N/A	19,98%	19,99%	20,00%	20,01%	20,02%
1,10	Opini Laporan Keuangan	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1,11	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	N/A	19,98%	19,99%	20,00%	20,01%	20,02%
1,12	Rasio anggaran sisa terhadap	N/A	19,98%	19,99%	20,00%	20,01%	20,02%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	total belanja dalam APBD tahun sebelumnya						
1,13	Manajemen Aset :						
	1,13,1 Apakah ada daftar aset tetap?	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	1,13,2 Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	1,13,3 Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	1,13,4 Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Keuangan						
2,1	Persentase SILPA terhadap APBD	46,18%	3,50%	3,20%	3%	2,75%	2,50%
2,2	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,08%	22,18%	22,58%	23,04%	24,02%	24,50%
2,3	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,32%	25,37	26,3	27,05	27,37	27,65
2,5	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
2,6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
3	Pendapatan						
3,1	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD	52,3	43,4	44,1	46,2	45,3	45,16
3,2	Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD	4,84	9,14	9,15	9,66	9,39	9,24
3,3	Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD	0,72	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93
3,4	Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD	42,14	46,61	45,88	43,25	44,4	44,67
3,5	Rasio PAD	7,22	7,92	8,02	8,17	7,99	7,61
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
4,1	Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP
4,2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6	6,5	7	7,5	8	9
4,3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80,56	88,85	88,89	90	90,55	95
4,4	Jumlah jabatan Pimpinan	39	39	39	39	39	39

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Tinggi pada instansi pemerintah						
4,5	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	3	3	3	3	3	3
4,6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
4,7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,13	0,14	0,1445	0,15	0,1542	0,16
4,8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
4,9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Penelitian dan pengembangan						
5,1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan,	92%	13,99%	35,49%	57,00%	78,50%	100%
5,2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan,	93%	83,33%	85,00%	91,07%	93,64%	95,05%
5,3	Penerapan SIDa:						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	5,3,1 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah,	N/A	19,51%	36,59%	48,78%	60,98%	73,17%
	5,3,2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah,	N/A	62,50%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
6	Pengawasan						
6,1	Persentase tindak lanjut temuan	0,82	82%	82%	82%	82%	82%
6,2	Persentase pelanggaran pegawai	NA	30,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%
6,3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
6,4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
7	Sekretariat Dewan						
7,1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7,2	Tersusun dan terintegrasinya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)						
7,3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi
8	Pengadaan						
8,1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	21,00%	28,50%	37,90%	50,00%	67,00%	89,00%
8,2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode	21,00%	28,50%	37,90%	50,00%	67,00%	89,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
			2022	2023	2024	2025	2026
	kompetitif						
8,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	21,00%	28,50%	37,90%	50,00%	67,00%	89,00%
9	Transparansi dan Partisipasi Publik						
9,1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	NA	100	100	100	100	100
9,2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	NA	100	100	100	100	100

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah; serta penyesuaian prioritas daerah pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dokumen Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota Palu serta merupakan kesinambungan dari

RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Palu periode 2021-2026 yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, dan target sasaran, strategi pembangunan, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Palu, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, Visi, Misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pilkada Tahun 2020, serta KLHS RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Wali Kota Palu yang dibantu oleh Wakil Wali Kota Palu serta diimplementasi oleh seluruh Perangkat Daerah di Kota Palu dengan tahun perencanaan 2021 sampai dengan Tahun 2026;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Seluruh Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kota Palu berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap Tahun;
4. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Wali Kota

5. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu;
6. Penyusunan RKPD Kota Palu harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu diawali dengan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
7. RKPD Kota Palu harus menjadi acuan utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan berbasis kinerja melalui pendekatan rasional, realistis, dan proporsional;
8. Keberadaan RKPD Kota Palu berkaitan dengan keuangan daerah, merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap Tahun anggaran, terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) hingga lahirnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
10. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Bappeda Kota Palu berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
11. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Wali Kota

terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Palu serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

Selanjutnya, untuk menjamin pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Palu.

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

RPJMD KOTA PALU 2021-2026